BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL



Editor:
RR Emilia Yustiningrum
Ella Syafputri Prihatini

Indonesia dalam Kancah Geopolitik di Indo-Pasifik

Buku ini tidak diperjualbelikan

KARYA TERPILIH
BRIN
PROGRAM AKUISISI
PENGETAHUAN LOKAL
TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

Indonesia dalam Kancah Geopolitik di Indo-Pasifik

Buku ini tidak diperjualbelikan

Diterbitkan pertama pada 2026 oleh Penerbit BRIN

Tersedia untuk diunduh secara gratis: penerbit.brin.go.id



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Buku ini tidak diperjualbelikan



Editor:
RR Emilia Yustiningrum
Ella Syafputri Prihatini

Indonesia dalam Kancah Geopolitik di Indo-Pasifik

Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan

© 2026 Editor & Penulis

Katalog dalam Terbitan (KDT)
Indonesia dalam Kancah Geopolitik di Indo-Pasifik/RR Emilia Yustiningrum & Ella Syafputri Prihatini (Ed.)–Jakarta: Penerbit BRIN, 2026.

xxxiv + 405 hlm.; 14,8 × 21 cm

ISBN 978-602-6303-98-1 (*e-book*)

1. Geopolitik Indo-Pasifik
2. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok
3. Geoekonomi dan *De-risking*
4. Investasi Industri Nikel di Indonesia

327.598

Editor Akuisisi	: Noviastuti Putri Indrasari
Copy editor	: Sarah Fairuz
Proofreader	: Martinus Helmiawan
Penata isi	: Rahma Hilma Taslima
Desainer sampul	: Rahma Hilma Taslima
Edisi pertama	: September 2026

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, Anggota Ikapi
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
WhatsApp: +62 811-1064-6770
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id
PenerbitBRIN
@Penerbit_BRIN
@penerbit.brin

Buku ini tidak diperjualbelikan

Daftar Isi

Pengantar Penerbit xi
Prakata xiii

BAB I Memaknai Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok dalam Geopolitik di Indo-Pasifik 1
RR Emilia Yustiningrum & Ella Syafputri Prihatini

BAB 2 Aktor-Aktor Dibalik Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok 29
Maulana Ibrahim & Poppy Wulandari

BAB 3 Indo-Pasifik dalam Pusaran Geoekonomi: *De-Risking* dan Implikasinya bagi Indonesia 71
Arrizal Anugerah Jaknanihan & Alfin Febrian Basundoro

BAB 4 Rivalitas Tiongkok-Amerika Serikat dalam Industri Nikel di Indonesia 115
Paulus Rudolf Yuniarto & Wabilia Husnah

Buku ini tidak diperjualbelikan

BAB 5 *Belt and Road Initiative* (BRI) dalam Visi Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia (PMD): Implikasi terhadap Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) 151
Ganjar Widhiyoga, Hasna Wijayati, & Megah Rahmat Ramadhan

BAB 6 Diplomasi Siber Asia Tenggara di Tengah Rivalitas AS-China di Indo-Pasifik 189
Ali Abdullah Wibisono

BAB 7 Menavigasi Kebijakan *Look East* melalui Diplomasi Biru ... 233
Baiq Wardhani, Sarah Anabarja, & Renatha A. Rossdiana

BAB 8 Menavigasi Arus Zaman: Posisi Indonesia di Tengah Persaingan dan Perubahan 273
RR Emilia Yustiningrum & Ella Syafputri Prihatini

Daftar Singkatan 293
Glosarium 303
Tentang Editor 315
Tentang Penulis 317
Indeks 323

Buku ini tidak diperjualbelikan

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Peta teritorial LCS yang tumpang tindih dan *nine dash line.* 32
Gambar 3.1 Realisasi Investasi Dalam Negeri (PMDN) dan Asing (PMA) dalam Sektor Pertambangan dan Industri Logam Kritis Indonesia..... 95
Gambar 3.2 Indeks Korelasi antara Perdagangan dan Infrastruktur Terkait 97
Gambar 3.3 Skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) di Asia Tenggara.. 99
Gambar 4.1 Investasi Tiongkok pada Pertambangan Nikel di Sulawesi dan Halmahera Tahun 2018–2022..... 128
Gambar 4.2 Impor Nikel AS dari Indonesia Tahun 2018–2023..... 130
Gambar 4.3 Investasi AS dalam Industri Nikel di Sulawesi dan Halmahera Tahun 2018–2022..... 132
Gambar 4.4 Dominasi Perusahaan terhadap Industri Nikel Indonesia Tahun 2014 dan 2018..... 135
Gambar 5.1 Peta Persaingan Geopolitik di Indo-Pasifik..... 158
Gambar 5.2 Peta Konsep Koridor BRI..... 160
Gambar 5.3 Peta Konsep Koridor CICPEC..... 161

Buku ini tidak diperjualbelikan

Gambar 5.4 Peta Konsep Tol Laut Menjadi Poros Maritim Dunia... 164
Gambar 5.5 Rencana Integrasi BRI dan PMD oleh Kemenko Marves..... 168
Gambar 7.1 Porsi Hibah RI pada Pemerintah/Lembaga Asing..... 251
Gambar 7.2 Bidang Kerja Sama KSST di SIDS 254

Buku ini tidak diperjualbelikan

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Dinamika Indo-Pasifik dan Dampak Konflik Laut China Selatan 34
Tabel 2.2 Analisis Penyebab Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok..... 36
Tabel 2.3 Upaya Jepang Terkait FOIP Tahun 2006–2023..... 41
Tabel 2.4 Kebijakan Australia Terkait Indo-Pasifik 45
Tabel 2.5 Kebijakan PM Manmohan Singh dan PM Narendra Modi Terkait Indo-Pasifik..... 49
Tabel 2.6 Sudut Pandang Negara-Negara ASEAN terhadap Indo-Pasifik 52
Tabel 2.7 Gagasan ASEAN mendukung kemajuan Indo-Pasifik..... 55
Tabel 4.1 Investasi Tiongkok di Indonesia Berdasarkan Sektor (2010–2015)..... 124
Tabel 4.2 Tantangan dan Implikasi Investasi Tiongkok..... 128
Tabel 5.1 Daftar Proyek di Indonesia dalam Skema BRI 169
Tabel 6.1 Tipe-Tipe Serangan Siber, Lapisan Ruang Siber yang Diserang dan Dampaknya 198

Buku ini tidak diperjualbelikan

Tabel 6.2 Sebaran Serangan Siber Dunia Tahun 2023 dan Peringkat Indeks GCI 202
Tabel 6.3 Karakteristik Ketidakamanan Siber Negara-Negara ASEAN, Jepang, dan Australia 209
Tabel 6.4 Pengukuran Kapasitas Keamanan Siber dan Pembangunan TIK Negara-Negara ASEAN 213
Tabel 6.5 Indikator-Indikator Kontribusi pada Keamanan Siber Global Negara-Negara ASEAN 214
Tabel 6.6 Instrumen Kebijakan Keamanan Siber dan Data Negara-Negara ASEAN 216
Tabel 7.1 Realisasi Program Kerja Sama Hibah KSST Indonesia di Pasifik Selatan Tahun 2023 252

Buku ini tidak diperjualbelikan

Pengantar Penerbit

Sebagai penerbit ilmiah, Penerbit BRIN mempunyai tanggung jawab untuk terus berupaya menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas Penerbit BRIN untuk turut serta membangun sumber daya manusia unggul dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Konseptualisasi Indonesia dalam memaknai rivalitas Amerika Serikat (AS) melawan Tiongkok dalam geopolitik di Indo-Pasifik diawali dengan pemahaman tentang rivalitas kedua negara besar dalam enam aspek utama, yaitu ekonomi dan persaingan dagang, militer, kemajuan teknologi dan inovasi, politik dan ideologi, diplomasi dan aliansi, serta konflik kawasan.

Pembahasan mengenai dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik selalu melibatkan berbagai negara sebagai pelaku utamanya. AS pada awalnya mengembangkan *pivot to Asia*, disambut dengan Jepang yang membangun *Free and Open Indo-Pacific* (*FOIP*), Australia

Buku ini tidak diperjualbelikan

menggunakan *Australia's Asian Century* untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia, India yang merespons dengan *Security and Growth for All in the Region* (SAGAR) khususnya di kawasan Samudra Hindia, dan Tiongkok yang membangun koridor dunia melalui *Belt and Road Initiative* (BRI). Sepuluh negara anggota ASEAN merespons dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik dengan pemahaman dan kebijakan yang berbeda satu sama lain.

Buku *Indonesia dalam Kancah Geopolitik di Indo-Pasifik* menjadi rujukan bagi kajian mengenai politik internasional, politik luar negeri Indonesia, studi keamanan dan pertahanan, serta dinamika perkembangan politik di kawasan ASEAN, Asia Pasifik, dan Pasifik Selatan. Dalam periode peningkatan rivalitas AS-Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik yang terjadi di berbagai bidang, buku ini memberikan analisis mendalam dan terkini mengenai investasi AS dan Tiongkok di kawasan, respons pemerintah Indonesia, dan dinamika politik domestik dalam menanganinya.

Kami berharap hadirnya buku ini dapat menjadi referensi bacaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi seluruh pembaca. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan

Prakata

Peningkatan tensi rivalitas Amerika Serikat (AS) melawan Tiongkok dalam dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik membuat pemerintah Indonesia merespons dengan berbagai macam wacana, pemahaman, serta kebijakan. Semua respons tersebut diwujudkan ke dalam identifikasi aktor negara termasuk berbagai kepentingan nasionalnya, penerapan *de-risking* atau pengurangan risiko ketergantungan ekonomi terhadap negara-negara riskan membawa dampak negatif di kawasan, pemetaan investasi Tiongkok mengenai nikel di Sulawesi Tengah dan energi hijau di Kalimantan Utara, implikasinya terhadap keamanan siber di Asia Tenggara, hingga perluasan diplomasi ke kawasan Pasifik Selatan melalui Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular (KSST).

Pembahasan dalam buku ini mencakup kebijakan AS mengenai Indo-Pasifik masa Presiden Donald Trump hingga Presiden Joseph Biden, Australia sejak masa Perdana Menteri (PM) Kevin Rudd sampai PM Anthony Albanese, Jepang saat dipimpin oleh PM Shinzo

Buku ini tidak diperjualbelikan

Abe hingga PM Fumio Kishida, India sejak PM Manmohan Singh sampai PM Narendra Modi, dan Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi Jinping—tokoh yang pertama kali memperkenalkan *Belt and Road Initiative* (BRI). Pemerintah Indonesia merespons dinamika geopolitik di Indo-Pasifik pada masa Presiden Joko Widodo periode pertama dan kedua, khususnya untuk isu *de-risking*, investasi nikel, investasi energi hijau, keamanan siber di Asia Tenggara, hingga diplomasi biru di Pasifik Selatan.

Buku ini menjadi rujukan bagi kajian mengenai politik internasional, politik luar negeri Indonesia, studi keamanan dan pertahanan, serta dinamika perkembangan politik di kawasan ASEAN, Asia Pasifik, dan Pasifik Selatan. Dalam periode peningkatan rivalitas AS-Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik yang terjadi di berbagai bidang, buku ini memberikan analisis mendalam dan terkini mengenai investasi AS dan Tiongkok di kawasan, respons pemerintah Indonesia, dan dinamika politik domestik dalam menanganinya.

Buku ini merupakan hasil kajian mendalam pada Program Akuisisi Pengetahuan Lokal dengan judul *Indonesia dalam Kancah Geopolitik di Indo-Pasifik* yang diselenggarakan oleh Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah (RMPI), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Penulisan buku ini melibatkan para pakar politik internasional dan akademisi dari Australian National University (ANU), Universitas Indonesia (UI), Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Negeri Medan, Politeknik Negeri Medan, Universitas Slamet Riyadi (UNISRI), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dan BRIN.

Jakarta, September 2025

RR Emilia Yustiningrum
Ella Syafputri Prihatini

Buku ini tidak diperjualbelikan

BAB I

Memaknai Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok dalam Geopolitik di Indo-Pasifik

RR Emilia Yustiningrum & Ella Syafputri Prihatini

A. Persaingan Antarnegara

Rivalitas antarkekuatan besar dalam politik internasional telah terjadi sejak lama, bahkan ratusan tahun sebelum Masehi. Kekaisaran Persia yang sekarang menjadi Iran, telah menjadi adikuasa pertama di dunia dan menguasai kawasan Timur Tengah, mulai dari Turki hingga Afghanistan. Kekaisaran Persia berkonflik dengan Yunani sejak tahun 547 Sebelum Masehi (SM), dan menundukkan negara kota Yunani serta menggantikan pemerintahannya dengan yang loyal terhadap Persia.

Persaingan antarnegara besar ini terus berlanjut hingga masa kekaisaran Roma yang menundukkan Carthagena dan menguasai

RR. E. Yustiningrum & E. S. Prihatini
Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: emilia.yustiningrum@gmail.com

© 2026 Editor & Penulis

Yustiningrum, RR., E. & Prihatini, E. S. (2026). Memaknai Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok Dalam Geopolitik di Indo-Pasifik. Dalam RR. E. Yustiningrum & E. S. Prihatini (Ed.), *Indonesia dalam Kancah Geopolitik di Indo-Pasifik* (1–27). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.2075.c1718
E-ISBN: 978-602-6303-98-1

Buku ini tidak diperjualbelikan

kawasan Mediterania pada kisaran tahun 509 SM melalui Perang Punic dan Perang Makedonia. Roma terus berkuasa hingga seribu tahun pertama Masehi. Pada abad pertengahan, Republik Venesia menjadi negara adikuasa di kawasan Mediterania melawan Kekaisaran Byzantium, Genoa, dan Milan, yang kekuasaannya mencapai Afrika Utara dan Laut Hitam hingga tahun 1500-an Masehi. Pada abad ke-17 muncul persaingan antara Belanda melawan Spanyol untuk memperebutkan sumber rempah-rempah di mana Belanda menguasai lautan dari Afrika Selatan hingga Asia Tenggara, sementara Spanyol menundukkan kawasan Amerika Selatan. Namun, pada abad ke-19, Inggris melampaui Belanda sebagai negara terkaya di dunia yang menguasai lautan hingga sekarang. Pada saat yang sama, Prancis juga muncul sebagai kekuatan dunia pada abad ke-19 walaupun bisa dikalahkan oleh Inggris.

Pada awal abad ke-20, Jerman muncul sebagai kekuatan dunia hingga pecahnya Perang Dunia I. Amerika Serikat (AS) belum menjadi kekuatan dunia hingga Jepang menyerang Pearl Harbour yang menjadi pemicu munculnya Perang Dunia II pada tahun 1941. AS yang menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 mengakhiri Perang Dunia II. Pasca-1945, dimulailah Perang Dingin antara AS melawan Uni Soviet yang diwarnai dengan pecahnya Jerman menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur serta terbelahnya Korea menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Runtuhnya Rusia pada akhir tahun 1990 menjadikan AS sebagai satu-satunya negara adikuasa dalam politik internasional. Namun demikian, Federasi Rusia hadir sebagai kekuatan dunia yang baru, meskipun pecahan-pecahan wilayahnya telah berdiri sebagai negara merdeka melalui *Commonwealth of Independent States* (CIS).

Kini, tantangan utama AS dalam politik internasional adalah kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan besar. Keunggulan AS dan Tiongkok terlihat jelas dalam kekuatan ekonomi dan militer. Pada 2018, Produk Domestik Bruto (PDB) AS mencapai $21,4 triliun dan Tiongkok $14,1 triliun, sementara Jepang di posisi ketiga dengan $5,2 triliun. Dalam hal belanja militer, AS memimpin dengan $643

Buku ini tidak diperjualbelikan

miliar, diikuti oleh Tiongkok $168 miliar, Arab Saudi $82,9 miliar, dan Jepang $46,6 miliar (Kydd, 2020, 855). Berdasarkan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*/PPP) per April 2025, ekonomi Tiongkok telah melampaui AS dengan nilai 40.720 sementara AS 30.510 (IMF, 2025) sehingga meskipun masih tertinggal di belanja militer, pertumbuhan ekonominya yang pesat menjadikan Tiongkok sangat berpeluang menggantikan AS sebagai negara paling kuat.

Rivalitas yang bersumber kepada pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang spektakuler sejak 30 tahun terakhir kerap disebut sebagai "Perang Dingin versi baru" atau "Perang Dingin 2.0" (Brands & Gaddis, 2021; Steen, 2025; Westad, 2019). Bedanya sekarang, AS menghadapi Tiongkok yang ekonominya jauh lebih kuat daripada Uni Soviet sehingga Perang Dingin 2.0 ini sangat ditentukan oleh performa ekonomi Tiongkok menghadapi beberapa tantangan, seperti populasi yang menua, alokasi modal yang terlalu fokus ke properti, dan krisis energi (Dollar, 2025). Rivalitas AS dan Tiongkok juga berbeda dari kompetisi antara AS dan Uni Soviet. Tak seperti Uni Soviet kala itu yang tidak memiliki kontak dagang dan sosial dengan AS, saat ini Tiongkok adalah mitra dagang terbesar AS dan hampir 200.000 mahasiswa Tiongkok berkuliah di AS (Roberts & Bano, 2023, 25). Selain itu, sekarang negara-negara *middle power* bisa menolak desakan untuk memilih antara AS atau Tiongkok dengan cara mengadopsi berbagai bentuk kebijakan *hedging*, di antaranya pendekatan multipolaritas di kawasan Indo-Pasifik. Negara-negara *middle power* tidak selalu memandang serta merespons persaingan AS dan Tiongkok sebagai adu kuat antara demokrasi liberal dan autokrasi, justru mereka memainkan langkah strategis berada di tengah dua negara terkuat di dunia (Chan & Lee, 2024).

Tiongkok telah berkuasa sebagai kekuatan besar selama 2.000 tahun melalui berbagai dinasti, yaitu Qin, Han, Xin, Jin, Sui, Tang, Song, Liao, Jin, Yuan, Ming, and Qing. Tiongkok berubah menjadi republik ketika Mao Zedong mendirikan Partai Komunis China pada tahun 1949. Hingga Mao Zedong wafat pada tahun 1976, penggantinya, Deng Xiaoping melakukan reformasi ekonomi mulai tahun 1978

Buku ini tidak diperjualbelikan

dengan membuka Tiongkok terhadap ekonomi pasar. Tiongkok mengalami perkembangan ekonomi pesat sejak Deng Xiaoping, yang berlanjut pada masa Jiang Zemin, Hu Jintao, hingga Xi Jinping tahun 2013. Pada tahun 2013 ini, Xi Jinping mulai memperkenalkan kebijakan luar negeri Tiongkok melalui *Belt and Road Initiative* (BRI) untuk menghubungkan kawasan Asia Pasifik melalui koridor jalan darat dan jalan laut. Melalui kebijakan BRI inilah, Tiongkok mulai membuka kedekatan hubungan dan menyalurkan pinjaman lunak untuk pembangunan infrastruktur dengan kawasan Mekong (Myanmar, Laos, dan Kamboja), Asia Tenggara, hingga Asia Selatan.

B. Definisi Indo-Pasifik

Perubahan bahasa adalah salah satu indikator yang jelas dari perubahan politik dan faktor pendorong penggunaan frase Indo-Pasifik adalah geopolitik (Kassab, 2023). Seiring dengan pengaruh Tiongkok yang terus meluas di Laut Cina Selatan, negara-negara yang merasa terancam bereaksi dengan mengimbanginya. Indo-Pasifik menjadi sebuah konsep yang diciptakan untuk menciptakan identitas bersama di antara negara-negara Asia, dimulai dengan Jepang dan India lalu meluas ke Australia, AS, dan Taiwan (Li, 2021).

Istilah Indo-Pasifik pertama kali dijelaskan (tetapi istilah itu tidak dinyatakan secara eksplisit) dalam konteks geopolitik oleh pidato Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe yang berjudul "Pertemuan Dua Laut" (Li, 2021, 2). Sebelum itu, istilah itu digunakan oleh Karl Haushofer, seorang ahli geografi, untuk menggambarkan wilayah di antara Samudra Hindia dan Pasifik yang terkait dengan pembagian kolonial antara kekuatan barat dan Jepang. Dalam pidato yang disampaikan tahun 2007 itu, PM Abe berpidato di hadapan Parlemen India. Ia menggambarkan hubungan historis antara masyarakat Jepang dan India pada saat ini dan pada masa lalu, menceritakan kisah-kisah tentang persahabatan Swami Vivekananda dan Tenshin Okakura, intelektual anti-kolonial yang melihat budaya mereka tidak hanya unik, tetapi juga lebih unggul dari dunia barat.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Identitas Indo-Pasifik kian mengental digaungkan seiring dengan kebijakan AS mengubah nama pangkalan militer terbesarnya dari "Pacific Command" menjadi "Indo-Pacific Command" (BBC, 2018). Komando tempur ini mengawasi operasi Amerika di Asia dan memiliki sekitar 375.000 personel militer serta sipil. Perubahan nama dilakukan ketika ketegangan dengan Tiongkok menyeruak akibat upaya-upaya negeri itu memperluas aktivitas militernya di kawasan.

Indonesia tidak memiliki definisi yang kokoh tentang Indo-Pasifik. Namun berbagai kajian mengaitkan kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks Indo-Pasifik. Hardini, Emad, dan Nguyen (2020) menyampaikan bahwa dalam konteks Indo-Pasifik, Indonesia mengutamakan aktivitas internasional dan keterlibatannya dalam isu ekonomi biru, serta sebagai negara kepulauan, Indonesia membangun tol laut sebagai implementasi kebijakan kelautan nasional. Putri dan Salim (2020) menyatakan bahwa Maritime Silk Road menghubungkan Indonesia dengan pulau-pulau terluarnya sebagai jalur pelayaran, transportasi, perdagangan, dan infrastruktur kelautan. Saha, Bland, dan Laksmana (2020) menggarisbawahi tiga negara yaitu Indonesia, India, dan Australia sebagai pemain utama di kawasan Indo-Pasifik yang bisa melakukan kerja sama jangka pendek, menengah, dan panjang. Sementara itu, Ramadhan dan Yustiningrum (2024, 2) melakukan kajian tentang definisi Indo-Pasifik dengan menggunakan pemikiran dari berbagai pakar geopolitik dunia.

Di sisi lain, Australia mendefinisikan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang mencakup bagian Timur Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik, yang tersambung dengan Asia Tenggara, termasuk India, Asia Utara, dan AS (DFAT, 2017, 1). Sementara Jepang mendefinisikan Indo-Pasifik adalah kawasan yang membentang dari Asia-Pasifik, melalui Samudra Hindia, menuju Timur Tengah dan Afrika (MFAJ, 2019, 27). Pemerintah India memahami Indo-Pasifik yang mencakup Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik melalui selat-selat dan Laut China Selatan/Timur dan Laut Filipina (MDI, 2015, 18–19).

Indonesia tercatat mulai menggunakan frase Indo-Pasifik lewat pidato Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa: "Bagi Indonesia, mengingat kondisi geografisnya, arah masa depan kawasan Indo-

Buku ini tidak diperjualbelikan

Pasifik merupakan kepentingan yang sangat penting" (Natalegawa, 2013). Ramadhan dan Yustiningrum (2024, 2–3) menyatakan bahwa dalam pemilu presiden, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menyebutkan Indo-Pasifik sebagai pertemuan dua samudera (KPU, 2014, p. 13). Sejak periode pertama pemerintahannya, Joko Widodo membangun konsep Poros Maritim Dunia, mengaitkannya dengan kebijakan Belt and Road Initiative Tiongkok, mengimplementasikan pada level kementerian/lembaga, dan mengintegrasikan ke dalam konteks Indo-Pasifik.

Pada periode kedua pemerintahannya, pemaknaan Joko Widodo tentang keterlibatan Indonesia dalam konteks Indo-Pasifik, secara pelan namun pasti, mulai bergeser ke isu ekonomi politik dan peningkatan komitmen perdagangan internasional. Joko Widodo yang hadir dalam pertemuan Belt and Road Forum tahun 2017, Wakil Presiden Jusuf Kalla pada pertemuan serupa tahun 2019, dan Joko Widodo kembali hadir dalam pertemuan ketiga tahun 2023, semakin memperkuat Indonesia untuk menyeimbangkan perdagangan, proteksionisme, dan meningkatkan kedekatan ke Tiongkok. Bahkan, Indonesia terlibat aktif dalam berbagai negosiasi perdagangan yang mengerucut pada terbentuknya RCEP tahun 2022. RCEP merupakan akumulasi perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru. RCEP yang lahir dan berkembang atas inisiatif ASEAN kemudian mengusung agenda sentralitas dalam tata kelola ekonomi regional, yang pada saat bersamaan mempromosikan inklusifitas, dan integrasi ekonomi yang berimbang di kawasan Asia Tenggara (Kim, 2025). Tiongkok sangat berkepentingan dengan RCEP sebagai momentum integrasi ekonomi kawasan. Secara terpisah, Yustiningrum, Alami, Siswanto, dan Ramadhan (2023) yang melakukan kajian tentang respons Indonesia terhadap rivalitas AS-Tiongkok di Indo-Pasifik pada aspek geoekonomi, semakin menegaskan kedekatan hubungan ke Tiongkok.

Buku ini tidak diperjualbelikan

C. Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik

Dalam konteks rivalitas AS dan Tiongkok, setidaknya terdapat enam aspek yang mendasari. Yustiningrum, Alami, Siswanto, dan Ramadhan (2023) melakukan kajian tentang respons Indonesia terhadap rivalitas AS melawan Tiongkok dalam aspek geoekonomi. Namun buku ini melengkapi rivalitas AS melawan Tiongkok dalam enam aspek berikut ini. Pertama, ekonomi khususnya persaingan ekonomi dan persaingan dagang. Kedua negara ini bersaing untuk menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia yang menetapkan kebijakan perdagangan yang tidak selalu seiring sejalan satu sama lain untuk melindungi ekonomi dan perdagangan masing-masing namun juga berusaha untuk merugikan lawan. AS dengan perdagangan global dan sistem keuangan yang berdasarkan prinsip liberalisme sering berbenturan dengan Tiongkok yang mengutamakan otoritarian dan merkantilis (Hilpert, 2020).

Kedua, militer yang merujuk pada dominasi militer dan keterlibatannya di kawasan Asia Pasifik. Baik AS dan Tiongkok saling memperkuat kekuatan militer untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik. Tiongkok terus membangun kekuatan militer yang menjadikannya sebagai ancaman bagi AS khususnya dengan ekspansi militer ke kawasan Laut China Selatan dan klaim teritorial di wilayah tersebut (Fravel, 2011). Di bawah kepemimpinan Presiden Xi, aktivitas Tiongkok yang agresif di Laut Tiongkok Selatan dipandang sebagai ancaman serius terhadap status quo (Scobell, 2018). Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam pun memiliki klaim tumpang tindih atas pulau-pulau dan sumber daya di wilayah ini. Laut Tiongkok Selatan yang kaya akan minyak, gas alam, dan hasil perikanan (USEIA, 2024), merupakan jalur pelayaran penting dengan nilai perdagangan mencapai US$5 triliun setiap tahun (Roberts & Bano, 2023, 22). Data lain menyebutkan bahwa 90% perdagangan dunia dikirim menggunakan jalur laut dan setengahnya melintasi atau berhenti di Laut Tiongkok Selatan (George, 2013). Hal ini membuat Laut Tiongkok Selatan bukan hanya jalur nadi perdagangan global,

Buku ini tidak diperjualbelikan

tetapi juga medan pertarungan kepentingan yang terus menghangat, terutama antara AS dan Tiongkok (Hayton, 2014; Shambaugh, 2021).

Ketiga, faktor kemajuan teknologi dan inovasi. Ketika AS unggul dalam hal inovasi khususnya mengenai teknologi semikonduktor, model kecerdasan buatan, berikut ekosistem risetnya, Tiongkok secara pelan namun pasti menutup kekurangan dalam implementasi skala besar, koordinasi industri, dan semakin tinggi kontrol rantai pasokan globalnya (Canuto, 2026). Rivalitas kedua negara besar ini tidak lagi didominasi oleh inovasi teknologi, namun kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam produksi, sistem energi, dan pengaruh geopolitik hingga menyebabkan ketergantungan global (Canuto, 2026). Presiden Xi Jinping memandang kepemimpinan teknologi global sebagai bagian penting dari misi kebangkitan nasional Tiongkok. Kemajuan teknologi tidak hanya penting untuk mengurangi ketergantungan pada luar negeri atau mendorong pertumbuhan ekonomi—tetapi juga sebagai cara bagi Tiongkok untuk merebut kembali statusnya sebagai kekuatan besar dunia. Para pemimpin Tiongkok melihat negara mereka tertinggal dalam tiga revolusi industri sebelumnya (mesin uap, listrik massal, dan komputer), dan kini bertekad memimpin revolusi keempat (Toner, 2023). Sejak Xi menjabat, sektor sains dan teknologi Tiongkok mencatat kemajuan pesat. Salah satu pencapaian besar terjadi pada 2016, ketika superkomputer Sunway TaihuLight—yang sepenuhnya menggunakan prosesor buatan dalam negeri—menjadi yang tercepat di dunia. Capaian penting lainnya adalah ketika Tiongkok menerbitkan lisensi penggunaan komersial 5G pada tahun 2019, teknologi komunikasi tercanggih di dunia yang diperkirakan berkontribusi $ 1,54 triliun ke ekonomi Tiongkok dan menciptakan 3 juta lapangan pekerjaan (Franedya, 2019). Tiongkok bahkan mengalahkan AS di belanja penelitian dan pengembangan (*research and development*/R&D) tahap lanjut dan jumlah publikasi ilmiah (Tollefson, 2018).

Keempat, politik dan ideologi khususnya perbedaan pandangan politik dan benturan ideologi. Secara ideologi, rivalitas AS melawan Tiongkok mewakili pertarungan antara individualisme lawan

Buku ini tidak diperjualbelikan

kolektivisme, demokrasi lawan komunisme, dan pendekatan yang saling bertentangan untuk pembangunan manusia dan tata kelolanya (Zeller, 2024). AS berakar pada tradisi liberal Barat yang menjunjung tinggi individualisme yang meyakini bahwa kebebasan individu dan otonomi adalah hal yang sangat fundamental, sementara Tiongkok berakal pada tradisi Konfusianisme dan ideologi Komunis yang mengutamakan kolektivitas, yang diterjemahkan dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakatnya (Zeller, 2024). Sebenarnya secara politik, AS dan Tiongkok memiliki hubungan bilateral yang kuat, bahkan sejak berakhirnya Perang Dunia II dan Perang Dingin. Jisi (2023) membagi fase relasi bilateral ini menjadi tiga, 1979–2008 menjadi era kerja sama erat melawan ekspansi Uni Soviet saat Perang Dingin bergulir dan puncaknya terjadi saat Presiden George W. Bush menghadiri Olimpiade Beijing tahun 2008. Periode kedua adalah tahun 2009–2018 di mana hubungan bilateral mulai berubah menjadi kompetisi strategis dan persaingan. Sementara periode ketiga adalah sejak 2019 di mana AS dan Tiongkok berpotensi masuk ke situasi konfrontasi penuh. Secara khusus, mulai tahun 2017 AS secara terbuka menyebut Tiongkok sebagai "*strategic adversary*" atau lawan strategis (Jisi & Ran, 2019, 2).

Kelima, diplomasi dan aliansi, yang merujuk pada pembentukan aliansi strategis. AS hadir sebagai sekutu negara-negara di kawasan Asia Pasifik dalam menghadapi kekuatan Tiongkok. AS juga membangun trilateral dengan berbagai negara di kawasan ini. Trilateral antara AS, Jepang, dan Korea Selatan bertujuan untuk meningkatkan kerja sama rantai pasokan global, keamanan regional, dan koordinasi menghadapi Korea Utara (DoD, 2024). Trilateral antara AS, Jepang, dan Filipina bertujuan untuk mendukung Filipina dalam menghadapi intensitas Tiongkok di Laut China Selatan (Langel, 2024). Sementara itu, Tiongkok menggunakan Belt and Road Forum for Internasional Cooperation untuk bekerja sama dengan berbagai negara berkembang dan tidak melibatkan negara-negara maju dalam forum tersebut.

Keenam, isu regional khususnya konflik regional di Taiwan dan Korea Utara. Tucker (2009) pernah menyebut konflik di Selat Taiwan

Buku ini tidak diperjualbelikan

sebagai ancaman paling serius bagi AS sebab berpotensi konfrontasi langsung dengan negara berkekuatan nuklir. Ketegangan di Taiwan harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, terutama sengketa wilayah Tiongkok di Laut Cina Selatan. Pemerintah Beijing yang semakin agresif mengeklaim wilayah lewat *Nine Dash Line*, memicu konflik dengan negara, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Sementara itu, kebijakan *pivot to Asia* dan komitmen AS terhadap kebebasan navigasi serta perjanjian pertahanan dengan negara-negara di kawasan membuat potensi gesekan dengan Tiongkok semakin besar (Lin, 2025). Terkait kebijakan pertahanan misil AS terhadap ancaman Korea Utara justru mendorong Tiongkok memperkuat kapabilitas serangan balasan nuklirnya, sehingga memicu ketegangan berkelanjutan (Ekmektsioglou & Lee, 2022).

D. Geoekonomi dan *De-risking*

Semakin meningkatnya persaingan antar dua negara besar dalam dunia internasional memunculkan berbagai perilaku negara dalam meresponsnya menggunakan kekuatan ekonomi yang dimiliki, yang dikenal dengan gagasan geoekonomi. Hal ini juga terjadi di kawasan Indo-Pasifik, ketika Tiongkok semakin membangun kekuatan ekonomi dengan negara-negara berkembang, sementara AS juga semakin meningkatkan upaya dan melobi para sekutunya guna membendung Tiongkok. Maka negara-negara dengan kekuatan menengah dan kecil di kawasan juga harus menanggung dampaknya. Hal tersebut disampaikan oleh Yustiningrum, Alami, dan Siswanto (2024) melalui kajian tentang perspektif geoekonomi di kawasan Indo-Pasifik dengan merujuk pada Blackwill dan Harris (2016) serta Baru (2012).

Berbagai negara merespons pergolakan geopolitik dengan melakukan adaptasi pada perangkat politik domestiknya. Hal ini juga muncul ketika persaingan AS-Tiongkok semakin meningkat di kawasan Indo-Pasifik, negara-negara yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi turunan dari rivalitas tersebut, mulai merevisi perangkat politik domestiknya—pada tataran institusi, regulasi, dan pelakunya di level nasional—yang dipengaruhi oleh perubahan global tersebut.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Yustiningrum, Alami, dan Siswanto (2024, 136–137) menyampaikan hal tersebut dalam kajian geoekonomi pada aspek birokrasi pemerintah dengan merujuk Luttwak (1993) dan Sparke (1998).

Perubahan politik internasional dapat mempengaruhi dinamika politik domestik, demikian juga sebaliknya. Ketika persaingan AS-Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik semakin tinggi, maka negara-negara yang berada di kawasan juga mendapatkan pengaruhnya yang masuk hingga ke kebijakan luar negeri. Setidaknya terdapat tiga mekanisme perubahan situasi geopolitik yang mempengaruhi penyusunan kebijakan luar negeri, bahkan hingga ke kebijakan ekonominya, yang diuraikan oleh Yustiningrum, Alami, dan Siswanto (2024, 137) menggunakan pemikiran Luttwak (1990) dan Vihma (2018). Mekanisme pertama terjadi secara sistemik ketika pergolakan geopolitik merupakan situasi yang tidak bisa dihindari, maka negara merumuskan strategi untuk merespons dinamika internasional tersebut (Vihma, 2018). Mekanisme kedua muncul ketika respons terhadap perkembangan politik internasional diwujudkan dalam bentuk penggunaan kekuasaan dan pengaruh negara—khususnya ekonomi—pada level regional dan global (Vihma & Wigell, 2016). Mekanisme terakhir muncul ketika dinamika geopolitik terus berlangsung, maka negara mendahulukan kepentingan ekonomi daripada terus menerus bertahan pada situasi geopolitik (Wigell & Vihma, 2016).

Guna meningkatkan pengaruh dan hegemoni di kawasan, negara menggunakan kekuatan ekonomi untuk mengontrol wilayah dan kepentingan strategisnya. Yustiningrum, Alami, dan Siswanto (2024, 137–138) merujuk pemikiran Scholvin dan Wigell (2018), memaknai geoekonomi sebagai strategi kebijakan luar negeri yang terjadi pada dua level. Level pertama dalam politik domestik ketika negara menjalankan diplomasi internasional untuk memperkuat ekonomi dalam negeri (Scholvin & Wigell, 2018, 73). Level kedua dalam politik internasional dimana negara menggunakan kekuasaan dan instrumen ekonomi untuk memperkuat diplomasi internasional (Clinton, 2011).

Buku ini tidak diperjualbelikan

Sementara itu, semakin meningkatnya ketegangan geopolitik di suatu kawasan memunculkan kondisi baru yang dikenal dengan nama *de-risking* atau pengurangan risiko sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada negara-negara yang dianggap berbahaya secara geopolitik (Cave, 2023). Praktik *de-risking* telah terjadi sejak perang dagang antara AS melawan Tiongkok pada masa Presiden Donald Trump periode pertama. *De-risking* juga disampaikan oleh Presiden Uni Eropa, Ursula von der Leyen, yang menyatakan bahwa *de-risking* merupakan strategi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor strategis untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dalam pasar domestik dan mengurangi kerentanan terhadap ketegangan geopolitik di level regional (von der Leyen, 2023).

De-risking juga diadopsi dalam pertemuan tingkat tinggi G7 di Jepang pada bulan Mei 2023 (TWH, 2023) yang menggarisbawahi bahwa negara-negara G7 perlu memiliki ketahanan ekonomi sehingga membutuhkan *de-risking* khususnya diversifikasi untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan kritis. *De-risking* mengedepankan logika ekonomi di mana ketika ketegangan geopolitik semakin meningkat antara AS melawan Tiongkok maka perlu menggunakan instrumen ekonomi di samping juga instrumen keamanan.

E. Keamanan Siber dan Rivalitas Negara Besar

Kemajuan teknologi informasi sering dideskripsikan sebagai pencapaian kemajuan manusia yang luar biasa. Namun demikian, ketika kemajuan teknologi informasi dilihat dari perspektif keamanan, pemahamannya menjadi sangat berbeda karena teknologi tidak hanya masalah teknis, tapi juga berkelindan dengan isu sosial dan politik. Berbagai negara yang memiliki kemajuan teknologi cenderung untuk membatasi negara lain dengan berbagai cara dengan menggunakan sistem yang paralel.

Hal ini juga terjadi pada Tiongkok dengan kemajuan teknologi informasinya memiliki karakter yang industrinya sangat dikontrol oleh pemerintah, industri juga dilindungi oleh pemerintah, mendapatkan berbagai kemudahan dari pemerintah, mengintegrasikan antara sipil

Buku ini tidak diperjualbelikan

dan militer, membatasi penggunaan produk-produk dari negara lawan, memaksakan integrasi, membangun pasar yang semakin besar, dan bahkan berbagai kesepakatan internasional melakukan standarisasi, yang membuat perusahaan telekomunikasi Tiongkok, seperti Alibaba dan Tencent, pemilik WeChat dan AliPay, menjadi dominan dalam pasar telekomunikasi domestik (Doshi & McGuiness, 2021). Berbagai perusahaan ini ketika mulai ekspansi global tidak hanya menargetkan pasar dari AS, tetapi juga pasar negara-negara berkembang dengan keuntungan lebih sedikit dan juga persaingan yang lebih rendah.

Tiongkok melalui kebijakan BRI bertujuan untuk membangun standar infrastruktur cerdas di kawasan Asia, khususnya yang berkaitan dengan perangkat lunak dan sensor, yang dikenal juga dengan *China's Digital Silk Road*. Sejak itu, Tiongkok membangun infrastruktur jaringan internet, investasi besar-besaran agar *chips* buatan Tiongkok mampu mengalahkan buatan AS dalam persaingan internet standar 5G. Hal serupa juga terjadi ketika perusahaan telekomunikasi Tiongkok, seperti Huawei dan ZTE mendapatkan pinjaman dari pemerintah untuk membangun infrastruktur di berbagai negara berkembang.

Pada awal dekade 2000-an, Tiongkok melakukan serangan terhadap jaringan internet Kementerian Pertahanan AS yang dikenal dengan nama *Operation Titan Rain*. Hal tersebut memicu berbagai negara tidak hanya AS, tetapi juga Inggris, Perancis, Jerman, Kanada, Australia, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, India, mengeluhkan serangan Tiongkok atas jaringan internet pemerintahnya. Berbagai serangan siber terbesar yang pernah dilakukan Tiongkok terhadap AS juga disampaikan oleh Jaksa Agung, William Barr, yang pernah mengalami pencurian pada *US Office of Personnel Management* (USOPM) yang tercatat sebanyak 21 juta data, jaringan Hotel Marriott (400 juta), asuransi kesehatan Anthem (80 juta), dan Equifax (147 juta) (Doshi & McGuiness, 2021).

Buku ini tidak diperjualbelikan

F. Kerja Sama Selatan-Selatan

Kerja Sama Selatan-Selatan adalah modalitas negara-negara yang terletak di bumi bagian selatan untuk membangun kemitraan secara horizontal mengenai berbagi informasi, pendidikan dan pelatihan, transfer teknologi, serta bidang keahlian, untuk mendukung pembangunan di kawasan tersebut (Rinaldi, 2023). Kerja Sama Selatan-Selatan ini berlandaskan pada prinsip-prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara, independensi nasional, kesetaraan, tidak mencampuri urusan politik domestik, tidak meminta persyaratan yang memberatkan, berdasarkan pada kebutuhan, dan memberikan manfaat timbal balik.

Sebagai salah satu aktor utama di kawasan Asia Pasifik, Indonesia perlu berhadapan dengan berbagai negara termasuk persaingan AS melawan Tiongkok di area tersebut. Dengan kondisi tersebut, Indonesia harus mampu untuk menyeimbangkan antara kepentingan nasionalnya dengan negara-negara Pasifik Selatan dan juga pertentangan kepentingan nasional antara dua negara besar, yaitu AS melawan Tiongkok. Hal tersebut memberikan kesempatan pada Indonesia untuk membangun kerja sama di kawasan Selatan-Selatan dari berbagai perspektif yang juga menguntungkan kepentingan nasionalnya (Hutagalung, 2024).

G. Struktur Buku

Buku bunga rampai ini mengulas Indonesia dalam kancah geopolitik di Indo-Pasifik dan *Global South* ke dalam enam bab. Di dalam pembahasan pertama, Maulana Ibrahim dan Poppy Wulandari mengajak pembaca menyelami lebih dalam peran dan pengaruh aktor-aktor utama di balik rivalitas antara AS dan Tiongkok. Bab ini menguraikan secara perinci bagaimana AS, Tiongkok, dan India menavigasi kompleksitas geopolitik kawasan ini melalui kebijakan dan strategi yang mereka gunakan. Mereka mengupas latar belakang historis rivalitas sembari memetakan pergeseran kekuatan ekonomi dari Barat ke Timur dan menganalisis bagaimana perubahan tersebut

Buku ini tidak diperjualbelikan

membentuk tatanan ekonomi dan politik global saat ini. Inisiatif ambisius Tiongkok melalui BRI bertujuan memperluas pengaruh ekonomi melalui investasi infrastruktur dan kerja sama ekonomi di seluruh Indo-Pasifik. Selain itu, pendekatan diplomasi *soft power* oleh India akan dibahas untuk mengungkap bagaimana budaya dan pendidikan menjadi alat strategis dalam memperkuat posisi India di kawasan ini.

Amerika Serikat, melalui *Quadrilateral Security Dialogue* (Quad) yang melibatkan Jepang, India, dan Australia, memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik. Ketegangan di Laut China Selatan, dengan klaim teritorial Tiongkok yang luas dan respons negara-negara, seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia, menjadi titik fokus utama dalam memahami dinamika rivalitas ini. Quad, sebagai forum strategis untuk keamanan maritim, berupaya menjaga kebebasan navigasi dan mencegah dominasi Tiongkok di kawasan.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan analisis yang mendalam, pembahasan dalam bab ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana rivalitas AS-Tiongkok memengaruhi stabilitas dan keamanan di Indo-Pasifik. Pembaca akan dibekali dengan wawasan yang lebih tajam mengenai aktor-aktor utama dalam geopolitik kawasan yang juga membuka jalan bagi eksplorasi lebih lanjut di bab-bab berikutnya.

Di pembahasan berikutnya, Arrizal Anugerah Jaknanihan dan Alfin Febrian Basundoro membahas tren geoekonomi di Indo-Pasifik yang berfokus kepada fenomena pengurangan risiko (*de-risking*). Integrasi dan interdependensi ekonomi telah lama menjadi fondasi utama kerja sama di Asia-Pasifik. Meskipun demikian, transformasi kawasan menjadi Indo-Pasifik memperlihatkan perubahan signifikan dalam hubungan ekonomi dan politik global. Sementara negara-negara di kawasan tetap menjalin hubungan ekonomi yang erat meski terdapat tensi geopolitik dengan Tiongkok, bab ini mengeksplorasi bagaimana hubungan ekonomi yang erat justru dipandang sebagai sumber konflik geopolitik. Mengutip pidato Penasehat Keamanan

Buku ini tidak diperjualbelikan

Nasional AS Jake Sullivan yang menggambarkan pergeseran besar dalam tatanan ekonomi dan keamanan di Indo-Pasifik, keterbukaan ekonomi ternyata tidak lagi dianggap sebagai prasyarat bagi kesejahteraan, tetapi justru sebagai sumber kerentanan.

Dalam konteks ini, AS berupaya mengurangi ketergantungan pada Tiongkok melalui strategi pengurangan risiko (*de-risking*). Pergeseran ini menantang kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia yang didasari strategi *hedging* untuk meningkatkan otonomi dan minimalisir risiko dengan tidak berpihak pada satu kekuatan besar. Bab ini secara kritis membedah tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia akibat tren *de-risking*, serta respons kebijakan Indonesia dalam berbagai ranah, baik bilateral maupun multilateral.

Bab ini juga menyoroti bagaimana keterbatasan Indonesia dalam mengapitalisasi tren yang ada, baik berupa masalah domestik maupun kapasitas luar negeri Indonesia. Analisis ini didasarkan pada kajian literatur yang mendalam, mencakup naskah pidato, kertas kebijakan, data statistik, serta sumber literatur primer, dan sekunder lainnya. Melalui analisis yang komprehensif, para penulis memberikan wawasan tentang implikasi geoekonomi di Indo-Pasifik dan bagaimana Indonesia dapat menavigasi tantangan dan peluang tersebut.

Pada bagian berikutnya, Paulus Rudolf Yuniarto dan Wabilia Husnah mengkaji secara mendalam persaingan strategis antara Tiongkok dan AS dalam industri nikel di Indonesia. Nikel merupakan komponen vital dalam produksi baterai lithium-ion, yang menjadi bahan utama untuk kendaraan listrik dan produk teknologi semikonduktor lainnya. Dengan meningkatnya permintaan global untuk kendaraan listrik dan kebutuhan akan baterai berkualitas tinggi, nikel menjadi komoditas yang sangat berharga. Sejak beberapa tahun terakhir, harga nikel terus meroket, dipicu oleh meningkatnya penggunaan nikel dalam industri kendaraan listrik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara, mitigasi perubahan iklim, dan ketahanan energi. Tiongkok dan AS, sebagai dua negara utama yang bersaing dalam produksi dan konsumsi kendaraan listrik, kini

Buku ini tidak diperjualbelikan

berlomba untuk mengamankan pasokan nikel dari Indonesia, yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia.

Indonesia memegang peran strategis sebagai pemasok utama nikel bagi kedua negara ini. Presiden Joko Widodo telah secara aktif mengundang investasi dari Tiongkok dan AS untuk mengembangkan industri nikel domestik. Dalam bab ini, penulis memaparkan perbedaan kebijakan dan strategi investasi Tiongkok dan AS dalam industri nikel di Indonesia. Ketika Tiongkok melancarkan pendekatan nasionalisme sumber daya, AS menerapkan prinsip-prinsip pasar bebas. Perbedaan pendekatan investasi ini memunculkan berbagai implikasi, termasuk dampak lingkungan, penggusuran mata pencaharian lokal, degradasi lingkungan, dan permasalahan sosial lainnya.

Menggunakan metode kualitatif yang bersandar kepada kajian literatur dan diskusi terpumpun dengan peneliti serta pejabat pemerintah, penulis memaparkan gambaran umum dan peran industri nikel Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sektor baterai kendaraan listrik serta nuansa rivalitas antara AS dan Tiongkok dalam investasi nikel berikut rangkaian implikasinya di Indonesia. Dengan pemahaman yang mendalam tentang rivalitas Tiongkok dan AS dalam industri nikel, pembaca akan mendapatkan wawasan tentang bagaimana Indonesia dapat menavigasi tantangan dan peluang yang muncul dari dinamika ini, serta strategi yang dapat diterapkan untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi sambil meminimalkan dampak sosial dan lingkungan.

Berikutnya adalah bab yang ditulis oleh Ganjar Widhiyoga, Hasna Wijayati, dan Megah Rahmat Ramadhan. Mereka mengkaji hubungan sinergis antara *Belt and Road Initiative* (BRI) yang diprakarsai oleh Tiongkok dan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan posisi geografis strategis di jalur perdagangan global, memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi maritimnya. Visi PMD yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan stabilitas politik

Buku ini tidak diperjualbelikan

regional melalui ekspansi jalur perdagangan, perluasan pasar, dan keamanan maritim.

Di sisi lain, Tiongkok dengan BRI-nya, yang diperkenalkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013, mengusung dua jalur konektivitas global: *Silk Road Economic Belt* dan *21st Century Maritime Silk Road*. Melalui BRI, Tiongkok berupaya untuk meningkatkan konektivitas darat dan laut guna mendukung pertumbuhan ekonomi global. Indonesia, yang berada di jalur penting *21st Century Maritime Silk Road*, menjadi titik strategis dalam inisiatif ini. Para penulis mengevaluasi irisan antara BRI dan PMD serta bagaimana kedua konsep ini diimplementasikan dalam pembangunan *Kalimantan Industrial Park Indonesia* (KIPI). KIPI merupakan salah satu proyek besar yang mencerminkan sinergi antara BRI dan PMD. Mereka membahas bagaimana KIPI berfungsi sebagai pengejawantahan konsep konektivitas maritim dan pembangunan ekonomi yang diusung oleh kedua inisiatif tersebut.

Analisis dalam bab ini akan mencakup teori geopolitik untuk memahami pentingnya posisi geografis dalam pengambilan keputusan negara dan teori kerja sama internasional untuk mengevaluasi kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menguraikan data dan informasi yang relevan dengan perwujudan BRI dan PMD dalam proyek KIPI, serta mengevaluasi sejauh mana implementasi KIPI mendukung visi strategis kedua negara. Dengan menggali lebih dalam hubungan antara BRI dan PMD melalui studi kasus KIPI, pembaca akan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang dampak dan implikasi dari sinergi ini terhadap pembangunan ekonomi dan maritim Indonesia. Bab ini juga memberikan wawasan tentang strategi geopolitik dan kerja sama internasional yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam kancah global.

Bahasan selanjutnya ditulis oleh Ali Abdullah Wibisono yang menelaah peran dan tantangan diplomasi siber di Asia Tenggara di tengah rivalitas geopolitik antara AS dan China di kawasan Indo-Pasifik. Ruang siber dan teknologi digital telah menjadi elemen krusial

Buku ini tidak diperjualbelikan

dalam interaksi antarnegara di Indo-Pasifik, memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian digital, tetapi juga menciptakan tantangan keamanan yang kompleks. Kawasan Indo-Pasifik, yang terdiri atas 40 negara dan diproyeksikan akan mewakili lebih dari 50% GDP dunia pada tahun 2040, menjadi episentrum persaingan strategis, termasuk di ruang siber. Sementara itu, diplomasi siber didefinisikan sebagai alat penting dalam kebijakan luar negeri untuk menjaga interaksi di ruang siber agar tidak mengarah kepada konflik, dan membangun kepercayaan sebagai dasar kerja sama.

Dalam konteks ini, AS, China, dan Rusia membawa prioritas masing-masing dalam konstruksi norma keamanan siber di forum internasional, seperti *United Nations Group of Governmental Experts* (UNGGE) dan *United Nations Open-Ended Working Group* (OEWG). China menekankan kedaulatan nasional dan menghindari intervensi aktor eksternal, sementara AS cenderung mendukung kemitraan antara negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil di bawah aturan-aturan internasional yang mengikat. Penulis mengeksplorasi sejauh mana rivalitas geopolitik AS-China di ruang siber memengaruhi keamanan siber di Asia Tenggara. Bab ini menjelaskan bagaimana persaingan antara dua kekuatan terkuat di dunia telah menjadi struktur yang membatasi upaya diplomasi siber negara-negara Asia Tenggara dan menghambat terbentuknya arsitektur norma keamanan siber yang solid di kawasan. Penulis juga mengevaluasi berbagai aspek diplomasi siber di Asia Pasifik, termasuk pembangunan norma dan arsitektur keamanan regional, serta peran diplomasi siber dalam mitigasi ketidakamanan di ruang siber yang semakin kompleks dengan inovasi, seperti kecerdasan buatan/*artificial intelligence* (AI), *machine learning*, *Internet of Things* (IoT), dan *blockchain*. Meski demikian, belum ada riset yang secara khusus melihat implikasi dari rivalitas AS-China di ruang siber Asia Tenggara dan kesenjangan digital di antara negara-negara anggotanya.

Dalam menyusun argumen-argumennya, penulis menggunakan data dari laporan-laporan keamanan siber, indeks keamanan siber dari *Internasional Telecommunication Union* (ITU), serta kontribusi

Buku ini tidak diperjualbelikan

negara-negara terhadap keamanan siber global berdasarkan indeks dari Estonian e-Governance Academy. Melalui analisis ini, pembaca akan mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang tantangan dan peluang yang dihadapi negara-negara Asia Tenggara dalam menjaga keamanan siber dan membangun kerja sama regional yang kokoh.

Sebagai bahasan terakhir dalam buku bunga rampai ini, Baiq Wardhani, Sarah Anabarja, dan Renatha A. Rossdiana membahas upaya Indonesia dalam mewujudkan kebijakan luar negeri *Look East* melalui diplomasi biru di wilayah Pasifik Selatan dengan menggunakan skema Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular (KSST). Kebijakan *Look East* merupakan strategi Indonesia untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan, dengan tujuan utama memperkuat kerja sama dan pembangunan bersama yang mencakup bantuan pembangunan, kerja sama sektoral, dan bantuan teknis. Dalam konteks ini, diplomasi biru menjadi instrumen penting dalam memanfaatkan dan melestarikan sumber daya kelautan, serta mendukung berbagai inisiatif ekonomi berbasis laut.

Diplomasi biru Indonesia bertujuan untuk menangkal isu kemerdekaan Papua yang disuarakan oleh negara-negara Pasifik melalui pendekatan yang holistik dan beragam, termasuk bantuan finansial, pembangunan kapasitas, dan dukungan teknis. Konsep ini belum sepenuhnya dikenal di Indonesia, tetapi makin populer di tingkat global karena kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem laut dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 14. Melalui kebijakan ini, Indonesia berupaya membangun citra positif dan memainkan peran yang lebih besar di kawasan Pasifik.

Indonesia membentuk Forum Pasifik Selatan Indonesia (ISPF) pada tahun 2019 sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterlibatan di Pasifik Selatan. Diplomasi biru Indonesia di kawasan ini mencakup dimensi politik, ekonomi, dan budaya, serta bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, pariwisata, dan pertukaran budaya melalui visi *Pacific Elevation*. Dengan menyadari kepentingan yang

Buku ini tidak diperjualbelikan

semakin kompleks di kawasan ini, Indonesia berupaya memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik untuk mengatasi tantangan bersama.

Negara-negara kepulauan Pasifik yang kini dikenal sebagai *large ocean island states* (LOIS) telah memperkenalkan konsep 'Pasifik Biru' sebagai identitas kolektif mereka untuk menghadapi kerentanan bersama terkait perubahan iklim dan kelestarian lingkungan. Konsep ini menegaskan bahwa negara-negara Pasifik membentuk satu kesatuan yang saling terhubung secara geografis dan budaya, dengan tantangan keamanan yang sama. Keterlibatan Indonesia dalam *Blue Pacific* menunjukkan komitmen untuk menyelaraskan diplomasi dengan kepentingan negara-negara Pasifik dan memperkuat stabilitas serta kemakmuran regional.

Bab ini menjelaskan bagaimana diplomasi biru dapat memperkuat kehadiran Indonesia di Pasifik Selatan melalui KSST. Diplomasi biru dianggap sebagai titik awal utama untuk memperkuat identitas Indonesia di Pasifik dan meningkatkan keterlibatan dalam berbagai aspek di kawasan ini. ISPF dijadikan platform untuk kerja sama regional, dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan khusus negara-negara Pasifik Selatan dan meningkatkan kolaborasi serta kemitraan. Menggunakan metode kualitatif menganalisis kebijakan *Look East* melalui diplomasi biru dan hubungannya dengan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular, para penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan penelitian. Telaah ini dilakukan untuk memahami bagaimana diplomasi biru dan KSST dapat disinergikan dengan kebijakan *Look East*, serta tantangan internal dan eksternal yang dihadapi dalam penerapannya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan *Look East* dan diplomasi biru, pembaca akan memperoleh wawasan tentang bagaimana Indonesia dapat memperkuat posisinya di Pasifik Selatan dan mengatasi tantangan dalam membangun kerja sama yang solid dengan negara-negara di kawasan ini.

Sebagai penutup, kami juga menuliskan epilog yang mengikat kembali benang merah dari setiap bab buku bunga rampai sambil

Buku ini tidak diperjualbelikan

mengarahkan pandangan ke masa depan. Langkah selanjutnya bagi Indonesia adalah memperkuat strategi diplomasi dan kebijakan luar negeri, serta berinvestasi dalam pembangunan kapasitas domestik di berbagai sektor. Keterlibatan aktif dalam forum-forum regional dan internasional juga menjadi kunci untuk menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika global yang terus berubah.

Mengapa ini penting? Karena di tengah persaingan geopolitik dan geoekonomi yang semakin ketat, Indonesia harus mampu menavigasi dengan cerdas dan strategis. Keterlibatan aktif dan posisi yang kuat di Indo-Pasifik dan *Global South* akan memberikan keuntungan ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan yang lebih baik. Selain itu, Indonesia dapat memainkan peran signifikan dalam membentuk masa depan kawasan ini. Dalam epilog, kami ingin mengingatkan bahwa perjalanan Indonesia dalam kancah geopolitik dan geoekonomi masih panjang. Dengan strategi yang tepat dan keterlibatan aktif dalam diplomasi, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam kancah internasional, memberikan kontribusi positif bagi stabilitas dan kemakmuran global.

Referensi

Baru, S. (2012). Geo-economics and Strategy. *Survival: Global Politics and Strategy, 54*(3), 47-58. doi:10.1080/00396338.2012.690978

BBC. (2018, May 31). US military renames Pacific Command. *BBC*. Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44312024

Blackwill, R. D., & Harris, J. M. (2016). *War by Other Means. Geoeconomics and Statecraft*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Brands, H., & Gaddis, J. L. (2021). The New Cold War: America, China, and the Echoes of History. *Foreign Affairs, 100*(6), 10-21.

Canuto, O. (2026). The New South as a Frontline of the US-China Technological Rivalry. *Policy Brief* (07), 1-15.

Cave, D. (2023, May 22). How 'Decoupling' From China Became 'De-risking. *The New York Times*. Retrieved from https://www.nytimes.com/2023/05/20/world/decoupling-china-de-risking.html

Buku ini tidak diperjualbelikan

Chan, L. H., & Lee, P. K. (2024). *China-US Great-Power Rivalry: The Competitive Dynamics of Order-Building in the Indo-Pacific*. New York, USA: Routledge.

Clinton, H. (2011, October 11). Remarks by Hillary Rodham Clinton, US Secretary of the State titled Economic Statecraft at the Economic Club of New York, New York City, USA [Press release]. Retrieved from https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/10/175552.htm

DFAT. (2017). *2017 Foreign Policy White Paper*. Canberra, ACT: Department of Foreign Affairs and Trade (Australian Government).

DoD. (2024. January 6). Joint Statement on the Trilateral United States-Japan-Republic of Korea Indo-Pacific Dialogue [Press release]. Retrieved from https://2021-2025.state.gov/joint-statement-on-the-trilateral-united-states-japan-republic-of-korea-indo-pacific-dialogue/

Dollar, D. (2025). The Limits of China's Economic Rise. In B. N. V. Steen (Ed.), *Not Just Another Cold War: The Global Implications of the US-China Rivalry* (pp. 55-74). Oxford, UK: Oxford University Press.

Doshi, R., & McGuiness, K. (2021, March). Huawei Meets History: Great Powers and Telecommunications Risk, 1840-2021. Retrieved from https://www.brookings.edu/articles/huawei-meets-history-great-powers-and-telecommunications-risk-1840-2021/

Ekmektsioglou, E., & Lee, J.-Y. (2022). North Korea, Missile Defense, and U.S.-China Security Dilemma. *The Pacific Review, 35*(4), 587-616. doi:10.1080/09512748.2020.1862285

Franedya, R. (2019, June 06). Resmi! China Masuki Era Teknologi 5G Komersial. *CNBC Indonesia*. Retrieved from https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190606122528-37-76947/resmi-china-masuki-era-teknologi-5g-komersial

Fravel, M. T. (2011). China's Strategy in the South China Sea. *Contemporary Southeast Asia, 33*(3), 292-319.

George, R. (2013). *Ninety Percent of Everything: Inside Shipping, the Invisible Industry That Puts Clothes on Your Back, Gas in Your Car, and Food on Your Plate*. New York, USA: Henry Holt and Company.

Hardini, H. K., Emad, G. R., & Nguyen, H. O. (2020). *Blue Economy and Logistic Connectivity through Maritime Identity Development: A Case Study of Indonesia.* Paper presented at the 10th Asian Logistics Round Table Conference (ALRT), Launceston, Tasmania.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Hayton, B. (2014). *The South China Sea: The Struggle for Power in Asia*. New Haven, CT: Yale University Press.

Hilpert, H. G. (2020). Trade, Economy and Finance: Rivalries, Conflicts, Escalation Risks. In B. Lippert & V. Perthes (Eds.), *Strategic Rivalry between United States and China. Causes, Trajectories, and Implications for Europe* (pp. 25-29). Berlin, Germany: German Institute for International and Security Affairs (SWP).

Hutagalung, S. (2024, April 25). Navigating Indonesia's Relations In South Pacific For 2024 – OpEd. *Eurasia Review*. Retrieved from https://www.eurasiareview.com/25042024-navigating-indonesias-relations-in-south-pacific-for-2024-oped/#google_vignette

IMF. (2025). World Economic Outlook (April 2025). Retrieved from https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO

Jisi, W. (2023). From Reluctant Cooperation to Assertive Competition: China's Reaction to US Strategic Pressure, 1979–2022. In E. S. Medeiros (Ed.), *Cold Rivals: The New Era of US-China Strategic Competition* (pp. 108-142). Washington, DC: Georgetown University Press.

Jisi, W., & Ran, H. (2019). From Cooperative Partnership to Strategic Competition: A Review of China–U.S. Relations 2009–2019. *China International Strategy Review, 1*(1), 1-10. doi:10.1007/s42533-019-00007-w

Kassab, H. S. (2023). What Is the Indo-Pacific? Genealogy, Securitization, and the Multipolar System. *Chinese Political Science Review, 8*(4), 573-596. doi:10.1007/s41111-023-00233-z

Kim, S. Y. (2025). Centrality and Community: ASEAN in the Regional Comprehensive Economic Partnership. In F. Iwasaki, K. Oikawa, & S. Urata (Eds.), *Political Economy of East Asian Economic Integration. The Process of the RCEP Negotiations and Beyond* (pp. 61-87). London, UK: Routledge.

KPU. (2014). *Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian. Visi, Misi dan Program Aksi. Joko Widodo - Jusuf Kalla 2014*. Jakarta, Indonesia: Komisi Pemilihan Umum.

Kydd, A. (2020). Switching Sides: Changing Power, Alliance Choices and US–China–Russia Relations. *International Politics, 57*(5), 855-884. doi:10.1057/s41311-020-00225-9

Buku ini tidak diperjualbelikan

Langel, T. (2024, May 29). A New Trilateral for the Indo-Pacific: Japan, the Philippines, and the United States. Retrieved from https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=10930&lid=6947

Li, H. (2021). The "Indo-Pacific": Intellectual Origins and International Visions in Global Contexts. *Modern Intellectual History, 19*(3), 807-833. doi:10.1017/S1479244321000214

Lin, M. (2025). Taiwan, Geopolitics, and US–China Relations. *The Geography Teacher, 22*(1), 31-35. doi:10.1080/19338341.2024.2432276

Luttwak, E. (1993). The Coming Global War for Economic Power: There are No Nice Guys on the Battlefield of Geo-economics. *The International Economy, 7*(5), 18-67.

Luttwak, E. N. (1990). From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce. *The National Interest(20),* 17-23.

MDI. (2015). *Ensuring Secure Areas. Indian Maritime Security Strategy*. New Delhi, India: Ministry of Defence of India (Indian Navy).

MFAJ. (2019). *Diplomatic Blue Book 2019*. Tokyo, Japan: Ministry of Foreign Affairs of Japan (Japanese Government).

Natalegawa, M. (2013, May 20). 'An Indonesian Perspective on the Indo-Pacific'. *The Jakarta Post*. Retrieved from https://www.thejakartapost.com/news/2013/05/20/an-indonesian-perspective-indo-pacific.html

Putri, H., & Salim, W. (2020). The Maritime Silk Road's Potential Effects on Outer Island Development: The Natuna Islands, Indonesia. *Island Studies Journal, 15*(2), 155-172. doi:10.24043/isj.136

Ramadhan, M. S., & Yustiningrum, R. R. E. (2024). Diskursus Indo-Pasifik dalam Politik Domestik dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Geopolitik, Geostrategi, dan Geoekonomi. In R. R. E. Yustiningrum, M. S. Ramadhan, D. F. Anwar, S. Siswanto, G. Wuryandari, A. N. Alami, R. A. R. F. Prabaningtyas, & A. Elisabeth (Eds.), *Indo-Pasifik dalam Politik Luar Negeri Indonesia: Dimensi Geopolitik, Geostrategi, dan Geoekonomi* (pp. 1-47). Yogyakarta, Indonesia: Penerbit Andi.

Rinaldi, P. N. (2023, August 12). The Vital Role of South-South Cooperation and Its Importance for the Summit of the Future. *Global Governance Forum*. Retrieved from https://globalgovernanceforum.org/vital-role-south-south-cooperation-importance-summit-of-the-future/

Buku ini tidak diperjualbelikan

Roberts, K., & Bano, S. (2023). *The Ascendancy of Regional Powers in Contemporary US-China Relations: Rethinking the Great Power Rivalry*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.

Saha, P., Bland, B., & Laksmana, E. A. (2020). *Anchoring the Indo-Pacific: The Case for Deeper Australia-India-Indonesia Trilateral Cooperation*. Jakarta, Indonesia: Centre for Strategic and International Studies (CSIS) and Observer Research Foundation, India.

Scholvin, S., & Wigell, M. (2018). Power Politics by Economic Means: Geoeconomics as An Analytical Approach and Foreign Policy Practice. *Comparative Strategy, 37*(1), 73-84. doi:10.1080/01495933.2018.1419729

Scobell, A. (2018). The South China Sea and U.S.-China Rivalry. *Political Science Quarterly, 133*(2), 199-224. doi:10.1002/polq.12772

Shambaugh, D. (2021). *Where Great Powers Meet: America & China in Southeast Asia*. Oxford, UK: Oxford University Press.

Sparke, M. (1998). From Geopolitics to Geoeconomics: Transnational State Effects in the Borderlands. *Geopolitics, 3*(2), 62-98. doi:10.1080/14650049808407619

Steen, B. N. V. (2025). *Not Just Another Cold War: The Global Implications of the US-China Rivalry*. Oxford, UK: Oxford University Press.

Tollefson, J. (2018). China Declared World's Largest Producer of Scientific Articles. *Nature, 553*(7686), 390-391.

Toner, H. (2023). From Backwater to Near-Peer: Changing US Approaches toward China as a Technological Competitor. In E. S. Medeiros (Ed.), *Cold Rivals: The New Era of US-China Strategic Competition* (pp. 360-386). Washington, DC: Georgetown University Press.

Tucker, N. B. (2009). *Strait Talk: United States-Taiwan Relations and the Crisis with China*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

TWH. (2023, December 06). G7 Leaders' Statement. Retrieved from https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2023/12/06/g7-leaders-statement-6/

USEIA. (2024, March 21). Regional Analysis Brief: South China Sea. Retrieved from https://www.eia.gov/international/content/analysis/regions_of_interest/South_China_Sea/south_china_sea.pdf

Buku ini tidak diperjualbelikan

Vihma, A. (2018). Geoeconomic Analysis and the Limits of Critical Geopolitics: A New Engagement with Edward Luttwak. *Geopolitics, 23*(1), 1-21. doi:10.1080/14650045.2017.1302928

Vihma, A., & Wigell, M. (2016). Unclear and Present Danger: Russia's Geoeconomics and the Nord Stream II Pipeline. *Global Affairs, 2*(4), 377-388. doi:10.1080/23340460.2016.1251073

von der Leyen, U. (2023, March 30). Speech by President von der Leyen on EU-China relations to the Mercator Institute for China Studies and the European Policy Centre [Press release]. Retrieved from https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_2063

Westad, O. A. (2019). The Sources of Chinese Conduct: Are Washington and Beijing Fighting a New Cold War? *Foreign Affairs, 98*(5), 86-95.

Wigell, M., & Vihma, A. (2016). Geopolitics versus Geoeconomics: The Case of Russia's Geostrategy and Its Effects on the EU. *International Affairs 92*(3), 605-627. doi:10.1111/1468-2346.12600

Yustiningrum, R. R. E., Alami, A. N., & Siswanto, S. (2024). Perspektif Geoekonomi Indonesia dalam Konteks Indo-Pasifik. In R. R. E. Yustiningrum, M. S. Ramadhan, D. F. Anwar, S. Siswanto, G. Wuryandari, A. N. Alami, R. A. R. F. Prabaningtyas, & A. Elisabeth (Eds.), *Indo-Pasifik dalam Politik Luar Negeri Indonesia: Perspektif Geopolitik, Geostrategi, dan Geoekonomi* (pp. 135-184). Yogyakarta, Indonesia: Penerbit Andi.

Yustiningrum, R. R. E., Alami, A. N., Siswanto, S., & Ramadhan, M. S. (2023). *Indonesia's Responses to the US-China Rivalry in the Indo-Pacific: Geo-economic Approach. [Manuscript in preparation]*. National Research and Innovation Agency (BRIN). Jakarta, Indonesia.

Zeller, J. (2024, September 26). Beyond Geopolitics: The Ideological and Ethical Battleground of US-China Relations. *Australia Institute of International Affairs (AIIA)*. Retrieved from https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/beyond-geopolitics-the-ideological-and-ethical-battleground-of-us-china-relations/

Buku ini tidak diperjualbelikan

Buku ini tidak diperjualbelikan

BAB 2

Aktor-Aktor Dibalik Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok

Maulana Ibrahim & Poppy Wulandari

A. Mengungkap Aktor dan Kepentingan di Balik Rivalitas AS–Tiongkok

Kajian Indo-Pasifik merupakan fondasi bagi aktor internasional maupun akademisi dalam mentransformasikan pemahaman global sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan kelahiran sebuah kebijakan. Indo-Pasifik merupakan kawasan strategis dan dinamis yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi global secara masif. Kawasan ini mencakup sebagian besar wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Oseania. Secara geografis, Samudra Hindia dan Pasifik menjadi dasar pertimbangan istilah Indo-Pasifik dalam geostrategi (Zeng & Zhang, 2021). Adapun tiga aktor utama dalam dinamika Indo-Pasifik, yakni Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan

M. Ibrahim & P. Wulandari
Universitas Negeri Medan, *e-mail*: maulanaibrahim@unimed.ac.id

© 2026 Editor & Penulis

Ibrahim, M. & Wulandari, P. (2026). Aktor-Aktor Dibalik Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok. Dalam RR. E. Yustiningrum & E. S. Prihatini (Ed.), *Indonesia dalam Kancah Geopolitik di Indo-Pasifik* (29–69). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.2075.c1719
E-ISBN: 978-602-6303-98-1

Buku ini tidak diperjualbelikan

India (He & Li, 2020). Pergeseran kiblat kekuatan ekonomi global dari Barat ke Timur, terkhusus akibat dari pengaruh Tiongkok dan India turut memengaruhi tatanan perekonomian internasional (Sudan, 2022). Kebangkitan perekonomian wilayah Timur menempatkan Indo-Pasifik sebagai kawasan strategis dan potensial.

Di Indonesia sendiri, gagasan Indo-Pasifik mulanya termuat dalam kebijakan luar negeri Indonesia pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2013 (Yustiningrum et al., 2024). Dalam gagasan Indo-Pasifik juga termuat konsep *dynamic equilibrium*, yang dapat didefinisikan sebagai perubahan yang terjadi secara terus-menerus di kawasan Asia Tenggara tidak boleh mengarah pada anarki sebagai akibat dari kekuatan negara adikuasa (Anwar, 2023). Indo-Pasifik saat ini bagai podium dan pusat perhatian internasional sebagai akibat dari pergeseran kekuatan ekonomi Barat ke Timur. Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Indo-Pasifik melalui kepemimpinan Presiden Jokowi turut menguatkan program-program pendukung dalam mencapai tujuan strategis pemanfaatan peluang ekonomi di Indo-Pasifik. Meskipun Indonesia bukanlah aktor sentral dalam dinamika Indo-Pasifik, tetapi visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) merupakan bentuk sambutan hangat terhadap kesediaan untuk terlibat dalam kemajuan infrastruktur maritim dan penguatan konektivitas global (Radjendra et al., 2022).

Tiongkok dan India sebagai dua aktor inti kekuatan ekonomi Timur masing-masing memiliki pengaruh signifikan di Indo-Pasifik. Tiongkok dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi pesat berdiplomasi melalui *Belt and Road Initiative* (BRI), yakni inisiatif pembangunan global yang berfokus pada kerja sama dan penguatan konektivitas negara-negara di dunia (Pedrason, 2021). Inisiatif Tiongkok melalui BRI turut membawa investasi bagi kawasan Indo-Pasifik. Investasi yang menyasar negara-negara kawasan Indo-Pasifik pada akhirnya turut mendorong perekonomian berbagai negara dan menguatkan konektivitas global. Namun, di sisi lain, inisiatif ini turut menimbulkan kekhawatiran khususnya terkait utang luar negeri dan ketergantungan ekonomi negara-negara penerima investasi.

Buku ini tidak diperjualbelikan

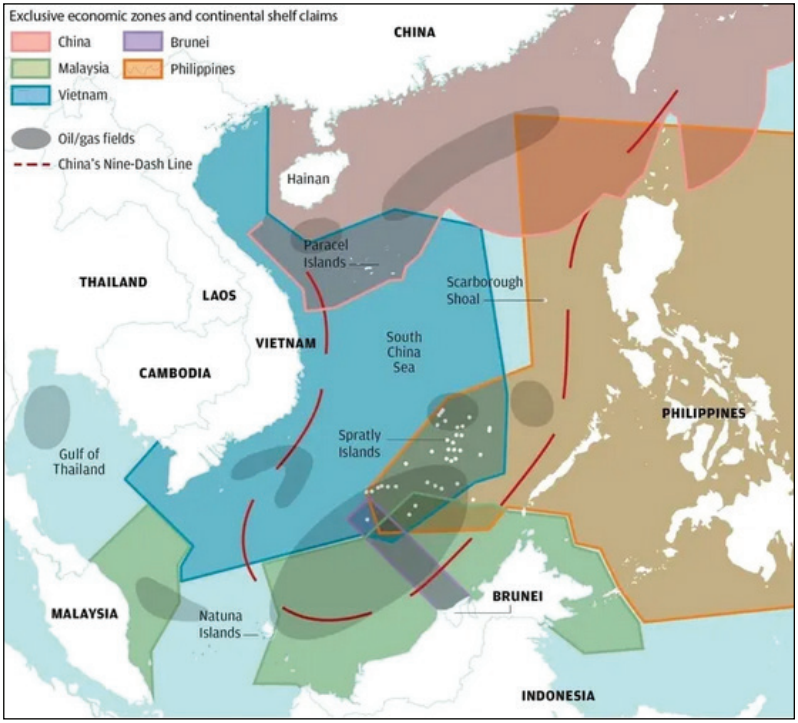
Sementara itu, India dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil berdiplomasi melalui penguatan *soft power* sebagai diplomasi pada bidang budaya dan pendidikan. *Soft power* merupakan strategi India dalam memengaruhi negara lain melalui daya tarik budaya tanpa keterlibatan kekuatan militer atau keterpaksaan (Ohnesorge, 2020).

Dalam dinamika Indo-Pasifik, ketegangan sering kali berpusat pada Laut China Selatan (LCS). Klaim teritorial dari Tiongkok yang luas memicu konflik dengan negara-negara yang memiliki kesatuan bentangan laut, seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Situasi LCS yang sensitif ini menjadi peluang bagi AS dalam berdiplomasi melalui *Quadrilateral Security Dialogue* (Quad). Quad merupakan sebuah forum strategis yang bersifat informal dengan keterlibatan AS, Jepang, India, dan Australia yang berfokus pada keamanan maritim, perlawanan terorisme, dan penanggulangan bencana (Gale & Shearer, 2022). Misi utama Quad adalah menyeimbangkan pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik (Jash, 2021). Quad secara strategis menentang klaim teritorial Tiongkok atas LCS yang berlebihan dan memastikan perairan internasional terbuka untuk semua negara. Melalui kekuatan militer dan aliansi strategis di kawasan LCS, Quad berupaya menjaga *status quo* dan mencegah Tiongkok berlaku agresif (Zhang, 2022).

Klaim teritorial terhadap LCS hingga saat ini masih menjadi sengketa dikarenakan masing-masing negara yang berperairan di LCS memiliki dasar klaimnya sendiri hingga mengakibatkan pola laut yang tumpang tindih terhadap negara-negara tetangga. Adapun yang mendasari sengketa LCS dikarenakan terdapat kurang lebih 250 fitur objek potensial yang dibagi dalam lima grup objek utama, seperti Kepulauan Spratley, Kepulauan Paracel, Scarborough Shoal, Pulau Paratas, dan Macclesfield Bank (Zhou et al., 2020). Munculnya konflik di wilayah LCS bermula ketika Tiongkok mendaftarkan peta teritorialnya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2009, yang mana peta tersebut berlandaskan atas peta tahun 1947 milik Tiongkok (Kim & Druckman, 2020). Peta tersebut merupakan peta yang dibuat Tiongkok atas perairannya sendiri. Pembuatan peta didasarkan pada sejarah zona penangkapan ikan tradisional

Buku ini tidak diperjualbelikan

(*traditional fishing*). Peta yang mulanya berjudul *Map of South China Sea Islands* tahun 1947 memiliki sembilan tanda hubung garis (*nine dash line*) menggambarkan sebagian besar wilayah LCS. Peta yang selanjutnya disebut *nine dash line* kemudian didaftarkan ke PBB pada tahun 2009 (Handiriono et al., 2024). Meskipun peta tersebut memang milik Tiongkok sejak 1947, tetapi peta tersebut belum diakui secara sah oleh internasional. Ketegangan negara-negara berperairan LCS terjadi akibat masing-masing negara memiliki klaim masing-masing dan Tiongkok justru mendaftarkan petanya kepada PBB.



Keterangan: Peta wilayah Laut China Selatan. Perbedaan warna merupakan klaim masing-masing negara, sembilan garis merah putus-putus merupakan nine dash line yang menjadi klaim Tiongkok atas teritorialnya.

Sumber: Asia Maritime Transparency Initiative (2022)

Gambar 2.1 Peta teritorial LCS yang tumpang tindih dan *nine dash line*.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Berdasarkan Gambar 2.1 tersebut, Tiongkok menuntut pengakuan bahwa wilayah dalam sembilan garis merah merupakan wilayah perairan Tiongkok. Peta tersebut mengeklaim kekuasaan sekitar 90% terhadap perairan LCS (Napang et al., 2019). *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 sebagai pedoman hukum laut internasional, peta teritorial Tiongkok tidak dapat dianggap sah karena bertolak belakang dengan beberapa aturan terkait. Pasal 2 UNCLOS 1982 tentang *legal status of the territorial sea, of the air space over the territorial sea and its bed and subsoil* berbunyi:

> *"The sovereignty of a Coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea." (UN, 1982).*

Pasal 2 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa kedaulatan perairan suatu negara yang meluas melampaui wilayah daratan dan perairan pedalamannya, dan dalam hal suatu negara kepulauan maka perairan kepulauannya sampai ke jalur laut yang berdekatan merupakan laut teritorial. Hal ini juga dikuatkan oleh hukum perihal jarak laut teritorial sejauh 12 *nautical miles* dari garis pangkal sesuai dengan pasal 3 tentang *breadth of the territorial sea* yang berbunyi:

> *"Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention." (UN, 1982).*

Dalam dinamika Indo-Pasifik khususnya terkait konflik LCS, ketegangan bukan hanya terjadi akibat peta *nine dash line* oleh Tiongkok, tetapi juga ketidakselarasan negara-negara dalam pengukuran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Berdasarkan Pasal 57 UNCLOS 1982 tentang *breadth of the exclusive economic zone* mengatur bahwa ZEE memiliki batas maksimal 200 mil dari garis pangkal lebar laut teritorial diukur. Konflik kepentingan antara negara-negara yang terlibat dalam konflik LCS turut menghasilkan integrasi pendekatan

Buku ini tidak diperjualbelikan

antara *hard power* dan *soft power*. Integrasi kedua pendekatan ini diaplikasikan dalam kebijakan dari negara-negara yang berkonflik.

Jauh sebelum terjadi integrasi pendekatan *hard power* dan *soft power*, Filipina sebenarnya telah lebih dulu membawa sengketa terkait klaim *nine dash line* ke *Permanent Court of Arbitration* (PCA) pada 2013. Kemudian pada 2016 PCA menyatakan klaim Tiongkok terhadap *nine dash line* menyalahi aturan UNCLOS 1982. Namun, pihak Tiongkok hingga saat ini tidak mengakui keputusan PCA tersebut dan masih mempertahankan klaimnya. Pada akhirnya, klaim atas objek-objek di kawasan LCS menjadi sengketa yang penuh dinamika di kawasan Indo-Pasifik. Masing-masing negara bersengketa demi mempertahankan hak kedaulatan tentu memiliki kepentingan yang berbeda-beda hingga melahirkan dinamika baru dalam Indo-Pasifik. Adapun dinamika Indo-Pasifik yang muncul sebagai dampak dari konflik LCS dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Dinamika Indo-Pasifik dan Dampak Konflik Laut China Selatan

Dinamika	Keterlibatan	Dampak
Peta tumpang tindih atas klaim teritorial di LCS	Tiongkok, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam	Ketegangan antarnegara yang berpotensi terhadap konflik militer dan ketidakpastian politik
Pembangunan pangkalan militer oleh negara-negara dengan klaim negara tumpang tindih	Tiongkok, Vietnam, Filipina	Berisiko eskalasi konflik militer dan perubahan dinamika keamanan wilayah
Arbitrase internasional	Tiongkok dan Filipina	Tiongkok menolak putusan arbitrase internasional yang mendukung Filipina pada 2016 mengakibatkan ketegangan dua negara

Buku ini tidak diperjualbelikan

Dinamika	Keterlibatan	Dampak
Penguatan kemitraan dan pembentukan aliansi untuk mempertahankan posisi dalam sengketa	Negara-negara ASEAN, AS, Jepang, India	Latihan militer gabungan dan pembentukan aliansi strategis dan penguatan diplomasi melalui kemitraan untuk mengurangi ketegangan
Keterlibatan negara-negara ekonomi maju sebagai penyeimbang kekuatan Tiongkok	AS, India	Memberikan pengaruh dalam politik dan ekonomi guna menyeimbangkan kekuatan Tiongkok

Sumber: Leddy (2021); Hendler & Motta (2021); Wiegand & Beuck (2020); Kipgen (2020); Mukherjee (2020)

Ditinjau dari dinamika yang terjadi sebagai akibat dari konflik LCS, masing-masing negara yang terlibat berupaya membangun pertahanan dan strateginya masing-masing. Ada negara yang berusaha menguatkan strateginya secara mandiri melalui pengajuan ke pengadilan internasional, ada pula negara yang bersekutu dengan negara lain untuk menyeimbangkan kekuatan dan mengintegrasikan pendekatan *hard power* dan *soft power*. LCS sebagai kawasan strategis *sea line of communication* (SLOC) menghubungkan rute perairan antarpelabuhan sebagai jalur perdagangan, logistik, dan militer (Agastia & Perwita, 2016). Mengingat posisinya yang strategis, dalam keadaan darurat perang militer antarnegara maka jalur SLOC akan ditutup (Santoso, 2021). LCS merupakan jalur perdagangan perekonomian yang menguasai sepertiga arus perdagangan dunia dengan penghasilan perdagangan global senilai US$ 3,37 triliun setiap tahunnya (Gul et al., 2022). Dalam dinamika geoekonomi, negara yang dapat menguasai wilayah strategis LCS dapat mengatur kegiatan yang menguntungkan bagi kepentingan nasionalnya.

Dinamika yang terjadi di Indo-Pasifik khususnya akibat dari ketegangan LCS bukan hanya dirasakan oleh negara-negara yang berperairan sama dan memiliki kepentingan teritorial, tetapi juga terdapat negara luar yang berusaha terlibat. Keterlibatan AS yang

Buku ini tidak diperjualbelikan

bermula dari keinginannya untuk menyeimbangi kekuatan Tiongkok menambah luas dinamika yang terjadi di Indo-Pasifik (Nagy, 2022). Bahkan, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menganggap keterlibatan AS sebagai ancaman bagi perdamaian negara-negara kawasan (Santoso, 2021). Rivalitas AS dan Tiongkok memengaruhi berbagai sektor yang kemudian hal ini menjadi aspek dasar rivalitas kedua negara tersebut. Jika dirincikan lebih detail, beberapa penyebab rivalitas AS dan Tiongkok umumnya berangkat dari aspek ekonomi, militer, teknologi, politik, dan diplomasi yang dirincikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Analisis Penyebab Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok

Aspek Rivalitas	Penyebab	Analisis
Ekonomi	Persaingan ekonomi dan perang dagang	Kedua negara adikuasa bersaing untuk menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan menetapkan kebijakan perdagangan yang melindungi industri masing-masing, tetapi merugikan bagi lawan.
Militer	Dominasi militer dan keterlibatannya di Indo-Pasifik	Kedua negara saling memperkuat militer guna memperluas pengaruhnya di Indo-Pasifik.
Teknologi	Persaingan kemajuan teknologi dan inovasi	Kedua negara berkompetisi menjadi pengembang teknologi canggih, seperti 5G, *artificial intelligence* (AI), hingga semikonduktor.
Politik dan ideologi	Perbedaan pandangan politik dan benturan ideologi	AS sebagai negara yang mengedepankan demokrasi bertolak belakang dengan Tiongkok yang berideologi komunis.
Diplomasi dan aliansi	Pembentukan aliansi strategis	AS hadir sebagai sekutu negara-negara kawasan Indo-Pasifik dalam menghadapi kekuatan Tiongkok, sedangkan Tiongkok memperluas pengaruh dan diplomasi melalui BRI.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Aspek Rivalitas	Penyebab	Analisis
Isu regional	Konflik regional Taiwan dan Korea Utara	AS membersamai Taiwan terhadap dukungan Tiongkok kepada Korea Utara yang semakin menambah dinamika di Indo-Pasifik.

Sumber: Kroenig (2020); Mearsheimer (2022).

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penyebab utama yang mendasari konflik hingga bermuara pada rivalitas AS-Tiongkok adalah perbedaan ideologi, persaingan ekonomi yang ketat, dominasi kemajuan teknologi dan keamanan nasional, modernisasi militer, hingga diplomasi dan aliansi masing-masing negara. Perbedaan ideologi mulanya memunculkan kewaspadaan yang tinggi terhadap masing-masing negara, sementara persaingan ekonomi melalui perang dagang dan kompetisi dalam teknologi inovasi semakin membuat kedua negara bersitegang.

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (*literature review*). Pendekatan ini dipilih guna memberikan pemahaman mendalam mengenai rivalitas AS-Tiongkok melalui analisis kritis terhadap peran aktor-aktor dibalik ketegangan AS dan Tiongkok. Dengan demikian, tingkat analisa (*level of analysis*) dalam kajian ini adalah sekumpulan sudut pandang aktor-aktor rivalitas AS-Tiongkok yang meliputi aktor pendukung dan aktor netral dalam lingkup internasional.

Adapun yang menjadi sumber kajian dalam tulisan ini, yakni jurnal akademik, buku, laporan kebijakan, dan peraturan internasional. Proses pengumpulan data melibatkan identifikasi, pengumpulan, dan seleksi literatur yang relevan dengan menggunakan basis data akademik, seperti JSTOR, Google Scholar, dan ProQuest. Kriteria seleksi meliputi kebaruan publikasi lima tahun terakhir dan fokus pada topik yang relevan dengan kajian. Guna memastikan validitas dan reliabilitas hasil, dilakukan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur dan meninjau konsistensi argumentasi yang disampaikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Kerangka pemikiran dalam kajian ini melibatkan analisis dinamika kekuasaan global, yang mana kedua negara bersaing untuk mendominasi dalam ekonomi, teknologi, dan militer (Wu, 2020). Rivalitas yang terjadi antara AS dan Tiongkok turut mendorong negara-negara untuk menunjukkan keberpihakan terhadap dua kekuatan negara. Pada akhirnya, negara-negara yang terlibat juga turut menjadi aktor pendukung dalam keberlanjutan rivalitas tersebut hingga saat ini.

B. Pandangan 'Amerika yang Utama'

Kawasan Indo-Pasifik sebagai penguasa sepertiga perdagangan global melalui LCS memiliki aktor-aktor dan penggerak gagasan dalam dinamika global. AS, Tiongkok, India, Jepang, dan Australia merupakan aktor-aktor sentral yang memiliki konsepsi dan gagasan secara khusus terhadap Indo-Pasifik (Heiduk & Wacker, 2020). Masing-masing negara memiliki gagasan dan kepentingan yang berbeda-beda, yang mana secara kolektif menjadi penentu kiblat politik, ekonomi, dan keamanan di Indo-Pasifik. AS melalui kepemimpinan Presiden Donald Trump pertama kali mengemukakan gagasan *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) pada *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) *Summit* 2017 di Hanoi, Vietnam (Tomotaka, 2021). Dalam kancah internasional, konsep *free* atau bebas dalam FOIP melambangkan kebebasan setiap negara untuk melaksanakan hak kedaulatan tanpa campur tangan negara lain. Dalam kancah nasional, hal ini dimaksudkan dengan kebebasan hak asasi manusia dan perlindungannya dalam pemerintahan. Konsep *open* atau terbuka melambangkan akses yang terbuka terhadap perairan internasional, wilayah udara dan akses terbuka terhadap pasar dalam perdagangan yang adil.

AS secara tegas meyakini bahwa Tiongkok merupakan rival yang harus dihadapi dengan strategi dan diplomasi yang tepat. Modernisasi militer AS menitikberatkan kesiapsiagaan dalam menjamin pengaruh AS secara jangka panjang di Indo-Pasifik. AS berasumsi bahwa di masa depan, konflik dan peperangan akan mengandalkan kekuatan yang kompetitif untuk memperluas pengaruh di wilayah Indo-

Buku ini tidak diperjualbelikan

Pasifik. AS juga mengusung strategi kemitraan bersama Singapura, Taiwan, Selandia Baru, dan Mongolia (Heiduk & Wacker, 2020). Di sisi lain, AS juga mempererat hubungan kemiliteran dengan India guna mengintensifkan kerja sama dengan Sri Lanka, Maladewa, Bangladesh, dan Nepal.

Usaha AS mengajak negara-negara dengan kekuatan ekonomi dan militer yang potensial nyatanya tidak semulus ego 'Amerika yang Utama'. Pada tahun 2017 hingga 2018, kritik negara-negara Asia Tenggara ditujukan kepada AS dikarenakan pada tahun-tahun itu FOIP secara eksklusif hanya didasarkan pada aliansi bilateral (He & Li, 2020). Menanggapi kritik negara-negara Asia Tenggara, AS kemudian berupaya mengusung tema *promote a networked region* yang melibatkan Indo-Pasifik melalui perluasan komitmen tripartit dan multilateral (Ford, 2020). AS berkomitmen dalam mempromosikan perdagangan bebas, adil, dan timbal balik di kawasan Indo-Pasifik melalui FOIP. Namun, ternyata FOIP turut membawa dampak eksternal akibat prinsip *America First* atau Amerika yang utama.

Prinsip Amerika yang utama dalam konteks politik memperjelas bahwa FOIP merupakan bentuk kekhawatiran AS terhadap inisiasi BRI yang diusung Tiongkok (Grissler & Vargö, 2021). Kritik negara-negara Asia Tenggara terhadap FOIP pada tahun 2017 hingga 2018 ditanggapi melalui perluasan kerja sama sebagai tawaran yang menguntungkan negara-negara kawasan. Pada mulanya, solusi yang ditawarkan oleh AS merupakan hal yang solutif di tengah keresahan negara-negara yang mengkritik, tetapi di tahun 2019 AS justru mengabaikan banyak mitranya di Asia Tenggara dengan hanya mengirimkan penasihat keamanan nasional Amerika ke KTT Asia Timur 2019 di Bangkok, Thailand. KTT EAS 2019 merupakan forum regional yang melibatkan pemimpin negara-negara Asia Timur dan mitra mencapai kesepakatan yang sama. Namun, dengan ketidakhadiran Presiden Donald Trump yang saat itu hanya diwakilkan oleh penasihat keamanan nasional, yang bahkan bukan merupakan anggota kabinet, memunculkan kekecewaan di tengah kritik masa lalu.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Beberapa tahun belakangan tepatnya pada 2020 AS kembali mengusung inisiatif baru *Pacific Pledge* senilai 200 juta USD dengan tujuan melipatgandakan pendanaan pembangunan oleh AS untuk negara-negara Pasifik selama beberapa tahun mendatang (Dupont, 2021). Inisiatif ini juga memungkinkan *United States Agency for International Development* (USAID) untuk meningkatkan partisipasinya di Pasifik Barat. Tak hanya berhenti di situ, AS bersama dengan Australia, Jepang, dan Selandia Baru juga membangun kemitraan dengan Papua Nugini melalui inisiasi *Papua New Guinea Electrification Partnership (PEP)* yang bertujuan meningkatkan ketersediaan listrik secara mendasar. Sejak menjabat pada tahun 2021, Presiden AS Joe Biden menempatkan Indo-Pasifik sebagai prioritas dalam kebijakan luar negeri dengan berfokus pada FOIP (Li, 2023). Presiden Joe Biden tetap melanjutkan dan memperkuat FOIP dengan tujuan menjaga kebebasan navigasi, supremasi hukum, dan hak negara-negara kawasan di Indo-Pasifik. Selain itu, Presiden Joe Biden juga menginisiasi inisiatif *Build Back Better World* (B3W) melalui tawaran alternatif bagi proyek infrastruktur BRI yang diinisiasi Tiongkok (Zhao, 2021).

C. Interpretasi Jepang tentang Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka

Sebenarnya istilah FOIP lebih dulu muncul dalam pidato yang berjudul *Confluence of the Two Seas* oleh Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe pada 2007. Pada saat itu, PM Shinzo Abe menyampaikan visinya terkait hubungan politik-ekonomi yang lebih hangat antara Pasifik dan Samudra Hindia (Wallis et al., 2020). Berdasarkan pidatonya, PM Shinzo Abe mengemukakan pentingnya keamanan jalur pelayaran sebagai arus bebas manusia, barang, modal, dan pengetahuan (Heiduk & Wacker, 2020). Secara diplomasi, Jepang juga menekankan norma universal untuk menghubungkan negara-negara kawasan secara erat dalam hal politik dan ekonomi. Di tahun yang bersamaan dengan pidato PM Jepang Shinzo Abe pada 2007 itu juga forum strategis *Quadrilateral Security Dialogue* (Quad) diusungkan.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Quad adalah forum strategis yang dipicu oleh keinginan menghadapi tantangan dan peluang di kawasan Indo-Pasifik (Atif & Akbar, 2021). Lebih khusus, Quad hadir sebagai tanggapan terhadap pengaruh dan aktivitas militer Tiongkok di Indo-Pasifik (Koga, 2020). Meskipun pada 2007 forum ini sempat tidak aktif beberapa tahun hingga akhirnya aktif kembali pada 2017, tetapi tujuan diplomatisnya tetap tercapai. Quad melibatkan empat negara, yakni AS, Jepang, India, dan Australia. Adapun tiga bidang strategis berdasarkan prinsip-prinsip FOIP, yakni pertama, menjaga ketertiban berdasarkan peraturan dengan menjunjung tinggi perdagangan bebas dan kebebasan navigasi; kedua, menjamin kesejahteraan ekonomi melalui konektivitas yang lebih luas melalui infrastruktur, program pertukaran, kelembagaan, dan harmonisasi peraturan global; ketiga, menjaga kedamaian dan keamanan melalui peningkatan kerja sama dengan negara AS, India, Australia, dan mitra lainnya (Heiduk & Wacker, 2020).

Sejak cikal bakal FOIP melalui konsep *Arc of Freedom and Prosperity,* yakni strategi Jepang guna mempererat hubungan dengan negara-negara yang memiliki ekonomi pasar bebas dari Eropa Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, hingga Asia Tenggara diinisiasi oleh PM Shinzo Abe tahun 2006, terjadi banyak dinamika dalam strategi FOIP yang menyebabkan perubahan konsep dan upaya terkait FOIP. Tabel 2.3 berikut menganalisis upaya terkait FOIP oleh PM Jepang sejak tahun 2006 hingga saat ini.

Tabel 2.3 Upaya Jepang Terkait FOIP Tahun 2006–2023

Perdana Menteri/ Periode Jabatan	Upaya terkait FOIP
Shinzo Abe (2006–2007)	Mengusulkan konsep *Arc of Freedom and Prosperity* yang menjadi cikal bakal FOIP. Meningkatkan kerja sama keamanan dengan AS dan negara-negara Asia Tenggara.
Yasuo Fukuda (2007–2008)	Memperkuat hubungan diplomatik dengan ASEAN melalui kebijakan *Fukuda Doctrine,* fokus pada kerja sama ekonomi dan budaya, tetapi belum eksplisit dalam FOIP.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Perdana Menteri/ Periode Jabatan	Upaya terkait FOIP
Taro Aso (2008–2009)	Memperkenalkan konsep *Asia's Democratic Security Diamond* untuk menghubungkan India, Australia, Jepang, dan AS sebagai dasar pembentukan FOIP.
Yukio Hatoyama (2009–2010)	Fokus pada hubungan Jepang-Tiongkok dan pembentukan *East Asian Community* sehingga keterlibatan dalam FOIP kurang menonjol.
Naoto Kan (2010–2011)	Meningkatkan kerja sama maritim dengan AS dan ASEAN, tetapi lebih berfokus pada respons terhadap krisis domestik (Gempa Tohoku 2011).
Yoshihiko Noda (2011–2012)	Memperkuat aliansi dengan AS dan mendorong kerja sama keamanan di Laut China Timur, tetapi inisiatif terkait FOIP belum eksplisit.
Shinzo Abe (2012–2020)	Mengartikulasikan dan mempromosikan secara penuh konsep FOIP sebagai strategi utama Jepang. Menekankan kebebasan navigasi, supremasi hukum, dan pembangunan ekonomi di Indo-Pasifik.
Yoshihide Suga (2020–2021)	Melanjutkan kebijakan FOIP Shinzo Abe, fokus pada penguatan aliansi AS-Jepang dan kerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk menghadapi pengaruh Tiongkok.
Fumio Kishida (2021–2023)	Meneruskan FOIP dengan penekanan pada keterlibatan multilateral, kerja sama ekonomi, dan penguatan pertahanan maritim. Mendorong stabilitas regional melalui diplomasi aktif.

Sumber: Koga (2021)

Sejak tahun 2006, Jepang telah mengambil peranan penting dalam membentuk dan mendiplomasikan FOIP. Melalui inisiasi PM Shinzo Abe, Jepang memperkenalkan konsep *Arc of Freedom and Prosperity*, yang menjadi landasan bagi FOIP, dengan fokus pada promosi demokrasi, supremasi hukum, dan kerja sama ekonomi di kawasan yang membentang dari Asia Timur hingga Afrika (Koga, 2021). Pada periode 2012–2020, PM Shinzo Abe memperkuat konsep FOIP dengan menginisiasi strategi yang lebih komprehensif. Jepang aktif memperkuat aliansi dengan AS dan negara-negara, seperti India

Buku ini tidak diperjualbelikan

dan Australia melalui *Quadrilateral Security Dialogue* (Quad), guna menghadapi tantangan keamanan yang meningkat dari Tiongkok, terutama di LCS dan Laut China Timur. Setelah Abe, PM Yoshihide Suga dan Fumio Kishida melanjutkan upaya ini. Suga fokus pada penguatan hubungan dengan ASEAN dan memperkuat kerja sama keamanan maritim. Kishida, yang menjabat sejak 2021, menekankan diplomasi multilateral dan pembangunan infrastruktur berkualitas tinggi di Indo-Pasifik melalui inisiatif seperti *Partnership for Quality Infrastructure.*

Secara keseluruhan, Jepang terus berkomitmen pada FOIP dengan tujuan menjaga stabilitas regional, mempromosikan tatanan berbasis aturan, dan menawarkan alternatif pembangunan bagi negara-negara berkembang di kawasan Indo-Pasifik, menghadapi pengaruh Tiongkok yang semakin besar. Pada tahun 2018, strategi FOIP berganti nama menjadi *FOIP Vision* (Koga, 2020). Dengan demikian, Jepang tidak lagi berbicara tentang strategi melainkan sebuah visi, yang mulanya BRI Tiongkok dianggap sebagai proyek yang harus dibendung kini menjadi hidup berdampingan dan saling melengkapi. Pada saat yang sama, promosi tentang demokrasi sebagai elemen normatif FOIP telah berkurang dan Jepang tidak lagi membendung Tiongkok (Radjendra et al., 2022). Masih di tahun 2018, Jepang memainkan peran penting dalam *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP), yaitu sebuah perjanjian perdagangan bebas antara Jepang dengan Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam. Adapun yang menjadi dasar bagi Jepang untuk bergabung dalam CPTPP, yakni untuk memperluas akses pasar, meningkatkan standar perdagangan internasional, dan menjadi pemimpin tatanan ekonomi berbasis aturan di Indo-Pasifik (Bobowski et al., 2021).

CPTPP merupakan reformulasi dari *Trans-Pacific Partnership* (TPP) setelah AS menarik diri pada 2017 (Salamatov & Galkina, 2019). CPTPP memiliki visi dalam mengurangi atau menghilangkan tarif dan hambatan perdagangan antaranggota; mendorong investasi dan memberikan proteksi serta jaminan hukum kepada investor;

Buku ini tidak diperjualbelikan

menetapkan standar perlindungan tenaga kerja; dan meningkatkan transparansi serta efisiensi regulasi perdagangan bebas. Perubahan konsep FOIP dari strategi menjadi visi seiring dengan fokus Jepang terhadap proyek infrastruktur, kebijakan perdagangan, serta kerja sama pembangunan menjadikan FOIP sebagai alternatif terhadap BRI Tiongkok. Pada akhirnya, seiring dengan pergantian PM Jepang, banyak aspek dari visi FOIP mengalami perubahan prinsip, misalnya kembalinya prinsip kebijakan luar negeri lama, seperti tatanan internasional berbasis aturan dan sentralitas kepentingan Jepang.

D. Australia dan Kerangka Acuan Indo-Pasifik

Australia memiliki peranan strategis dan signifikan terhadap Indo-Pasifik yang menjadi gravitasi geopolitik dan geoekonomi global. Bagi Australia, konsepsi Indo-Pasifik menjadi kerangka acuan regional untuk geostrateginya sejak 2013 (Khurana, 2019). Secara independen, Australia memiliki kekuatan menengah di satu sisi dan di sisi lain dalam hal dependensi Australia merupakan sekutu yang bergantung pada AS (Koga, 2020). Dalam geostrategi, Australia berada di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik, yang menjadikan Australia sebagai kawasan interaksi antarnegara Indo-Pasifik. Australia memainkan peranan penting dalam keamanan dan stabilitas di Indo-Pasifik. Angkatan bersenjata Australia (*Australia Dence Force*) secara simultan terlibat dalam latihan militer gabungan dengan negara-negara kuat lainnya, seperti AS, Jepang, dan India. Latihan militer *Talisman Sabre* (TS) merupakan latihan gabungan utama angkatan bersenjata Australia dan AS (Christie et al., 2023). Latihan ini merupakan latihan militer terbesar di Indo-Pasifik yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali di wilayah Australia.

Bagi Australia, kehadiran AS dan kerja sama bilateral yang dibangun merupakan penstabil kawasan Indo-Pasifik. Bahkan dalam pidato Menteri Pertahanan Australia Linda Reynolds pada Dialog Shangri-La 2019 di Singapore menyatakan bahwa Tiongkok harus lebih banyak berkontribusi dalam perdamaian dan stabilitas Indo-Pasifik sebagai bentuk tanggung jawab (Heiduk & Wacker, 2020).

Buku ini tidak diperjualbelikan

Australia sebagai negara yang terletak di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik memiliki diplomasi khusus terkait Indo-Pasifik. Tabel 2.4 berikut menganalisis kebijakan terkait Indo-Pasifik oleh Australia sejak 2007 hingga saat ini.

Tabel 2.4 Kebijakan Australia Terkait Indo-Pasifik

Perdana Menteri/Priode Jabatan	Kebijakan Terkait FOIP
Kevin Rudd (2007–2010)	Fokus pada diplomasi multilateral dan penguatan hubungan dengan negara-negara Asia, termasuk meningkatkan keterlibatan Australia dalam forum regional, seperti ASEAN dan *East Asia Summit*.
Julia Gillard (2010-2013)	Memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara dan mendukung kebijakan luar negeri berbasis kemitraan untuk mempromosikan stabilitas di kawasan.
Kevin Rudd (2013)	Mengalihkan perhatian dari kebijakan luar negeri yang lebih luas untuk fokus pada keamanan dan diplomasi strategis, termasuk melanjutkan keterlibatan dengan Asia dan Pasifik.
Tony Abbott (2013-2015)	Memperkenalkan kebijakan *"Australia's Asian Century"* dengan penekanan pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan hubungan bilateral dengan negara-negara Asia, serta fokus pada keamanan maritim.
Malcolm Turnbull (2016–2018)	Meningkatkan kerja sama dengan AS dan negara-negara Indo-Pasifik melalui kebijakan keamanan dan pertahanan yang lebih kuat, serta mendukung kebijakan FOIP untuk menahan pengaruh Tiongkok.
Scott Morrison (2019-2022)	Memperkuat aliansi dengan AS melalui AUKUS dan Quad, serta mengambil sikap tegas terhadap klaim teritorial Tiongkok di LCS. Memprioritaskan keamanan regional dan diversifikasi ekonomi.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Perdana Menteri/Priode Jabatan	Kebijakan Terkait FOIP
Anthony Albanese (2022–2023)	Melanjutkan kebijakan FOIP dan AUKUS, serta meningkatkan diplomasi dengan negara-negara Indo-Pasifik untuk menghadapi tantangan dari Tiongkok. Menekankan pentingnya kerja sama multilateral dan keamanan regional.

Sumber: Varghese (2019); Panda & Ghiasy (2024)

Berdasarkan geoekonomi, sebagai negara dengan ekonomi terbuka Australia bergantung pada perdagangan internasional dan merupakan anggota dari *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP) (Salamatov & Galkina, 2019). CPTPP bukan hanya berperan dalam membuka akses pasar yang luas bagi produk dan layanan jasa Australia, tapi juga menetapkan standar yang tinggi dalam perdagangan, investasi, dan hak pekerja. Adapun pertimbangan Australia untuk bergabung dalam CPTPP dikarenakan kesempatan dalam akses pasar yang lebih luas dan mengurangi ketergantungan Australia terhadap Tiongkok sebagai mitra dagang utama, dengan demikian Australia dapat mendiversifikasi ekspor dan investasi (Wilson, 2021).

Australia juga terlibat dalam inisiatif *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) bersama 14 negara Indo-Pasifik lainnya, seperti ASEAN, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan (Al-Qudah et al., 2022). RCEP merupakan perjanjian perdagangan terbesar di dunia dengan estimasi perputaran uang 30% dari PDB Dunia (Liu et al., 2022). Australia melalui keikutsertaannya dalam RCEP menunjukkan komitmen untuk mendukung integrasi ekonomi regional dan mempererat hubungan dagang di Indo-Pasifik. Australia bergabung dalam RCEP bertujuan untuk memperluas akses pasar, mendorong peningkatan kerja sama ekonomi dan mendiversifikasi mitra dagang. Dengan bergabungnya Australia dalam RCEP maka posisi Australia sebagai kekuatan menengah di dunia menjadi lebih kuat karena melawan dominasi Tiongkok dan mendukung kebijakan AS di kawasan (Davis, 2020). Dengan bergabung dalam RCEP, Australia

Buku ini tidak diperjualbelikan

menegaskan komitmennya terhadap stabilitas dan keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik, serta meningkatkan diplomasi ekonomi di tengah ketegangan global.

Dalam kebijakan luar negeri Australia, kebebasan navigasi pada perairan internasional dan melakukan perdagangan tanpa khawatir terhadap intervensi merupakan prinsip kunci (Wirth, 2019). Dalam konflik LCS, yang mana Tiongkok mengeklaim sebagian besar wilayah LCS sebagai teritorialnya membuat Australia bergerak mendukung supremasi hukum internasional dan mendesak penyelesaian sengketa melalui upaya damai. Menanggapi inisiasi BRI Tiongkok, pemerintah Australia menekankan pentingnya transparansi dan tata kelola yang bijaksana dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur untuk mencegah jebakan utang luar negeri negara-negara kawasan. Australia menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan perannya di Indo-Pasifik terkhusus dalam kerja sama multilateral melalui organisasi ASEAN dan APEC (He & Feng, 2020).

Kerja sama multilateral dalam infrastruktur antara Australia dengan AS dan Jepang menekankan kualitas standar emas global (Heiduk & Wacker, 2020). Berbeda dengan BRI Tiongkok yang penuh kritik akibat dari mendorong negara-negara di kawasan untuk terjebak dalam perangkap utang, proyek infrastruktur Australia, AS, dan Jepang di Indo-Pasifik menekankan transparansi, keberlanjutan dan keterlibatan sektor swasta dengan penghindaran utang (Vashisht, 2023). Dalam diplomasinya terhadap Indo-Pasifik, Australia bertujuan mempertahankan tatanan berbasis aturan yang memberikan perdamaian abadi bagi negara-negara kawasan dengan menghormati hak-hak negara kawasan dan mengedepankan perdamaian.

E. India: Kebijakan Bertindak ke Timur

Dalam menghadapi dinamika geopolitik dan geoekonomi di Indo-Pasifik, India mengembangkan beberapa kebijakan strategis dalam merespons tantangan dan peluang yang mungkin terjadi. PM Narasimha Rao pada tahun 1991 pertama kali memperkenalkan *Look East Policy* yang bertujuan mempererat hubungan ekonomi dan

Buku ini tidak diperjualbelikan

posisi strategis India dengan negara-negara Asia Timur dan Tenggara (Kelly, 2014). Kebijakan ini lahir dari kebutuhan India untuk mencari mitra ekonomi baru di tengah krisis ekonomi global dan mengurangi ketergantungan India pada negara barat. Selanjutnya pada tahun 2014 oleh PM Nerendra Modi, kebijakan *Look East* berevolusi menjadi *Act East Policy* yang menekankan fokus pada aspek keamanan dan konektivitas (Khatik & Bhandari, 2021). Kebijakan bertindak ke Timur (*Act East Policy*) merupakan inisiatif kebijakan luar negeri India dengan visi mempererat hubungan ekonomi, strategis, dan budaya dengan negara-negara kawasan Indo-Pasifik. Adapun fokus dari kebijakan bertindak ke Timur menyasar pada negara-negara ASEAN dan Asia Timur. Fondasi tradisional kebijakan luar negeri India berperan penting dalam penafsiran konsep Indo-Pasifik (Kesavan et al., 2020).

Tidak hanya berhenti pada *Act East Policy*, pada tahun 2015 PM Nerendra Modi juga melahirkan kebijakan *Security and Growth for All in the Region* (SAGAR) dengan komitmen terhadap keamanan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Samudra Hindia dan Indo-Pasifik yang lebih luas. SAGAR turut mendorong India lebih proaktif dalam kerja sama keamanan maritim dengan negara-negara kawasan. Evolusi kebijakan India dari *Look East* ke *Act East* hingga SAGAR merupakan respons terhadap dinamika regional dan pengaruh Tiongkok yang dominan di Indo-Pasifik. India memandang Tiongkok sebagai kekuatan pendorong sesungguhnya dalam konsepsi Indo-Pasifik melalui tiga alasan, yakni India memandang kebijakan Tiongkok sebagai pengepungan strategis; India prihatin terhadap kebebasan navigasi di LCS; dan India khawatir dengan kehadiran militer Tiongkok di Samudra Hindia (Heiduk & Wacker, 2020).

Geoekonomi merupakan salah satu dimensi utama pengaruh India di Indo-Pasifik. India berusaha meningkatkan investasi dan kegiatan perdagangan dengan negara-negara kawasan melalui Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Agreement* - FTA). Melalui FTA India berusaha memperkuat posisinya dalam rantai nilai global dan regional serta menempatkan daya saing ekonominya di posisi strategis (Kumarasamy, 2023). Dalam hal pertahanan, India

Buku ini tidak diperjualbelikan

juga merapatkan barisan dengan AS, Australia, dan Jepang dalam keamanan dan militer. Latihan militer Malabar merupakan latihan militer angkatan laut tahunan yang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan koordinasi dan inter-operabilitas dalam rangka menjaga keamanan perairan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik (Hanif & Sharif, 2021). India di bawah pemerintahan PM Narendra Modi dalam keterlibatannya di *circle* internasional mengambil langkah yang lebih tegas terhadap kebijakan ekspansif Tiongkok di Indo-Pasifik. Berbeda dengan kepemimpinan Manmohan Singh yang hanya menjaga keseimbangan kerja sama dan kompetisi dengan Tiongkok. Tabel 2.5 berikut menganalisis perbedaan kebijakan PM Manmohan Singh dan PM Narendra Modi dalam kebijakan terkait Indo-Pasifik.

Tabel 2.5 Kebijakan PM Manmohan Singh dan PM Narendra Modi Terkait Indo-Pasifik

Kebijakan	Manmohan Singh (2004–2014)	Narendra Modi (2014–2023)
Visi Strategis	Memperkuat hubungan ekonomi dan keamanan dengan Asia Timur dan Asia Tenggara melalui kebijakan *Look East Policy* (LEP).	Perluasan dari LEP menjadi *Act East Policy* (AEP), dengan fokus pada tindakan konkret dan kerja sama yang lebih aktif di kawasan Indo-Pasifik.
Pendekatan Diplomatik	Diplomasi ekonomi dan politik untuk mengintegrasikan India dengan ekonomi Asia Timur. Menjaga hubungan baik dengan ASEAN sebagai mitra strategis.	Pendekatan diplomatik yang lebih proaktif dan inklusif melalui *Security and Growth for All in the Region* (SAGAR). Menguatkan hubungan dengan negara-negara kunci, seperti Jepang, Australia, dan AS melalui Quad.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Kebijakan	Manmohan Singh (2004–2014)	Narendra Modi (2014–2023)
Kerja sama Keamanan	Fokus pada kerja sama keamanan maritim secara terbatas di Samudra Hindia dan Asia Tenggara. Penekanan pada *Malabar Exercises* dengan AS.	Memperluas kerja sama keamanan maritim di seluruh Indo-Pasifik. Meningkatkan partisipasi India dalam Quad dan memperkuat kerja sama pertahanan dengan negara-negara anggota Quad.
Kebijakan Maritim	Fokus pada penguatan kapabilitas maritim di Samudra Hindia. Penekanan pada perlindungan jalur perdagangan maritim.	Mengembangkan kebijakan maritim yang lebih luas dengan SAGAR, yang menekankan pada keamanan, kerja sama, dan pembangunan ekonomi di Indo-Pasifik.
Pandangan terhadap Tiongkok	Berusaha menyeimbangkan hubungan dengan Tiongkok sambil meningkatkan kehadiran India di Asia Timur. Menjaga keseimbangan antara kerja sama dan kompetisi dengan Tiongkok.	Sikap yang lebih tegas terhadap kebijakan ekspansif Tiongkok di Indo-Pasifik. Meningkatkan kemitraan strategis dengan negara-negara yang memiliki pandangan serupa untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok.

Sumber: Kumar et al. (2020); Gupta (2020)

Keterlibatan India di tengah dinamika Indo-Pasifik tentu tidak serta merta menggeser tatanan dan pengaruh besar Tiongkok dengan mudah, India juga menghadapi tantangan internal, seperti pembangunan infrastruktur dan birokrasi negara yang mana masih dianggap lebih utama untuk ditanggapi sebelum terlibat dalam aspek Indo-Pasifik yang lebih luas. Untuk mengatasi hambatan ini, India perlu melakukan reformasi ekonomi dan birokrasi yang signifikan demi menciptakan lingkungan bisnis yang menjanjikan. Meskipun demikian, keunggulan India dalam hal demografi dianggap sesuatu yang menguntungkan sebagai sumber daya manusia produktif dan

Buku ini tidak diperjualbelikan

dapat berpengaruh secara nyata dalam memperkuat ketahanan Indo-Pasifik. Kemajuan teknologi dan inovasi di India yang telah mengubah kekuatan dunia dari barat ke timur juga merupakan aspek pendukung daya saing ekonomi kawasan Indo-Pasifik.

F. Sudut Pandang Negara-Negara ASEAN terhadap Indo-Pasifik

Dalam revolusi pergeseran terminologi "Asia Pasifik" menjadi "Indo-Pasifik", dialog tentang kebangkitan kekuatan ekonomi membawa signifikansi konseptual dan substansial di kalangan negara-negara kawasan. Samudra Hindia dan Pasifik yang tidak dapat dipisahkan sebagai jalur utama transportasi dan perdagangan internasional semakin menarik dalam diskusi-diskusi internasional. Kemunculan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Samudra Hindia yang dibersamai dengan ancaman keamanan regional memaksa negara-negara kawasan Asia Timur memberikan perhatian yang lebih aktif (Anwar, 2023). Persaingan antara AS dan Tiongkok dalam perang dagang dan kekuatan militer turut memengaruhi kekhawatiran negara-negara ASEAN (Khurana, 2019). Kebijakan luar negeri Tiongkok yang ekspansif dan visioner terhadap inisiatif BRI dianggap sebagai ancaman oleh negara-negara rival. Kebangkitan Quad pada 2017 setelah bertahun-tahun lamanya non-aktif secara tegas berupaya memastikan Indo-Pasifik berada dalam situasi bebas dan terbuka berdasarkan supremasi hukum.

Negara-negara ASEAN yang terdiri atas Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste dalam rangka mempertahankan otonomi regional di Asia Tenggara memilih bekerja sama dengan AS dan Tiongkok dengan mempertimbangkan keuntungan yang ditawarkan oleh dua negara adikuasa tanpa memilih keberpihakan secara khusus. ASEAN telah sejak lama mengambil peran proaktif dalam arsitektur regional yang lebih inklusif di kawasan Indo-Pasifik (Anwar, 2023).

Buku ini tidak diperjualbelikan

Negara-negara ASEAN sepakat untuk berpartisipasi dalam langkah-langkah yang membangun kepercayaan, diplomasi preventif dan keamanan kooperatif dalam upaya membangun hubungan yang saling menguntungkan (Purwanto, 2024). Meskipun negara-negara ASEAN bukan merupakan aktor sentral dalam Indo-Pasifik, seperti Tiongkok, AS, Jepang, India, dan Australia, tetapi negara-negara ASEAN memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap Indo-Pasifik. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara berusaha menjaga hubungan baik dengan AS dan Tiongkok tanpa menunjukkan keberpihakan secara khusus, berbeda dengan Singapura yang merupakan mitra strategis AS dalam kegiatan ekonomi. Perbedaan pandangan negara-negara ASEAN tersebut dianalisis dalam Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Sudut Pandang Negara-Negara ASEAN terhadap Indo-Pasifik

Negara	Sudut Pandang terhadap Indo-Pasifik	Kebijakan Terkait	Hubungan dengan AS dan Tiongkok
Indonesia	Pendukung kuat konsep ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) yang menekankan inklusivitas dan kerja sama.	AOIP *Global Maritime Fulcrum* (GMF)	Hubungan baik dengan semua negara utama, termasuk Tiongkok, AS, dan India.
Malaysia	Mendukung pendekatan inklusif, menolak blok militer eksklusif di kawasan Indo-Pasifik.	AOIP *Non-Alignment Policy*	Menjaga keseimbangan antara Tiongkok dan AS, berhati-hati dalam keterlibatan dengan Quad.
Singapura	Mendorong keterlibatan multilateral dan menekankan pentingnya kebebasan navigasi serta perdagangan bebas.	AOIP *Rules-Based Order*	Mitra strategis AS, bekerja sama erat dengan Tiongkok, dan mendukung Quad sebagai forum dialog.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Negara	Sudut Pandang terhadap Indo-Pasifik	Kebijakan Terkait	Hubungan dengan AS dan Tiongkok
Vietnam	Kuat dalam menolak ekspansionisme Tiongkok di LCS, mendukung kehadiran AS di kawasan.	AOIP *National Defense Policy*	Hubungan erat dengan AS dan India, serta skeptis terhadap Tiongkok.
Thailand	Memprioritaskan keseimbangan antara kekuatan besar, mendukung keterlibatan ASEAN di Indo-Pasifik.	AOIP *Balanced Diplomacy*	Hubungan baik dengan Tiongkok dan AS, tetapi lebih condong ke arah non-konfrontasi.
Filipina	Awalnya mendukung kehadiran AS untuk melawan Tiongkok di LCS, tetapi belakangan mengambil pendekatan yang lebih moderat.	AOIP *Mutual Defense Treaty dengan AS*	Hubungan yang fluktuatif dengan Tiongkok, menjaga kemitraan pertahanan dengan AS.
Myanmar	Kurang terlibat secara aktif di Indo-Pasifik, lebih fokus pada isu domestik dan hubungan bilateral dengan negara-negara besar.	AOIP (dalam lingkup terbatas)	Hubungan erat dengan Tiongkok, tetapi juga membuka hubungan dengan India dan AS.
Laos	Fokus pada pembangunan ekonomi domestik, mendukung keterlibatan ASEAN dalam Indo-Pasifik, tetapi dengan profil rendah.	AOIP (dukungan normatif)	Hubungan sangat erat dengan Tiongkok, tergantung pada bantuan ekonomi dan investasi.
Kamboja	Sikap yang lebih pro-Tiongkok, cenderung mendukung kebijakan Tiongkok di Indo-Pasifik dan sering mengambil sikap yang sejalan dengan Beijing.	AOIP (dukungan terbatas)	Hubungan sangat erat dengan Tiongkok, terutama dalam hal ekonomi dan infrastruktur.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Negara	Sudut Pandang terhadap Indo-Pasifik	Kebijakan Terkait	Hubungan dengan AS dan Tiongkok
Brunei Darus-salam	Mempromosikan stabilitas regional dan kebebasan navigasi, dengan pendekatan netral dan tidak kon-frontatif.	AOIP *Peaceful Reso-lution Policy*	Hubungan baik dengan Tiongkok, AS, dan negara-ne-gara ASEAN, men-jaga sikap netral.

Sumber: Oktaviano et al. (2020); Anwar (2023); Heiduk (2020)

Indonesia sebagai negara dengan luas wilayah terbesar dan jumlah penduduk terbanyak di ASEAN mengambil peran sentral dalam mendorong ASEAN berperan aktif dalam wacana konsep strategis Indo-Pasifik (Anwar, 2023). Asia Tenggara yang terletak di titik tengah dalam geostrategi Samudra Hindia dan Pasifik harus mempertahankan sentralitasnya dalam pembangunan Indo-Pasifik yang terus dikembangkan. Indonesia memandang bahwa sentralitas ASEAN merupakan fokus penting dalam memastikan pembangunan arsitektur regional Indo-Pasifik yang terbuka, transparan, dan inklusif (Siahaan & Risman, 2020). Presiden Indonesia Joko Widodo dalam pertemuan *East Asia Summit* 2014 di Myanmar pertama kali mengemukakan konsep PMD. Indonesia sebagai PMD menggambarkan visi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekuatan maritim yang potensial dalam pembangunan ekonomi yang merata (Rachman, 2022).

Dalam dinamika yang terjadi di Indo-Pasifik, meskipun ASEAN bukan aktor sentral yang secara khusus memiliki kebijakan yang berfokus pada pertumbuhan Indo-Pasifik, tetapi ASEAN merupakan faktor penentu bagi negara-negara kecil di kawasan Indo-Pasifik untuk mendukung pembangunan kawasan (Anwar, 2023). Faktor penentu bagi negara-negara ASEAN untuk mendukung inisiatif dan strategi aktor-aktor sentral dalam pembangunan Indo-Pasifik adalah apakah ASEAN dapat mempertahankan dan menjalankan sentralitasnya dalam dinamika global (Siahaan & Risman, 2020). Sentralitas ASEAN dalam hubungan internasional merupakan tujuan yang termuat dalam

Buku ini tidak diperjualbelikan

Pasal 1 Piagam ASEAN, yakni: "*Mempertahankan sentralitas dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan penggerak utama dalam hubungan dan kerja samanya dengan para mitra eksternal dalam arsitektur kawasan yang terbuka, transparan, dan inklusif.*" ASEAN harus terus berupaya mempertahankan sentralitasnya dengan harapan Indo-Pasifik menjadi kawasan terintegrasi dan saling terhubung dengan ASEAN. Meskipun ASEAN harus mempertahankan sentralitasnya, tetapi ASEAN memiliki berbagai upaya dan gagasan mendukung kemajuan Indo-Pasifik (Siahaan & Risman, 2020). Tabel 2.7 berikut mendeskripsikan gagasan ASEAN dalam mendukung kemajuan Indo-Pasifik.

Tabel 2.7 Gagasan ASEAN Mendukung Kemajuan Indo-Pasifik

Gagasan	Tujuan	Mitra
ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)	Meningkatkan stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik melalui kerja sama multilateral	ASEAN, AS, Tiongkok, Jepang, India
ASEAN Free Trade Area (AFTA)	Meningkatkan perdagangan intra-ASEAN dan daya saing ekonomi kawasan	Negara-negara anggota ASEAN
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)	Menciptakan pasar terbesar di dunia, meningkatkan perdagangan dan investasi di kawasan Indo-Pasifik	ASEAN, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru
ASEAN Regional Forum (ARF)	Meningkatkan stabilitas dan keamanan di kawasan melalui dialog dan kerja sama	ASEAN, AS, Tiongkok, Jepang, India
ASEAN Maritime Forum (AMF)	Menangani ancaman keamanan maritim dan meningkatkan kerja sama di sektor maritim	Negara-negara anggota ASEAN

Buku ini tidak diperjualbelikan

Gagasan	Tujuan	Mitra
ASEAN Economic Community (AEC)	Meningkatkan integrasi ekonomi dan memperkuat posisi ASEAN dalam ekonomi global	Negara-negara anggota ASEAN

Sumber: Wilkins (2020)

Negara-negara ASEAN turut berpartisipasi dalam mengembangkan berbagai program dan inisiatif dalam pertumbuhan kawasan Indo-Pasifik. *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) merupakan kebijakan yang diadopsi ASEAN pada KTT ASEAN 2019. AOIP mencerminkan visi ASEAN untuk Indo-Pasifik dengan empat area fokus, meliputi meningkatkan kerja sama maritim untuk keamanan wilayah perairan, pengelolaan SDA di kawasan perairan dan pengembangan infrastruktur perairan; meningkatkan konektivitas untuk mendukung perdagangan, investasi, dan mobilitas manusia; memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dengan berfokus pada pengurangan kesenjangan; memajukan integrasi ekonomi regional melalui perdagangan bebas, inovasi, dan investasi. Selain AOIP, beberapa program utama dari ASEAN yang turut mendukung kemajuan Indo-Pasifik, antara lain AFTA, RCEP, kerja sama dalam bidang maritim, seperti AMF dan kerja sama dalam menjaga stabilitas kawasan, seperti ARF.

G. Independensi Tiongkok dan Pemicu Konflik di Indo-Pasifik

Indo-Pasifik sebagai kawasan potensial perekonomian dan perdagangan memiliki kepentingan strategis sebagai pusat perhatian global. Kepentingan strategis Indo-Pasifik tidak hanya terbatas pada negara-negara yang berbatasan langsung, tetapi juga melibatkan kekuatan besar, seperti AS, Tiongkok, Jepang, India, dan Australia. Dalam sudut pandang Tiongkok, negara-negara dengan kekuatan besar yang terlibat dalam dinamika Indo-Pasifik merupakan hal umum dalam dinamika yang terjadi (Shicun & Colombage, 2019).

Buku ini tidak diperjualbelikan

Dalam dinamikanya, kolaborasi dan rivalitas muncul sebagai reaksi dalam interaksi di kawasan Indo-Pasifik (He & Li, 2020). Kolaborasi di Indo-Pasifik terwujud melalui berbagai inisiatif kerja sama multilateral dengan tujuan meningkatkan stabilitas, keamanan, dan kemakmuran (Wilkins, 2020). Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan besar mengadopsi kebijakan luar negeri yang otonom. Hal ini tercermin dalam penolakan Tiongkok terhadap keterikatan pada aliansi militer formal dan pendekatan yang fleksibel dalam diplomasi. Prinsip *non-alignment* yang dipegang teguh Tiongkok memungkinkan Tiongkok bermanuver di antara kekuatan besar dunia lainnya tanpa keterikatan pada satu blok tertentu (Afzal et al., 2023). Keterlibatan Tiongkok dalam berbagai organisasi multilateral, seperti ASEAN, *Shanghai Cooperation Organization (SCO)*, dan BRICS, yang mana Tiongkok memainkan peran signifikan dapat tetap terjadi tanpa kehilangan otonominya. Independensi Tiongkok merupakan prinsip utama dalam menjaga posisi Tiongkok menjadi negara yang 'dibutuhkan' dalam setiap kerja sama (Zou et al., 2020).

Negara-negara dengan kekuatan besar yang biasa disebut sebagai aktor sentral selain Tiongkok di Indo-Pasifik berkolaborasi dalam kerja sama keamanan wilayah, infrastruktur, dan kemanusiaan (Kroenig, 2020). Quad merupakan kekuatan penyeimbang Tiongkok yang mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum (Atif & Akbar, 2021). Dalam dinamika Indo-Pasifik, strategi independensi Tiongkok merupakan langkah guna menghindari intervensi pihak ketiga, yakni AS. Prinsip ini memungkinkan Tiongkok mempertahankan kontrol dalam kegiatan diplomatik dan menjaga kepentingan nasionalnya tanpa tekanan eksternal. Kekuatan militer Tiongkok melalui modernisasi militer yang ekstensif merupakan pilar utama kekuatan Tiongkok (Fravel, 2020). Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat *(PLA Navy*) merupakan kekuatan militer paling besar dan paling canggih di dunia. Keberadaan militer Tiongkok di LCS merupakan salah satu manifestasi nyata dari kekuatan Tiongkok (Teixeira, 2021). Meskipun *nine dash line* yang diklaim oleh Tiongkok hingga hari ini menjadi sengketa internasional, tetapi Tiongkok tetap mempertahankan klaimnya melalui kekuatan militer.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Selain kekuatan militer, kekuatan ekonomi Tiongkok merupakan faktor kunci dalam independensi Tiongkok (Fravel, 2020). Melalui inisiatif BRI, Tiongkok berhasil membangun jaringan perdagangan dan infrastruktur yang menghubungkan Asia, Afrika, Eropa, termasuk kawasan Indo-Pasifik. Independensi dan strategi Tiongkok melalui berbagai inisiasi turut menggetarkan AS dan negara dengan kekuatan menengah lainnya dalam dinamika Indo-Pasifik. Adapun faktor utama yang memicu kemunculan rivalitas di kawasan Indo-Pasifik antara AS dengan Tiongkok, yakni persaingan dalam geopolitik dan geoekonomi kedua negara (Charoensri, 2022). AS dan Tiongkok sebagai dua negara adikuasa saling berusaha untuk memperluas pengaruhnya di kawasan. Tiongkok melalui inisiatif BRI berhasil mendorong investasi dan kemajuan infrastruktur di kawasan Indo-Pasifik, mulai dari pelabuhan di Asia Tenggara hingga jalur kereta api di Afrika Timur. Sementara AS melalui strategi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka berupaya membendung pengaruh Tiongkok dengan memperkuat aliansi dan kemitraan dengan negara-negara kawasan maupun negara-negara dengan potensi pertumbuhan yang besar.

Isu rivalitas AS dengan Tiongkok merupakan isu umum yang diketahui oleh setiap negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Reaksi yang muncul terhadap isu rivalitas ini pun beragam, ada negara yang memilih untuk menjadi sekutu salah satu negara, tetapi lebih banyak negara-negara kawasan yang memilih kebijakan luar negeri netral dan tidak memihak hanya pada salah satu negara (Purwanto, 2024). Ketegangan LCS juga turut menjadi pemantik rivalitas AS dengan Tiongkok. Selain kedua negara yang saling berupaya memperluas pengaruhnya dalam hal inovasi dan kebijakan, penyebab lain rivalitas AS dan Tiongkok juga ditengarai oleh kemajuan inovasi dalam teknologi. Rivalitas AS dan Tiongkok dalam bidang teknologi disebabkan oleh pengembangan teknologi 5G, kecerdasan buatan, dan semikonduktor (Kroenig, 2020). Sanksi dan pembatasan oleh AS terhadap perusahaan pengembang teknologi Tiongkok, seperti Huawei dan Tiktok memicu kekhawatiran terhadap dominasi teknologi di kawasan. Melalui inisiatif "Made in China 2025" Tiongkok berupaya

Buku ini tidak diperjualbelikan

membalas sikap AS dan mengurangi ketergantungan pada Barat (Rashidin & Javed, 2020).

Meskipun konflik rivalitas AS-Tiongkok menjadi isu umum bagi negara-negara kawasan Indo-Pasifik, tetapi dalam dinamikanya muncul juga upaya untuk menjembatani konflik dan menemukan jalan tengah bagi kedua negara. Dalam upaya menemukan jalan tengah bagi kedua negara maka diskusi-diskusi yang diwadahi oleh PBB menjadi penampung aspirasi kedua negara dalam rangka keamanan dunia. Grup Dua Puluh (G20) yang terdiri dari 19 negara maju dan berkembang serta Uni Eropa memainkan peran penting dalam dinamika global dan keterkaitannya dengan rivalitas AS dan Tiongkok. G20 merupakan momentum sekaligus forum utama bagi dua kekuatan besar untuk berinteraksi, bernegosiasi, dan berkolaborasi dalam isu-isu global. Selain melalui upaya mempertemukan kedua belah negara dalam satu forum internasional, upaya mendamaikan dua negara juga didukung oleh negara-negara kawasan, misalnya Indonesia, Singapura, dan Vietnam tetap berupaya meningkatkan kerja sama dan investasi dengan Tiongkok sambil tetap mempertahankan hubungan strategis dengan AS. Pendekatan ini memungkinkan negara-negara kawasan untuk memperoleh manfaat dari kedua negara adikuasa tanpa memiliki ketergantungan tunggal hanya pada satu kekuatan besar.

H. Penutup

Meskipun dalam dinamika Indo-Pasifik Tiongkok berdiri secara independen dengan kekuatan besarnya tanpa bergantung pada kekuatan lain, tetapi Tiongkok terus berupaya mempertahankan pengaruhnya di tengah kolaborasi AS dengan aktor-aktor pendukung. AS memainkan peran strategis dalam rivalitas AS-Tiongkok di Indo-Pasifik melalui FOIP yang menekankan kekuatan aliansi dengan negara-negara berkekuatan menengah, seperti Jepang, India, dan Australia. Melalui kehadiran militernya di LCS, AS bertujuan menyeimbangkan kekuatan dan pengaruh dominan Tiongkok di Indo-Pasifik. Selain meluncurkan aksi melalui kekuatan militer, AS

Buku ini tidak diperjualbelikan

juga melakukan pertahanan dan perlawanan dalam perang dagang dengan asas kebebasan navigasi bagi negara-negara kawasan tanpa intervensi Tiongkok.

Jepang sebagai aktor pendukung AS berperan sebagai sekutu kunci bagi AS dalam rivalitasnya dengan Tiongkok. Jepang berupaya memperkuat aliansi militer dengan AS melalui kerja sama dan partisipasi dalam latihan militer Quad bersama dengan India dan Australia. Jepang juga berperan menawarkan bantuan pembangunan infrastruktur dan investasi bagi negara-negara kawasan Indo-Pasifik sebagai alternatif BRI yang diinisiasi Tiongkok. Jepang sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia terlibat sebagai pendukung AS melalui kerja sama militer dan ekonomi dalam kapasitas memperkuat pertahanan.

Berbeda dengan Jepang, India melalui *Act East Policy* dan SAGAR berfokus pada penguatan kerja sama maritim, infrastruktur, dan diplomasi *soft power* di kawasan. Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, India mendukung rivalitas kedua negara dikarenakan persaingan yang kompleks dengan Tiongkok. Perbatasan Himalaya antara India dengan Tiongkok yang sering kali terjadi ketegangan militer kedua negara, diperburuk dengan persaingan inovasi teknologi turut menjadi penyebab India menjadi sekutu AS.

Sementara Australia dalam posisi dilematik antara ketergantungan perdagangan dengan Tiongkok dan kebutuhan menjaga aliansi strategis dengan AS berperan mengikuti arus dalam keterikatannya dengan Quad. Australia di satu sisi masih menjaga hubungan Tiongkok dalam perdagangan, tetapi di sisi lain berupaya menyeimbangkan kekuatan bersama dengan AS di Indo-Pasifik. Bersama dengan AS, Australia memegang teguh konsistensi dalam mempertahankan tatanan internasional berlandaskan keadilan dan keamanan regional tanpa intervensi dari Tiongkok. Melalui diplomasi multilateral bersama negara-negara kawasan, Australia memastikan stabilitas Indo-Pasifik terjaga di tengah menguatnya ketegangan AS-Tiongkok.

Rivalitas AS dan Tiongkok menjadi dinamika paling dominan dalam kajian hubungan internasional di era modern. Kedua kekuatan

Buku ini tidak diperjualbelikan

besar dunia saling bersaing dalam geostrategi dan geopolitik. Rivalitas dua kekuatan besar dunia ini bukan hanya berpengaruh terhadap gejolak ekonomi maupun politik kedua negara secara langsung, tetapi juga berdampak pada tatanan global khususnya kawasan Indo-Pasifik melalui efek *multiplier* di berbagai aspek. Dalam aspek ekonomi, rivalitas AS dan Tiongkok menumbuhkan investasi dan diversifikasi pasar internasional, meskipun efek *multiplier* yang muncul adalah ketidakstabilan perdagangan internasional dan dependensi pembiayaan pembangunan terhadap investor bagi negara-negara kawasan. Dalam aspek politik, negara-negara kawasan memperoleh dorongan kerja sama regional yang lebih luas, tetapi memunculkan efek *multiplier* dalam intervensi eksternal. Sementara itu, dalam aspek keamanan dan militer, rivalitas kedua negara memperkuat kapabilitas kekuatan pertahanan melalui latihan bersama beberapa negara, tetapi juga meningkatkan risiko konflik.

Rivalitas melalui perang dagang antara AS dan Tiongkok yang dimulai sejak 2018 turut membawa pengaruh signifikan terhadap ketidakpastian ekonomi negara-negara kawasan. Kebijakan AS yang menetapkan tarif tinggi terhadap barang-barang impor Tiongkok dibalas dengan kebijakan serupa oleh Tiongkok terhadap AS. Akibatnya, ketidakseimbangan mengguncang rantai pasok global, meningkatnya biaya produksi di tiap-tiap negara dan ketidakpastian pasar. Perusahaan multinasional di negara-negara kawasan Indo-Pasifik turut menjadi korban atas perang dagang yang mengakibatkan perusahaan harus mencari alternatif bahan baku produksi. Dampak agregat dari rivalitas dan perang dagang AS-Tiongkok terhadap negara-negara kawasan menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara-negara kawasan melambat dan menurunnya produktivitas.

Rivalitas AS dan Tiongkok bukan hanya terjadi dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang politik khususnya dalam persaingan kekuatan militer. AS dalam rangka menjadi penyeimbang kekuatan militer Tiongkok yang mendominasi di kawasan Indo-Pasifik terus mengalokasikan pendanaan yang besar untuk mempertahankan kekuatan militernya, sedangkan Tiongkok

Buku ini tidak diperjualbelikan

semakin memperkuat kekuatan militer melalui modernisasi militer dengan melibatkan kecanggihan teknologi sebagai kekuatan utama. Klaim LCS oleh Tiongkok dan penolakan AS bersama negara-negara kawasan berperairan sama turut menambah dinamika ketegangan di Indo-Pasifik. Inisiasi Tiongkok melalui BRI sebagai upaya meningkatkan pengaruh ekonomi di Indo-Pasifik melalui investasi dan pembangunan infrastruktur merupakan upaya strategis untuk mengikat negara-negara kawasan dalam kerja sama pembangunan meskipun tanpa strategi menggabungkan kekuatan bersama sekutu, seperti AS. Meskipun banyak negara terlibat dalam kesepakatan inisiasi BRI Tiongkok, tetapi AS tidak menghentikan upayanya untuk tetap berpengaruh di Indo-Pasifik. Dalam merespons keterlibatan negara-negara kawasan terhadap BRI Tiongkok, AS menyeimbangkan strategi melalui gagasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dengan berfokus pada transparansi, supremasi hukum, dan pembangunan berkelanjutan.

Jika negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia memilih keberpihakan secara spesifik terhadap rivalitas AS dan Tiongkok, berbeda halnya dengan negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN, meskipun beberapa di antaranya terlibat secara langsung dengan Tiongkok melalui konflik LCS, tetapi negara-negara ASEAN tidak menyatakan keberpihakan secara khusus terhadap AS dalam ketegangan dengan Tiongkok. Negara-negara ASEAN memilih jalur tengah untuk tetap bekerja sama tanpa dominasi khusus terhadap salah satu negara dan memilih untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan kedua negara dalam pertumbuhan ekonomi masing-masing negara ASEAN. Sejauh ini negara-negara ASEAN secara umum masih sangat bergantung terhadap perdagangan dan investasi dari Tiongkok. Hal ini menciptakan situasi bahwa negara-negara ASEAN harus menavigasi dan mempertimbangkan keuntungan ekonomi dari hubungan dengan Tiongkok dan tetap menjaga baik hubungan dengan AS.

Secara keseluruhan, rivalitas AS dengan Tiongkok melibatkan aktor-aktor yang memiliki kepentingannya masing-masing dalam

Buku ini tidak diperjualbelikan

dinamika Indo-Pasifik. Keterlibatan dalam kolaborasi negara-negara sekutu AS dan independensi Tiongkok mempertahankan pengaruhnya di Indo-Pasifik menambah dinamika yang terjadi terhadap negara-negara kawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. AS dan Tiongkok sebagai dua kekuatan besar dunia melalui dinamika rivalitas yang terjadi hingga saat ini akan menentukan arah dan struktur kebijakan internasional negara-negara kawasan di masa depan.

Referensi

Afzal, M., Riedel, B., & Sachs, N. (2023). The United States, China and the new "nonaligned" countries. *Brookings Institution Policy Brief*, 1–7.

Agastia, I. G. B. D., & Perwita, A. A. B. (2016). Indonesia's maritime axis and the security of sea lanes of communications (SLOCs) in the Indo-Pacific. *Jurnal hubungan Internasional*, *5*(1), 10–21. doi:10.18196/hi.2016.0081.10-21

Al-Qudah, A. A., Al-Okaily, M., & Alqudah, H. (2022). The relationship between social entrepreneurship and sustainable development from economic growth perspective: 15 'RCEP' countries. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, *12*(1), 44–61. doi:10.1080/20430795.2021.1880219

AMTI. (2022). Maritime claims of the Indo-Pacific. Retrieved from https://amti.csis.org/maritime-claims-map/

Anwar, D. F. (2023). Indonesia's hedging plus policy in the face of China's rise and the US-China rivalry in the Indo-Pacific region. *The Pacific Review*, *36*(2), 351–377. doi:10.1080/09512748.2022.2160794

Atif, M., & Akbar, M. (2021). The belt and road initiative (BRI) vs. quadrilateral security dialogue (the Quad): A Perspective of a Game Theory. *Journal of Development and Social Sciences*, *2*(4), 63–75. doi:http://doi.org/10.47205/jdss.2021(2-IV)06

Bobowski, S., Cvecic, I., & Dobrzanski, P. (2021). *The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)–Genesis and Challenges of The Trans-Pacific Mega-Regionalism in Trade.* Paper presented at the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Cordoba, Spain.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Charoensri, N. (2022). Changing regional dynamics in the greater mekong subregion: The rivalry between Japan, China and the US and the impacts to regional connectivity. *Thammasat Review*, *25*(2), 26–45.

Christie, E. H., Buts, C., & Du Bois, C. (2023). Demand for military expenditures and security alignment choices in the Indo-Pacific. *Defence and Peace Economics*, *34*(5), 581–602. doi:10.1080/10242694.2022.2073430

Dupont, P. (2021). The United States' Indo–Pacific strategy and a revisionist China: Partnering with Small and Middle Powers in the Pacific Islands Region. *Issues & Insights*, *21*(2), 1–40.

Ford, L. (2020). *The Trump administration and the 'free and open Indo-Pacific'*. Retrieved from Washington DC, USA: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/05/fp_20200505_free_open_indo_pacific.pdf

Fravel, M. T. (2020). China's "world-class military" ambitions: Origins and implications. *The Washington Quarterly*, *43*(1), 85–99. doi:10.1080/0163660X.2020.1735850

Gale, J. B., & Shearer, A. (2022). Quadrilateral security dialogue and the maritime silk road initiative. *CSIS Brief*, 1–4.

Grissler, J. R., & Vargö, L. (2021). The BRI vs FOIP: Japan's countering of China's global ambitions. *Institute for Security and Development Policy (ISDP) Issue Brief*, 1–10.

Gul, S., Umar, S., & Alam, A. (2022). South China Sea: The dispute creates capital. *Global Strategic & Security Studies Review*, *7*(4), 24–31. doi:10.31703/gsssr.2022(VII-IV).04

Gupta, U. (2020). Commitment of India toward the Indo-Pacific region borders. *International Journal for Advance Research in Science and Technology*, *8*(4), 219–226.

Handiriono, R., Hardjowikarto, D., & Maharani, A. (2024). The Nine-Dash Line and Maritime Territorialization: Over the Sovereignty Claims of the Philippines, Indonesia, in the South China Sea under UNCLOS. *Journal of Financial Technology and Business Innovation*, *1*(1), 33–40.

Hanif, S., & Sharif, R. (2021). US-India strategic convergences in the Indo Pacific: Evolving regional dynamics and responses. *Pakistan Journal of American Studies*, *39*(2), 25–53.

Buku ini tidak diperjualbelikan

He, K., & Feng, H. (2020). The institutionalization of the Indo-Pacific: Problems and prospects. *International Affairs*, *96*(1), 149–168. doi:10.1093/ia/iiz194

He, K., & Li, M. (2020). Understanding the dynamics of the Indo-Pacific: US–China strategic competition, regional actors, and beyond. *International Affairs*, *96*(1), 1–7. doi:10.1093/ia/iiz242

Heiduk, F., & Wacker, G. (2020). From Asia-Pacific to Indo-Pacific: Significance, implementation and challenges. *SWP Research Paper*(9), 1–43. doi:https://doi.org/10.18449/2020RP09

Hendler, B., & Motta, A. L. C. (2021). Military build-up in Southeast Asia and the South China Sea: How relevant are the disputes with China? *Contexto Internacional*, *43*(3), 565–591. doi:https://doi.org/10.1590/S0102-8529.2019430300006

Jash, A. (2021). The quad factor in the Indo-Pacific and the role of India. *Journal of Indo-Pacific Affairs*, *4*(02), 78–85.

Kelly, A. (2014). Looking back on look east: India's post-cold war shift toward Asia. *Seton Hall Journal of Diplomacy and International Relations*, *15*, 81–93.

Kesavan, K. V., Singh, A., Powell, L., Joshi, M., Mukhopadhyay, A., & Sahoo, N. (2020). India and South Korea: Exploring New Avenues, Outlining Goals. *ORF Special Report*, 1–80.

Khatik, M. H., & Bhandari, U. (2021). India's foreign policy: A transformation from 'look east'to 'act east'policy. *Towards Excellence*, *13*(2), 542–551.

Khurana, G. S. (2019). The 'Indo-Pacific' idea: Origins, conceptualizations and the way ahead. *Journal of Indian Ocean Rim Studies*, *2*(2), 58–76.

Kim, J., & Druckman, D. (2020). Shelved sovereignty or invalid sovereignty? The South China Sea negotiations, 1992–2016. *The Pacific Review*, *33*(1), 32–60. doi:10.1080/09512748.2018.1535520

Kipgen, N. (2020). India–ASEAN relations: the initiatives, successes, and challenges. *India Review*, *19*(3), 207–222. doi:10.1080/14736489.2020.1754012

Koga, K. (2020). Japan's 'Indo-Pacific' question: Countering China or shaping a new regional order? *International Affairs*, *96*(1), 49–73. doi:10.1093/ia/iiz241

Koga, K. (2021). Japan and the development of quadrilateral cooperation. *Pensamiento Propio*(54), 157–186.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Kroenig, M. (2020). *The return of great power rivalry: Democracy versus autocracy from the ancient world to the U.S. and China*. Oxford University Press.

Kumar, S., Verma, S. S., & Shah, S. H. (2020). Indo-US convergence of agenda in the new Indo-Pacific regional security architecture. *South Asia Research*, *40*(2), 215–230. doi:10.1177/0262728020915564

Kumarasamy, D. (2023). Strengthening regional value chain between India and South Korea: Emerging opportunities for trade and investment cooperation. *KIEP Research Paper, World Economy Brief (WEB)*, 23–10. doi:http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4417678

Leddy, K. (2021). Competing claims: The developing roles of international law and unilateral challenges to maritime claims in the South China Sea. *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, *54*(3), 785–830.

Li, Z. (2023). Aspiration and leadership research of the diffusion of Indo-Pacific. *SHS Web Conference*, *157*(03028), 1–7. doi:https://doi.org/10.1051/shsconf/202315703028

Liu, Y., Chen, X., & Tian, Y. (2022). Modelling the impact of RCEP agreement on the economic and trade environment of Beijing. *Discrete Dynamics in Nature and Society*, *2022*(9237940), 1–7. doi:https://doi.org/10.1155/2022/9237940

Mearsheimer, J. J. (2022). The Inevitable Rivalry. *Rossiya v globalnoi politike*, *20*(1). doi:https://doi.org/10.31278/1810-6439-2022-20-1-166-181

Mukherjee, R. (2020). Chaos as opportunity: the United States and world order in India's grand strategy. *Contemporary Politics*, *26*(4), 420–438. doi:10.1080/13569775.2020.1777040

Nagy, S. R. (2022). US-China strategic competition and converging middle power cooperation in the Indo-Pacific. *Strategic Analysis*, *46*(3), 260–276. doi:10.1080/09700161.2022.2088126

Napang, M., Patittingi, F., Aspan, Z., Ruslan, A., Latief, B., Hambali, R., & Hendrapati, M. (2019). Contesting views of the Philippines and China over the nine-dash line in the South China Sea. *Journal East Asia and International Law*, *12*(1), 180–192. doi:http://dx.doi.org/10.14330/jeail.2019.12.1.10

Ohnesorge, H. W. (2020). *Soft Power. The forces of attraction in international relations*. Springer.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Oktaviano, D., Mahroza, J., & Risman, H. (2020). Indonesia defense strategy towards Indo-Pacific (Case Study: The ASEAN outlook on the Indo-Pacific). *International Affairs and Global Strategy*, *80*(2020), 21–29. doi:https://doi.org/10.7176/IAGS/80-04

Panda, J., & Ghiasy, R. (2024). Indo-Pacific as a strategic imperative for the EU: Whither Australia? *Policy Brief*, 1–10.

Pedrason, R. (2021). *Belt and road initiative. peluang dan tantangan*. Jakad Media Publishing.

Purwanto, A. J. (2024). The successful of strengthening ASEAN centrality through the ASEAN way. *Journal of Contemporary Sociological Issues*, *4*(1), 84–101. doi: https://doi.org/10.19184/csi.v4i1.45089

Rachman, V. H. (2022). Geopolitics: Dynamics and development of Indonesia's Maritime Axis. *Jurnal Ekonomi*, *11*(03), 1102–1108.

Radjendra, P., Wibisono, M., Mahroza, J., & Shabuddin, Z. A. (2022). Indonesia's vision as global maritime fulcrum: A geopolitical strategy to address geopolitical shifts in Indo-Pacific. *Journal of Positive School Psychology*, 8621–8634.

Rashidin, M. S., & Javed, S. (2020). 'Made in China 2025' strategy and trade hostility: The United States VS China. *Asian Journal of Business Research*, *10*(3), 1–23. doi:https://doi.org/10.14707/ajbr.200088

Salamatov, V. Y., & Galkina, N. M. (2019). Comprehensive and progressive agreement for trans-pacific partnership (TPP-11): Past, present and future? *International Trade and Trade Policy*, (1), 5–18. doi:https://doi.org/10.21686/2410-7395-2019-1-5-18

Santoso, S. P. (2021). *Percaturan geopolitik kawasan Laut China Selatan*. Deepublish.

Shicun, W., & Colombage, J. (2019). *Indo-Pacific strategy and China's response*. Retrieved from Hainan Province, People Republic of China: https://chinaus-icas.org/wp-content/uploads/2020/11/Indo-Pacific-Strategy-and-Chinas-Response-Report-FINAL.pdf

Siahaan, S. Y. E., & Risman, H. (2020). Strengthening ASEAN Centrality within the Indo-Pacific Region. *PEOPLE: International Journal of Social Sciences*, *6*(1), 254–266. doi:https://doi.org/10.20319/pijss.2020.61.254266

Buku ini tidak diperjualbelikan

Sudan, F. K. (2022). Indo-Pacific strategy and India's opportunities and challenges for regional economic cooperation and integration: An Exploratory Review. *Global Economics Science*, *3*(2), 143–161. doi:https://doi.org/10.37256/ges.3220221290

Teixeira, V. A. G. (2021). The hegemony's contest in the South China Sea. *Sage Open*, *11*(3), 1–15. doi:10.1177/21582440211031216

Tomotaka, S. (2021). "Belt and Road" vs."Free and Open Indo-Pacific": Competition over regional order and ASEAN's responses. *Security & Strategy*, *1*, 3–24.

UN. (1982). *United nations convention on the law of the sea (UNCLOS)*. Retrieved from https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

Varghese, P. (2019). *The Indo-Pacific and its strategic challenges: An Australian perspective*. ISEAS - Yusof Ishak Institute.

Vashisht, P. (2023). Indo-Pacific strategies: What do they entail for India? *Journal of Indo-Pacific Affairs*, *6*(3), 1–24.

Wallis, J., Chinoy, S. R., Sambhi, N., & Reeves, J. (2020). A free and open Indo-Pacific: Strengths, weaknesses, and opportunities for engagement. *Asia Policy*, *15*(4), 1–6. doi:https://doi.org/10.1353/asp.2020.0051

Wiegand, K. E., & Beuck, E. (2020). Strategic selection: Philippine arbitration in the South China Sea dispute. *Asian Security*, *16*(2), 141–156. doi:10.1080/14799855.2018.1540468

Wilkins, T. S. (2020). Searching for a middle path: ASEAN and the "Indo Pacific". *Policy Brief*, 1–9.

Wirth, C. (2019). Whose 'freedom of navigation'? Australia, China, the United States and the making of order in the 'Indo-Pacific'. *The Pacific Review*, *32*(4), 475–504. doi:10.1080/09512748.2018.1515788

Wu, X. (2020). Technology, power, and uncontrolled great power strategic competition between China and the United States. *China International Strategy Review*, *2*(1), 99–119. doi:10.1007/s42533-020-00040-0

Yustiningrum, R. R. E., Ramadhan, M. S., Anwar, D. F., Siswanto, Wuryandari, G., Alami, A. N., Prabaningtyas, R. A. R. F., & Elisabeth, A. (2024). *Indo-Pasifik dalam politik luar negeri Indonesia: Dimensi geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi*. Penerbit Andi.

Zeng, X., & Zhang, S. (2021). From "Asia Pacific" to "Indo Pacific": The Adjustment of American Asia Pacific strategy from the perspective

Buku ini tidak diperjualbelikan

of critical geopolitics. *East Asian Affairs*, *01*(02), 2150009-2150001-2150009-2150041. doi:10.1142/s2737557921500091

Zhang, S. (2022). Rise of China and its behaviours in the South China Sea: an analysis of defensive realism perspective. *Liberal Arts and Social Sciences International Journal (LASSIJ)*, *6*(1), 286–306. doi:https://doi.org/10.47264/idea.lassij/6.1.18

Zhao, M. (2021). The belt and road initiative and China–US strategic competition. *China International Strategy Review*, *3*(2), 248–260. doi:10.1007/s42533-021-00087-7

Zhou, X., Cheng, L., Min, K., Zuo, X., Yan, Z., Ruan, X., Cu, S., & Li, M. (2020). A framework for assessing the capability of maritime search and rescue in the south China sea. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, *47*, 101568. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101568

Zou, C., Pan, S., & Hao, Q. (2020). On the connotation, challenge and significance of China's "energy independence" strategy. *Petroleum Exploration and Development*, *47*(2), 449–462. doi:https://doi.org/10.1016/S1876-3804(20)60062-3

Buku ini tidak diperjualbelikan

Buku ini tidak diperjualbelikan

BAB 3

Indo-Pasifik dalam Pusaran Geoekonomi: *De-Risking* dan Implikasinya bagi Indonesia

Arrizal Anugerah Jaknanihan & Alfin Febrian Basundoro

A. Perkembangan Geoekonomi di Indo-Pasifik

Integrasi dan interdependensi ekonomi telah lama menjadi pilar yang menopang kerja sama di kawasan Asia-Pasifik. Lepas dari tensi geopolitik dengan Tiongkok di berbagai titik konflik,[1] negara-negara di kawasan tetap menjalin hubungan ekonomi yang erat selama dua dekade setelah berakhirnya Perang Dingin. Mengamati fenomena ini, para akademisi Hubungan Internasional, seperti David Kang (2003,

[1] Titik konflik atau *flashpoint* mengacu pada lokasi geografis yang menjadi kawasan rawan konflik. Brendan Taylor (2018) menjelaskan bahwa terdapat empat titik konflik yang membuat Indo-Pasifik menjadi kawasan rawan terhadap tensi geopolitik dibandingkan kawasan lain, di antaranya Laut Tiongkok Selatan, Semenanjung Korea, Selat Taiwan, dan Kepulauan Kenkaku.

A. A. Jaknanihan & A. F. Basundoro
The Habibie Center & Universitas Airlangga, *e-mail*: arrizal.jaknanihan@gmail.com

© 2026 Editor & Penulis

Jaknanihan, A. A. & Basundoro, A. F. (2026). Indo-Pasifik Dalam Pusaran Geoekonomi: De-Risking Dan Implikasinya Bagi Indonesia. Dalam RR. E. Yustiningrum & E. S. Prihatini (Ed.), *Indonesia dalam Kancah Geopolitik di Indo-Pasifik* (71–114). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.2075.c1720
E-ISBN: 978-602-6303-98-1

Buku ini tidak diperjualbelikan

2022), berargumen bahwa negara-negara Asia-Pasifik tidak melakukan perimbangan atau *balancing* terhadap kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan besar.

Berbeda dari prediksi para akademisi neorealis, seperti John Mearsheimer (2005) dan Richard Betts (1993, 55), bahwa kebangkitan Tiongkok akan memicu ketidakstabilan di kawasan, Indonesia beserta negara-negara ASEAN secara aktif mendorong integrasi Tiongkok ke ekonomi dan institusi kawasan, menghasilkan kawasan yang tidak hanya berkembang pesat secara ekonomi, tetapi juga relatif stabil. Pada 1990, kontribusi Tiongkok terhadap perdagangan di kawasan melonjak dari 5% pada 1990 menjadi 27% pada 2019 (Kang, 2022, 85). Tidak hanya itu, persentase produk domestik bruto (PDB) terhadap anggaran militer negara-negara kawasan juga menurun drastis dari rata-rata 2,88% pada 1990 menjadi 1,6% pada 2021. Angka tersebut menggambarkan bergesernya prioritas kawasan Asia-Pasifik dari konflik militer ke kerja sama ekonomi bersama (Kang, 2022, 81–83).

Rampungnya negosiasi perjanjian dagang bebas (FTA) kawasan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) melalui kepemimpinan Indonesia dan ASEAN pada November 2020 turut memberikan pesan bahwa sekutu[2] Amerika Serikat (AS), seperti Australia, Korea Selatan, dan Jepang sekalipun tidak enggan bergabung ke dalam blok dagang beranggotakan rival geopolitik mereka, Tiongkok, demi kesejahteraan ekonomi bersama.

Optimisme David Kang patut diapresiasi. Namun, observasinya luput dalam memperhatikan dinamika ekonomi-keamanan yang muncul seiring dengan transformasi Asia-Pasifik menjadi Indo-Pasifik sebagai suatu kawasan strategis, yaitu munculnya tatanan geoekonomi atau *geoeconomic order* (Roberts et al., 2019). Di tengah tatanan geoekonomi, tendensi negara-negara untuk terjun dalam konflik tidak sepenuhnya hilang, tetapi metode konflik berubah dari

[2] Sekutu dalam konteks ini didefinisikan secara luas sebagai "*like-minded countries*" dengan *alignment yang* kuat, bukan aliansi dalam definisi sempit seperti sekutu formal (*treaty allies*). Untuk perbedaan definisi "sekutu," di Asia-Pasifik, baca Wilkins (2012).

Buku ini tidak diperjualbelikan

militer konvensional ke penggunaan instrumen ekonomi untuk tujuan strategis (Luttwak, 1990). Hubungan ekonomi yang secara tradisional menopang Asia-Pasifik akhirnya dipandang sebagai sumber konflik geopolitik di Indo-Pasifik.

Dalam pidatonya di *Brookings Institution*, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan (TWH, 2023) menegaskan bahwa, "Banyak dari kebijakan ekonomi internasional dalam beberapa dekade bergantung pada premis [yang salah] bahwa integrasi ekonomi membuat negara lebih bertanggung jawab dan terbuka, serta membuat tatanan global lebih damai dan kooperatif." Nyatanya, lanjut Sullivan, "Integrasi ekonomi tidak menghentikan Tiongkok untuk memperluas ambisi militernya di kawasan, ataupun menghentikan Rusia menginvasi tetangga-tetangga demokrasinya, mengabaikan ketergantungan ekonomi yang telah dibangun selama beberapa dekade liberalisasi menjadi hal yang berbahaya."

Pidato Sullivan mendeskripsikan pergeseran besar yang sedang terjadi pada tatanan ekonomi dan keamanan di Indo-Pasifik saat ini. Mulai dari perang tarif hingga perang teknologi antara Tiongkok dan sekutu AS, keterbukaan ekonomi tidak lagi dipandang sebagai prasyarat bagi kesejahteraan sebagaimana disebut dalam Konsensus Washington, tetapi sumber kerentanan di tengah ekonomi yang kian dipersenjatai (Reinsch, 2023). Visi AS selaku jawara dari tatanan neoliberal telah berbelok 180 derajat dalam dua puluh tahun sejak Perang Dingin; dari mengintegrasikan Tiongkok ke dalam ekonomi dunia melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), ke menjauhkan Tiongkok dari pasar global melalui pengurangan risiko (*de-risking*). Sebagai dampak, tren geoekonomi di Indo-Pasifik akhirnya meruntuhkan tembok yang semula memisahkan kerja sama ekonomi dan keamanan, membuat keduanya sulit dibedakan (Gertz & Evers, 2020, 177).

Sebagai negara yang menggantungkan diri pada kerja sama ekonomi dengan berbagai mitra, munculnya tatanan geoekonomi memberikan tantangan besar bagi Indonesia. Kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia didasari pada strategi *hedging* (Anwar, 2023;

Buku ini tidak diperjualbelikan

Priamarizki, 2024), yaitu meningkatkan otonomi dan meminimalisasi risiko dengan tidak mendekatkan diri hanya pada satu kekuatan besar. *Hedging* umumnya diterapkan oleh negara-negara Asia Tenggara, terutama Indonesia, dengan mendorong kerja sama ekonomi yang erat dengan Tiongkok, tetapi tetap mempertahankan pengaruh keamanan AS di kawasan (Goh, 2007; Kuik, 2023). Strategi yang sama ditegaskan kembali oleh menteri pertahanan sekaligus presiden-terpilih Indonesia Prabowo Subianto (2024) dalam tajuknya yang berjudul "*The Road Ahead for Indonesia*," "Sejalan dengan visi untuk posisi geopolitik negara kami [Indonesia], kami akan meneruskan kerja sama yang kuat dengan Tiongkok sebagai mitra ekonomi yang penting. Namun, pada saat yang sama, kami akan memperluas dan memperdalam kerja sama kami dengan AS."

Namun, ketika berbagai negara semakin mengasosiasikan kerja sama ekonomi dengan Tiongkok sebagai ancaman keamanan (Babić & Dixon, 2022; Chubb, 2023), apakah Indonesia masih dapat menerapkan strategi yang sama? Menanggapi tantangan geoekonomi di kawasan, bab buku bunga rampai berikut menganalisis tantangan dan peluang yang Indonesia hadapi dari tren *de-risking* di tengah munculnya tatanan geoekonomi Indo-Pasifik. Meski Indonesia memiliki posisi ideal sebagai negara yang netral, tren geokonomi yang berlangsung berpotensi mempersempit ruang *hedging* dan manuver kebijakan luar negeri Indonesia dalam menerapkan kebijakan ekonomi dan keamanan secara strategis (Lim, 2023).

Sebagaimana akan dibahas dalam bab buku ini, tingginya ketergantungan ekonomi Indonesia dengan Tiongkok berpotensi membuat inisiatif Indonesia tidak disambut baik di tengah tatanan geoekonomi, di mana interdependensi ekonomi dengan lawan geopolitik semakin diasosiasikan sebagai ancaman keamanan (Farrell & Newman, 2019). Selain itu, rendahnya kapasitas industri (Anas et al., 2022, 259) dan minimnya kualitas dan konsistensi regulasi terkait bisnis (Indrawati et al., 2024, 29) juga membuat Indonesia sulit mengapitalisasi tren pengurangan ketergantungan yang ada secara optimal dibandingkan negara ASEAN lain, terutama Vietnam (Wijaya & Jayasuriya, 2024, 13).

Buku ini tidak diperjualbelikan

Pada bagian selanjutnya, bab berikut akan menganalisis fenomena *de-risking* sebagai dampak dari munculnya tatanan geoekonomi di Indo-Pasifik. Bagian terkait *de-risking* akan mendiskusikan bagaimana tren geoekonomi membuat logika keamanan turut memengaruhi logika ekonomi dalam interaksi negara-negara di Indo-Pasifik. Kemudian, tulisan ini akan menjabarkan bagaimana implikasi dan respons Indonesia terhadap tren *de-risking* melalui berbagai ranah, terutama bilateral dan multilateral. Setelah membahas respons Indonesia, bab buku berikut akan membahas bagaimana limitasi dari upaya Indonesia dalam mengapitalisasi tren yang ada, baik berupa aneka permasalahan domestik maupun kapasitas luar negeri Indonesia, sebelum diakhiri dengan kesimpulan.

Metodologi dalam menganalisis respons Indonesia, menggunakan metode kualitatif berupa kajian literatur untuk sumber primer dan sekunder terkait kompetisi geoekonomi di kawasan Indo-Pasifik. Data primer, di antaranya naskah pidato para pejabat terkait, kertas kebijakan, dan data statistik dari lembaga riset dan pemerintahan yang relevan; serta data sekunder, berupa buku, jurnal, makalah, artikel, dan karya terkait, dikumpulkan melalui sumber yang tersedia secara daring. Kajian pada data tersebut digunakan untuk analisis dalam tiga ranah besar, yaitu a) tren *de-risking* dan kompetisi geoekonomi di kawasan Indo-Pasifik, b) dampak tren terhadap Indonesia, serta c) respons kebijakan Indonesia.

B. *De-Risking* dalam Kacamata Geoekonomi

1. Munculnya *Tren De-Risking*

Meski penggunaan ekonomi untuk kepentingan geostrategis bukanlah hal yang baru dalam politik internasional (Blackwill & Harris, 2016), geoekonomi merupakan tren yang masih relatif baru di kawasan Asia-Pasifik (Wesley, 2016, 4–5). Keterbukaan pasar dan ekonomi telah lama menjadi karakteristik yang melekat pada Asia-Pasifik sebagai suatu kawasan. Asia-Pasifik merupakan kawasan dengan jumlah Persetujuan Perdagangan Preferensial (PTA) terbanyak di dunia, dengan 333 PTA pada 2021 (UNESCAP, 2022). Indonesia

Buku ini tidak diperjualbelikan

dan ASEAN berperan besar dalam mendorong keterbukaan ekonomi Asia-Pasifik melalui munculnya berbagai ASEAN + 1 FTA sepanjang tahun 2000-an dan RCEP pada 2020 yang beranggotakan seluruh negara ASEAN, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Australia.

Namun, eskalasi konflik antara AS dan Tiongkok, terutama sejak masa pemerintahan Trump membuat kacamata keamanan menjadi lebih dominan dalam membingkai kerja sama ekonomi yang telah ada di kawasan. Strategi *Pivot to Asia* pada era Obama yang mulanya bertumpu pada perdagangan bebas untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok kini digantikan dengan strategi yang bersifat proteksionis melalui restriksi dagang terhadap Beijing (Blackwill, 2024). Mulai dari perang dagang pada 2018, hingga pelarangan ekspor semikonduktor sejak 2019, kompetisi AS-Tiongkok kian mendorong Indo-Pasifik menuju ke tatanan geoekonomi. Krisis rantai pasok akibat pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina kian mengakselerasi transformasi ekonomi-keamanan di kawasan. Disrupsi yang terjadi menunjukkan bahwa ketergantungan yang berlebih terhadap perdagangan bebas menciptakan celah untuk kerentanan terhadap disrupsi eksternal, terutama tensi geopolitik yang makin mencekam. Krisis yang Uni Eropa alami akibat pemutusan suplai gas dan minyak dari Rusia semakin memberikan contoh bahwa ketergantungan ekonomi dapat dipersenjatai suatu waktu ketika konflik geopolitik terjadi.[3] Janji Tiongkok untuk menjadi mitra "tanpa batas" Rusia turut menimbulkan ketakutan bahwa negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini akan turut mempersenjatai ekonominya (Nikoladze et al., 2023).

Tingginya kerentanan ekonomi terhadap tensi geopolitik akhirnya menciptakan tren baru yang disebut sebagai "*de-risking*"

[3] Farrell & Newman (2019) menjelaskan interdependensi yang dipersenjatai (*weaponized interdependence*) sebagai risiko globalisasi, yaitu ketika ketergantungan ekonomi yang tinggi pada suatu negara menciptakan struktur dengan insentif lebih bagi negara tersebut untuk menggunakan ketergantungan yang ada demi memaksa negara lain memenuhi kepentingan geopolitik. Kondisi kerap ditemui pada sektor yang cenderung dimonopoli segelintir negara, seperti telekomunikasi, perbankan, energi, dan sumber daya alam.

Buku ini tidak diperjualbelikan

atau "pengurangan risiko" dari ketergantungan ekonomi berlebih pada negara yang dianggap berbahaya secara geopolitik (Cave, 2023). Meski secara praktis *de-risking* telah terjadi sejak perang tarif antara AS dan Tiongkok pada era Trump, istilah *de-risking* pertama kali diinstitusionalisasikan melalui pidato Presiden Uni Eropa Ursula von Der Leyen. Merespons tren persenjataan ekonomi oleh Tiongkok dan Rusia pascainvasi ke Ukraina, von Der Leyen (2023) menjelaskan bahwa *de-risking* merupakan strategi mengurangi ketergantungan pada sektor strategis demi meningkatkan resiliensi ekonomi dalam negeri serta mengurangi kerentanan terhadap konflik geopolitik dan persenjataan ekonomi. *De-risking* makin menjadi strategi kebijakan yang diprioritaskan di tengah dampak "overkapasitas" produksi Tiongkok, di mana Tiongkok membanjiri berbagai negara dengan produk manufaktur dengan harga terlampau murah dari industri yang disubsidi negara, terutama teknologi hijau, seperti kendaraan listrik (EV), panel surya, dan baterai (Taplin, 2024).

Istilah *de-risking* kemudian diadopsi secara lebih luas ke dalam kebijakan strategis setelah Konferensi Tingkat Tinggi G7 ke-49 di Kota Hiroshima, Jepang pada Mei 2023. Dalam dokumen Komunike Pemimpin G7 Hiroshima (TWH, 2023), pemimpin-pemimpin dari Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan AS menggarisbawahi bahwa negara G7 perlu "mengakui bahwa [untuk mencapai] ketahanan ekonomi, dibutuhkan kebijakan *de-risking* dan diversifikasi" dengan "mengurangi ketergantungan yang berlebih pada rantai pasok kritis". Dua hal patut digarisbawahi dari Komunike G7. Pertama, berbeda dari strategi "*decoupling*" ala Perang Dingin yang berusaha melepaskan seluruh ikatan ekonomi, *de-risking* berfokus pada sektor-sektor kritis, seperti teknologi dan mineral. Kedua, *de-risking* didorong tidak hanya melalui logika ekonomi, tetapi juga geopolitik untuk mengurangi pengaruh Tiongkok dan potensi penggunaan ekonomi untuk instrumen keamanan.

Sebagai negara di kawasan yang menjadi partner dagang nomor satu Tiongkok,[4] Indonesia dan ASEAN mendapatkan imbas dari tren

[4] Tiongkok menjadi partner dagang terbesar ASEAN sejak 2009 dan ASEAN

Buku ini tidak diperjualbelikan

de-risking, Indonesia mulanya menyambut *de-risking* secara optimis. Presiden Indonesia Joko Widodo menyebutkan bahwa perang dagang yang menjadi bagian dari *de-risking* merupakan "peluang" yang perlu dimanfaatkan (SKRI, 2019). Indonesia berpotensi untuk mendapatkan keuntungan besar sebagai lokasi pasar dan produksi alternatif ketika Tiongkok dan sekutu-sekutu AS saling berlomba mencari mitra lain untuk berdagang. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan peluang yang ada jauh dari kata optimal.

Lepas dari peluang dari *de-risking*, tingkat partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global (GVC), produktivitas dari sektor manufaktur, dan penyerapan investasi asing masih kalah dibandingkan tetangga-tetangga di kawasan, seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Singapura (Patunru, 2023), Selain itu, sekuritisasi terhadap kerja sama ekonomi yang berlangsung di tengah tren ini juga membatasi ruang manuver politik luar negeri Indonesia. Kondisi ini diakibatkan karena kerja sama ekonomi yang secara tradisional digunakan sebagai instrumen *hedging* semakin diasosiasikan dengan kedekatan atau *alignment* politik terhadap salah satu kekuatan besar (Lim, 2023).

2. *De-Risking* dan Sekuritisasi Ekonomi

De-risking muncul seiring dengan transformasi Asia-Pasifik menjadi Indo-Pasifik sebagai kawasan geostrategis. Berbeda dengan kawasan "Asia-Pasifik" yang identik dengan kerja sama ekonomi dan pasar bebas[5], konsep "Indo-Pasifik" lahir dari kompetisi geopolitik. Sebagaimana diungkapkan oleh Amitav Acharya (2024), Konsep 'Asia' dibangun oleh para nasionalis, 'Asia-Pasifik' oleh para ekonom, 'Asia Timur' oleh para budayawan, dan 'Indo-Pasifik' oleh para ahli strate-

menjadi partner dagang nomor satu Tiongkok pada 2020, menyaingi volume dagang Tiongkok dengan Uni Eropa, Ameria Serikat, dan Jepang (Wester, 2023). Tiongkok juga menjadi partner dagang terbesar Indonesia dengan volume dagang 127,815 juta dan surplus 2,053 juta dolar AS pada 2023 (KPRI, 2024).

[5] Asia-Pasifik sebagai suatu konsep kawasan dibangun oleh institusi yang mengedepankan keterbukaan pasar dan integrasi ekonomi di kawasan, seperti APEC dan forum-forum ASEAN. Untuk analisis terkait transformasi kawasan Asia-Pasifik menjadi Indo-Pasifik, baca Heiduk et al. (2020) dan Medcalf (2020).

Buku ini tidak diperjualbelikan

gi." Institusionalisasi Indo-Pasifik sebagai suatu konsep geostrategis membuat batas antara ekonomi dan keamanan nasional semakin kabur.

Dalam peluncuran Strategi Keamanan Nasional AS, contohnya, mantan Presiden Donald Trump (TWH, 2017) menegaskan bahwa "keamanan ekonomi merupakan keamanan nasional." Hengkangnya Trump dari Gedung Putih setelah pemilu AS tahun 2020 tidak mengubah haluan kebijakan AS dalam memandang ekonomi di Indo-Pasifik melalui kacamata keamanan. Mengacu pada koersi ekonomi yang dilakukan Tiongkok, Joe Biden menekankan ancaman "dari pemerintah otokratik yang kerap menyalahgunakan tatanan ekonomi global dengan mempersenjatai konektivitas [ekonomi]" sebagai basis dalam Strategi Keamanan Nasional AS tahun 2022 (TWH, 2022, 21).

Kerja sama ekonomi akhirnya tidak lagi dipandang cuma-cuma sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi bersama bagi negara yang terlibat dalam kompetisi, tetapi sebagai celah yang membuat negara rentan terhadap disrupsi ekonomi. Menurut *laporan Mercator Institute for China Studies* (*MERICS*), Beijing telah menerapkan 39 sanksi ekonomi sepanjang 2012–2023 (Ghiretti, 2023). Beberapa contoh persenjataan ekonomi seperti sanksi Tiongkok terhadap Korea Selatan dalam kasus *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) tahun 2017 dan Australia pada kasus investigasi pandemi COVID-19 tahun 2021 semakin memberikan preseden bahwa negara perlu segera mengamankan ekonominya.[6] Sejalan dengan tren ini, AS selaku ekonomi terbesar di dunia juga menjadi negara yang menerapkan kebijakan restriksi dagang dengan jumlah tertinggi. Sejak 2022–2023, AS telah menerapkan lebih dari 4.200 intervensi yang restriktif terhadap perdagangan (GTA, 2024).

[6] Laporan *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) oleh Reynolds & Goodman (2023, 12) memaparkan bahwa Tiongkok cenderung akan mempersenjatai ekonominya apabila ada isu yang mengancam legitimasi domestik dan keamanan nasional dengan target rawan yaitu negara dengan relasi ekonomi yang asimetrik.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Meski *de-risking* dan *decoupling* sama-sama bertujuan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi dari negara lawan, keduanya mengambil pendekatan yang berbeda. *Decoupling* dilakukan ketika interdependensi ekonomi antara AS dan Uni Soviet masih relatif rendah. Namun, munculnya Tiongkok sebagai kekuatan besar membawa tantangan yang berbeda. Rata-rata porsi perdagangan antara AS dengan Soviet selama 1970–1980-an hanya sebesar 1% (Becker, 1987). Sebaliknya, Tiongkok merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia dan menjadi mitra perdagangan nomor satu AS dengan kontribusi ekspor dan impor sebesar 7,5% dan 16,5% terhadap AS (OUSTR, 2024). Kondisi ini memunculkan konsep *de-risking* sebagai "jalan tengah" yang lebih realistis untuk meningkatkan resiliensi ekonomi, tetapi turut menghindari besarnya biaya *decoupling* total dari Tiongkok.

Berbeda dari *decoupling* yang bertujuan untuk melepas seluruh kerja sama ekonomi, *de-risking* lebih berfokus pada sektor-sektor strategis yang berpotensi mengancam keamanan nasional. Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan (TWH, 2023) secara spesifik menyebut strategi ini sebagai pendekatan "halaman yang kecil dan pagar yang tinggi". "Pagar tinggi" dalam hal ini mengacu pada penerapan kebijakan proteksionis yang ketat, tetapi diterapkan secara terfokus pada "halaman yang kecil," yaitu sektor-sektor strategis seperti teknologi dan mineral kritis.

Salah satu contoh kebijakan *de-risking* adalah keputusan AS dan sekutunya untuk mengurangi ketergantungan dan memutus akses Tiongkok terhadap teknologi semikonduktor yang berpotensi memiliki penggunaan ganda (*dual use*) untuk memperkuat kapabilitas defensif maupun ofensif militer Tiongkok. Pada Oktober 2022, Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan AS menerapkan larangan ekspor besar-besaran terhadap semikonduktor yang memiliki komponen dari AS. Melalui *CHIPS and Science Act* pada Agustus 2022, AS juga menggelontorkan US$52.7 miliar untuk mendorong pengembangan riset dan manufaktur produk semikonduktor (TWH, 2022). AS mengeskalasi kebijakan proteksionismenya melalui *Inflation*

Buku ini tidak diperjualbelikan

Reduction Act (IRA) pada bulan yang sama untuk memberikan kredit pajak dan insentif bagi perusahaan dalam negeri untuk memproduksi teknologi ramah lingkungan–sekaligus mengurangi daya saing produk-produk Tiongkok di pasar AS.

3. *De-Risking* sebagai Instrumen Geoekonomi

Terdapat berbagai pendekatan dalam memandang munculnya tren kompetisi geoekonomi di Indo-Pasifik. Wijaya & Jayasurya (2024), misalkan, memandang bahwa konflik geopolitik menciptakan "neoliberalisme yang dipersenjatai," tetapi tetap mempertahankan karakteristik umum neoliberalisme seperti akumulasi dan mobilisasi kapital. Senada, Jayant Menon (2024, March 23) juga berargumen bahwa pertumbuhan berorientasi ekspor (*export-led growth)* yang menjadi karakteristik neoliberalisme Asia Timur tidak menghilang, tetapi menyesuaikan diri terhadap batasan yang muncul akibat kompetisi geopolitik. Tanpa mengesampingkan pendekatan neoliberal terhadap fenomena geoekonomi. Tulisan berikut lebih memandang *de-risking* melalui perspektif geoekonomi, yaitu penggunaan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan strategis.

Melalui pendekatan neorealis, geoekonomi pertama kali didefinisikan oleh ahli strategi Edward Luttwak (1990, 19) sebagai "perpaduan antara logika konflik dengan metode perniagaan" atau "logika konflik dengan tata bahasa komersial." Melalui pendekatan Luwakian et al. (2016, 9) dalam bukunya *War by Other Means* secara lebih spesifik mendefinisikan geoekonomi sebagai penggunaan instrumen ekonomi untuk mendorong dan mempertahankan kepentingan nasional, juga upaya menciptakan tatanan geopolitik yang kondusif untuk kepentingan ekonomi.

Melalui pendekatan geoekonomi, *de-risking* dapat dipandang sebagai instrumen untuk memitigasi ancaman dari lawan geopolitik terhadap ekonomi. Dalam karyanya *Weaponized Interdependence*, Farrell & Newman (2019) menganalisis bagaimana globalisasi menciptakan ketergantungan ekonomi yang tidak seimbang antara berbagai negara, di mana beberapa negara lebih bergantung terhadap

Buku ini tidak diperjualbelikan

negara dengan ekonomi yang dominan dibandingkan negara lainnya. Negara dengan tingkat interdependensi yang lebih tinggi terhadap negara lain akhirnya menjadi lebih rawan terhadap potensi persenjataan ekonomi (*economic weaponization*) dari negara lawan. Begitu pula sebaliknya, negara dengan kekuatan ekonomi yang lebih dominan memiliki insentif dan keleluasaan yang lebih besar untuk menggunakan pengaruh ekonominya demi kepentingan geostrategis.

Farrell & Newman (2019, 65–70) mengilustrasikan persenjataan ekonomi menggunakan kasus *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (*SWIFT). Ketergantungan negara-negara di dunia terhadap sistem telekomunikasi perbankan SWIFT membuat AS yang memegang yurisdiksi atas SWIFT dapat menggunakannya untuk keperluan keamanan dan geostrategis, seperti memutus layanan bank-bank Rusia setelah invasinya ke Ukraina pada 2021 silam.

Dalam konteks Indo-Pasifik, contoh lain penggunaan instrumen geoekonomi adalah proyek pendanaan infrastruktur Inisiatif Sabuk dan Jalan (*Belt and Road Initiative*/BRI) oleh yang berjalan seiringan dengan perluasan pengaruh geopolitik Tiongkok di negara-negara penerima, terutama negara-negara berkembang di *Global South* (Li, 2020). Studi Dreher et al. (2022) menemukan bahwa negara resipien BRI dan dana pembangunan Tiongkok memiliki kecenderungan lebih besar untuk tidak menunjukkan rekognisi terhadap Taiwan dan mendukung posisi Tiongkok dalam forum-forum internasional.

De-risking muncul sebagai upaya meminimalisasi dampak kompetisi geopolitik dan geoekonomi terhadap negara, terutama dalam sektor kritis yang marak dipersenjatai. Dalam sektor mineral, sebagai contoh, Tiongkok mendominasi hampir 60% produksi dan 90% pemrosesan mineral kritis dunia yang digunakan untuk berbagai teknologi (IEA, 2023). Hal ini secara efektif membuat Tiongkok memiliki dominasi atas manufaktur teknologi elektronik dan hijau, seperti EV yang membutuhkan mineral kritis sebagai komponen utama baterai. Kondisi ini mendorong AS dan sekutunya untuk meluncurkan koalisi Kerja Sama Keamanan Mineral bersama 13 negara lain pada 2022 dengan fokus untuk mengurangi ketergantungan dari

Buku ini tidak diperjualbelikan

Tiongkok dan membuat alur rantai pasok alternatif di antara negara sahabat, termasuk Indonesia (Nangoy, 2024). Sebagai negara yang memproduksi kurang lebih setengah dari nikel dunia, tren *de-risking* dan geoekonomi dapat memengaruhi Indonesia.

C. Transformasi Institusi di Kawasan dan Dampaknya bagi Indonesia

Kompetisi geoekonomi mendorong transformasi institusi ekonomi dan keamanan di Indo-Pasifik. Peranan institusi ekonomi kini turut diperluas untuk mengatasi isu-isu terkait keamanan. Sebaliknya, transformasi geoekonomi juga membuat institusi keamanan turut mencakup isu terkait ekonomi (Roberts et al., 2019; Wesley, 2016, 4; Wijaya & Jayasuriya, 2024, 2). Beberapa institusi ekonomi negara Indo-Pasifik, seperti Badan Peninjau Penanaman Modal Asing (FIRB) Australia, Departemen Perdagangan AS, dan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang, misalnya, kini memperluas fungsinya untuk turut mengatur area keamanan ekonomi. Sebaliknya, institusi keamanan kawasan, seperti NATO, Quad, dan AUKUS turut mendorong kerja sama keamanan ekonomi yang semakin dipandang tak terpisahkan dari dimensi geopolitik.

Transformasi yang serupa juga ditunjukkan dengan semakin maraknya inkorporasi kebijakan ekonomi dalam strategi keamanan nasional setelah perang di Ukraina. Beberapa di antaranya adalah *Economic Security Strategy* yang diterbitkan Komisi Eropa pada 2023, *The Economic Security Promotion Act* oleh Jepang pada 2022, dan baru-baru ini seperti kebijakan keamanan ekonomi dalam *National Interest Framework* Australia pada 2024. Transformasi tersebut memberikan berbagai implikasi terhadap Indonesia sebagai negara yang berada dalam posisi tengah dalam pusaran geoekonomi yang berlangsung.

Buku ini tidak diperjualbelikan

1. Ruang Manuver Bebas-Aktif yang Menyempit

Proses sekuritisasi terhadap inisiatif ekonomi mempersempit ruang manuver Indonesia sebagai "kekuatan menengah"[7] di Indo-Pasifik. Kebijakan bebas-aktif Indonesia diterapkan melalui strategi *hedging* dan *omni-enmeshment*,[8] (Goh, 2007) di mana Indonesia berusaha menjaga otonominya melalui hubungan ekonomi yang kuat dengan seluruh pihak, terutama Tiongkok, tetapi tetap mempertahankan relasi strategisnya dalam sektor keamanan dengan negara lain, terutama AS, demi mencegah munculnya satu kekuatan besar yang terlalu dominan di kawasan.

Secara tradisional, strategi tersebut dapat dilakukan karena hubungan ekonomi dapat berlangsung tanpa mencederai kerja sama keamanan yang telah dibangun. Suatu negara dapat menjalin hubungan ekonomi yang erat meskipun memiliki tensi geopolitik dengan partner dagang (Lim & Cooper, 2015, 70). Namun, di tengah batas yang semakin kabur antara kerja sama ekonomi dan keamanan, aplikasi *hedging* melalui instrumen ekonomi berpotensi disalahartikan sebagai kedekatan keamanan Indonesia dengan salah satu pihak (Lim, 2023).

Dalam upaya merespons upaya *de-risking* AS pada komoditas mineral kritis, misalnya, Indonesia di bawah arahan Menteri Koordinator urusan Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan

---

[7] Kekuatan menengah atau *middle powers* merupakan kategori negara yang secara kekuatan tidak sebesar para kekuatan besar atau *great powers* dan *major powers*, tetapi memiliki peran kuat dalam memengaruhi dinamika kawasan dengan perannya sebagai pendukung multilateralisme, fasilitator dialog, dan mengambil posisi tengah di antara konflik geopolitik yang berlangsung. Untuk kebijakan luar negeri Indonesia sebagai kekuatan menengah, lihat lebih lanjut pada Karim (2018), Ardhani et al. (2023), dan Umar (2023).

[8] *Omni-enmeshment* merupakan strategi kebijakan luar negeri yang umumnya digunakan negara-negara ASEAN untuk mencegah suatu kekuatan besar menjadi terlalu dominan di kawasan dengan cara membuat institusi kawasan yang inklusif sehingga seluruh kekuatan eksternal dapat saling terlibat, secara efektif mencegah pengaruh hanya dari satu negara. Untuk strategi *omni-enmeshment*, lihat lebih lanjut pada (Goh, 2007).

Buku ini tidak diperjualbelikan

berusaha untuk menegosiasikan FTA terbatas dengan AS (Ghifari, 2023). Langkah ini Indonesia tempuh untuk mengamankan subsidi dan kredit pajak dari kebijakan IRA yang mengharuskan komponen teknologi, salah satunya nikel, diproduksi dari negara yang memiliki FTA dengan AS. Sebelumnya, Jepang telah sukses menerapkan langkah serupa dengan menandatangani FTA terbatas untuk mineral kritis pada bulan Maret 2023. Namun, upaya Indonesia hingga kini belum membuahkan hasil. Selain karena kekhawatiran terkait efektivitas regulasi dan lingkungan, dominasi Tiongkok dalam rantai pasok mineral Indonesia turut menjadi perhatian.

Pada bulan Oktober 2023, sekelompok senator AS mengirimkan surat penolakan terhadap Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo terkait potensi FTA terbatas dengan Indonesia karena alasan dominasi Tiongkok di sektor mineral Indonesia (Yuniar, 2024). Menurut Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), 90% dari investasi asing untuk smelter Indonesia berasal dari Tiongkok (Raharjo et al., 2023). Minimnya diversifikasi Indonesia dari Tiongkok berpotensi membuat AS menerapkan klausul "*foreign entity of concern*" atau kebijakan tarif lain yang mencegah investasi dan ekspor dari perusahaan Indonesia yang berhubungan erat dengan entitas-entitas Tiongkok tertentu (Yuniar, 2024).

Kondisi ini turut diperburuk kewaspadaan AS terhadap strategi Tiongkok dalam menghindari tarif AS dengan mengekspor produknya ke negara-negara perantara di Asia Tenggara terlebih dahulu sebelum diekspor ke pasar AS (Wihardja, 2024). Preseden dari kasus serupa telah terjadi, yaitu ketika Departemen Perdagangan AS memberikan sanksi ekonomi pada lima perusahaan manufaktur panel surya di Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang menjadi perantara perusahaan Tiongkok demi menghindari tarif AS (Lee & Kaufman, 2023). Kasus serupa dapat terjadi pada sektor di mana Tiongkok memiliki pengaruh dominan di Indonesia.

2. Minimnya Inisiatif Ekonomi di Kawasan

Tingginya tingkat ketergantungan ekonomi Indonesia dengan Tiongkok sepatutnya dapat ditangani dengan kebijakan diversifikasi yang

Buku ini tidak diperjualbelikan

lebih menyeluruh. Namun, hal tersebut kurang dapat dimaksimalkan karena sedikitnya opsi kerja sama ekonomi alternatif yang ada dari AS selaku partner dagang terbesar kedua di kawasan.[9] Tren geoekonomi di kawasan mendorong sensitivitas AS terhadap FTA dan pasar bebas.

Hampir satu dekade setelah AS hengkang dari FTA kawasan yang ia inisiasi sendiri pada masa pemerintahan Barack Obama, Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) pada 2017, AS tidak menunjukkan tanda untuk bergabung ke dalam FTA apapun di Indo-Pasifik di mana Indonesia dapat berpartisipasi. Sejak pemilu AS pada 2016, terdapat sentimen domestik yang dirasakan, baik oleh kubu Partai Demokrat maupun Partai Republik bahwa kebijakan perdagangan bebas yang selama ini AS topang memberikan berbagai kerugian, mulai dari tingginya defisit neraca dagang negara, hilangnya pekerjaan, dan kalahnya industri dalam negeri dari kompetisi barang asing (Schoenbaum, 2023), Sentimen terhadap pasar bebas tidak hanya AS tujukan pada TPP, tetapi juga FTA lain di Asia-Pasifik dan secara global dengan boikot terhadap Badan Banding WTO dan negosiasi ulang perjanjian dagang USMCA.

Hengkangnya Trump dan terpilihnya Biden sebagai presiden pada 2020 tidak serta merta membuat sentimen AS terhadap FTA berkurang. Lepas dari tensi yang semakin meningkat dengan Tiongkok, AS tidak menawarkan inisiatif ekonomi yang cukup berarti bagi Indonesia dan negara-negara kawasan lain untuk mendorong upaya *de-risking*. Sejauh ini, tidak ada intensi bahwa AS akan bergabung ke dalam TPP yang bertransformasi menjadi Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) di bawah inisiasi Jepang ataupun mega-FTA RCEP yang didorong oleh ASEAN.

Alih-alih mendorong inisiatif ekonomi yang membukakan akses pasar bagi Indonesia, Biden mendorong Kerangka Kerja Sama Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) sebagai alternatif kebijakan geoekonomi pada Mei

[9] AS merupakan partner dagang terbesar nomor kedua ASEAN setelah Tiongkok dengan kontribusi sebesar 10,9% dari total perdagangan ASEAN. AS juga merupakan kontributor investasi terbesar di ASEAN (ASEAN, 2023b).

Buku ini tidak diperjualbelikan

2022. IPEF bertumpu pada empat pilar, yaitu pilar perdagangan, pilar rantai pasok, pilar ekonomi hijau, dan pilar ekonomi bersih dengan tujuan menciptakan norma bersama dan platform kerja sama untuk mengurangi ketergantungan dari Tiongkok dan rantai pasok yang lebih tangguh. Meski demikian, IPEF tidak menawarkan adanya akses yang lebih besar untuk pasar AS–hal yang paling dibutuhkan oleh negara-negara kawasan. Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo menegaskan dalam pertemuan APEC di San Fransisco pada 2023 bahwa "IPEF perlu dipahami bukan sebagai suatu perjanjian dagang" (Seow, 2023).

Munculnya IPEF menggambarkan tren geoekonomi kawasan, di mana kerja sama ekonomi lebih digunakan sebagai instrumen politik ketimbang ekonomi murni (Wilson, 2012). Kondisi ini tidak hanya memengaruhi posisi sentral Indonesia sebagai pemimpin di kawasan, tetapi juga target pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang sangat bergantung pada kerja sama dengan negara lain. Sektor teknologi dan mineral yang menjadi target *de-risking* merupakan salah satu sektor prioritas yang Indonesia berusaha kembangkan dalam upaya mencapai status negara maju berpendapatan tinggi (BAPPENAS, 2023, 88–89). Indonesia menerapkan beberapa pendekatan di ranah domestik bilateral, dan internasional dalam menghadapi tantangan *de-risking* ini—meski limitasi yang Indonesia hadapi tidak kalah besar.

D. Respons Indonesia terhadap Tren *De-risking*

Dalam menghadapi tren *de-risking* di Indo-Pasifik, Indonesia sejak era kepresidenan Joko Widodo berupaya untuk melakukan aneka respons untuk memperoleh keuntungan dari tren tersebut, terutama melalui kanal bilateral dan multilateral. Seiring dengan meningkatnya tren *de-risking* di kawasan Indo-Pasifik dalam lima tahun terakhir, Indonesia melakukan variasi pendekatan yang lebih luas. Sekalipun pada periode pertama kepresidenan Joko Widodo Indonesia cenderung hanya memperkuat relasi dengan Tiongkok pada sektor pertambangan mineral kritis, khususnya dengan terlaksananya Kemitraan Strategis Komprehensif antara kedua negara (Tritto, 2023, 6),

Buku ini tidak diperjualbelikan

kemitraan yang lebih variatif dalam sektor ini dilaksanakan Indonesia pada pemerintahan Joko Widodo yang kedua.

Pendekatan bilateral dilaksanakan Indonesia dengan cara diversifikasi kemitraan pada sektor pertambangan dan teknologi dengan negara-negara Barat dan kekuatan menengah global. Misalnya, Indonesia meningkatkan level kerja sama dengan AS menjadi strategis-komprehensif pada tahun 2023 dan mendorong kerja sama yang lebih erat dengan Australia dalam lima tahun terakhir (Zhang, 2023). Secara multilateral, pendekatan Indonesia dalam hal ini mencakup aktivitas dalam forum-forum multilateral, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, seperti OECD. Sekalipun Tiongkok masih berperan penting dalam pengembangan sektor ini di Indonesia, Indonesia berupaya mengapitalisasi tren *de-risking* mineral kritis di kawasan dengan mendorong keterlibatan aktor strategis yang lebih luas dan bervariasi.

1. Pendekatan Bilateral

Secara bilateral, upaya Indonesia untuk memanfaatkan *de-risking* berfokus pada pendekatan terhadap negara-negara mitra strategis untuk mendiversifikasi opsi Indonesia di tengah pusaran konflik geoekonomi. Dalam dekade terakhir, Indonesia cenderung dekat kepada Tiongkok untuk urusan ekonomi, bahkan Presiden Tiongkok, Xi Jinping meresmikan kerja sama BRI di Jakarta pada bulan Oktober 2013 (Garlick, 2023, 75). Dalam kesempatan tersebut, Xi menyatakan bahwa proyek BRI menjadi upaya Tiongkok untuk mendorong kerja sama dengan Asia Tenggara. Inisiatif ini kian memperkuat kerja sama Indonesia-Tiongkok yang telah berstatus kemitraan strategis komprehensif dengan Beijing sejak tahun 2013 (Anwar, 2019, 4). Pendekatan ini terus berlanjut pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo, di mana pada tahun 2021, perwakilan kedua negara menyepakati dibentuknya sekretariat dialog tingkat tinggi dan kerja sama yang memfasilitasi kerja sama bilateral (Wenbin, 2021).

Lebih lanjut, proyek BRI Indonesia–Tiongkok memiliki cakupan yang sangat luas, di mana proyek tersebut disinergikan dengan visi

Buku ini tidak diperjualbelikan

Poros Maritim Global (*Global Maritime Fulcrum/BRI*) dan menjadi kesatuan kerja sama GMF-BRI (Jiang, 2023, 3–4; KLNRI, 2022). Dengan aneka status di atas, kedua negara telah mengembangkan kerja sama dalam berbagai bidang, mulai dari pembangunan infrastruktur strategis, kawasan industri, kelautan dan perikanan (Damuri et al., 2014, 12), hingga perdagangan (Damuri et al., 2014, 10–11; Jiang, 2023). Hingga tahun 2023, Tiongkok masih menjadi negara investor terbesar kedua di Indonesia—setelah Singapura, tetapi memegang peranan yang paling sentral dalam pembangunan infrastruktur dan sektor padat-kapital, seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Prasetyo, 2023, 13) dan proyek hilirisasi mineral, khususnya nikel, yang belakangan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia (Jennings, 2024; Tritto, 2023, 1). Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi Tiongkok di Indonesia mencapai US$ 7,3 miliar pada tahun 2023.

Akan tetapi, rivalitas antara Tiongkok dan AS terus berlanjut, di mana kedua negara memanfaatkan ekonomi sebagai instrumen keamanan. Tren *de-risking* kian gencar dilakukan oleh AS dan sekutunya di Asia Timur maka diversifikasi kemitraan bilateral dengan memperkuat relasi dengan AS dan sekutunya menjadi respons bilateral utama Indonesia dalam memanfaatkan tren konfliktual tersebut. Di antaranya, Indonesia mendorong peningkatan kualitas kerja sama hingga level strategis-komprehensif (*Comprehensive Strategic Partnership*) dengan AS yang disepakati pada bulan November 2023. Dalam pernyataan bersama antara Presiden Joko Widodo dan Joe Biden, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama rantai suplai mineral kritis, industri teknologi informasi, khususnya semikonduktor, dan teknologi energi terbarukan (TWH, 2023). Lebih lanjut, AS juga mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam industri semikonduktor untuk mendorong keterlibatan Indonesia dalam rantai suplai global (TWH, 2023, 4–5; USDS, 2023, 4–5). Sekalipun memang status kerja sama strategis-komprehensif tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan, upaya ini perlu diapresiasi, mengingat dengan status tersebut, Indonesia akan

Buku ini tidak diperjualbelikan

memperoleh keuntungan signifikan dalam pengembangan sektor mineral dan teknologi yang menjadi tulang punggung ekonomi di masa mendatang.

Selain dengan AS, Indonesia juga memperkuat relasi dengan Australia. Selain untuk menyambut keuntungan dari *de-risking* Australia terhadap Tiongkok, Indonesia memanfaatkan penguatan relasi ini guna memperluas ruang geraknya dalam menghadapi risiko geoekonomi regional. Berdasarkan analisis Lian Sinclair dan Neil Coe dari Sydney Southeast Asia Centre (2024), sekalipun belum berstatus strategis-komprehensif, perwakilan Jakarta dan Canberra dalam tiga tahun terakhir terus mengintensifkan pembicaraan kerja sama sektor mineral dan teknologi, yang menunjukkan peningkatan signifikan relasi kedua negara pada era Presiden Joko Widodo, yang sejalan dengan visi hilirisasi mineral yang menjadi prioritasnya (DIS, 2023). Hingga tahun 2023, keduanya telah delapan kali mengadakan pertemuan 2 + 2 yang tidak hanya membahas soal kerja sama politik dan pertahanan, melainkan juga menyinggung percepatan perdagangan dan investasi dua arah (DFAT, 2020, 2021). Lebih lanjut, dalam *Plan of Action for the Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership 2020–2024*, disebutkan bahwa kedua pihak sepakat untuk mengembangkan arsitektur perdagangan bebas dan investasi dalam kerangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) dan *Economic*, *Trade*, *and Investment Minister Meeting*, yang memudahkan investasi Australia di Indonesia. Selain itu, beban tarif yang jauh berkurang akan mendorong keuntungan bagi Perusahaan Australia dalam berinvestasi di sektor mineral, mengingat minimnya biaya yang harus ditanggung (DFAT, 2020). Lebih lanjut, sebagaimana AS, Australia juga menyetujui kerja sama pengembangan SDM bidang teknologi, yang akan menguntungkan Indonesia seiring dengan peningkatan kualitas SDM secara intensif.

Secara spesifik, Australia pula meningkatkan investasi riil pada sektor pertambangan mineral di Indonesia. Nickel Industries, salah satu perusahaan tambang terkemuka Australia, mulai berinvestasi di Indonesia sejak tahun 2012 di Morowali, Sulawesi Tengah (NI,

Buku ini tidak diperjualbelikan

2024). Selain melakukan ekstraksi, Nickel Industries juga melakukan hilirisasi dalam bentuk konversi dari feronikel NPI yang bernilai rendah menjadi *nickel matte* yang bernilai lebih tinggi (NI, 2024; Thompson, 2024). Secara keseluruhan, perusahaan tersebut telah memproduksi lebih dari 13,4 juta ton nikel dengan pendapatan mencapai US$ 87,9 juta pada tahun 2023 (NI, 2024). Aneka kapasitas dan pencapaian tersebut membuat Nickel Industries tidak hanya menjadi mitra strategis Indonesia dalam mengambil peran di tengah tren *de-risking*, tetapi juga berperan dalam meningkatkan pendapatan Indonesia dalam sektor ekstraksi mineral (Hunt et al., 2024). Dengan capaian korporasinya, Australia tidak hanya melakukan penambangan mineral di Indonesia, tetapi juga terlibat dalam hilirisasi mineral. Sekalipun memang belum signifikan, progres ini penting bagi upaya diversifikasi investasi mineral di Indonesia guna menggeser dominasi investasi tambang Tiongkok dan memperluas ruang gerak Indonesia untuk berperan dalam rantai suplai mineral global.

2. Pendekatan multilateral

Selain memperluas kemitraan bilateral, Indonesia merespons sekuritisasi geoekonomi di Indo-Pasifik dengan memperluas pendekatan multilateralisme, khususnya pada forum-forum ekonomi regional dan global**.** Perluasan kemitraan tersebut dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk membentuk arsitektur investasi yang menguntungkan Indonesia dalam sektor padat-kapital. Di antaranya, Indonesia mendorong pembahasan isu investasi dan perdagangan multilateral dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali tahun 2022 lalu. Indonesia juga menyatakan keinginannya untuk bergabung ke dalam *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) yang menawarkan aneka keuntungan dalam pengembangan sektor mineral dan teknologi. Lebih lanjut, Jakarta juga mendorong kemajuan arsitektur geoekonomi regional seperti ASEAN dan berinteraksi dekat di dalam aneka inisiatif geoekonomi multilateral bentukan AS, seperti IPEF.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Dalam KTT G20 tahun 2022, Indonesia selaku ketua konferensi memegang peran penting dalam menjadikan isu investasi sebagai bahasan prioritas. Di antaranya, dalam Deklarasi Bersama KTT G20, Indonesia menekankan pentingnya "reformasi struktural di tingkat global" untuk mendorong kebebasan investasi dan memperkuat perdagangan multilateral (TWH, 2022). Deklarasi tersebut juga menetapkan dibentuknya *multilateral trading system* (MTS) di bawah koordinasi WTO untuk mendorong perdagangan multilateral yang lebih inklusif dan dapat mendukung peran negara-negara berkembang dalam rantai suplai global (TWH, 2022). Selama ini, investasi dan perdagangan di antara anggota G20 masih didominasi oleh negara maju atau kekuatan besar global. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia berupaya untuk memegang peran yang lebih luas dalam geoekonomi global, khususnya sektor-sektor unggulan. Dalam sektor teknologi, Indonesia memanfaatkan forum ini sebagai ajang mempromosikan kemajuan ekonomi digital.

Pada tingkat regional, Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 menjadi momen untuk integrasi ekonomi regional sekaligus momentum bagi Indonesia untuk menawarkan kawasan Asia Tenggara sebagai mitra *de-risking*. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (2023) dalam *ASEAN Economic Integration Brief*, Indonesia dalam keketuaannya mengusung tema *Epicentrum of Growth*. Di sini, Indonesia berupaya untuk mendorong ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dan inovasi ekonomi regional, yang artinya mendorong konektivitas, penguatan investasi intraregional, dan ketahanan ekonomi. Dalam KTT ASEAN Ke-42 di Labuan Bajo tahun 2023, upaya ini diwujudkan dengan deklarasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik (ASEAN, 2023a). Dalam deklarasi ini, negara anggota ASEAN sepakat untuk "meningkatkan industri kendaraan listrik di negara anggota dan menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi kendaraan listrik global". Praktis, Indonesia jelas dilibatkan sebagai produsen mineral untuk baterai kendaraan, yang tidak hanya diproyeksikan akan meningkatkan pendapatan Indonesia, tetapi juga menjadi progres signifikan bagi

Buku ini tidak diperjualbelikan

kapitalisasi *de-risking*. Hal ini mengingat kian banyak mitra regional Indonesia yang menjadi konsumen dalam pasar kendaraan listrik sehingga Indonesia dapat memperoleh keuntungan signifikan dari tren ini.

Terkini, perluasan multilateralisme juga dilakukan Indonesia dengan lebih aktif terlibat dalam forum-forum yang terasosiasi dengan negara Barat atau bentukan AS. Pertama, Indonesia telah mengajukan keanggotaan di OECD sejak Juli 2023 (Sulaiman, 2024). Pada bulan April 2024, Indonesia secara resmi bahkan telah diterima sebagai calon anggota OECD dan diperkirakan akan menjalani proses menjadi anggota penuh selama tiga hingga empat tahun. Terkait dengan keanggotaan Indonesia di OECD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan manfaat keanggotaan OECD terhadap kemajuan ekonomi Indonesia, khususnya hilirisasi mineral dalam bentuk semikonduktor (SKRI, 2024). Contohnya, Indonesia tengah mendorong kerja sama dengan Jerman untuk pengembangan SDM industri semikonduktor. Dengan menjadi anggota OECD, inisiatif serupa akan berjalan lebih ekstensif dan komprehensif sehingga membawa keuntungan lebih besar dan pasti bagi Indonesia yang tengah mengembangkan industrialisasi. Pendekatan Indonesia terhadap OECD yang semakin intensif menepis anggapan sejumlah pihak akan ketertarikan Indonesia untuk menjadi anggota BRICS—blok ekonomi pesaing OECD yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (Bonesh, 2023, October 13; Donnellon-May, 2023, February 8; Kaur & Kaur, 2015). Pasalnya, sekalipun BRICS mencitrakan diri sebagai blok ekonomi negara berkembang, jika Indonesia memilih BRICS alih-alih OECD maka Indonesia akan kian terikat dengan kemitraan ekonomi dengan Tiongkok (Ng & Santiko, 2023).

Kedua, Indonesia meningkatkan interaksi dengan IPEF. Selain meningkatkan status kemitraan dengan AS menjadi strategis-komprehensif, Indonesia berupaya menjangkau forum multilateral bentukan AS tersebut guna mendiversifikasi kemitraan dan memperkuat status Indonesia di mata negara-negara Barat sebagai

Buku ini tidak diperjualbelikan

bentuk pengurangan risiko. Indonesia berharap bahwa upaya ini akan memberikan keuntungan dalam industrialisasi, khususnya dukungan AS terhadap hilirisasi mineral Indonesia, sekalipun memang IPEF sendiri belum berdampak berarti bagi perdagangan bebas. Apalagi, keterlibatan Indonesia dalam IPEF akan memperkuat kemitraan Indonesia-AS yang telah terjalin secara bilateral hingga level strategis-komprehensif, di mana Indonesia dapat memperoleh akses kredit pajak untuk hilirisasi mineral kritis (Hendrix, 2023). Di sisi lain, keterlibatan Indonesia tersebut juga akan memastikan inklusivitas IPEF, agar tetap mendukung posisi negara-negara ASEAN dan menguntungkan kawasan Asia Tenggara dalam aneka inisiatif forum tersebut dalam jangka panjang (Jakjanihan, 2023).

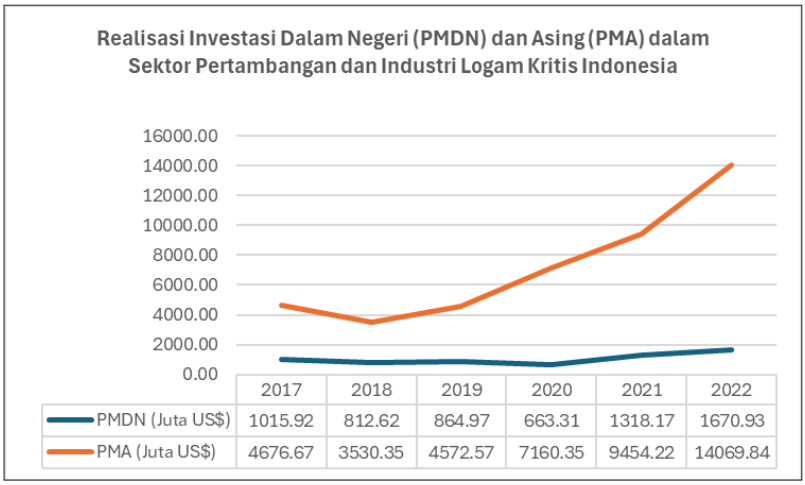
E. Limitasi Indonesia dalam Kapitalisasi *De-risking*

1. Limitasi Domestik

Meski Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan, terdapat berbagai limitasi yang menghambat Indonesia dalam mengapitalisasi tren *de-risking* di ranah domestik dan internasional. Isu domestik pertama yang menghambat kapitalisasi *de-risking* adalah kurang proporsionalnya pemberian akses pemerintah antara aktor lokal dan investor asing. Selain penyusunan kebijakan soal investasi asing Indonesia yang masih didominasi oleh elite pemerintah pusat, misalnya di lingkaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang menjadi tulang punggung dalam menangani investasi Tiongkok ke Indonesia (KKBKIRI, 2023; Wenbin, 2021), pemberian akses investasi dari pemerintah juga masih tersentralisasi kepada aktor lokal lainnya. Baru-baru ini, Presiden Jokowi memberikan izin kepada organisasi masyarakat (ormas) untuk melakukan pengelolaan tambang di wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) (BBC, 2024). Sekalipun izin tersebut baru diberikan pemerintah untuk penambangan batu bara dan hingga saat ini realisasi investasi asing dalam pertambangan mineral kritis masih mendominasi. Memang, sebagaimana tercatat dalam Gambar 3.1, investasi asing dalam sektor pertambangan dan

Buku ini tidak diperjualbelikan

industri logam kritis masih mendominasi di Indonesia. Akan tetapi, pemberian akses yang terlalu luas kepada aktor-aktor lokal tanpa mempertimbangkan relasi dengan investor asing menjadi gestur yang dapat berdampak negatif pada reputasi Indonesia. Padahal, di tengah tren *de-risking* tersebut, seharusnya Indonesia dapat menjaring lebih banyak investor asing guna mendorong kemajuan dan daya saing investasi pada sektor ini.



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PMDN (Juta US$)	1015.92	812.62	864.97	663.31	1318.17	1670.93
PMA (Juta US$)	4676.67	3530.35	4572.57	7160.35	9454.22	14069.84

Sumber: Taufikurrahman et al. (2023, 3)

Gambar 3.1 Realisasi Investasi Dalam Negeri (PMDN) dan Asing (PMA) dalam Sektor Pertambangan dan Industri Logam Kritis Indonesia

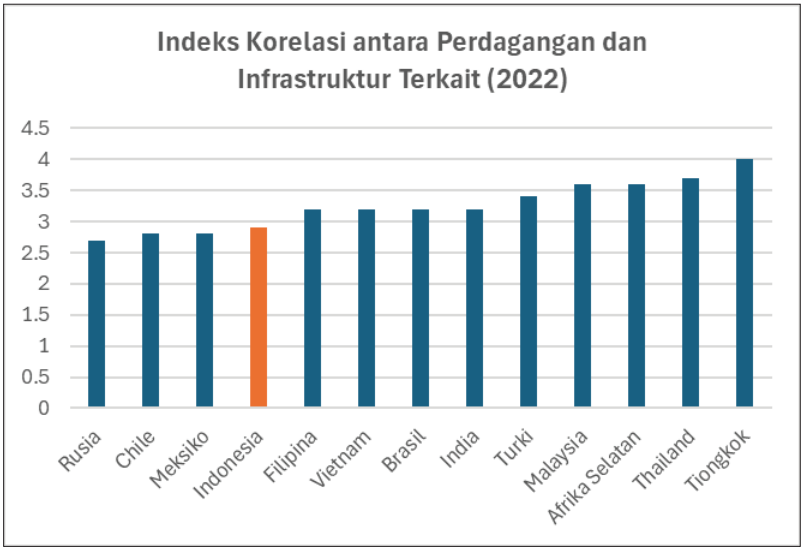
Apabila terus berlanjut dan meluas, pemberian izin ini akan mendorong dominasi aktor lokal dalam sektor pertambangan yang akan membuat akses masuk bagi investor asing semakin terbatas. Hal ini agaknya berkontradiksi dengan aturan dalam Undang-undang Cipta Kerja yang berorientasi liberalisasi sektor pertambangan, yang seharusnya mempermudah investasi mitra luar negeri (Pattinggi et al., 2021). Apalagi, di banyak daerah, masih kerap terjadi penguasaan usaha tambang oleh oligarki lokal, misalnya di Kalimantan Selatan, yang berkelindan dengan dinamika politik elektoral dan ketokohan

Buku ini tidak diperjualbelikan

yang kian meningkatkan dominasi aktor lokal dalam investasi pertambangan (Hemanona & Suharyono, 2017). Lebih lanjut, sentimen negatif investor asing terhadap Indonesia tentunya akan menurun, membuat prospek Indonesia sebagai negara strategis dalam sektor ini akan memudar dan berujung pada ditinggalkannya Indonesia selaku mitra *de-risking*.

Selain dominasi aktor lokal, Indonesia menemui hambatan dalam infrastruktur pendukung perdagangan dan investasi. Berdasarkan analisis Bank Dunia (2022) pada Gambar 3.2, indeks kualitas infrastruktur transportasi di Indonesia hanya mencapai 2,9 dalam skala 1 hingga 5. Indeks ini bahkan lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN, semisal Vietnam (3,2) dan Thailand (3,6). Sejumlah permasalahan utama transportasi logistik di Indonesia, yakni waktu tunggu di pelabuhan (*dwelling time*) yang masih cukup panjang akibat masih belum meratanya teknologi pendukung bongkar muat logistik. Kemudian, disparitas kualitas jalan raya antara Jawa dan luar Jawa juga cukup signifikan, di mana jalan raya di Luar Jawa masih cukup banyak yang belum teraspal atau belum memiliki lebar tertentu untuk memungkinkan kendaraan logistik melewati jalan tersebut dengan lancar (Curristine et al., 2018, 81). Jika permasalahan infrastruktur ini tidak kunjung membaik, investor dari negara mitra tentu akan mempertimbangkan ulang investasi mereka di Indonesia, seiring dengan masih banyaknya negara ASEAN yang memiliki infrastruktur transportasi yang lebih baik untuk kelancaran logistik mereka.

Buku ini tidak diperjualbelikan



Sumber: Bank Dunia (2022)

Gambar 3.2 Indeks Korelasi antara Perdagangan dan Infrastruktur Terkait

Hambatan domestik ketiga yang dihadapi Indonesia dalam kapitalisasi tren *de-risking* adalah permasalahan kebijakan dan regulasi yang berbelit dan tumpang tindih. Hingga saat ini, upaya pemerintah untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan iklim investasi, seperti UU Cipta Kerja nampaknya belum menunjukkan hasil yang memuaskan, di mana masih terjadi keluhan terkait rumitnya regulasi di Indonesia (Intan, 2020; USDS, 2023). Isu ini pula digarisbawahi oleh Kamar Dagang AS di Indonesia (AMCHAM). Dalam laporannya, banyak keluhan dari investor AS terkait dengan birokrasi yang kompleks, di mana tiap kementerian memiliki aturan yang berbeda-beda terkait perizinan investasi. Sistem *online single submission* (OSS) yang saat ini diimplementasikan berdasarkan UU Cipta Kerja belum terkoordinasi secara merata, di mana kementerian seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih mensyaratkan pengumpulan dokumen secara manual (EYI, 2022, 3). Miskoordinasi ini juga memperpanjang waktu tunggu perizinan

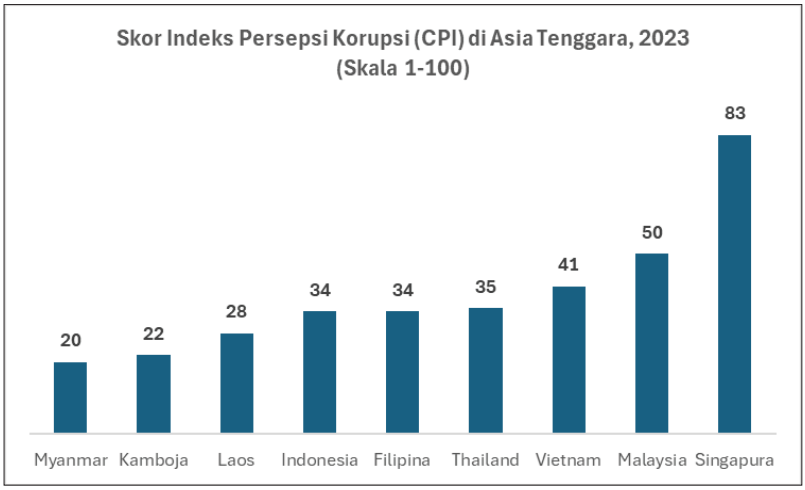
Buku ini tidak diperjualbelikan

yang membuat realisasi investasi tidak lancar, misalnya pengurusan AMDAL memerlukan waktu tunggu hingga 150 hari (EYI, 2022, 28).

Penegakan korupsi, terutama di tingkat daerah, juga masih belum efektif, terutama setelah revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2019 yang tidak hanya mengurangi independensi lembaga penegakan hukum tersebut karena semakin kuatnya pengawasan langsung dari pemerintah, tetapi juga mengurangi jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK.[10] Hingga saat ini, Indonesia masih menjadi salah satu negara Asia Tenggara dengan indeks persepsi korupsi (*corruption perceptions index*/CPI) terendah di Kawasan (Gambar 3.3). Transparency International (2023) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-115 dari 180 negara dengan skor hanya 34 dari 100. Adapun negara lain seperti Vietnam menempati peringkat ke-83 dengan skor 41 dari 100, dan Malaysia pada peringkat ke-56 dengan skor 50 dari 100. Sejauh ini, Indonesia hanya menempati peringkat keenam di Asia Tenggara dalam hal indeks persepsi korupsi, jauh tertinggal dibandingkan Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Praktis, hal ini mendisrupsi iklim investasi di Indonesia yang memerlukan kepastian dan ketegasan hukum. Ditambah, UU Cipta Kerja yang seharusnya memperbaiki iklim investasi dengan kemudahan perizinan melalui sentralisasi perizinan justru mempersempit ruang akuntabilitas dan memperlemah aspek integritas, seiring dengan ketiadaan aturan turunan untuk memastikan transparansi izin perusahaan (TI, 2023, 9–10).

[10] Tercatat, terjadi penurunan jumlah penanganan kasus korupsi oleh KPK secara signifikan antara tahun 2019 dan 2021. Pada tahun 2019, KPK tercatat menangani 153 kasus korupsi. Pada tahun 2020 dan 2021, kasus korupsi yang ditangani KPK menurun menjadi 75 dan 88 (USDS, 2023).

Buku ini tidak diperjualbelikan



Sumber: Transparency International (2023)

Gambar 3.3 Skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) di Asia Tenggara

2. Limitasi Internasional

Selain berbagai permasalahan dan batasan domestik, usaha Indonesia dalam konteks *de-risking* geoekonomi juga terkendala oleh kapasitas Indonesia dalam mengapitalisasi relasinya dengan berbagai negara mitra strategis. Pertama, adalah dominasi Tiongkok dalam dinamika sektor mineral kritis dan teknologi di Indonesia yang justru dipertahankan oleh sebagian kementerian dan lembaga negara. Investasi Tiongkok di Indonesia didominasi oleh raksasa pertambangan dan industri mineral, seperti Tsingshan Group yang merupakan produsen baja nirkarat terbesar di Tiongkok yang beroperasi di Indonesia dan Lygend Resources & Technology yang merupakan perusahaan nikel terbesar di Tiongkok (Thibault, 2024, 21–22; Yean & Negara, 2020, 14). Di Morowali, Sulawesi Tengah sendiri, perusahaan-perusahaan tersebut menguasai lebih dari 2.000 hektare lahan pertambangan dan mempekerjakan lebih dari 43.000 karyawan lokal dan asing (Tritto, 2023, 7–8). Adapun secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan tersebut memproduksi lebih dari 40% dari bahan dasar baterai kendaraan listrik di dunia (Tritto, 2023, 8).

Buku ini tidak diperjualbelikan

Dominasi tersebut dipertahankan oleh sejumlah elite politik dan pemerintahan Indonesia, di mana mereka memberikan 'karpet merah' untuk memberi aneka prioritas dan kemudahan perusahaan Tiongkok untuk berbisnis di Indonesia (Pramono et al., 2022; Rosada, Wibisana, & Paksi, 2023; Tritto, 2023, 11). Sebagai contoh, sejak tahun 2022, promosi kemudahan berbisnis di Indonesia hampir setiap tahun dilakukan oleh sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan tajuk Forum Kemitraan Bisnis Indonesia-Tiongkok. Selain diskusi interaktif, forum tersebut juga menjadi ajang perkenalan dan promosi sektor-sektor strategis, termasuk pertambangan mineral kritis, yang kemudian memperluas keterlibatan investor Tiongkok di Indonesia (KKBKIRI, 2023).

Di sisi lain, promosi serupa kepada negara-negara mitra yang berseberangan dengan Tiongkok, seperti AS, Jepang, Australia, dan Eropa kenyataannya masih belum begitu gencar. Sebagai contoh, sekalipun Indonesia dan Australia terus meningkatkan dialog mengenai investasi dan telah menjajaki peningkatan status relasi hingga level strategis-komprehensif, promosi investasi masih belum terlalu gencar dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait. Hingga tahun 2023, Canberra baru berinvestasi senilai US$ 545 juta—kurang dari 10% dari investasi Tiongkok di Indonesia pada tahun yang sama (BKPM, 2023). Hal ini menunjukkan kurangnya upaya kapitalisasi kemitraan oleh Pemerintah Indonesia terhadap negara-negara selain Tiongkok yang dapat menjadi preseden negatif bagi mereka, mengingat ketergantungan yang tetap tinggi kepada Tiongkok akan dipandang sebagai ancaman keamanan.

Kedua, adalah masih minimnya kesadaran dan konsistensi Pemerintah Indonesia terhadap rezim pembangunan berkelanjutan**.** Sekalipun telah memiliki aturan-aturan hukum payung terkait kelestarian lingkungan, seperti yang tertuang dalam UU Cipta Kerja, Pemerintah Indonesia belum secara spesifik memiliki strategi untuk mendorong pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab *(responsible business conduct)* yang berorientasi pada rezim lingkungan hidup

Buku ini tidak diperjualbelikan

global, seperti Perjanjian Paris (USDS, 2021). Contoh lainnya, Pemerintah Indonesia belum menaati aturan OECD terkait perusahaan multinasional pertambangan dan rantai suplai mineral (USDS, 2023). Padahal, strategi tersebut penting untuk mendorong kepatuhan investor dan perusahaan tambang terhadap aturan terkait lingkungan. Lebih lanjut, strategi ini krusial untuk menjaga citra Indonesia di mata negara-negara Barat yang cenderung peduli terhadap pembangunan berkelanjutan sekaligus memastikan keberlanjutan bisnis yang menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Ketiga, upaya Indonesia untuk melakukan kapitalisasi kemitraan dengan negara-negara alternatif juga terhambat akan ambiguitas sikap Indonesia sendiri. Dalam dekade terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia menjalin kemitraan yang relatif sama erat, baik dengan Tiongkok maupun AS. Indonesia telah meningkatkan relasi kemitraan dengan kedua negara hingga level strategis-komprehensif dan telah mencapai aneka kerja sama dalam berbagai sektor (KLNRI, 2023; TWH, 2023). Di satu sisi, sikap ini memang menguntungkan Indonesia, di mana Jakarta dapat memperoleh aneka keuntungan untuk pengembangan sektor-sektor strategis seperti teknologi dan pertambangan dari kedua negara besar tersebut. Akan tetapi, di tengah tren geoekonomi yang semakin dikotomis dan tersekuritisasi, sikap ini dapat menjadi bumerang bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia akan dipandang negatif sebagai negara yang ambigu dalam konteks geoekonomi dan berisiko merugikan salah satu pihak. Alhasil, kepercayaan mitra alternatif terhadap komitmen Indonesia akan berkurang dan berisiko membuat upaya *de-risking* Indonesia menjadi bersifat sekadar simbolis (Storey, 2021).

Hal ini berbeda dengan Vietnam yang sejak awal memberikan sikap yang jelas terhadap tren geoekonomi di Indo-Pasifik. Sekalipun Vietnam bukan merupakan sekutu formal AS, negara tersebut menjalin kemitraan yang lebih kuat dengan AS seiring dengan memburuknya relasi dengan Tiongkok akibat sengketa Laut Tiongkok Selatan. Hal ini mendorong kepercayaan yang lebih tinggi dari AS dan perusahaan-perusahaan teknologinya, seperti Nvidia dan Intel,

Buku ini tidak diperjualbelikan

yang berencana akan membuka pabrik di Vietnam sebagai bentuk *de-risking* AS terhadap Tiongkok (Benson & Sicilia, 2023; Nangoy & Munthe, 2023). Adapun komitmen investasi AS di Indonesia sejauh ini tidak banyak menyentuh sektor tersebut, dan lebih banyak berkutat pada pengembangan energi terbarukan di bawah lingkup *Just Energy Transition Partnership* (JETP), tanpa kesepakatan perdagangan dan investasi bilateral yang bersifat formal. Hal ini justru menunjukkan minimnya kepercayaan investor AS terhadap prospek Indonesia dalam tren *de-risking* dan dinamika geoekonomi regional.

F. Penutup

Transformasi Asia-Pasifik menjadi Indo-Pasifik sebagai konsep geostrategis berimbas pada munculnya tatanan geoekonomi di kawasan. Dalam tatanan geoekonomi, Tiongkok dan AS saling berusaha untuk melakukan *de-risking* dalam memitigasi kerja sama dan ketergantungan ekonomi yang semakin rawan untuk dipersenjatai. Sebagai negara yang berada di posisi tengah, Indonesia seharusnya dapat memperoleh keuntungan dari tren ini Indonesia merupakan negara yang bersahabat baik dengan AS maupun Tiongkok. Selain itu, kekayaan mineral kritis Indonesia yang masif dan pasar yang besar membuat Indonesia menjadi mitra alternatif yang ideal. Indonesia telah berusaha mengapitalisasi tren *de-risking* dengan mendorong diversifikasi dan perluasan pasar dengan negara yang saling berusaha mengurangi ketergantungan pada sektor mineral dan teknologi kritis melalui kanal bilateral dan multilateral. Meski demikian, Indonesia mengalami berbagai batasan dari iklim geopolitik dan geoekonomi global, serta faktor domestik.

Menguatnya dominasi aktor lokal berisiko membuat investor asing sulit untuk melakukan eksplorasi pada sektor mineral dan teknologi. Lebih lanjut, kualitas dan kuantitas infrastruktur yang belum merata juga menjadi masalah pelik di Indonesia. Mirisnya, kualitas infrastruktur Indonesia di ASEAN pula kalah dibandingkan Thailand dan Vietnam, yang dapat membuat para investor mempertimbangkan ulang rencana proyek investasi mereka di Indonesia. Terakhir, sikap

Buku ini tidak diperjualbelikan

pemerintah Indonesia yang masih kerap memprioritaskan investasi dari Tiongkok dan kurangnya ketegasan terhadap relasinya dengan AS membuat posisi Indonesia terkesan ambigu dan sulit untuk memperoleh kepercayaan yang lebih mendalam dari AS dan sekutu-sekutunya dalam tren *de-risking*.

Dengan tensi AS-Tiongkok yang semakin mengalami eskalasi di Indo-Pasifik, besar kemungkinan Indonesia akan tetap menghadapi tren *de-risking* dalam beberapa waktu ke depan. Keputusan Presiden AS Biden dan bakal calon presiden Donald Trump untuk saling adu kuat dalam meningkatkan jumlah tarif ke produk Tiongkok menjelang pemilu AS tahun 2024 menandakan bahwa tren yang sama masih bertahan: ekonomi dibingkai melalui kacamata keamanan dan keterbukaan pasar dianggap sebagai kerentanan. Dalam upaya mengapitalisasi tren ini, diplomasi ekonomi Indonesia yang lebih proaktif dalam mencari celah-celah pasar tidaklah cukup. Indonesia perlu juga melakukan transformasi di tatanan domestik melalui perbaikan institusi, regulasi, dan infrastruktur yang dapat membuat Indonesia menjadi mitra yang dilirik di tengah tren pengurangan risiko. Tanpanya, besar kemungkinan tatanan geoekonomi yang ada hanya semakin menyingkirkan Indonesia dari kancah ekonomi dan keamanan kawasan, termasuk negara tetangga di ASEAN yang memiliki performa lebih baik dari Indonesia.

Referensi

Acharya, A. (2024, June 13). Turning the idea of the Indo-Pacific into reality. *East Asia Forum*. Retrieved from https://eastasiaforum.org/2024/06/13/turning-the-idea-of-the-indo-pacific-into-reality/

Anas, T., Hill, H., Narjoko, D., & Putra, C. T. (2022). The Indonesian economy in turbulent times. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(3), 241–271. doi:10.1080/00074918.2022.2133344

Anwar, D. F. (2019). Indonesia-China relations: To be handled with care. *ISEAS Perspective*, (19).

Buku ini tidak diperjualbelikan

Anwar, D. F. (2023). Indonesia's hedging plus policy in the face of China's rise and the US-China rivalry in the Indo-Pacific region. *The Pacific Review*, *36*(2), 351–377. doi:10.1080/09512748.2022.2160794

Ardhani, I., Nandyatama, R. W., & Alvian, R. A. (2023). Middle power legitimation strategies: the case of Indonesia and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. *Australian Journal of International Affairs*, *77*(4), 359–379. doi:10.1080/10357718.2023.2228709

ASEAN. (2023a). ASEAN Leaders' declaration on developing regional electric vehicle ecosystem [Press release]. Retrieved from https://asean.org/wp-content/uploads/2023/05/07-ASEAN-Leaders-Declaration-on-Developing-Regional-EV-Ecosystem_adopted.pdf

ASEAN. (2023b). *ASEAN statistical yearbook 2023*. ASEAN Secretariat.

Babić, M., & Dixon, A. D. (2022). Is the China effect real? Ideational change and the political contestation of chinese state-led investment in Europe. *The Chinese Journal of International Politics*, *15*(2), 111–139. doi:10.1093/cjip/poac009

BAPPENAS. (2023). Rancangan akhir rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025–2045 [Press release]. Retrieved from https://www.bappenas.go.id/berita/rancangan-akhir-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-2025-2045-YohFL

BBC. (2024, June 1). Presiden Jokowi izinkan ormas keagamaan kelola tambang - Rawan 'konflik SARA' dan 'alat perusahaan', kata pegiat lingkungan. *BBC News Indonesia*. Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1ddgk11v0yo

Becker, A. S. (1987). Main Features of United States-Soviet Trade. *Proceedings of the Academy of Political Science*, *36*(4), 67–77. doi:10.2307/1173834

Benson, E., & Sicilia, G. (2023, December 20). A closer look at de-risking. Retrieved from https://www.csis.org/analysis/closer-look-de-risking

Betts, R. K. (1993). Wealth, power, and instability: East Asia and the United States after the Cold War. *International Security*, *18*(3), 34–77.

BKPM. (2023). Realisasi investasi triwulan II dan Januari-Juni 2023 [Press release]. Retrieved from https://www.bkpm.go.id/storage/file/pdf/1690200386.pdf

Blackwill, R. D. (2024, August 1). The rise and fall of the economic pivot to Asia. *Foreign Policy*. Retrieved from https://foreignpolicy.com/2024/08/01/lost-decade-us-economic-pivot-to-asia-defense/

Buku ini tidak diperjualbelikan

Blackwill, R. D., & Harris, J. M. (2016). *War by Other Means. Geoeconomics and Statecraft*. Harvard University Press.

Bonesh, F. R. (2023, October 13). Indonesia's approach to BRICS: Opportunities and membership potential. *ASEAN Briefing*. Retrieved from https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-approach-to-brics-opportunities-and-membership-potential/

Cave, D. (2023, May 22). How 'decoupling' from China became 'de-risking. *The New York Times*. Retrieved from https://www.nytimes.com/2023/05/20/world/decoupling-china-de-risking.html

Chubb, A. (2023). The securitization of 'Chinese influence' in Australia. *Journal of Contemporary China*, *32*(139), 17–34. doi:10.1080/10670564.2022.2052437

Curristine, T. R., Nozaki, M., & Shin, J. (2018). Chapter 4: Developing infrastructure. In L. E. Breuer, J. Guajardo, & T. Kinda (Eds.), *Realizing Indonesia's Economic Potential* (67–84). International Monetary Fund (IMF).

Damuri, Y. R., Atje, R., Alexandra, L. A., & Soedjito, A. (2014). *Maritime silk road and Indonesia's perspective of maritime state*. Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

DFAT. (2020). Plan of action for the Indonesia-Australia comprehensive strategic partnership (2020–2024) [Press release]. Retrieved from https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/plan-of-action-for-the-indonesia-australia-comprehensive-strategic-partnership-2020-2024.pdf

DFAT. (2021, September 9). Joint statement on the seventh Indonesia-Australia foreign and defence ministers 2+2 meeting [Press release]. Retrieved from https://www.dfat.gov.au/news/media-release/joint-statement-seventh-indonesia-australia-foreign-and-defence-ministers-22-meeting

DIS. (2023, November 24). Indonesia and Australia cooperation on electric vehicles [Press release]. Retrieved from https://www.minister.industry.gov.au/ministers/husic/media-releases/indonesia-and-australia-cooperation-electric-vehicles

Buku ini tidak diperjualbelikan

Donnellon-May, G. (2023, February 8). BRICS expanding to Saudi Arabia, Indonesia and beyond holds promise, but challenges remain. *South China Morning Post*. Retrieved from https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3209345/brics-expanding-saudi-arabia-indonesia-and-beyond-holds-promise-challenges-remain

Dreher, A., Fuchs, A., Parks, B., Strange, A., & Tierney, M. J. (2022). *Banking on Beijing: The aims and impacts of China's overseas development program*. Cambridge University Press.

EYI. (2022). *US-Indonesia Investment Report 2022. Resilient Indonesia*. Retrieved from https://www.amcham.or.id/viewer/web/viewer.html?file=https://www.amcham.or.id/document/material/US_Indonesia_Investment_Report_2022_63904f3e09e5e.pdf

Farrell, H., & Newman, A. L. (2019). Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion. *International Security, 44*(1), 42-79. doi:https://doi.org/10.1162/isec_a_00351

Garlick, J. (2023). *Advantage China: agent of change in an era of global disruption*. Bloomsbury Publishing.

Gertz, G., & Evers, M. M. (2020). Geoeconomic competition: Will state capitalism win? *The Washington Quarterly*, *43*(2), 117–136. doi:10.1080/0163660X.2020.1770962

Ghifari, D. (2023, September 8). Indonesia invites US to work on critical minerals agreement. *The Jakarta Post*. Retrieved from https://www.thejakartapost.com/business/2023/09/08/jokowi-urges-us-to-start-discussion-on-critical-mineral-agreement.html

Ghiretti, F. (2023, June). *How China Imposes Sanctions. A guide to the evolution of Beijing's New Policy Tool*. Retrieved from https://merics.org/sites/default/files/2023-06/MERICS%20Report%20How%20China%20imposes%20sanctions.pdf

Goh, E. (2007). Great powers and hierarchical order in Southeast Asia: Analyzing regional security strategies. *International Security*, *32*(3), 113–157. doi:10.1162/isec.2008.32.3.113

GTA. (2024, August 24). United States of America. Retrieved from https://www.globaltradealert.org/country/222/period-from_20090101/period-to_20240920

Hartarto, A. (2023). ASEAN as Epicentrum of growth: Propelling Southeast Asia as an economic powerhouse. *ASEAN Economic Integration Brief*, (13), 5–6.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Heiduk, F., & Wacker, G. (2020). From Asia-Pacific to Indo-Pacific: Significance, implementation and challenges. *SWP Research Paper*, (9), 1–43. doi:https://doi.org/10.18449/2020RP09

Hemanona, V., & Suharyono, S. (2017). Analisis pengaruh foreign direct investment terhadap country advantages Indonesia (Studi terhadap FDI Amerika Serikat di Indonesia). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, *52*(1), 16–25.

Hendrix, C. (2023, November 20). Rethinking Indonesia's nickel policies to power economic growth. *East Asia Forum*. Retrieved from https://eastasiaforum.org/2023/11/20/rethinking-indonesias-nickel-policies-to-power-economic-growth/

Hunt, P.-A., Biesheuvel, T., & Burton, M. (2024, July 11). BHP to shut Australia nickel business as glut upends market. *BNN Bloomberg*. Retrieved from https://www.bnnbloomberg.ca/business/international/2024/07/11/bhp-to-halt-australia-nickel-project-as-glut-upends-industry/

IEA. (2023). *Energy Technology Perspectives 2023*. International Energy Agency (IEA).

Indrawati, S. M., Satriawan, E., & Abdurohman, A. (2024). Indonesia's fiscal policy in the aftermath of the pandemic. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *60*(1), 1–33. doi:10.1080/00074918.2024.2335967

Intan, N. (2020, August 6). Regulasi berbelit, alasan investor AS susah masuk Indonesia. *Republika*. Retrieved from https://ekonomi.republika.co.id/berita/qemr3x383/regulasi-berbelit-alasan-investor-as-susah-masuk-indonesia

Jakjanihan, A. (2023, December). Keeping the IPEF afloat is in Indonesia's interest. *East Asia Forum*. Retrieved from https://eastasiaforum.org/2023/12/09/keeping-the-ipef-afloat-is-in-indonesias-interest/

Jennings, R. (2024, May 18). China's high-speed railway in Indonesia is adding trips – but debt could hold back the gravy train. *South China Morning Post*. Retrieved from https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3263108/chinas-high-speed-railway-indonesia-adding-trips-debt-could-hold-back-gravy-train

Jiang, Y. (2023, August). *PRC's approach to Indonesia: Competing for regional influence*. Retrieved from https://chinamatters.org.au/wp-content/uploads/2023/08/PRCs-apporach-to-Indonesia-Yun-Jiang-August-2023.pdf

Buku ini tidak diperjualbelikan

Kang, D. C. (2003). Getting Asia wrong: The need for new analytical frameworks. *International Security*, *27*(4), 57–85.

Kang, D. C. (2022). Still getting Asia wrong: No "Contain China" coalition exists. *The Washington Quarterly*, *45*(4), 79–98. doi:10.1080/0163660X.2022.2148918

Karim, M. F. (2018). Middle power, status-seeking and role conceptions: the cases of Indonesia and South Korea. *Australian Journal of International Affairs*, *72*(4), 343–363. doi:10.1080/10357718.2018.1443428

Kaur, P., & Kaur, K. (2015). New Allies for BRICS - Egypt or Indonesia. *Abhigyan*, *33*(3), 16–27. doi:10.1177/0970238520150302

KKBKIRI. (2023, February 21). Indonesia perkuat kerja sama dengan Tiongkok melalui forum kemitraan bisnis ketiga [Press release]. Retrieved from https://maritim.go.id/detail/indonesia-perkuat-kerja-sama-dengan-tiongkok-melalui-forum-kemitraan-bisnis-ketiga

KLNRI. (2022, July 7). Pertemuan bilateral Menlu RI - Menlu RRT [Press release]. Retrieved from https://kemlu.go.id/portal/id/read/3781/view/pertemuan-bilateral-menlu-ri-menlu-rrt

KLNRI. (2023, October 18). Joint statement on deepening comprehensive strategic cooperation between the people's Republic of China and the Republic of Indonesia, 18 October 2023, Beijing [Press release]. Retrieved from https://kemlu.go.id/portal/en/read/5393/siaran_pers/joint-statement-on-deepening-comprehensive-strategic-cooperation-between-the-peoples-republic-of-china-and-the-republic-of-indonesia-18-october-2023-beijing

KPRI. (2024, August 4). Neraca perdagangan dengan mitra dagang [Press release]. Retrieved from https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/neraca-perdagangan-dengan-mitra-dagang

Kuik, C.-C. (2023). Shades of grey: riskification and hedging in the Indo-Pacific. *The Pacific Review*, *36*(6), 1181–1214. doi:10.1080/09512748.2022.2110608

Lee, L. Y., & Kaufman, N. (2023, November 13). Q&A | Solar tariffs and the US Energy Transition. Retrieved from https://www.energypolicy.columbia.edu/qa-solar-tariffs-and-the-us-energy-transition/#

Li, M. (2020). The Belt and Road Initiative: geo-economics and Indo-Pacific security competition. *International Affairs*, *96*(1), 169–187. doi:10.1093/ia/iiz240

Buku ini tidak diperjualbelikan

Lim, D. (2023, July 13). Economic security and hedging in Southeast Asia. *East Asia Forum*. Retrieved from https://eastasiaforum.org/2023/07/12/economic-security-and-hedging-in-southeast-asia/

Lim, D. J., & Cooper, Z. (2015). Reassessing hedging: The Logic of alignment in East Asia. *Security Studies*, *24*(4), 696–727. doi:10.1080/09636412.2015.1103130

Luttwak, E. N. (1990). From geopolitics to geo-economics: Logic of conflict, grammar of commerce. *The National Interest*, *(20)*, 17–23.

Mearsheimer, J. (2005, November 8). The rise of China will not be peaceful at all. *The Australian*. Retrieved from https://www.mearsheimer.com/wp-content/uploads/2019/06/The-Australian-November-18-2005.pdf

Medcalf, R. (2020). *Indo-pacific empire: China, America and the contest for the world's pivotal region*. Manchester University Press.

Menon, J. (2024, March 23). The export-led model is evolving, not dying. *East Asia Forum*. Retrieved from https://eastasiaforum.org/2024/03/23/the-export-led-model-is-evolving-not-dying/

Nangoy, F. (2024, July 16). US approaches Indonesia for multinational critical mineral partnership. *Reuters*. Retrieved from https://www.reuters.com/markets/commodities/us-approaches-indonesia-multinational-critical-mineral-partnership-2024-07-15/

Nangoy, F., & Munthe, B. C. (2023, February 6). Investments in Indonesia's nickel industry. *Reuters*. Retrieved from https://www.reuters.com/markets/commodities/investments-indonesias-nickel-industry-2023-02-06/

Ng, J., & Santiko, U. (2023). Is Indonesia about to join BRICS? *IDSS Paper*, (057), 1–4.

NI. (2024). Nickel operations in Indonesia. Retrieved from https://nickelindustries.com/operations/

Nikoladze, M., Meng, P., & Yin, J. (2023, June 14). How is China mitigating the effects of sanctions on Russia? Retrieved from https://www.atlanticcouncil.org/blogs/econographics/how-is-china-mitigating-the-effects-of-sanctions-on-russia/

OUSTR. (2024). The People's Republic of China [Press release]. Retrieved from https://ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan/peoples-republic-china

Buku ini tidak diperjualbelikan

Pattinggi, D. M. M., Goerke, M., Dawborn, D., Gadd, A., & Handoyo, A. S. T. (2021, March 3). Indonesia's new investment list: Liberalisation of foreign investment in the energy, resources and infrastructure sectors. Retrieved from https://www.herbertsmithfreehills.com/notes/indonesia/2021-03/indonesias-new-investment-list-liberalisation-of-foreign-investment-in-the-energy-resources-and-infrastructure-sectors

Patunru, A. A. (2023). Trade policy in Indonesia: Between ambivalence, pragmatism and nationalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *59*(3), 311–340. doi:10.1080/00074918.2023.2282821

Pramono, A. H., Manessa, M. D. M., Indrawan, M., Sari, D. A., Fuad, H. A. H., Khasanah, N., Pratiwi, K., Siregar, R. S. E., Winarni, N. L., Supriatna, J., Haryanto, B., Gallagher, K. P., Ray, R., Simmons, B. A., & Yogaswara, H. (2022). China's belt and road initiative in Indonesia: Mapping and mitigating environmental and social risks. *Global China Initiative (GCI) Working Paper*, (021), 1–24.

Prasetyo, K. C. (2023). Global south responses to China's BRI projects: A case study of Jakarta-Bandung high-speed railway project. *Global South Review*, *5*(2), 7–26. doi:https://doi.org/10.22146/globalsouth.90951

Priamarizki, A. (2024). Understanding the domestic determinants of Indonesia's hedging policy towards the United States and China. *Contemporary Southeast Asia*, *46*(1), 19–42.

Raharjo, S. N. I., Setiawan, B., Ekawati, E., & Ghafur, M. F. (2023). Managing social resilience on outmost small islands through cross-border cooperation: A study of the marore island, Indonesia. *Jurnal Archipelago*, *2*(2), 171–180.

Reinsch, W. A. (2023, January 3). The end of neoliberalism? Retrieved from https://www.csis.org/analysis/end-neoliberalism

Reynolds, M., & Goodman, M. P. (2023, March 21). Deny, deflect, deter: Countering China's economic coercion. Retrieved from https://www.csis.org/analysis/deny-deflect-deter-countering-chinas-economic-coercion

Roberts, A., Moraes, H. C., & Ferguson, V. (2019). Toward a geoeconomic order in international trade and investment. *Journal of International Economic Law*, *22*(4), 655–676.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Rosada, F., Wibisana, R. A. A., & Paksi, A. K. (2023). The impact of Indonesia-China nickel cooperations on Indonesia's economy and environment. *Nation State: Journal of International Studies*, *6*(2), 96–116. doi:https://doi.org/10.24076/nsjis.v6i2.1270

Schoenbaum, T. J. (2023). The biden administration's trade policy: Promise and reality. *German Law Journal*, *24*(1), 102–124. doi:10.1017/glj.2023.7

Seow, B. (2023, November 17). Asia trade talk stumble is another setback for US: Analysts. *The Jakarta Post*. Retrieved from https://www.thejakartapost.com/business/2023/11/17/asia-trade-talk-stumble-is-another-setback-for-us-analysts.html

Sinclair, L. (2024, February 28). Nickel and lithium: Cooperation or competition with Indonesia? Retrieved from https://www.sydney.edu.au/sydney-southeast-asia-centre/news/2024/02/28/nickel-and-lithium-cooperation-or-competition-with-indonesia.html

SKRI. (2019, June 12). Terima pengurus KADIN dan HIPMI, Presiden Jokowi ajak manfaatkan peluang dari perang dagang [Press release]. Retrieved from https://setkab.go.id/terima-pengurus-kadin-dan-hipmi-presiden-jokowi-ajak-manfaatkan-peluang-dari-perang-dagang/

SKRI. (2024, May 16). Indonesia seeks to become OECD member state by 2027 [Press release]. Retrieved from https://setkab.go.id/en/indonesia-seeks-to-become-oecd-member-state-by-2027/

Storey, H. (2021, November 9). Do comprehensive strategic partnerships matter? *The Interpreter*. Retrieved from https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/do-comprehensive-strategic-partnerships-matter

Subianto, P. (2024, June 12). The road ahead for Indonesia—One of the fastest growing economies in Asia | Opinion. *Newsweek*. Retrieved from https://www.newsweek.com/road-ahead-indonesiaone-fastest-growing-economies-asia-opinion-1911354

Sulaiman, S. (2024, February 29). Indonesia aims to become OECD member in 2 to 3 years, senior minister says. *Reuters*. Retrieved from https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-aims-become-oecd-member-2-3-years-senior-minister-says-2024-02-29/

Taplin, N. (2024, June 4). Why China's overcapacity problem is about to get even worse, in seven charts. *The Wall Street Journal*. Retrieved from https://www.wsj.com/world/asia/why-chinas-overcapacity-problem-is-about-to-get-even-worse-in-seven-charts-d0e25e38

Buku ini tidak diperjualbelikan

Taufikurahman, M. R., Firdaus, A. H., Ahmad, T., Febriani, D. A., & Permana, A. S. (2023). The impact of mining sector investment on national and regional economic performance. *INDEF Policy Brief*, (07), 1–9.

Taylor, B. (2018). *The four flashpoints: How Asia goes to war*. La Trobe University Press.

Thibault, M. (2024). The prospects of Indonesia's nickel boom amidst a systemic challenge from coal. *IFRI Papers*, 1–42.

Thompson, B. (2024, January 30). Indonesian nickel miner boosts returns as mines fight to survive. *Financian Review*. Retrieved from https://www.afr.com/companies/mining/indo-nickel-miner-boosts-dividend-as-aussie-rivals-fight-to-survive-20240130-p5f119

TI. (2023). Corruption Perceptions Index 2023. Retrieved from https://www.transparency.org/en/cpi/2023

Tritto, A. (2023). *How Indonesia used chinese industrial investments to turn nickel into the new gold*. Retrieved from Washington DC, USA: https://carnegie-production-assets.s3.amazonaws.com/static/files/files__Tritto_Indonesia_Nickel.pdf

TWH. (2017, December 18). Remarks by President Trump on the administration's national security strategy [Press release]. Retrieved from https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-administrations-national-security-strategy/

TWH. (2022, August 9). Fact sheet: Chips and science act will lower costs, create jobs, strengthen supply chains, and counter China [Press release]. Retrieved from https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/09/fact-sheet-chips-and-science-act-will-lower-costs-create-jobs-strengthen-supply-chains-and-counter-china/

TWH. (2022, November 16). G20 Bali leaders' declaration [Press release]. Retrieved from https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/11/16/g20-bali-leaders-declaration/

TWH. (2022, October 12). National security strategy [Press release]. Retrieved from https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf

Buku ini tidak diperjualbelikan

TWH. (2023, April 27). Remarks by national security advisor jake sullivan on renewing American economic leadership at the brookings institution [Press release]. Retrieved from https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/04/27/remarks-by-national-security-advisor-jake-sullivan-on-renewing-american-economic-leadership-at-the-brookings-institution/

TWH. (2023, May 20). G7 Hiroshima leaders' communiqué [Press release]. Retrieved from https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/05/20/g7-hiroshima-leaders-communique/

TWH. (2023, November 13). Joint Statement from the Leaders of the United States and the Republic of Indonesia: Elevating relations to a comprehensive strategic partnership [Press release]. Retrieved from https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/11/13/joint-statement-from-the-leaders-of-the-united-states-and-the-republic-of-indonesia-elevating-relations-to-a-comprehensive-strategic-partnership/

Umar, A. R. M. (2023). The rise of the Asian middle powers: Indonesia's conceptions of international order. *International Affairs*, *99*(4), 1459–1476. doi:10.1093/ia/iiad167

UNESCAP. (2022). *Trade agreements in Asia and the Pacific: Bigger, deeper, digital and more supportive of sustainable development?* Bangkok, Thailand: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP).

USDS. (2021). 2021 Investment climate statements: Indonesia [Press release]. Retrieved from https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/indonesia/

USDS. (2023). 2023 Investment climate statements: Indonesia [Press release]. Retrieved from https://www.state.gov/reports/2023-investment-climate-statements/indonesia/

von der Leyen, U. (2023, March 30). Speech by President von der Leyen on EU-China relations to the mercator institute for China studies and the European policy centre [Press release]. Retrieved from https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_2063

WB. (2022). Logistics performance index: Quality of trade and transport related infrastructure [Press release]. Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/LP.LPI.INFR.XQ?locations=XD

Buku ini tidak diperjualbelikan

Wenbin, Y. (2021, June 6). China, Indonesia hold inaugural meeting on high-level dialogue cooperation mechanism. *Xinhua Net*. Retrieved from http://www.xinhuanet.com/english/2021-06/06/c_139991980.htm

Wesley, M. (2016). *Australia and the rise of geoeconomics*. Strategic and Defence Studies Center, College of Asia and the Pacific, Australian National University (ANU).

Wester, S. (2023, November 8). *Balancing act: Assessing China's growing economic influence in ASEAN*. Retrieved from https://asiasociety.org/policy-institute/balancing-act-assessing-chinas-growing-economic-influence-asean

Wihardja, M. M. (2024, June 3). The impacts of the US tariff hikes on Southeast Asian Economies. *Fulcrum*. Retrieved from https://fulcrum.sg/the-impacts-of-the-us-tariff-hikes-on-southeast-asian-economies/

Wijaya, T., & Jayasuriya, K. (2024). Militarised neoliberalism and the reconstruction of the global political economy. *New Political Economy*, *29*(4), 546–559. doi:10.1080/13563467.2023.2298199

Wilkins, T. S. (2012). 'Alignment', not 'alliance' – the shifting paradigm of international security cooperation: Toward a conceptual taxonomy of alignment. *Review of International Studies*, *38*(1), 53–76. doi:10.1017/S0260210511000209

Wilson, J. D. (2012). Resource security: a new motivation for free trade agreements in the Asia-Pacific region. *The Pacific Review*, *25*(4), 429–453. doi:10.1080/09512748.2012.685098

Yean, T. S., & Negara, S. D. (2020). Chinese investments in industrial parks: Indonesia and Malaysia compared. *ISEAS Economics Working Paper*, (08), 1–39.

Yuniar, R. W. (2024, August 2). Is Indonesia limiting Chinese nickel investments to gain US trade benefits. *South China Morning Post*. Retrieved from https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3272838/indonesia-limiting-chinese-nickel-investments-gain-us-trade-benefits

Zhang, M. Y. (2023, December 2). Australia, Indonesia aim to challenge China's Dominance in EVs and batteries. *The Diplomat*. Retrieved from https://thediplomat.com/2023/12/australia-indonesia-aim-to-challenge-chinas-dominance-in-evs-and-batteries/

Buku ini tidak diperjualbelikan

BAB 4

Rivalitas Tiongkok-Amerika Serikat dalam Industri Nikel di Indonesia

Paulus Rudolf Yuniarto & Wabilia Husnah

A. Nikel "Emas Putih" yang Diperebutkan

Nikel merupakan komponen kunci dalam produksi baterai lithium-ion, sebuah bahan penting untuk kendaraan listrik dan produk teknologi semikonduktor lainnya (Ardian, 2021). Permintaan nikel secara global meningkat pada tahun-tahun belakangan ini, seiring dengan meningkatnya penggunaan nikel untuk baterai oleh produsen kendaraan listrik (*Electric Vehicles*; EVs), ditambah pula oleh preferensi untuk meningkatkan kualitas udara perkotaan, mitigasi perubahan iklim global, dan meningkatkan ketahanan energi di dalam negeri (Graham et al., 2021). Meningkatnya popularitas kendaraan listrik juga menjadi penyebab utama harga nikel menjadi naik. Misalnya, sejak awal tahun 2021, harga nikel naik dari sekitar US$15.000 per ton

P. R. Yuniarto & W. Husnah
Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: rudolfyuniarto@gmail.com

© 2026 Editor & Penulis

Yuniarto, P. R. & Husnah, W. (2026). Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok Dalam Industri Nikel di Indonesia. Dalam RR. E. Yustiningrum & E. S. Prihatini (Ed.), *Indonesia dalam Kancah Geopolitik di Indo-Pasifik* (115–149). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.2075.c1721
E-ISBN: 978-602-6303-98-1

Buku ini tidak diperjualbelikan

menjadi lebih dari US$26.690 per ton pada bulan Januari 2023, yang merupakan harga terendah sejak akhir November 2022 di London Metal Exchange (Sappor, 2023). Diprediksi peningkatan harga ini akan terus berlanjut, dengan perkiraan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (*Compound Annual Growth Rate*; CAGR) pada permintaan nikel untuk produk baterai antara tahun 2019 dan 2030 yang terus berada di sekitar 32 % (Deloitte, 2022).

Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) adalah dua negara yang industri dalam negerinya mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah produksi kendaraan listrik bertenaga baterai (*battery-powered electric vehicles*; PEV). Sejak tahun 2015, Tiongkok menjadi negara urutan pertama di dunia yang menggunakan kendaraan listrik, disusul AS dan negara-negara Eropa (Graham et al., 2021). Tiongkok saat ini tidak hanya memimpin dunia dalam konsumsi PEV, tapi juga dalam produksi komponen-komponen penting PEV. Hal ini tentu saja memicu persaingan dengan AS dan juga negara lainnya di industri PEV dan sektor pendukungnya. AS dan Tiongkok khususnya bersaing untuk mendapatkan nikel dan turunannya, untuk memasok komponen dan mengamankan industri mobil listrik mereka.

Indonesia, di posisi yang berbeda, bertindak sebagai tuan rumah sumber daya nikel, menjadi partner utama negara yang dapat memenuhi peningkatan permintaan logam ini. Dengan sumber daya yang ada, industri nikel Indonesia tumbuh di tengah kepentingan strategis Tiongkok dan juga AS (KESDMRI, 2021). Terkait hal ini, Presiden Indonesia Joko Widodo telah mengundang Tiongkok dan AS untuk berinvestasi di industri nikel. Langkah ini tentu saja mengubah Indonesia menjadi medan persaingan Tiongkok dan AS, terkait dengan perdagangan maupun industri pengolahan nikel (Junida, 2023).

Persaingan antara Tiongkok dan AS dalam industri nikel di Indonesia, tentu saja berimplikasi pada sisi ekonomi, sosial, maupun politik negara. Di satu sisi, perkembangan industri nikel memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan menciptakan lapangan kerja. Di sisi lain,

Buku ini tidak diperjualbelikan

persaingan antara Tiongkok dan AS juga menimbulkan permasalahan lingkungan maupun sosial kemasyarakatan. Berdasarkan gambaran kondisi di atas, tulisan ini akan menggambarkan bagaimana strategi (kebijakan) Tiongkok dan AS dalam industri nikel dan investasinya serta implikasi sosial-ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran pustaka, kajian mengenai strategi atau kebijakan Tiongkok dan AS dalam industri nikel di Indonesia antara lain dari Heydarian (2021) dan Ross (2020) telah membahas bagaimana strategi persaingan ekonomi-politik kedua negara. Mereka berpendapat bahwa pendekatan Tiongkok terhadap industri ini didasarkan pada nasionalisme sumber daya, sedangkan pendekatan AS didasarkan pada prinsip-prinsip pasar bebas. Smith (2019) serta Xing dan Bernal-Meza (2022) membahas implikasi dari investasi bahwa AS lebih berhati-hati dalam melakukan pendekatan terhadap industri nikel Indonesia. AS mengkhawatirkan pengaruh Tiongkok yang semakin besar dalam industri nikel. AS berupaya menyeimbangkan keinginannya untuk mengamankan akses terhadap nikel Indonesia, dan keinginannya untuk menghindari pertentangan dengan Tiongkok. Sementara itu, Tiongkok menggunakan berbagai cara, termasuk investasi, bantuan, dan perdagangan, untuk mengamankan akses terhadap nikel Indonesia. Mansfield dan Milner (2018) melihat bahwa AS menggunakan *economic statecraft* untuk mempromosikan kepentingannya pada industri nikel Indonesia.

Terkait bagaimana investasi Tiongkok-AS dalam industri nikel di Indonesia, rantai komoditas nikel yang dikembangkan oleh kedua negara merujuk pada konsep analitis dari Sovacool et al. (2020) tentang "*decarbonisation divide*" (kesenjangan dekarbonisasi). Studi ini mengkaji implementasi dan implikasi pertambangan di negara-negara berkembang–termasuk Indonesia–yang memproduksi energi dan bahan baku murah diatur dalam kaitannya dengan tuntutan global dan narasi hijau yang didominasi oleh negara-negara industri. Potensi dampak dari pertambangan nikel, meliputi penggusuran mata pencaharian lokal (Mtero, 2017), memaksa penduduk setempat untuk bekerja tanpa keterampilan (Rubbers, 2020), degradasi lingkungan,

Buku ini tidak diperjualbelikan

dampak terhadap kesehatan masyarakat, pencemaran air (Castillo et al., 2022), dan perampasan tanah (Toumbourou et al., 2022).

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan pada tahun 2022, dengan teknik diskusi terpumpun bersama dengan peneliti dan pejabat pemerintah serta didukung oleh pengumpulan sumber sekunder berupa artikel akademis, dokumen kebijakan dan laporan penelitian. Sesuai dengan tujuan penulisan, analisis dilakukan pada level negara/pemerintah mengenai (a) Industri Nikel di Indonesia pada level nasional, (b) Investasi Nikel Tiongkok di Indonesia, pada hubungan pemerintah Tiongkok dan Indonesia, (c) Investasi Nikel AS di Indonesia, pada hubungan pemerintah AS dan Indonesia, (d) Rivalitas AS-Tiongkok pada Tambang Nikel dan Implikasi Sosial Ekonomi di Indonesia, pada level nasional. Sistematika tulisan ini menggambarkan tiga hal: Pertama, gambaran umum dan peran industri nikel Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sektor baterai kendaraan listrik; Kedua, pendekatan yang digunakan Tiongkok dalam investasi nikel di Indonesia; Ketiga, pendekatan yang digunakan AS dalam investasi nikel di Indonesia; dan Keempat, rivalitas AS-Tiongkok dalam investasi nikel dan implikasi sosial ekonomi dalam persaingan mereka menguasai industri nikel di Indonesia.

B. Industri Nikel Indonesia

Indonesia saat ini bukan hanya negara dengan cadangan nikel terbesar, tetapi salah satu produsen nikel terbanyak di dunia. Pada tahun 2020, Indonesia mengeklaim memiliki total sumber daya nikel sebesar 143 juta ton dan cadangan nikel sebesar 49 juta ton (KESDMRI, 2021). 90 % cadangan nikel Indonesia berada di wilayah timur Indonesia, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara (Bhawono, 2022; Silvanah, 2023). Secara umum, keluaran nikel yang dihasilkan oleh Indonesia diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni Kelas 1, yang mengacu pada nikel elektrolitik, bubuk, briket, dan nikel karbonil; dan Kelas 2, yang mengacu pada *nikel pig iron* (NPI) atau *feronikel* (FeNi) yang digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan baja tahan karat. Fokus industri nikel Indonesia

Buku ini tidak diperjualbelikan

saat ini adalah mengembangkan kemampuan pemrosesan hilir untuk nikel Kelas 2, dengan tujuan akhir mengembangkan fasilitas produksi baterai lithium terintegrasi (Nangoy & Munthe, 2023). Permintaan nikel global selama ini juga didominasi oleh permintaan nikel Kelas 2 yang diperlukan untuk pembuatan baja tahan karat. Namun, dengan maraknya kendaraan listrik, kecenderungan permintaan nikel beralih ke nikel Kelas 1 yang dibutuhkan untuk baterai kendaraan listrik.

Investasi nikel di Indonesia bermula dari kontrak karya tambang nikel laterit dengan *PT International Nickel Indonesia* (PT INCO) pada 1968. Perjanjian kontrak karya tersebut memberikan izin untuk menambang hingga 30 tahun di provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Perjanjian ini kembali diperpanjang untuk masa 30 tahun hingga 2025 pada tahun 1996. Setelah diakuisisi Vale pada 2012, PT Inco berganti nama menjadi PT Vale Indonesia, Tbk. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2009–2014, Grup Tsingshan dari Provinsi Zhejiang, Tiongkok menjadi mitra utama kebijakan industri Indonesia. Tsingshan merupakan produsen feronikel terbesar di dunia dan produsen baja nirkarat terbesar kedua. Pemerintahan SBY sesuai dengan amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) mendorong Tsingshan untuk berinvestasi dan mengembangkan kawasan industri, dengan memindahkan kegiatan peleburan dari Tiongkok ke Indonesia. Untuk melakukan ini, Tsingshan bekerja sama dengan Grup Bintang Delapan, mitra jangka panjang perusahaan Tiongkok tersebut dan salah satu perusahaan pertambangan nikel terbesar di Sulawesi. Kawasan baru tersebut akan berlokasi di kabupaten Morowali di provinsi Sulawesi Tengah, seluas 5.472 kilometer persegi, yang diperkirakan menyimpan 370,59 juta ton cadangan nikel.

Pembangunan kawasan tersebut dimulai pada tahun 2014 di era kepresidenan Joko Widodo (Jokowi). Meskipun kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus ada di seluruh Indonesia, belum pernah ada kawasan di sektor pertambangan yang menghubungkan ekstraksi dengan peleburan dengan mudah, dan dalam skala sebesar itu. Pada era pertama Jokowi 2024–2019, grup Tsingshan memiliki

Buku ini tidak diperjualbelikan

66,25% kawasan dan Bintang Delapan memegang 33,75% saham. Membentang di lahan seluas 2.000 hektare, kawasan tersebut memiliki fasilitas peleburan dan jaringan transportasi. Kawasan tersebut juga memiliki hotel bintang lima untuk investor, barak untuk ribuan pekerja, jalan utama, pelabuhan, dan bandara kecil. Pada 2019–2020 di periode kedua Jokowi, enam belas perusahaan besar—termasuk dari Australia, Jepang, dan Korea—beroperasi di sana dalam kegiatan, seperti produksi baterai dan pengembangan baja karbon. Berdekatan dengan konsesi pertambangan Bintang Delapan, salah satu yang terbesar di Sulawesi, Kawasan Industri Morowali (IMIP) telah berhasil dengan menyatukan peleburan dan ekstraksi di satu lokasi. Bersama-sama, Tsingshan dan Bintang Delapan mendirikan Sulawesi Mineral Investments, yang telah meningkatkan ekstraksi dengan menggelontorkan investasi modal ke dalam teknologi pertambangan baru.

Hingga 2020, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan izin penambangan nikel skala besar, serta memberikan akses terhadap produksi dan ekspor bijih nikel pada investor lokal dan internasional. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), setidaknya terdapat 292 pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) nikel pada tahun 2020 (KESDMRI, 2020). Menurut Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Indonesia (2021), sebanyak 92 perusahaan telah mengambil keputusan untuk memasuki industri pengolahan dan pemurnian nikel di Indonesia. Di antara pemain utama dalam industri tersebut adalah PT Vale Indonesia, dengan total wilayah konsesi seluas 118.017 hektare, yang beroperasi di Blok Soroako (Sulawesi Selatan) dan lokasi lainnya; disusul PT Bintang Delapan Mineral seluas 21.695 hektare; PT Aneka Tambang Tbk dengan lima tambang nikel di Sulawesi; PT Makmur Lestari Primatama seluas 407 hektare; dan PT Citra Silika Mallawa seluas 475 hektare. Menurut Kontan (2021), pada tahun 2020 Indonesia memiliki 13 smelter nikel yang beroperasi. Pemerintah berencana meningkatkan jumlah ini menjadi 30 pada tahun 2024. CNBC Indonesia (2020) melaporkan bahwa lima dari smelter tersebut akan dilengkapi dengan

Buku ini tidak diperjualbelikan

teknologi canggih *High-Pressure Acid Leach* (HPAL), dan diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2023.

Permintaan nikel dunia lantas menjadikan produksi nikel Indonesia sebagai primadona investasi. Pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo memberlakukan Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Peraturan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah. Pemerintah Indonesia resmi melarang ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020 melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan ini menjadi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No. 3 Tahun 2020. Kebijakan pelarangan tersebut bertujuan untuk melindungi cadangan nikel, menarik investasi di sektor nikel, hilirisasi industri pengolahan, dan peningkatan devisa negara (Nangoy & Munthe, 2023).

Menurut FK, dosen HI Universitas Binus, meskipun terlambat mengundangkan hilirisasi pertambangan, penerapan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan keuntungan pertambangan dalam negeri, dengan memaksa perusahaan pertambangan mendirikan *smelter* agar dapat mengolah dan memurnikan mineral di Indonesia sebelum mengekspornya. Meski demikian, pembangunan *smelter* tampaknya belum dibarengi dengan pembangunan infrastruktur pengolahan. Pemerintah Indonesia belum mampu sepenuhnya memberikan bantuan pembangunan infrastruktur, khususnya pembangkit energi, lahan untuk *smelter*, insentif pajak dan bea masuk untuk jangka waktu tertentu, serta jaminan hukum terkait masa produksi pertambangan. Persoalan ini berakibat belum stabilnya pasokan bahan baku *smelter* yang mendukung pertumbuhan pertambangan menuju industrialisasi (Kim, 2023).

Kebijakan hilirisasi yang dirintis sejak era pemerintahan SBY dan dikembangkan oleh pemerintahan Jokowi, berdampak (berkontribusi) terhadap peningkatan ekspor nikel untuk pasar global. Kementerian

Buku ini tidak diperjualbelikan

Investasi RI mencatat, pada 2017–2018 nilai ekspor nikel awalnya mencapai US$ 3,3 miliar. Melalui kebijakan hilirisasi pada tahun 2020 menyebabkan peningkatan nilai ekspor Indonesia menjadi US$ 20,9 miliar pada tahun 2021 khususnya ke negara China, Jepang, Korea, dan AS. Ekspor mencapai US$ 29 hingga US$ 30 miliar pada tahun 2022 (Muliawati, 2023). Peningkatan ekspor ke Tiongkok terjadi seiring dengan investasi perusahaan dalam negeri mereka yang membangun pabrik pertambangan dan pengolahan bijih nikel di Indonesia.

Selain upaya peningkatan ekspor bahan mentah, pemerintah Indonesia mulai mendirikan perusahaan patungan, *Indonesia Battery Corporation*, pada tahun 2021. Perusahaan ini dimiliki oleh empat perusahaan negara, yaitu MIND ID, anak perusahaan ANTAM yang memproduksi nikel, perusahaan minyak dan gas Pertamina, dan perusahaan utilitas listrik PLN. Keempat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia ini bekerja sama dan bertujuan untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik dengan mengintegrasikan hulu dan hilir, di mana masing-masing BUMN mengambil bagian dalam rantai pasok industri baterai (Kim, 2023). Badan usaha negara ini bertugas memfasilitasi pengembangan pasar kendaraan listrik Indonesia serta menawarkan kemitraan dan kepastian kepada investor asing (Deloitte, 2022).

Namun demikian, pengembangan hilirisasi nikel di Indonesia bukannya tanpa hambatan. Pemerintah dan perusahaan Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang dapat menghambat pengimplementasian rencana tersebut.

1) Nilai investasi yang besar (Syafira et al., 2023). Tingginya nilai investasi terutama terjadi pada saat mendirikan pabrik pengelolaan nikel. Diketahui bahwa pengolahan satu juta *Wet Metric Ton* (WMT) bijih nikel menggunakan teknologi *Rotary Kiln-Electric Furnace* (RKEF) memerlukan biaya belanja modal (*capital expenditure*; CAPEX) hingga US$ 100–150 juta (MNI, 2021).
2) Nilai investasi proses hidrometalurgi relatif mahal serta memerlukan kajian teknis dan ekonomis yang detail. Nilai investasi tersebut bahkan mencapai lebih dari US$ 3,5 miliar (MNI, 2021).

Buku ini tidak diperjualbelikan

3) Belum berkembangnya pabrik pengolahan hidrometalurgi yang menggunakan umpan bijih limonit di Indonesia dan global. Kondisi ini mengakibatkan kurang dimanfaatkannya nikel limonit (MNI, 2021).
4) Belum lengkapnya pohon industri nikel dan kobalt di Indonesia. Sebagian besar hasil pengolahan nikel diekspor ke luar negeri sebagai bahan baku industri yang vital dan strategis serta bernilai ekonomi tinggi (MNI, 2021).
5) Kurangnya kemandirian teknologi hilir nikel di Indonesia. Teknologi pengolahan dan pemurnian sebagian besar masih dikuasai oleh negara asing, khususnya Tiongkok dan Jepang (MNI, 2021).
6) Proses perizinan yang panjang dan rumit menjadi kendala pendirian pabrik pengolahan nikel di Indonesia. Penyederhanaan izin diperlukan untuk mengefektifkan proses perizinan (MNI, 2021, October 6).
7) Kurangnya evaluasi kajian teknis dan ekonomis yang detail dan terperinci mengenai pengelolaan nikel. Padahal, hal ini dibutuhkan untuk menghindari kesalahan perhitungan, termasuk terkait kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan di Indonesia (Syafira et al., 2023).
8) Daya serap produk oleh industri hilir domestik yang masih rendah (Wikarya, 2019).

C. Investasi Nikel Tiongkok di Indonesia

Tiongkok sangat membutuhkan nikel untuk memenuhi kebutuhan domestiknya, khususnya untuk industri PEV-nya. Kebutuhan nikel yang tinggi membuat Tiongkok memburu bahan logam ini ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di sisi lain, Indonesia memiliki kepentingan dalam membangun industri pertambangan dalam negeri. Menurut *Corporate and Investment Banking*, *Natixis*, upaya Presiden Jokowi mendorong Indonesia menjadi kunci ekosistem baterai, membuat perusahaan Tiongkok tertarik dan ingin memanfaatkan sumber daya nikel tertarik berinvestasi. Situasi ini membuka jalan

Buku ini tidak diperjualbelikan

Tiongkok untuk menerapkan kebijakan investasi nikel di Indonesia (Dinata et al., 2020). Tiongkok telah melakukan investasi di sektor pertambangan, termasuk nikel di Indonesia. Gambaran singkat investasi Tiongkok di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Investasi Tiongkok di Indonesia berdasarkan sektor (2010–2015)

Jenis Komoditas	Persentase
Pasokan listrik, gas, dan air	23%
Pertambangan	21%
Logam dasar, produk logam & mesin	16%
Komoditas plastik & karet	8%
Perdagangan & reparasi	8%
Mineral non-logam	5%
Perumahan, area industri & perkantoran	5%
Industri makanan	4%
Bangunan & konstruksi	4%
Sektor lain	3%
Kimia dasar & farmasi	2%
Makanan nabati & agrikultur	1%

Sumber: Dinata et al. (2020)

Keputusan pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel pada Januari 2020 menguntungkan Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan industrinya. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang awalnya ditujukan untuk memberikan nilai tambah berupa turunan produk, justru mendorong ekspansi bisnis perusahaan Tiongkok di Indonesia dengan membangun *shelter* baru (Riedho, 2024). Bagi perusahaan Tiongkok yang beroperasi di Indonesia, kondisi ini menjadi peluang ganda bagi mereka di pertambangan dan pasar EV, yakni mereka dapat keuntungan bahan untuk ekspor bahan ke Tiongkok, memproduksi baterai dan mengendalikan harga baterai untuk pasar EV global maupun domestik mereka (Konewka et al., 2021). Keuntungan ini bisa di dapat oleh banyaknya perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di industri pertambangan nikel Indonesia (Konewka et al., 2021). Bagi Indonesia, hadirnya

Buku ini tidak diperjualbelikan

investasi Tiongkok ini mendapat manfaat biaya produksi yang lebih rendah daripada produsen NPI negara lain yang harganya lebih besar dari Tiongkok. Sementara bagi Tiongkok, investasinya di Indonesia dapat membantunya memperoleh nikel dengan mudah, dan menjaga kebutuhan pasokan nikel di negaranya (Riedho, 2024).

Perusahaan Tiongkok pertama yang berinvestasi di industri *smelter* Indonesia adalah Tsingshan Group, sebuah perusahaan yang berkantor pusat di Provinsi Zhejiang. Tsingshan mengambil risiko di awal tahun 2000-an dengan membeli tambang bijih nikel di pulau Sulawesi, meskipun cadangan nikel Indonesia sebagian besar belum teruji (Dinata et al., 2020). Namun, langkah ini ternyata cukup strategis karena memungkinkan Tsingshan untuk mendirikan pusat pasokan nikel yang menjadi besar di Indonesia. Investasi berikutnya dalam penyulingan hilir mengokohkan posisinya sebagai pemain kunci dalam sektor produksi dan pemurnian nikel yang berkembang pesat di Indonesia. Perusahaan Tsingshan telah bermitra dengan PT Grup Bintang Delapan dalam melaksanakan investasi di sektor pertambangan jauh sebelum pemerintah menerapkan kebijakan *smelter*. Saat ini, perusahaan tersebut adalah pengembang *Indonesia Morowali Industrial Park* (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Proyek IMIP merupakan hasil kerja sama antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Tiongkok dalam kerangka BRI. IMIP memiliki beberapa proyek, termasuk pembangunan smelter nikel. Pada tahun 2017, Tsingshan Group mengalokasikan dana sebesar US$ 2,8 miliar untuk membangun pabrik feronikel dengan kapasitas tinggi di Bahodopi, Sulawesi Tengah, melalui anak perusahaannya di bawah IMIP, yaitu PT Investasi Pertambangan Sulawesi. Kapasitas produksi tahunan dari investasi ini mencapai 2 juta ton baja tahan karat, yang kemudian meningkat menjadi tiga juta ton per tahun pada tahun 2018 (Devonshire-Ellis, 2022; Dinata et al., 2020). Anak perusahaan IMIP lainnya, PT Guang Ching Nickel, juga membangun *smelter* feronikel dengan kapasitas produksi 600 ribu ton per tahun (DInsights, 2021). PT Guang Ching Nickel menjadi produsen nikel

Buku ini tidak diperjualbelikan

terbesar di Indonesia. Sejak tahun 2018, IMIP telah menyumbang setengah dari total penjualan nikel Indonesia, menggeser posisi PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), yang pada tahun 2014 menguasai 77 dan 19% produksi nikel (DInsights, 2021). Saat ini, IMIP mengoperasikan 20 *smelter* di Indonesia (Dinata et al., 2020). Selain itu, Tsingshan bermitra dengan Eramet Group dari Prancis dan mitra lokal PT Aneka Tambang Tbk untuk membangun *Indonesia Weda Bay Industrial Park* (IWIP). IWIP merupakan kawasan industri yang terintegrasi dengan nilai investasi 11 US$ miliar, khususnya dalam sektor pertambangan dan industri nikel. Ketika selesai dibangun, kawasan industri ini menjadi kompleks pertama di dunia yang memproduksi baja tahan karat dan baterai kendaraan listrik secara terintegrasi (IWIP, 2022).

Selain itu, ada pula *Virtue Dragon Nickel Industry* (VDNI) di Morosi-Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. VDNI bekerja sama dengan deLong Nickel Co. Ltd., yang berkantor pusat di Provinsi Jiangsu, Tiongkok. VDNI berencana membangun 45 *smelter*, yang bisa lebih signifikan dari IMIP (Dinata et al., 2020). Pada tahun 2021, VDNI melakukan investasi sebesar Rp4,009 triliun (Senong, 2022). Investor Tiongkok lainnya, Shandong Xinhai, juga menggandeng ANTAM untuk proyek feronikel di Pulau Gag, Papua pada 2019. Proyek dengan nilai investasi sekitar US$1,2 miliar ini direncanakan memiliki kapasitas produksi sekitar 40.000 ton feronikel dan 600.000 baja tahan karat.

Selanjutnya, terdapat Zhejiang Huayou Cobalt Co. Pada tahun 2019, perusahaan ini bekerja sama dengan PT Aneka Tambang Tbk (dikenal sebagai "ANTAM") untuk membangun proyek katoda dan feronikel senilai $6–12 miliar. Pabrik tersebut akan berlokasi di dekat dua tambang ANTAM di Tanjung Buli, Halmahera Timur dan di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Zhejiang Huayou Cobalt Co juga bekerja sama dengan PT Vale Indonesia mengembangkan pengolahan nikel di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. PT Vale Indonesia merupakan anak perusahaan dari perusahaan Brasil, Vale. Proyek yang diberi nama Sorowako Limonite Project itu akan

Buku ini tidak diperjualbelikan

membangun pabrik pengolahan nikel senilai US$1,8 miliar. PT Vale Indonesia dan Zhejiang Huayou Cobalt Co juga akan membangun fasilitas pengolahan di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, PT Vale Indonesia menggandeng Xinhai dalam proyek Blok Bahodopi dengan total nilai US$2,1 miliar.

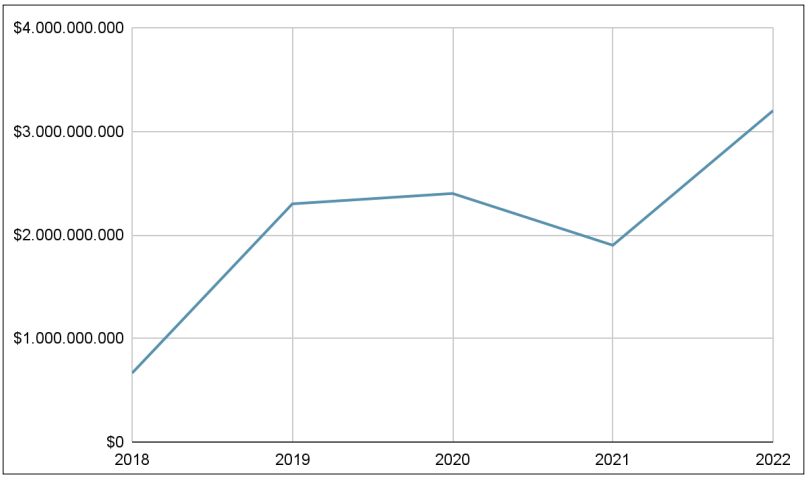
Perusahaan lainnya adalah Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co., Ltd (CBL), anak perusahaan *Contemporary Amperex Technology Co Limited* (CATL). Pada April 2022, CBL telah menandatangani perjanjian kerangka kerja *tri-party* dengan ANTAM dan PT Industri Baterai Indonesia (IBI) dalam Proyek Integrasi Baterai EV Indonesia. Proyek ini mencakup penambangan dan pemrosesan nikel, bahan baterai EV, pembuatan baterai EV, dan daur ulang baterai. Proyek ini berlokasi di Kawasan Industri FHT, Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, Indonesia, dengan investasi bersama sebesar US$6 miliar.

Terakhir adalah CNGR Hong Kong Material Science & Technology Co., Ltd. Pada tanggal 16 November 2022, CNGR menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja (*Framework Agreement*; FA) dengan PT Aneka Tambang Tbk ("ANTAM; IDX: ANTM; ASX: ATM"), yang merupakan bagian dari MIND ID - Badan Usaha Milik Negara Industri Pertambangan. Penandatanganan ini merupakan lanjutan dari *Head of Agreement* (HoA) untuk pembangunan dan pengembangan area industri *downstream* dari bijih nikel menjadi bahan baku baterai, yang sebelumnya ditandatangani oleh kedua belah pihak pada 5 Agustus 2022 (ANTAM, 2022).

Dari gambaran tersebut, dapat dikatakan Tiongkok mendominasi investasi *smelter* nikel di Indonesia (lihat Gambar 4.1). Hingga Juni 2021 terdapat 50 proyek *smelter* nikel Tiongkok di Indonesia, dengan total kapasitas produksi sekitar 38 juta ton per tahun. Berdasarkan keterangan Faisal Basri yang dikutip cnn.com, bea cukai Tiongkok *(General Customs Administration of China, GCAC)* melaporkan dari tahun 2020 sampai 2023, perusahaan Tiongkok mengimpor bijih nikel dari Indonesia 5,6 juta ton. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh investasi nikel yang besar-besaran, kedekatan geografis Indonesia

Buku ini tidak diperjualbelikan

dengan Tiongkok yang terletak di pinggiran Pasifik semakin mempercepat akses pengangkutan komponen baterai antarkedua negara yang mudah melalui jalur laut.



Sumber: Ho & Listiyorini (2022)

Gambar 4.1 Investasi Tiongkok pada Pertambangan Nikel di Sulawesi dan Halmahera Tahun 2018–2022

Meskipun investasi Tiongkok dalam industri nikel di Indonesia menawarkan peluang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan dalam beberapa aspek. Tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga global, seperti tertera dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Tantangan dan Implikasi Investasi Tiongkok

Aspek	Tantangan dan Implikasi
Lingkungan	Dampak lingkungan dari aktivitas penambangan dan pengolahan nikel, termasuk deforestasi, erosi tanah, dan pencemaran air. Investasi China meningkatkan risiko ini tanpa langkah-langkah perlindungan lingkungan yang kuat.

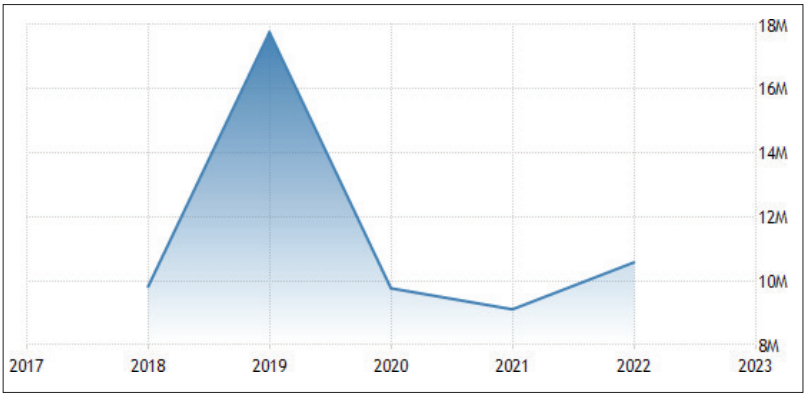
Buku ini tidak diperjualbelikan

Aspek	Tantangan dan Implikasi
Eksploitasi Sumber Daya dan Manfaat Ekonomi	Investasi China mengarah pada eksploitasi sumber daya alam Indonesia tanpa memberikan manfaat yang setara bagi ekonomi lokal. Prioritas perusahaan China terhadap keuntungan pribadi mengabaikan pembangunan lokal dan distribusi kekayaan yang adil.
Dominasi Pasar dan Ketegangan Geopolitik	Investasi China yang besar menghasilkan dominasi pasar global nikel dan meningkatkan ketegangan geopolitik. Perusahaan China yang mengendalikan pasar dapat memengaruhi harga dan dinamika perdagangan, menimbulkan ketegangan dengan pemain global lainnya.
Pengembangan Infrastruktur dan Dampak Sosial	Investasi China memicu perdebatan pengembangan infrastruktur di daerah-daerah pertambangan. Perubahan sosial dan ekonomi di komunitas lokal serta kerentanan terhadap kerusakan lingkungan kurang diperhitungkan.

D. Investasi Nikel AS di Indonesia

Menurut Biro Sensus AS (USCB, 2024), perdagangan barang dengan Indonesia menunjukkan tren meningkat. Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional menyatakan bahwa AS merupakan negara tujuan ekspor nikel terbesar ke-7 setelah Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Norwegia. Pada tahun 2020, AS mengimpor sekitar 57.000 metrik ton nikel dari Indonesia, meningkat secara signifikan dari sekitar 10.000 metrik ton pada tahun sebelumnya. Nilai impor ini mencapai sekitar $566 juta pada tahun 2020. Penting untuk dicatat bahwa industri nikel terpengaruh oleh fluktuasi harga dan undang-undang baru *Inflation Reduction Act* (IRA) kredit pajak atas pembelian mobil listrik, yang berpotensi memengaruhi volume dan nilai impor. Selain itu, faktor seperti kebijakan perdagangan dan hubungan bilateral antara AS dan Indonesia juga memengaruhi arah perdagangan nikel ini. Oleh karena itu, tren perdagangan nikel Indonesia ke AS memiliki kecenderungan fluktuatif (lihat Gambar 4.2).

Buku ini tidak diperjualbelikan



Sumber: (TE, 2023)

Gambar 4.2 Impor Nikel AS dari Indonesia Tahun 2018–2023

Sejak era reformasi, mayoritas investasi dari AS di Indonesia terfokus pada sektor ekstraktif, seperti minyak dan gas, serta pertambangan. Meskipun industri ekstraktif menjadi fokus utama bagi perusahaan-perusahaan AS yang berinvestasi di Indonesia, sektor manufaktur semakin menjadi perhatian. Pada era kepemimpinan Megawati hingga SBY antara tahun 2004 dan 2012, pertumbuhan gabungan tahunan industri ekstraktif mencapai 11%, sementara sektor manufaktur tumbuh sebesar 21%. Dengan sumber daya alam yang terbatas, potensi pertumbuhan lebih besar terdapat di sektor manufaktur, terutama jika pendapatan dan konsumsi terus meningkat (EYI, 2013). Beberapa perusahaan AS terkemuka lain yang telah berinvestasi di Indonesia, yaitu Coca Cola, Google, IBM, Intel, HP, Merck, Nike, Philip Morris, Visa, Procter and Gamble, Boeing, dan Ford. Selain itu, perusahaan-perusahaan energi dan pertambangan, seperti Chevron, Freeport, BP, dan ExxonMobil juga telah beroperasi di Indonesia. Pada paruh pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia terkena dampak dari kebijakan proteksionisme Presiden Donald Trump dengan sempat melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, kemudian berkembang pada setelah kepemimpinan Biden, terjadi peningkatan status hubungan dari kemitraan strategis menjadi

Buku ini tidak diperjualbelikan

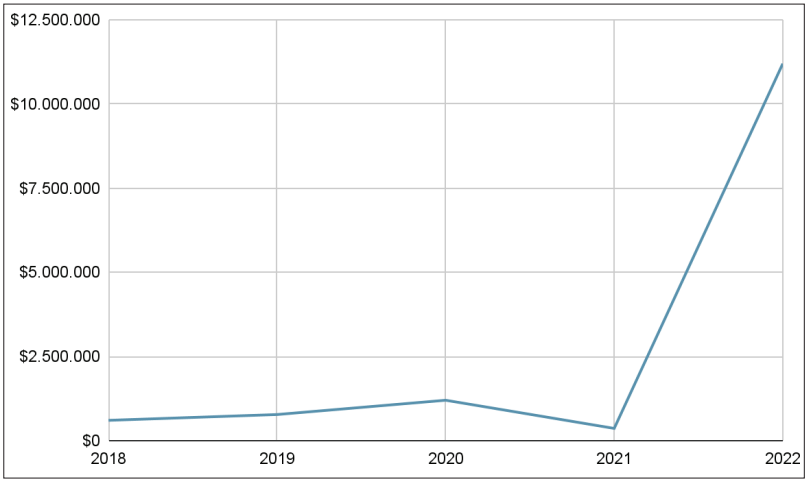
kemitraan strategis komprehensif. Dalam nota kerja sama tersebut telah disepakati enam dokumen kerja sama antara pemerintah kedua negara, yaitu kesepakatan pembentukan CSP, kerja sama di bidang kesehatan, ESDM, maritim, dan kebudayaan.

Kerja sama Indonesia-AS dalam kepemimpinan Jokowi-Biden, terjadi pergeseran investasi. Hal ini terlihat dari peningkatan signifikan dalam investasi AS di sektor pertambangan nikel di Indonesia, terutama di Sulawesi dan Halmahera. Indonesia dan AS pada November 2020 menandatangani perjanjian senilai US$750 juta untuk membiayai proyek perdagangan dan infrastruktur. Salah satu pertimbangan peningkatan kerja sama ini adalah kesepakatan menjalankan *Limited Trade Deal* (LTD) atau perjanjian perdagangan terbatas antara Indonesia dan AS. LTD ini mencakup kerja sama perdagangan dan investasi di bidang informatika, komunikasi, dan teknologi yang dapat meningkatkan perdagangan dua arah Indonesia dan AS hingga mencapai US$60 miliar pada tahun 2024.

Salah satu perusahaan AS yang berkeinginan investasi dalam sektor pengembangan industri nikel di Indonesia adalah Tesla. Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia berusaha meyakinkan Tesla, perusahaan mobil listrik dari AS, untuk mendirikan pabrik di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah, Indonesia. Namun, terakhir Tesla memilih untuk membeli bahan baku nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Tesla telah menandatangani kontrak dengan dua perusahaan pemasok baterai dari Tiongkok yang beroperasi di Indonesia, Zhejiang Huayou Cobalt Co dan CNGR Advanced Material Co. Kedua perusahaan tersebut mengimpor nikel dari *smelter* milik PT Vale Indonesia (INCO). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia berperan penting dalam menjembatani perusahaan asing yang akan berinvestasi dan menawarkan (mempromosikan) nikel Indonesia, salah satunya kepada Elon Musk dalam pertemuan Mei 2022, Tesla mengirimkan enam tim untuk berkunjung ke Indonesia dan membahas hal-hal terkait. Minat Tesla hanya terbatas pada pembelian nikel dari Indonesia, dan perusahaan telah menandatangani kontrak lima tahun senilai US$5 miliar. Meskipun ini merupakan langkah

Buku ini tidak diperjualbelikan

positif menuju investasi di Indonesia, negosiasi tentang rencana Tesla untuk mendirikan pabrik mobil listrik di Indonesia belum (tidak) menunjukkan perkembangan berarti (Karunia & Djumena, 2022). Meskipun demikian, terdapat peningkatan investasi AS dalam industri nikel Indonesia pada tahun 2021–2022 yang meningkat 10 juta dolar dibanding tahun sebelumnya 2018–2021 yang grafik investasinya landai berkisar di kisaran 2,5 juta dolar (lihat Gambar 4.3).



Sumber: Ho & Listiyorini (2022)

Gambar 4.3 Investasi AS dalam Industri Nikel di Sulawesi dan Halmahera Tahun 2018–2022

Ada tiga perusahaan AS lainnya yang telah berinvestasi di sektor energi terbarukan di Indonesia. *Air Products and Chemicals, Inc*., misalnya mengalokasikan investasi sebesar US$]3 miliar untuk membangun fasilitas produksi hidrogen di bendungan yang dimiliki oleh negara. Total investasi mereka di Indonesia mencapai US$18 miliar. Chevron Corporation juga memiliki rencana untuk menginvestasikan US$10 miliar hingga tahun 2032 di sektor panas bumi, bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara PT Pertamina (Persero). Terakhir, Charge CCCV (C4V) berencana untuk membangun pabrik aki mobil

Buku ini tidak diperjualbelikan

listrik di Indonesia. C4V menjadi perusahaan asing keempat yang melakukannya setelah LG Energy Solution, Badische Anilin-und Soda-Fabrik (BASF), Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL), dan BritishVolt (Primanita, 2015).

Secara umum, *Foreign Direct Investment* (FDI) AS di Indonesia periode sebelum kepemimpinan Presiden Jokowi memiliki dua dampak positif. Pertama, berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$94,1 miliar. Kedua, menciptakan lapangan kerja bagi 1,74 juta orang setiap tahun di berbagai sektor industri (Hemanona & Suharyono, 2017). Secara khusus, perusahaan-perusahaan AS yang aktif dalam sektor pertambangan telah mempekerjakan sekitar 35.000 orang di wilayah Indonesia Timur. Salah satu perusahaan AS terbesar yang beroperasi di wilayah tersebut, seperti yang dilaporkan oleh Biro Sensus AS (USCB, 2024), telah memberikan kontribusi sebesar 96,9% terhadap PDB regional di wilayah operasionalnya dan 2,2% terhadap PDB nasional antara tahun 2006 dan 2011. Selain itu, hal ini juga meningkatkan pendapatan rumah tangga nasional sebesar 1,7% dan pendapatan rumah tangga regional hingga 96,2% antara tahun 2006 dan 2011 (EYI, 2013).

Sayangnya, pada era Presiden Jokowi investasi AS dalam perdagangan, pertambangan dan juga perdagangan nikel dengan Indonesia belum sebesar yang diharapkan seperti investasi Tiongkok di Indonesia membangun pabrik pertambangan maupun pengolahan. Perusahaan Amerika tidak dekat dengan pengusaha atau perusahaan Indonesia sehingga mereka memilih partner lain di luar Indonesia. Sebagai contoh, Tesla Inc., lebih memilih India sebagai basis produksi keduanya di Asia. Perusahaan ini sedang dalam tahap akhir kesepakatan untuk memproduksi mobil listrik di India Selatan, Karnataka. Hal ini akan menjadikan India sebagai basis produksi Tesla ketiga setelah AS dan Tiongkok. Menurut *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF), India menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan dengan negara lain sebagai tujuan investasi. Pertama, India memiliki kebijakan perpajakan yang lebih ramah terhadap investor asing. Kedua, India memiliki keahlian di

Buku ini tidak diperjualbelikan

berbagai bidang, khususnya di bidang mobil listrik sehingga semakin menarik bagi Tesla. Ketiga, perekonomian India pulih lebih cepat dari pandemi COVID-19 dibandingkan dengan Indonesia (VOI, 2021).

Ketertarikan Tesla di Indonesia terutama berfokus pada sistem penyimpanan energi (*Energy Saving System/ESS*), terutama terkait dengan peningkatan jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di dalam negeri. Meskipun Tesla belum menunjukkan minat untuk mendirikan pabrik baterai di Indonesia, potensi negara untuk menggabungkan energi baru dan terbarukan dengan teknologi ESS bisa membuatnya menjadi mitra yang menarik bagi Tesla. Selain itu, puluhan organisasi non-pemerintah (LSM) di Indonesia dan AS telah mengajukan permohonan kepada Tesla untuk menghentikan rencana investasinya di industri nikel Indonesia karena "potensi dampak buruk terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat Indonesia" (Fortuna, 2022).

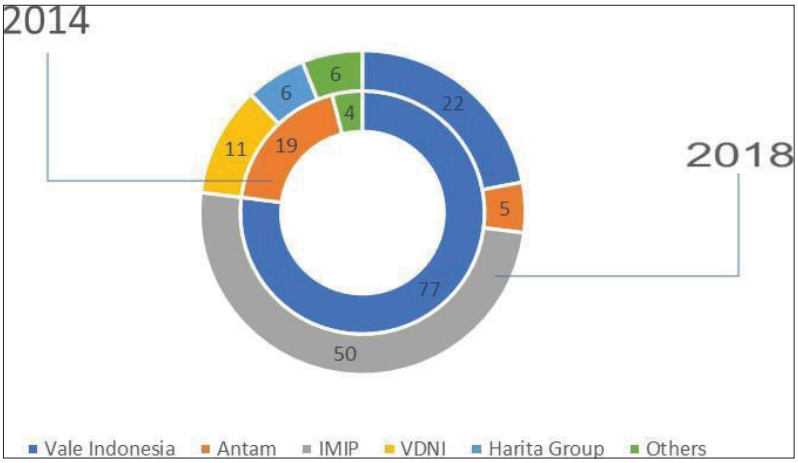
E. Rivalitas AS-Tiongkok dalam Tambang Nikel dan Implikasi Sosial Ekonomi bagi Indonesia

"Nikel adalah tantangan terbesar bagi pengembangan baterai bervolume tinggi dan tahan lama dunia!" Elon Musk menulis tweet pada tahun 2020. Hal ini berarti ada persoalan ekonomi-politik—dan permainan kekuasaan—nikel akan menjadi bahan yang produksi dan pengembangannya semakin penting.

Seperti diketahui, industri pengolahan nikel Indonesia sebagian besar sudah dikuasai oleh perusahaan asal Tiongkok. Menurut data dari Wood Mackenzie (2020), industri ini berubah dengan cepat dan dinamis seiring dengan masuknya raksasa Tiongkok ke pasar. Misalnya pada tahun 2014, PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) menguasai 77% nilai industri, sementara PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) atau ANTAM menguasai 19%. Namun, lanskap industri bergeser pada tahun 2018 dengan diresmikannya *PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)* pada 19 September 2013. Wood Mackenzie mencatat IMIP menguasai 50% nilai industri nikel Indonesia pada tahun tersebut. Sebaliknya, saham Vale Indonesia turun menjadi hanya 22%,

Buku ini tidak diperjualbelikan

disusul *PT Virtue Dragon Industry (VDNI)* sebesar 6%, Harita Group sebesar 6%, ANTAM sebesar 5%, dan lainnya sebesar 6%. Dominasi Tiongkok sudah terlihat dari struktur kepemilikan PT IMIP. Shanghai Decent Investment menguasai 49,69% saham perusahaan, dengan PT Sulawesi Mining Investment dan PT Bintang Eight Investama masing-masing memegang 25% dan 25,31% (Anggela, 2023).



Sumber: WM (2020)

Gambar 4.4 Dominasi Perusahaan terhadap Industri Nikel Indonesia Tahun 2014 dan 2018

Berdasarkan Gambar 4.4, hanya dalam waktu kurang dari satu dekade, Tiongkok tidak hanya menguasai pertambangan nikel, tetapi juga semakin memperkuat hubungannya dengan Indonesia. Hal yang menyebabkan Tiongkok menguasai tambang Indonesia adalah selain permodalan yang didukung perbankan Tiongkok dan teknologi yang bisa diaplikasikan, juga diberikan izin dalam membangun pabriknya di Indonesia. Di samping itu, penguatan hubungan diplomasi dan perdagangan kedua negara dilakukan dengan membentuk forum kerja sama BRI antara Indonesia dan Tiongkok. Melihat kesempatan ini, Tiongkok benar-benar mengambil kesempatan tidak memberikan peluang kepada pesaingnya seperti AS atau negara lain untuk

Buku ini tidak diperjualbelikan

mendominasi industri pertambangan dan *smelter* di Indonesia. Sebagai contoh saja, perusahaan Tiongkok, Tsingshan, mendominasi pertambangan nikel di Morowali Sulawesi, dan juga membangun pembangkit listrik tenaga batu bara serta mengolah nikel mentah menjadi bentuk yang cocok untuk baja tahan karat dan baterai kendaraan listrik. Dengan melakukan hal ini, investor asal Tiongkok telah menjawab seruan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pemrosesan tambahan di Indonesia sehingga menciptakan lebih banyak produk nikel bernilai tinggi, tetapi dengan catatan untuk lebih memperhatikan persoalan lingkungan (Perlez et al., 2023).

Dalam konteks persaingan perdagangan nikel, Tiongkok melakukan langkah "proteksi" dengan membatasi ekspor pada bahan baku penting yang dibutuhkan untuk mobil listrik dan energi terbarukan. Kebijakan ini dilakukan sejak 2009, saat kepemimpinan presiden Hu Jintao (Dempsey, 2023). Padahal, China saat ini menguasai 60% produksi pertambangan Logam Tanah Jarang (LTJ) atau *rare earth elements* (RRE) di dunia, dan sekitar 90% pengolahan dan pemurnian pertambangan. Sebagian besarnya digunakan untuk pasar domestik (IEA, 2023). Sementara itu, AS mengakui tidak memiliki produksi dalam negeri lagi untuk sejumlah mineral penting, dan lebih banyak bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan domestik (Berg et al., 2024). Ketergantungan AS pada mineral Tiongkok menyebabkan AS harus menghadapi tantangan berat melawan proteksi Tiongkok. Hal ini dapat berakibat memperlambat penerapan energi ramah lingkungan di AS. Daya beli nikel di AS menjadi terbatas sehingga menghambat kemampuannya untuk mengakselerasi penerapan teknologi energi ramah lingkungan. Selain itu, kondisi ini juga membatasi posisi AS sebagai pemimpin dalam mempromosikan energi ramah lingkungan secara global. Oleh karena itu, AS berpotensi terkendala secara geopolitik. Meningkatnya kepemilikan mineral Tiongkok dapat melambungkan Tiongkok secara ekonomi dan politik di dunia (McHugh, 2022).

Sementara itu, salah satu strategi yang dijalankan oleh AS adalah bekerja sama dengan Filipina dalam mengimbangi dominasi Tiongkok

Buku ini tidak diperjualbelikan

dalam industri nikel di Indonesia. AS menghadapi kesulitan untuk memasuki pasar Indonesia karena sudah dikuasai oleh Tiongkok, yang telah menguasai sumber daya serta melakukan penetrasi pasar di negara tersebut. Dalam konteks ini, AS mencari negara strategis untuk bersaing dan menguasai pasar serta industri kendaraan listrik di Asia Tenggara. Filipina, sebagai salah satu negara sahabat strategis dalam ASEAN, menjadi pilihan AS. AS mulai mendukung pembiayaan proyek infrastruktur, semikonduktor, dan pemrosesan nikel di Filipina, seiring dengan upaya untuk mengembangkan kemitraan investasi setelah memperbarui hubungan pertahanan. Proyek-proyek yang didukung mencakup modernisasi kereta api dan pelabuhan, energi ramah lingkungan, rantai pasokan semikonduktor, agribisnis, dan peningkatan pelabuhan sipil di Teluk Subic. Untuk mengembangkan industri hilir mineral domestik di tengah meningkatnya permintaan baterai dan sistem penyimpanan energi, pemerintah AS mendukung pemberian hibah kepada Eramen Minerals Inc untuk mengembangkan pabrik pengolahan bijih menjadi nikel dan kobalt di Filipina (Hasiana, 2024).

Persaingan antara AS dan Tiongkok dalam industri nikel di Indonesia paling baik dipahami dalam konteks ekonomi-politik, yaitu upaya mereka untuk mengendalikan pengaruh dan sumber daya global. Kedua negara bersaing untuk mendominasi perekonomian global dan berupaya mengamankan akses terhadap mineral penting seperti nikel, yang penting untuk pengembangan teknologi maju. Dengan memperhatikan pola investasi dan cara mengendalikan industri nikel mereka di Indonesia, dapat dilihat cara kedua negara mencari keuntungan di pasar global dan memperkuat pengaruh ekonomi dan geopolitik mereka.

Baik AS maupun Tiongkok sebenarnya telah memasukkan isu kebutuhan mineral ke dalam kerangka kebijakan nasionalnya. Di antaranya adalah Rencana Lima Tahun Tiongkok mencakup inisiatif *Made in China 2025* dan *BRI*, yang bertujuan untuk membangun dan memanfaatkan kendali atas teknologi penting, seperti kereta api berkecepatan tinggi, infrastruktur listrik, dan energi baru. Upaya

Buku ini tidak diperjualbelikan

ini memerlukan sejumlah besar mineral, termasuk nikel. Untuk mendukung tujuan tersebut, sejak BRI diresmikan tahun 2013, Tiongkok sudah mulai melakukan investasi dalam sektor logam dan pertambangan mineral. Di Indonesia sendiri, investasi Tiongkok melalui BRI mulai dilakukan tahun 2013, dengan pembangunan *Morowali Industrial Park (IMIP)* di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Aiddata, n.d.). Keseriusan Tiongkok dalam mengamankan akses terhadap mineral dapat dilihat dari peningkatan angka investasi Tiongkok dalam bidang tersebut dari tahun ke tahun. Bahkan pada tahun 2023, investasi Tiongkok terkait BRI di bidang tersebut mencapai $19,4 miliar, melonjak 131% dibandingkan paruh pertama tahun 2022. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam catatan investasi Tiongkok melalui BRI (Wang, 2023). Diperkirakan, BRI Tiongkok ke depan akan semakin fokus dalam energi terbarukan, pertambangan sumber daya alam, dan teknologi terkait termasuk baterai kendaraan listrik, yaitu litium, nikel, dan uranium (Els, 2024; Wang, 2023).

Di sisi lain, pemerintah AS menyetujui paket infrastruktur senilai US$1 triliun pada bulan November 2022, yang mencakup pendanaan untuk berbagai proyek, seperti jalan, jembatan, sistem listrik dan air, transportasi umum, kereta api, kendaraan listrik, peningkatan *broadband*, peningkatan bandara, serta perbaikan pelabuhan dan saluran air. Namun perbedaannya, paket kebijakan Tiongkok langsung banyak diinvestasikan di Indonesia karena kedua negara ini relasinya sangat dekat belakangan ini, sedangkan paket kebijakan AS tidak banyak yang diinvestasikan dan dikembangkan di Indonesia.

Tiongkok dalam hal ini selangkah lebih terdepan dalam penguasaan sumber daya nikel. Tiongkok telah mengamankan akses terhadap sebagian besar mineral yang diperlukan untuk membangun ekosistem perdagangan mandiri melalui partisipasi Indonesia dalam *BRI*. Selanjutnya, Tiongkok kini fokus membangun basis manufaktur yang kuat untuk memproduksi berbagai macam barang untuk dijual di pasar-pasar tersebut. Dominasi Tiongkok dalam pasokan komoditas pertambangan di Indonesia dilatarbelakangi oleh upayanya selama

Buku ini tidak diperjualbelikan

lebih dari satu dekade. Tiongkok telah mempertahankan kendali ketat atas sebagian besar sumber daya mineral Indonesia melalui akuisisi kepemilikan atau kepemilikan parsial secara agresif atas tambang nikel dan penandatanganan perjanjian *offtake* (ambil alih). Sebagai contoh, perusahaan tambang nikel PT Vale Indonesia telah menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Offtake Bijih dengan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) ("MIND ID"). Dalam perjanjian tersebut diatur kerangka kerja terkait kesepakatan. Pertama; setiap tahunnya (dimulai sejak tahun 2026, tunduk kepada rencana produksi PT Vale yang diberikan berdasarkan syarat dan ketentuan Perjanjian), PT Vale Indonesia akan memberikan MIND ID suatu hak untuk memilih untuk membeli bijih saprolit dan/atau bijih limonit tertentu yang diproduksi perusahaan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian.

Posisi perusahaan AS berada di belakang Tiongkok dalam pengembangan mineral atau membangun tambang di Indonesia, misalnya, perusahaan Tesla tidak memiliki teknologi smelter *high pressure acid leach (HPAL)* seperti yang dimiliki Tiongkok dan tertinggal 10 tahun pengembangan dengan Tiongkok. Dalam hal ini pemerintah dan perusahaan Tiongkok menyadari potensi jaringan dan modal yang mereka miliki. Tiongkok memanfaatkan peluang tersebut, dengan menguasai sebagian besar pengolahan dan produksi nikel di Indonesia. Era globalisasi membawa serta gagasan bahwa semua negara terbuka terhadap perdagangan bebas, yang ditangkap dengan baik oleh Tiongkok melalui praktik investasi asing. Terutama melalui skema BRI, yang membuat investasi Tiongkok di Indonesia semakin sukses. Dalam hal membangun kedekatan dengan Indonesia, Tiongkok membuka tambang dan menyediakan infrastruktur sebagai imbalan atas dukungan dan bantuan pemerintah setempat, termasuk sekolah, klinik kesehatan, jalan raya, dan sistem air bersih (Azzam, 2019). Cara ini sebenarnya merupakan taktik yang mirip dengan apa yang dilakukan AS di masa lalu di Indonesia.

Upaya Tiongkok memperkuat pengaruhnya di Indonesia juga dilihat melalui pembangunan bidang lainnya diluar pertambangan,

Buku ini tidak diperjualbelikan

semisal Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sistem perkeretaapian ini membuat transportasi orang dan barang antara kedua kota menjadi lebih nyaman. Contoh lainnya adalah inisiatif Dua Negara, Taman Kembar ("*two countries*, *twin parks*" *Initiative*) yang melibatkan Kawasan Investasi Yuanhong di Fujian dan tiga kawasan industri Indonesia (Kawasan Industri Bintan, Kawasan Industri Aviarna, dan Kawasan Industri Batang). Inisiatif ini menawarkan sekitar 36 proyek investasi pelabuhan, sistem logistik, pusat layanan inspeksi makanan, pusat penelitian dan pengembangan makanan laut gabungan Tiongkok-Indonesia, serta kerja sama antara Sino-Bank Indonesia (Yee, 2023). Upaya-upaya tersebut menggambarkan strategi Tiongkok untuk memengaruhi dan bersaing ketat dengan AS, Jepang, dan Korea Selatan di Indonesia.

Tiongkok juga membina hubungan dengan Indonesia melalui tawaran bantuan keuangan, sebagai imbalan atas akses terhadap mineral dan tenaga kerjanya di Indonesia. Misalnya, menurut Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2016, Cina memberikan dana proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, antara lain pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandar udara (bandara), pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer (km), pembangunan jalan kereta api sepanjang 8.700 km, serta pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW). Tidak hanya itu, Tiongkok juga akan terlibat dalam pembangunan jalur kereta supercepat Jakarta-Bandung (Siregar, 2016). Sebaliknya, janji Presiden Biden untuk melawan pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara dan memulihkan kepemimpinan AS sejauh ini belum membuahkan hasil yang signifikan. Daya tarik Tiongkok sebagai mitra juga diperkuat oleh fakta bahwa Tiongkok tidak mengaitkan investasi dengan hak asasi manusia atau nilai-nilai demokrasi, seperti yang sering dilakukan AS. Selama Tiongkok terus memberikan dukungan finansial, kecil kemungkinannya bahwa AS akan mampu bersaing untuk menguasai industri nikel di Indonesia. Investasi Tiongkok membantu Indonesia menjadi pusat penambangan dan pemurnian logam baterai oleh delapan *smelter* yang dijadwalkan beroperasi tahun 2021, meskipun

Buku ini tidak diperjualbelikan

belum berjalan lancar dan tidak mengarah pada pembuatan kendaraan listrik (Myllyvirta et al., 2024).

Tiongkok telah mengonsolidasikan kekuatan dan pengaruh regionalnya dengan mendanai proyek-proyek infrastruktur besar melalui skema *Belt and Road Initiative* (BRI). Sementara itu, AS justru sedang mencari pendekatan baru untuk melawan pengaruh Tiongkok di Indonesia. Mengamankan rantai pasokan baterai EV dan mineral yang diperlukan telah menjadi prioritas utama bagi AS dalam upayanya memfasilitasi penyebaran energi ramah lingkungan, merevitalisasi daya saing industri, dan mengurangi ketergantungan yang tidak semestinya pada rantai pasokan yang didominasi oleh Tiongkok (Nakano & Huang, 2023). Dalam hal percepatan industri nikel di Indonesia, Tiongkok lebih unggul daripada AS.

Namun demikian, ada catatan negatif terkait soal ketenagakerjaan dari rivalitas ini. Sebagai contoh, pada bulan Februari 2020, laporan palsu tentang industri nikel di Morowali mempekerjakan 40.000 pekerja Tiongkok tersebar di media sosial, menyebabkan kesalahpahaman tentang jumlah pekerja asing yang dipekerjakan di kawasan industri Indonesia. Jumlah sebenarnya adalah 5.000 pekerja asal Tiongkok dari total 43.000 pekerja. Sampai tahun 2023 karyawan PT IMIP berjumlah 78.443 dengan mayoritas pekerja asal Indonesia. Kenaikan jumlah pekerja asing ini dapat memiliki konsekuensi serius, seperti yang terlihat dari konflik mematikan di pabrik peleburan nikel Morowali pada bulan Januari 2022 antara pekerja Tiongkok dan Indonesia, yang memicu protes dari pekerja lokal Indonesia dan meningkatnya lapangan kerja bagi pekerja Indonesia di pabrik peleburan tersebut (Ramadhani & Ao'na, 2022).

F. Penutup

Pertama, perbedaan pendekatan. Tak dipungkiri peran Tiongkok sangat signifikan dalam sektor nikel Indonesia, dengan menonjolkan perusahaan-perusahaan Tiongkok sebagai investor utama. Mereka telah berinvestasi secara besar-besaran dalam operasi penambangan dan pemurnian nikel di Indonesia, serta memperluas ke produk-pro-

Buku ini tidak diperjualbelikan

duk hilir, seperti baja tahan karat, logam paduan, dan baterai. AS juga tertarik pada industri nikel Indonesia dan berupaya mendiversifikasi sumber pasokan nikelnya sambil mengurangi ketergantungannya pada impor Tiongkok. Salah satunya kebijakan yang diberlakukan adalah pemerintah AS mendanai usaha patungan antara dua perusahaan Amerika untuk mengembangkan pabrik pengolahan nikel-kobalt di Indonesia. Soal pendekatan, Tiongkok dan AS memiliki karakteristik praktik ekonomi politik yang berbeda. Pendekatan praktik Tiongkok didasarkan pada rencana investasi yang bertumpu pada kerangka proyek nasional negara semacam program *Made in China 2025* atau *BRI*, di mana pemerintah memegang peran utama dalam mengarahkan investasi dan memberikan dukungan finansial maupun jaringan sosial kepada perusahaan dalam negeri. Sementara itu, pendekatan AS lebih mengedepankan pembangunan yang didorong oleh mekanisme pasar, dengan peran pemerintah yang lebih terbatas.

Kedua, implikasi global—lokal. Pendekatan yang berbeda ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan industri nikel lokal dan juga global. Investasi dari Tiongkok dalam industri ini membantu Indonesia dalam pengembangan sumber daya nikelnya, tetapi juga dapat meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap investasi Tiongkok dalam pengembangan industri tersebut. Sebaliknya, pendekatan AS membantu memastikan bahwa industri nikel dapat dikembangkan dengan cara yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Di masa mendatang, persaingan antara AS dan Tiongkok di industri nikel Indonesia diperkirakan akan semakin ketat, karena keduanya berusaha untuk mengamankan sumber daya yang penting dan memperoleh posisi dalam rantai nilai nikel.

Ketiga, disinformasi. Kegiatan penambangan dan peleburan nikel telah menyebabkan skandal, kontroversi, atau berbagai tuduhan kelalaian, serta menyebarkan informasi yang keliru tentang gelombang migran pekerja asing dengan lokal, meningkatnya ketegangan dengan masyarakat lokal Indonesia, yang merusak reputasi perusahaan. Keempat, keterbatasan hubungan sosial. Berdasarkan diskusi dan wawancara, di kawasan industri nikel Sulawesi, terungkap bahwa

Buku ini tidak diperjualbelikan

hubungan antara perusahaan Tiongkok maupun AS dengan pemangku kepentingan di Indonesia ditandai oleh koalisi elite. Koalisi ini melibatkan aktor dari pemerintah pusat, otoritas daerah, dan entitas korporat, dengan tujuan mempertahankan hubungan kuat di antara mereka.

Referensi

Aiddata. (n.d.). Bank of China contributes $15 million to $574 million syndicated loan for Phase 3 of Sulawesi Mining Power Station Project in Morowali Industrial Park. https://china.aiddata.org/projects/69488/

Anggela, N. L. (2023, October 19). Erick Thohir: Perdagangan Indonesia-China tembus Rp2.000 Triliun. *Bisnis.com*. https://ekonomi.bisnis.com/read/20231019/12/1705724/erick-thohir-perdagangan-indonesia-china-tembus-rp2000-triliun

ANTAM. (2022, May 8). *Deepening international cooperation comprehensively, CNGR signed a strategic cooperation agreement with ANTAM, an Indonesian state-owned enterprise* [Press release]. https://www.antam.com/en/news-and-events/article/deepening-international-cooperation-comprehensively--cngr-signed-a-strategic-cooperation-agreement-with-antam--an-indonesian-state-owned-enterprise

Ardian, A. (2021, January 21). Prospek bisnis pertambangan nikel. *Media Nikel Indonesia*. https://nikel.co.id/2021/01/27/prospek-bisnis-pertambangan-nikel/

Azzam, F. (2019, February 19). Ini empat program csr harita nickel untuk masyarakat lingkar tambang. *Indotimur.* http://indotimur.com/nasional/ini-empat-program-csr-harita-nickel-untuk-masyarakat-lingkar-tambang

Berg, R. C., Ziemer, H., & Anaya, E. P. (2024). Mineral demands for resilient semiconductor supply chains. The Role of the Western Hemisphere. *CSIS Briefs*, 1–12.

Bhawono, A. (2022, September 27). Investasi nikel: Lika liku mimpi produksi hingga baterai otomotif. *Betahita*. https://betahita.id/news/lipsus/7982/investasi-nikel-lika-liku-mimpi-produksi-hingga-baterai-otomotif.html?v=1668119661

Buku ini tidak diperjualbelikan

Castillo, R., Blumenthal, L., & Purdy, C. (2022, September 21). Indonesia's electric vehicle batteries dream has a dirty nickel problem. *Brookings Commentary*.

Deloitte. (2022, February). Overview of Indonesia's EV downstream sector: A focus on nickel. *Deloitte Indonesia Perspectives*, (3), 26–46.

Dempsey, H. (2023, April 11). China leads rise in export restrictions on critical minerals, OECD says. *Financial Times*. https://www.ft.com/content/198b6824-21d6-4633-9a97-00164d23c13f

Devonshire-Ellis, C. (2022, July 21). 2023 Foreign Investment Opportunities in Indonesia. *ASEAN Briefing*. https://www.aseanbriefing.com/news/2023-foreign-investment-opportunities-in-indonesia/

Dinata, S., Iksan, M., Silaban, M., & Umam, A. K. (2020). The Outcome of China's Investment in Indonesia: Lessons from the Nickel Industry. In C. f. I. P. E. (CIPE) (Ed.), *A Study of Chinese Capital Flows to Six Countries. Mitigating Governance Risks from Investment in Southeast Asia* (144–168). Center for International Private Enterprise (CIPE).

DInsights. (2021, September 17). Tsingshan's subsidiary becomes Indonesia's top nickel producer. https://dinsights.katadata.co.id/read/2021/09/17/tsingshans-subsidiary-becomes-indonesias-top-nickel-producer

Els, F. (2024, February 20). CHART: China's belt and road mining investment hits record. *mining.com*. https://www.mining.com/chart-chinas-belt-and-road-mining-investment-hits-record/

EYI. (2013). *The impact of US foreign direct investment on the Indonesian economy*. Ernest and Young Indonesian in collaboration with USAid, Paramadina Public Policy Institute, Penelitian dan Pelatihan Ekonomika Bisnis Universitas Gadjah Mada, and Support for Economic Analysis Development in Indonesia (SEADI).

Fortuna, C. (2022). Should tesla invest in Indonesia's nickel mines & build a new gigafactory there? *CleanTechnica*. https://cleantechnica.com/2022/07/29/should-tesla-invest-in-indonesias-nickel-mines-build-a-new-gigafactory-there/

Graham, J. D., Belton, K. B., & Xia, S. (2021). How China Beat the US in Electric Vehicle Manufacturing. *Issues in Science and Technology*, *37*(2), 72–79.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Hasiana, D. (2024, April 13). AS bikin deal nikel dengan Filipina, bagaimana dengan RI? *Bloomberg Technoz*. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/35109/as-bikin-deal-nikel-dengan-filipina-bagaimana-dengan-ri

Hemanona, V., & Suharyono, S. (2017). Analisis pengaruh foreign direct investment terhadap country advantages Indonesia (Studi terhadap FDI Amerika Serikat di Indonesia). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, *52*(1), 16–25.

Heydarian, R. (2021, March 29). How Jokowi bested China, while Duterte ended up a lackey. *Nikkei Asia*. https://asia.nikkei.com/Opinion/How-Jokowi-bested-China-while-Duterte-ended-up-a-lackey

Ho, Y., & Listiyorini, E. (2022, December 16). Chinese Companies are flocking to Indonesia for its nickel. *Bloomberg*. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-15/chinese-companies-are-flocking-to-indonesia-for-its-nickel?embedded-checkout=true

IEA. (2023). *Energy technology perspectives 2023*. International Energy Agency (IEA).

IWIP. (2022). Tentang IWIP. https://iwip.co.id/tentang-iwip/

Junida, A. I. (2023, February 22). Indonesia dan China perkuat kerja sama investasi melalui forum kemitraan bisnis. *Antara Kalbar*. https://kalbar.antaranews.com/berita/536568/indonesia-dan-china-perkuat-kerja-sama-investasi-melalui-forum-kemitraan-bisnis

Karunia, A. M., & Djumena, E. (2022, August 09). Tesla pilih beli nikel Indonesia lewat 2 perusahaan China, apa keuntungan buat RI? *Kompas.com*. https://money.kompas.com/read/2022/08/09/131200926/tesla-pilih-beli-nikel-indonesia-lewat-2-perusahaan-china-apa-keuntungan-buat?page=all#google_vignette

KESDMRI. (2020, October 2020). Hilirisasi nikel ciptakan nilai tambah dan daya tahan ekonomi [Press release]. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hilirisasi-nikel-ciptakan-nilai-tambah-dan-daya-tahan-ekonomi

KESDMRI. (2021). *Grand strategy mineral dan batu bara. arah pengembangan hulu hilir mineral utama dan batu bara menuju Indonesia maju*. Indonesia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Kim, K. (2023, February 20). Indonesia's uncertain climb up the nickel value chain. *The Interpreter*. https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-s-uncertain-climb-nickel-value-chain

Konewka, T., Bednarz, J., & Czuba, T. (2021). Building a competitive advantage for Indonesia in the development of the regional ev battery chain. *Energies*, *14*(7332), 1–13. doi: https://doi.org/10.3390/en14217332

Kontan. (2021, March 23). Dua pabrik smelter tambang rampung tahun ini. *Kontan.co.id*. https://industri.kontan.co.id/news/dua-pabrik-smelter-tambang-rampung-tahun-ini

Mansfield, E. D., & Milner, H. V. (2018). The domestic politics of preferential trade agreements in hard times. *World Trade Review*, *17*(3), 371–403. doi:10.1017/S1474745617000428

McHugh, T. D. (2022). *Evaluating the effect China's belt and road initiative has on the Unted States' clean energy transition.* (MA Thesis). Johns Hopkins University, Baltimore, MD.

MNI. (2021, October 6). Peluang dan tantangan hilirisasi nikel. *Nikel*. https://nikel.co.id/2021/10/06/peluang-dan-tantangan-hilirisasi-nikel/

Mtero, F. (2017). Rural livelihoods, large-scale mining and agrarian change in Mapela, Limpopo, South Africa. *Resources Policy*, *53*, 190–200. doi:https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2017.06.015

Muliawati, F. D. (2023, January 19). Genjot hilirisasi nikel, RI bisa tiru China. *CNBC Indonesia*. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230119133056-4-406789/genjot-hilirisasi-nikel-ri-bisa-tiru-china

Myllyvirta, L., Hasan, K., Kelly, J., Parapat, J., Adhinegara, B. Y., Rizqiana, A., Refani, F., Huda, N., Monica, L., Darmawan, J., & Utomo, W. T. (2024). *Membantah mitos nilai tambah, menilik ulang industri hilirisasi nikel – dampak ekonomi dan kesehatan dari industri nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara*. Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) bekerja sama dengan Center of Economics and Law Studies (CELIOS).

Nakano, J., & Huang, C. (2023, February 6). U.S. push to secure ev battery supply chains and the role of China. *CSIS*. from https://www.csis.org/analysis/us-push-secure-ev-battery-supply-chains-and-role-china

Buku ini tidak diperjualbelikan

Nangoy, F., & Munthe, B. C. (2023, February 6). Investments in Indonesia's nickel industry. *Reuters*. https://www.reuters.com/markets/commodities/investments-indonesias-nickel-industry-2023-02-06/

Perlez, J., Schmitt, E., & Wee, S.-L. (2023, February 1). China and the U.S. Are Wooing Indonesia, and Beijing has the edge. *New York Times*. https://www.nytimes.com/2023/02/01/world/asia/indonesia-china-united-states.html

Primanita, A. (2015, May 4). US companies eying more than $1b investment in Indonesia. *Jakarta Globe*. https://jakartaglobe.id/business/us-companies-eying-1b-investment-indonesia

Ramadhani, N. F., & Ao'na, W. (2022, November 16). World Insights: China-invested industrial parks bring boom to Indonesia's nickel industry. *Xinhua News Agency*. https://english.news.cn/20221116/bbdddc5833604754aed02f17d542537d/c.html

Riedho, M. R. Z. (2024). Strategi Tiongkok dalam memanfaatkan momentum kebijakan larangan ekspor bijih nikel oleh pemerintah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, *20*(1), 74–95. doi:https://doi.org/10.26593/jihi.v20i1.7156.74-95

Ross, R. S. (2020). It's not a cold war: competition and cooperation in US–China relations. *China International Strategy Review*, *2*(1), 63–72. doi:10.1007/s42533-020-00038-8

Rubbers, B. (2020). Mining boom, labour market segmentation and social inequality in the congolese copperbelt. *Development and Change*, *51*(6), 1555–1578. doi:https://doi.org/10.1111/dech.12531

Sappor, J. (2023, February 7). Nickel CBS January 2023 – Price falls on Tsingshan's new supply plans. https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/blog/major-copper-discoveries

Senong, A. A. (2022, February 2022). Realisasi investasi di Konawe tertinggi ketujuh di Indonesia. *Antara News*. https://www.antaranews.com/berita/2710693/realisasi-investasi-di-konawe-tertinggi-ketujuh-di-indonesia

Silvanah, S. (2023, February 19). Exploitation of illegal nickel mines in Indonesia – OpEd. *Eurasia Review*. https://www.eurasiareview.com/19022023-exploitation-of-illegal-nickel-mines-in-indonesia-oped/

Siregar, R. R. (2016). Konsep bantuan luar negeri Cina ke Indonesia sebagai kedok investasi (Studi Kasus: Implikasi Pengiriman Tenaga Kerja Asing Cina). *Jurnal Hubungan Internasional*, *5*(1), 50–59.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Smith, E. (2019, June 18). Two European countries could be the big winners from the US-China trade war, Barclays says. *CNBC*. https://www.cnbc.com/2019/06/18/two-european-counties-big-winners-from-the-us-china-trade-war.html

Sovacool, B. K., Hook, A., Martiskainen, M., Brock, A., & Turnheim, B. (2020). The decarbonisation divide: Contextualizing landscapes of low-carbon exploitation and toxicity in Africa. *Global Environmental Change*, *60*, 102028. doi:https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.102028

Syafira, A. D., Putri, C. M., Widyaningsih, E., & Kusumawijaya, P. (2023). Analisis peluang, tantangan, dan dampak larangan ekspor nikel terhadap perdagangan internasional di tengah gugatan Uni Eropa di Wto. *Jurnal Economina*, *2*(1), 90–100. doi:https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.258

TE. (2023). United States imports from Indonesia. https://tradingeconomics.com/united-states/imports/indonesia

Toumbourou, T. D., Dressler, W. H., & Werner, T. T. (2022). Plantations enabling mines: Incremental industrial extraction, social differentiation and livelihood change in East Kalimantan, Indonesia. *Land Use Policy*, *119*, 106157. doi:https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106157

Umah, A. (2020, October 28). 5 Smelter HPAL pemasok bahan baku baterai beroperasi di 2023. https://www.cnbcindonesia.com/news/20201028162028-4-197792/5-smelter-hpal-pemasok-bahan-baku-baterai-beroperasi-di-2023

USCB. (2024). Trade in goods with Indonesia. https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5600.html#2024

VOI. (2021, February 21). Tesla choose India instead of Indonesia to build electric car factory, INDEF: Taxes there are cheap. *Voi*. https://voi.id/en/news/34126

Wang, C. N. (2023, August 1). China belt and road initiative (BRI) investment report 2023 H1. *Green FDC*. https://greenfdc.org/china-belt-and-road-initiative-bri-investment-report-2023-h1/

Wikarya, U. (2019). *Efektifitas kebijakan hilirisasi minerba, dan transparansi tatakelola*. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Indonesia.

WM. (2020). Global nickel long-term outlook Q4 2020. https://www.woodmac.com/reports/metals-global-nickel-long-term-outlook-q4-2020-456979/

Buku ini tidak diperjualbelikan

Xing, L., & Bernal-Meza, R. (2022). China-US rivalry: a new Cold War or capitalism's intra-core competition? *Revista Brasileira de Política Internacional*, *64*(1), 1–20. doi: https://doi.org/10.1590/0034-7329202100110

Yee, W. Y. (2023). Ten years on, how is the belt and road initiative faring in Indonesia? *China Brief*, *23*(4), 17–21.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Buku ini tidak diperjualbelikan

BAB 5

Belt and Road Initiative (BRI) dalam Visi Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia (PMD): Implikasi terhadap Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)

Ganjar Widhiyoga, Hasna Wijayati, & Megah Rahmat Ramadhan

A. Nilai Strategis Konektivitas Maritim Indonesia

Indonesia memiliki 17.000 pulau yang menjadikan Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Kondisi geografis Indonesia yang berwujud kepulauan inilah yang membuat Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim. Setidaknya, 62% wilayah Indonesia terdiri dari perairan dan lautan (Atmini & Retraubun, 2004). Secara geografis pula, Indonesia diapit oleh dua perairan strategis, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kedua Samudra ini merupakan jalur penting perdagangan global sehingga membuat Indonesia memiliki posisi strategis dalam era perdagangan (Rustam, 2016).

G. Widhiyoga, H. Wijayati, & M. R. Ramadhan
Universitas Slamet Riyadi, *e-mail*: ganjar.widhiyoga@gmail.com

© 2026 Editor & Penulis

Widhiyoga, G., Wijayati, H., & Ramadhan, M. R. (2026). *Belt And Road Initiative* (BRI) Dalam Visi Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia (PMD): Implikasi Terhadap *Kalimantan Industrial Park Indonesia* (KIPI). Dalam RR. E. Yustiningrum & E. S. Prihatini (Ed.), *Indonesia dalam Kancah Geopolitik di Indo-Pasifik* (151–187). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.2075.c1722
E-ISBN: 978-602-6303-98-1

Buku ini tidak diperjualbelikan

Posisi strategis Indonesia yang berada di jalur perdagangan global ini seharusnya dapat memberikan keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu menempuh langkah strategis untuk mengubah potensi strategis ini menjadi keunggulan nyata bagi Indonesia (Suryanto & Kurniati, 2022). Pemerintahan Presiden Joko Widodo berusaha menangkap potensi strategis ini dalam kebijakan pemerintah bertajuk "Poros Maritim Dunia (PMD)". Sebagai visi, PMD bertujuan menumbuhkan ekonomi nasional dan meningkatkan stabilitas politik dengan cara ekspansi jalur perdagangan, memperluas pasar, dan menjaga keamanan (Yadav, 2022).

Visi Indonesia sebagai PMD ini pun digaungkan ke seluruh dunia. Presiden Joko Widodo mencanangkan visi pembangunan ini dalam helatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur ke-9 di Myanmar pada 2014. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa Indonesia memiliki peran penting untuk keamanan, stabilitas, dan ekonomi di kawasan regionalnya. Peran ini pun lantas diperkuat dengan agenda Indonesia dalam sebuah gagasan Indonesia sebagai PMD (SKRI, 2014).

Selain Indonesia, Tiongkok juga menyadari pentingnya penguatan konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Tiongkok memiliki gagasan sendiri tentang konektivitas, baik di daratan maupun di lautan. Tiongkok melihat Jalur Sutra sebagai alat untuk melakukan ekspansi pengaruh ekonominya ke berbagai penjuru dunia. Tiongkok pun menyatakan keinginan untuk membangun ulang jalur sutra tradisional yang sebelumnya telah menjadi sarana perdagangan dunia (Ferdinand, 2016). Dalam kunjungan di Kazakhstan tahun 2013, Tiongkok memperkenalkan *Belt and Road Initiative* (BRI) sebagai wadah yang menaungi kerja sama antara Tiongkok dengan negara lain untuk mewujudkan pembangunan kembali Jalur Sutra ini (ACC, 2013).

Dalam gagasan yang disampaikan oleh Tiongkok, Jalur Sutra dibangun dengan dua jenis, yaitu *Silk Road Economic Belt* dan *21st Century Maritime Silk Road.* Pada skema *Silk Road Economic Belt*,

Buku ini tidak diperjualbelikan

agenda pembangunan infrastruktur dirancang melewati jalur darat dengan menghubungkan daratan Tiongkok, Timur Tengah, hingga Eropa. Sementara pada skema *21st Century Maritime Silk Road*, rancangan jalur perdagangan dibangun melalui jalur maritim dengan menghubungkan Tiongkok, Indo-Pasifik, Afrika, hingga Eropa (Ferdinand, 2016).

Dalam skema BRI, Indonesia merupakan salah satu titik vital yang akan dilewati oleh *21st Century Maritime Silk Road*. Pentingnya posisi Indonesia dalam BRI ini muncul dalam pidato Presiden Xi Jinping ketika mengunjungi Indonesia atas undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2 Oktober 2013. Di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada acara Forum Publik Presiden RRT, Presiden Xi Jinping menyampaikan gagasan mengenai pembangunan jalur maritim sutra yang baru (Dheani, 2017). Presiden Xi Jinping menyampaikan keinginannya untuk membangun kerja sama saling menguntungkan dan meningkatkan konektivitas dengan negara-negara di ASEAN (ACC, 2013).

Pada titik ini, kita dapat melihat bahwa gagasan BRI Tiongkok dan visi Indonesia sebagai PMD memiliki irisan. Baik BRI maupun PMD meletakkan konektivitas maritim sebagai landasan penting guna mendukung gairah ekonomi kawasan. Jika melihat secara kronologi, konsep BRI muncul terlebih dahulu sebelum PMD. BRI pertama kali dikenalkan oleh Presiden Xi Jinping dalam KTT di Kazakhstan pada tahun 2013 (Lalisang & Candra, 2020). Proyek ini awalnya diluncurkan dengan nama *One Belt One Road* (OBOR) yang kemudian pada tahun 2017 diubah nama menjadi *Belt and Road Initiative* (BRI) (Yudilla, 2019). Selang satu tahun kemudian, pada 13 November 2014, Presiden Joko Widodo menyampaikan gagasan mengenai Indonesia sebagai PM dalam KTT Asia Timur ke-9 di Myanmar (Lalisang & Candra, 2020). Visi PMD ini dicantumkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 (PP No. 2, 2015).

Melihat adanya irisan dalam konsep BRI dan PMD, tulisan ini ingin mengevaluasi bagaimana irisan kedua konsep tersebut terlaksana dalam pembangunan di Indonesia. Secara khusus, tulisan

Buku ini tidak diperjualbelikan

ini akan melihat pembangunan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) sebagai salah satu pengejawantahan konsep BRI dan PMD di Indonesia. Tulisan ini akan membahas bagaimana konsepsi BRI dan PMD tertuang dalam rancangan KIPI dan sejauh mana implementasi KIPI sudah mendukung perwujudan BRI dan PMD di Indonesia.

Tulisan ini menggunakan teori geopolitik sebagaimana yang telah diutarakan oleh Mahan (2004), Kaplan (2009), dan Cohen (2014) untuk melihat bagaimana geografi dapat memengaruhi kebijakan atau pengambilan sebuah keputusan sebuah negara. Teori geopolitik ini digunakan sebagai kerangka berpikir untuk dapat memahami pentingnya BRI dan PMD sebagai upaya negara-negara untuk mengelola dan mengambil keuntungan dari potensi geografis tertentu. Selanjutnya, tulisan ini menggunakan teori kerja sama internasional yang dikemukakan oleh Holsti (1972) dan Keohane (2019) untuk melihat bagaimana sebuah negara berkolaborasi dan berinteraksi untuk dapat mencapai tujuan bersama. hal ini untuk memahami bagaimana konsep BRI, yang ditawarkan oleh Tiongkok, dan konsep PMD, yang ditawarkan oleh Indonesia, berinteraksi dan melahirkan kerja sama antara kedua negara yang salah satunya terwujud dalam pembangunan KIPI.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif sebagai pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami masalah yang ada. Analisis dilakukan dengan membuat tafsiran yang bermakna dari data yang digunakan dan hasil akhir berupa struktur yang bersifat fleksibel (Creswell & Creswell, 2017). Adapun data-data yang digunakan sebagai landasan berpikir dan analisis diperoleh melalui penelusuran pustaka dengan sumber utama dokumen-dokumen resmi yang relevan dari pemerintah Tiongkok dan Indonesia. Sesuai tujuan penelitian, data-data tersebut penulis olah dengan tingkat analisis pada level negara/pemerintah mengenai (a) perwujudan konsep BRI dan PMD dalam rancangan KIPI; (b) evaluasi pembangunan KIPI dan perwujudan BRI dan PMD di Indonesia.

Buku ini tidak diperjualbelikan

B. Perspektif Geopolitik dalam *Belt and Road Initiative* (BRI) dan Poros Maritim Dunia (PMD)

BRI erat kaitannya dengan dinamika kawasan yang dibangun oleh Tiongkok. Oleh karena itu, pembahasan mengenai skema BRI tentu sangat dekat dengan geopolitik. Geopolitik merupakan kajian yang dapat menjelaskan keterkaitan antara geografi dan kebijakan luar negeri sebuah negara. Secara sederhana, geopolitik membahas bagaimana suatu negara dengan letak geografis tertentu dan menempati kondisi geografis tertentu, menghasilkan suatu hubungan yang khas pada kebijakan politiknya, diakibatkan oleh aspek geografis tersebut.

Terdapat banyak perspektif geopolitik yang lahir melalui beberapa ideologi dan sudut pandang. Misalnya, Rudolf Kjellen (1916) sebagai salah satu ilmuwan politik yang memperkenalkan istilah geopolitik pada dunia dengan cara pandangnya sendiri. Kjellen (1916) menyatakan posisi geografi dapat memengaruhi perilaku sebuah negara. Kjellen (1916) membedakan antara pandangan perilaku negara akibat etnis di dalam negara tersebut (etnopolitik) yang fokus kajiannya tentang bangsa dan perilaku akibat geografi negara (geopolitik) yang fokus kajiannya tentang negara. Menurutnya, kedua disiplin ilmu tersebut sangat berbeda dan tidak dapat disatukan (Kjellén, 1916).

Jika Kjellen (1916) banyak menekankan geopolitik pada posisi geografis negara maka ilmuan lain memiliki pendapat yang lebih luas. Terdapat Mackinder (2017) yang menyatakan bahwa kajian geopolitik tidak terbatas pada negara saja, melainkan juga pada kawasan. Mackinder (2017) membuat konsep geopolitik dari sudut pandang daratan yang disebut "*Land Power*" atau Teori Heartland. Dalam penjelasannya ini, Mackinder (2017) berpendapat bahwa daratan merupakan kunci geopolitik karena posisi daratan merupakan tempat berdirinya negara. Di antara sekian banyak negara, Mackinder (2017) berpendapat bahwa negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah dan Eropa memiliki nilai yang lebih dibandingkan negara-negara lain karena berada dalam "*pivot area*" yang strategis (Mackinder, 2017).

Buku ini tidak diperjualbelikan

Jika Mackinder (2017) berpendapat bahwa daratan lebih penting bagi geopolitik, Alfred Theyer Mahan (2004) seorang ahli dalam bidang geopolitik dan geostrategi berpendapat bahwa dalam geopolitik, aspek terpenting adalah "*sea power*". Ia melihat perairan sebagai kunci geopolitik. Menurut Mahan (2004), daratan memiliki akses terbatas karena terdapat teritori perbatasan antarnegara. Ditambah lagi, medan darat yang beragam juga dapat membuat mobilitas pasukan darat terbatas. Kondisi ini jelas berbeda dengan laut yang memiliki wilayah luas dan dapat digunakan secara bebas.

Dengan pendekatannya ini, Mahan (2004) menjelaskan bagaimana Rusia sebagai negara yang sangat besar dan memiliki pasukan darat yang kuat selalu mencari akses ke perairan, termasuk dengan menguasai Krimea. Contoh lain dari pendekatan Mahan (2004) adalah benua Amerika. Ia mencontohkan, AS yang dapat mengendalikan Amerika Latin dengan memanfaatkan perairan, yakni Kanal Panama. Hal yang sama juga terjadi di Timur Tengah. Keberadaan Terusan Suez memberikan akses kapal untuk melewati antarperairan dengan lebih cepat sehingga kebaradaan terusan ini merupakan potensi besar laut dalam geopolitik (Mahan, 2004).

Analisis tentang geopolitik lebih lanjut juga diuraikan oleh Kaplan (2009), seorang politikus AS yang berfokus pada kebijakan luar negeri. Dalam pandangannya, ia melihat geopolitik sebagai suatu kajian yang meletakkan geografi pada posisi penting yang berperan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri suatu negara. Kaplan (2009) sepakat dengan Mackinder (2017) bahwa kendali atas daratan merupakan hal utama dan krusial dalam geopolitik maka geopolitik harus berlandasan karakter topografi, perbatasan, kepemilikan wilayah maritim, dan lokasi geografi yang menentukan arah kebijakan luar negeri (Kaplan, 2009).

Pandangan geopolitik lain dikemukakan oleh Saul Bernard Cohen (2014) yang menjelaskan keterkaitan geopolitik dengan politik dan geografi yang menekankan pentingnya peran dari geografi terhadap politik internasional. Peran penting ini muncul karena akan berdampak pada perilaku sebuah negara, seperti strategi

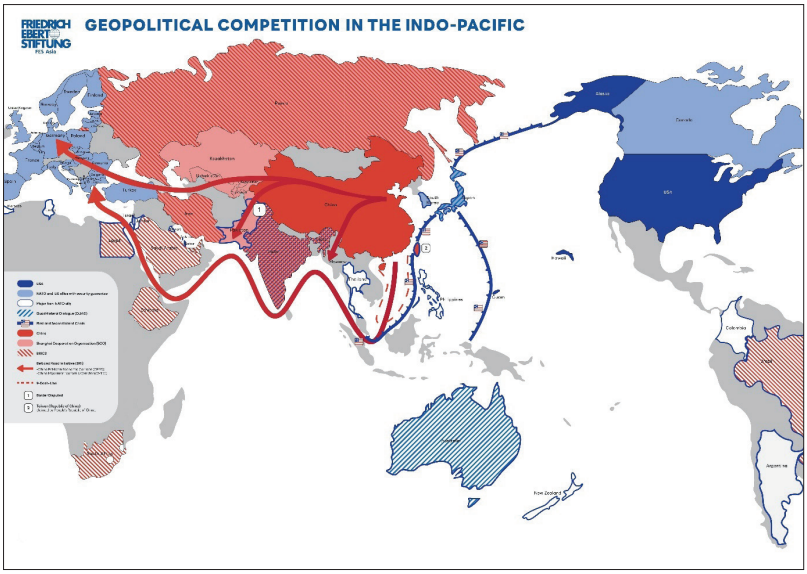
Buku ini tidak diperjualbelikan

negara, dinamika politik di level global, dan kepentingan nasional. Menurutnya, geopolitik dapat memicu terbentuknya kerja sama atau konflik antarnegara. Faktor tersebut dipengaruhi oleh perbatasan, akses terhadap wilayah maritim, dan sumber daya alam. Berbagai faktor ini dapat berpengaruh terhadap hubungan antarnegara secara bertolak belakang. Satu sisi, faktor ini bisa menjadi sumber kompetisi ketika terdapat perbedaan kepentingan yang menuai konflik. Sebaliknya, hal ini juga dapat menjadi sumber kerja sama untuk mencapai kepentingan nasional ketika berhasil meraih kesepakatan bersama (Cohen, 2014).

Cohen (2014) melihat struktur geopolitik tidak hanya ditentukan pada kendali teritori. Lebih lanjut, ia melihat geopolitik memiliki pola tertentu yang terdiri dari titik-titik yang bergantung pada karakteristik dari daratan, termasuk dalam bentuk dan ukuran. Pola tersebut saling terhubung dan membentuk interaksi antarbangsa dengan lingkungan alam. Cohen (2014) berpendapat bahwa geografi dipengaruhi oleh letak atau lokasi, topografi, dan sumber daya alam yang dapat menyebabkan terbentuknya konflik atau kerja sama antarnegara, terlepas dari geopolitik tersebut berada di darat atau di laut, ataupun ada di negara maupun bukan (Cohen, 2014).

Sebagai ahli geografi politik Cohen (2014) juga menyampaikan pandangannya tentang geostrategi yang membuat konsep *shatterbelt*. Konsep ini digambarkan sebagai wilayah geografis yang memiliki intensitas kekuatan besar yang sering bersaing di daerah tersebut. Cohen (2014) juga menyatakan bahwa geostrategi di dunia ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa wilayah dengan pengaruh dan dinamika yang berbeda (Cohen, 2014). Mengikuti dinamika politik internasional maka saat ini terdapat beberapa wilayah geografis yang menjadi ajang perebutan pengaruh kekuatan-kekuatan besar dunia.

Buku ini tidak diperjualbelikan



Sumber: FES (2024)

Gambar 5.1 Peta Persaingan Geopolitik di Indo-Pasifik

Indo-Pasifik dalam perspektif geopolitik memiliki wilayah yang strategis. Dalam studi yang dilaksanakan oleh Friedrich Ebert Stiftung (2024) yang tertuang dalam Gambar 5.1 di atas, Tiongkok dan AS disebut sebagai dua kekuatan besar yang berebut pengaruh di Indo-Pasifik. Dengan lemahnya pengaruh AS setelah adanya konflik Timur Tengah, Tiongkok segera memposisikan diri di Indo-Pasifik dengan BRI sebagai alat dominasi di kawasan Indo-Pasifik. Namun, tentu AS tidak tinggal diam menghadapi menguatnya pengaruh Tiongkok di kawasan. Secara aktif, AS memiliki kebijakan untuk membendung pengaruh Tiongkok, bekerja sama dengan sekutu-sekutunya di kawasan, seperti Korea Selatan dan Jepang, yang ditunjukkan dengan garis biru dalam Gambar 5.1 di atas. Tiongkok memiliki kekhawatiran akan hadirnya pasukan AS di perairan Indo-Pasifik.

Secara geopolitik, dinamika BRI membuat wilayah Indo-Pasifik kembali menjadi wilayah yang strategis dan sangat rentan terhadap

Buku ini tidak diperjualbelikan

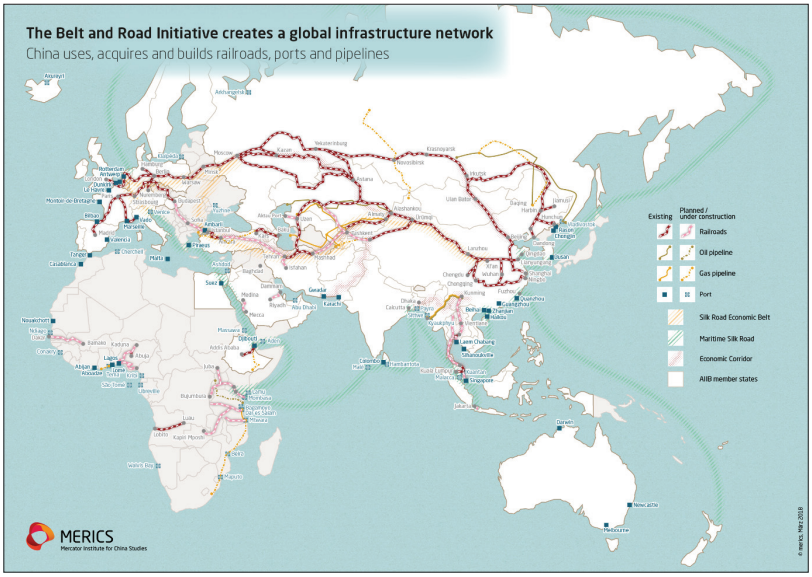
perpecahan internal yang dapat menimbulkan banyak konflik pada waktu yang sama penting secara strategis bagi negara besar. Hal itu membuat wilayah ini diminati banyak kekuatan besar seperti BRI. Secara tradisional, AS telah "mengepung" Tiongkok dengan strategi rantai kepulauan di perairan timur Tiongkok, yang dalam gambar ditunjukkan dengan garis berwarna biru. Strategi ini didukung oleh peran Jepang dan Korea Selatan sebagai dua sekutu utama AS di kawasan. Sejak 2017, AS dan tiga negara lain, yakni Australia, India, dan Jepang, sepakat menghidupkan kembali kerja sama empat negara tersebut dalam Quad (O'Connor & Jamali, 2020). Kerja sama ini memperkuat kontestasi politik di kawasan, hingga menimbulkan kecemasan akan munculnya perang dingin di kawasan (Heydarian, 2021; Kobara & Moriyasu, 2021).

Sebagai upaya Tiongkok untuk keluar dari "pengepungan" AS dan sekutu-sekutunya itu, Tiongkok pun mencetuskan konsep BRI yang akan menghubungkan Tiongkok dengan berbagai negara yang memiliki peran strategis bagi Tiongkok. Melalui BRI, Tiongkok berupaya untuk membuka garis hubung yang mampu memenuhi kepentingan nasionalnya. Terdapat enam koridor yang dirancang Tiongkok pada skema BRI, yakni *China-Mongolia-Russia Economic Corridor* (CMREC), *New Eurasian Land Bridge* (NELB), *China-Central Asia-West Asia Economic Corridor* (CCWAEC), *China-Indochina Peninsula Economic Corridor* (CICPEC), *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC), dan *Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor* (BCIMEC) (SCIOPRC, 2020). Masing-masing koridor ini menghubungkan Tiongkok ke kawasan yang dinilai vital bagi perkembangan perekonomian dan keamanan Tiongkok.

Konsep BRI Tiongkok bertujuan untuk mengamankan kerja sama internasional di sepanjang jalur dengan membuka peluang kerja sama dengan mitra yang berada di kawasan sepanjang koridor BRI. Kerja sama ini juga menjadi alat untuk memperluas pengaruh Tiongkok sehingga dapat menjadi tokoh utama dalam pembentukan sistem ekonomi global yang baru dengan lebih komprehensif serta inklusif (WB, 2019). Rancangan BRI dibesut sedemikian rupa sehingga tingkat

Buku ini tidak diperjualbelikan

keterhubungan kawasan yang ditargetkan Tiongkok dapat tercipta. Jalur utama BRI akan menghubungkan Tiongkok ke negara-negara Timur Tengah dan Eropa, yang selama ini menjadi konsumen dari komoditas yang diproduksi di Tiongkok. Jalur darat ini akan bercabang ke Myanmar melalui skema *China-Myanmar Economic Corridor* (CMEC) dan ke Pakistan melalui skema *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC), membuka akses Tiongkok ke Asia Selatan dan potensi sumber energi di wilayah Teluk Persia (FES, 2024). Sementara, jalur CICPEC akan bersambung dengan jalur maritim, memberikan Tiongkok akses ke Selat Malaka dan Samudra Hindia, secara efektif meningkatkan jangkauan militer dan ekonomi China (Chen, 2023). Visualisasi konsep BRI ini dapat dilihat pada Gambar 5.2.



Sumber: MERICS (2018)

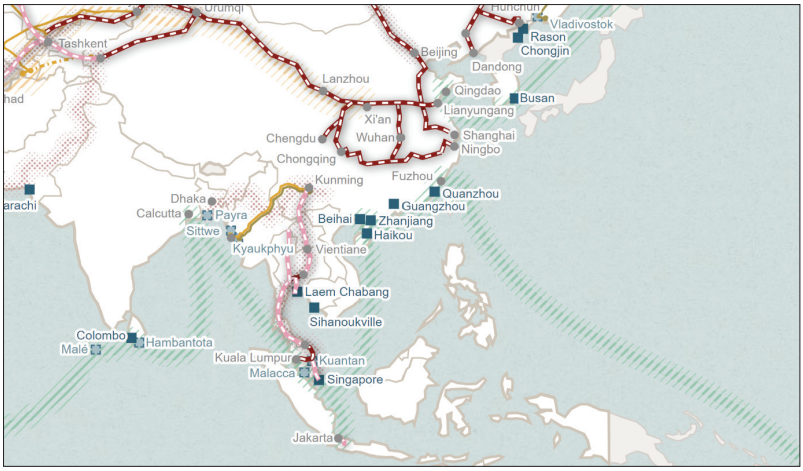
Gambar 5.2 Peta Konsep Koridor BRI

Buku ini tidak diperjualbelikan

Pada koridor *China-Indochina Peninsula Economic Corridor* (CICPEC), BRI melakukan ekspansi ekonomi ke negara-negara Asia Pasifik dan melakukan investasi kepada negara yang dilewati oleh koridor BRI. Secara praktis, CICPEC ingin membangun konektivitas antara Nanning dengan tujuh kota lain di Asia Tenggara Hanoi, Vientiane, Ho Chi Minh, Phnom Penh, Bangkok, Kuala Lumpur, dan Singapura. Dari sana, CICPEC akan berkembang menghubungkan Guangzhou dan Hong Kong (Luft, 2017). Tujuannya adalah agar Tiongkok juga dapat mengakses dan mengamankan jalur sutra maritim tanpa perlu khawatir dengan upaya AS untuk membendung pengaruh Tiongkok, sekaligus menjalin hubungan baik antara Tiongkok dengan negara mitra (Chen, 2023).

Guna mewujudkan CICPEC, Tiongkok bekerja sama dengan negara-negara di sepanjang koridor BRI dalam pembangunan infrastruktur dan investasi industri. Tujuan utama BRI berfokus pada pembangunan infrastruktur di negara mitra dengan mengedepankan konektivitas dan perdagangan melalui jalur maritim. Negara yang bekerja sama dengan Tiongkok dalam skema BRI antara lain Vietnam, yang memiliki proyek menghubungkan Nanning dengan Hanoi; Malaysia, dengan proyek pembangunan rel kereta dan pelabuhannya, yaitu *East Coast Rail Link* dan *Malacca Gateway*, serta Thailand, yang membangun jalur kereta api menghubungkan dua pelabuhan terbesar Thailand, Laem Chabang dan Map Ta Phut, dengan kota industri Nong Khai di dekat ibukota Laos, Vientiane. Dari sana, jalur kereta itu akan mencapai Kunming di China (Luft, 2017). Visualisasi koridor CICPEC yang menghubungkan China dengan beberapa negara di Asia Tenggara dapat dilihat pada Gambar 5.3.

Buku ini tidak diperjualbelikan



Sumber: MERICS (2018)

Gambar 5.3 Peta Konsep Koridor CICPEC

Bagi Indonesia, kehadiran Tiongkok yang menawarkan investasi pembangunan infrastruktur sebagai perwujudan koridor CICPEC adalah kesempatan baik. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan untuk menjaga keutuhan dan keamanan wilayahnya, sekaligus mengelola wilayahnya untuk kepentingan negara. Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan dengan sebagian besar wilayahnya merupakan lautan. Namun, sejak kemerdekaan Indonesia, fokus postur pertahanan condong pada membangun darat dan pusat kekuatan pertahanan Indonesia pada angkatan darat (Suropati et al., 2016).

Secara geopolitik, Mahan telah mengemukakan gagasannya tentang pentingnya laut dalam konsep "*sea power*" (Mahan, 2004). Pandangan ini didukung oleh hasil kajian berbagai peneliti geopolitik kemaritiman. Morris (1986) mendiskusikan bagaimana wilayah maritim di Amerika Latin menjadi rebutan tidak hanya bagi negara-negara setempat, seperti Argentina dan Brazil, Argentina dan Chile, atau Peru dan Bolivia di satu sisi melawan Chile di sisi lain. Namun, AS dan Uni Soviet sebagai kekuatan besar pada masa Perang Dingin pun ikut berebut pengaruh di wilayah maritim Amerika Latin.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Dalam perkembangannya, geopolitik kemaritiman selain membahas pentingnya wilayah laut juga membahas tentang penguasaan sumber daya yang ada di dalam wilayah maritim tersebut. Schofield (2012) menjelaskan bagaimana adanya sumber-sumber energi di wilayah laut memunculkan ketegangan antarnegara di sekitar perairan tersebut yang ingin menguasai sumber-sumber energi itu. Powell dan Dodds (2014) menyebutkan bahwa wilayah perairan kutub pun tidak luput dari konflik geopolitik. Sementara itu, Hannigan (2016) menjelaskan bagaimana perebutan wilayah dan sumber daya yang ada di wilayah tersebut telah merambah laut dalam.

Secara praktis, telah banyak negara yang memberikan perhatian khusus pada geopolitik kemaritiman. Inggris menerbitkan *National Strategy for Maritime Security* pada Mei 2014. Uni Eropa dan Uni Afrika juga menerbitkan buku putih terkait strategi maritim organisasinya pada 2014. Dengan semakin tingginya perhatian pada maritim, sumber daya di perairan dan implikasi geopolitik atas penguasaan laut, maka memang penting bagi Indonesia untuk memiliki konsepsi geopolitik kemaritiman (Chapsos & Malcolm, 2017).

Konsep PMD yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo merupakan perwujudan strategi geopolitik Indonesia untuk menjawab tantangan pengelolaan wilayah tersebut. Hal ini sebagaimana yang tertulis pada visi di Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Investasi Kemaritiman Republik Indonesia mengenai visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut Presiden Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden 16/2017 tentang KKI sebagai pedoman untuk menuju PMD (PP No.16, 2017).

Dalam Perpres disajikan pilar-pilar yang menyangga kebijakan kelautan Indonesia sebagai penopang agenda PMD. Pilar PMD tersebut, antara lain:

Buku ini tidak diperjualbelikan

1. pilar pertama Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. pilar kedua Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum dan Keselamatan di Laut;
3. pilar ketiga Tata Kelola dan Kelembagaan di Laut;
4. pilar keempat Ekonomi, Infrastruktur, dan Peningkatan Kesejahteraan;
5. pilar kelima Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut;
6. pilar keenam Budaya Bahari; dan
7. pilar ketujuh Diplomasi Maritim.

Dengan memanfaatkan ketujuh pilar tersebut, Indonesia dapat terus berjalan menuju kebijakan yang berorientasi pada kelautan. Pilar-pilar tersebut mencerminkan visi Indonesia untuk menjadi PMD. Untuk mewujudkan pilar-pilar tersebut pula, Indonesia dapat melaksanakan dengan bekerja bersama negara lain. Namun, Indonesia juga tetap harus memperhatikan dan mempertimbangkan konstelasi hubungan internasional yang terjadi di kawasan Asia, serta saling berbagi inisiatif di kawasan, seperti BRICS, *ASEAN Community*, dan BRI untuk mempertimbangkan kesesuaian antara kerja sama dengan kepentingan nasional (Perpres No 16, 2017).

Kesempatan hadirnya BRI Tiongkok di Indonesia, dapat dimanfaatkan untuk mendukung agenda Indonesia menuju PMD. Sebab, salah satu pembangunan BRI yang dicanangkan Tiongkok, juga mengarah pada pembangunan maritim. Rencana pembangunan maritim Indonesia ini sejalan dengan persepsi geopolitik maritim yang menempatkan perairan sebagai area penting dalam membangun hubungan geografis yang kuat dalam suatu wilayah. Gambar 5.4 menunjukkan visualisasi rencana PMD melalui pembangunan jalur tol laut Indonesia, yang akan dijadikan sebagai lalu lintas laut di perairan Indonesia jalur tol laut.

Buku ini tidak diperjualbelikan



Sumber: KOMINFO (2019)

Gambar 5.4 Peta Konsep Tol Laut Menjadi Poros Maritim Dunia

Tiongkok menyebutkan bahwa kata kunci dari agenda BRI ini adalah kerja sama internasional. Dengan mengusung kerja sama internasional, Tiongkok ingin menunjukkan keinginan *win win solution* dalam setiap agenda BRI yang dibawanya. Kerja sama internasional merupakan hubungan saling menguntungkan antarnegara yang dilakukan dengan dasar saling menguntungkan. Hubungan antarnegara memiliki bentuk bermacam-macam, salah satunya kerja sama bilateral yang dilakukan oleh dua negara atau multilateral oleh lebih dari dua negara. Hubungan ini pun dapat berwujud dalam berbagai bentuk kerja sama, yang ditentukan oleh tujuan dan apa yang ingin dicapai oleh negara yang terlibat (Holsti, 1972).

Teori kerja sama internasional memetakan standar perilaku kerja sama yang dilakukan antarnegara harus berdasarkan rasionalitas secara individu maupun kolektif (Barrett, 1999). Teori kerja sama merupakan evolusi dari teori lain dalam ranah hubungan internasional. Fokus utama dalam kerja sama internasional merupakan bagaimana negara berusaha untuk berkolaborasi untuk membuat hubungan saling menguntungkan dalam ranah yang lebih tinggi (Fearon, 1998).

Menurut Holsti, kerja sama internasional memiliki proses yang saling terhubung antara dua negara atau lebih. Dalam pendekatan ini, kerja sama internasional dilakukan dengan bernegosiasi serta

Buku ini tidak diperjualbelikan

mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi negara yang sedang terlibat (Holsti, 1972). Sementara, menurut Keohane (2019), kerja sama merupakan hubungan antarnegara yang muncul akibat beberapa negara saling berbagi kepentingan. Keohane (2019) menekankan bahwa negara yang ada di dunia akan saling bergantung satu sama lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Walaupun masih terdapat kemungkinan untuk bersaing, akan tetapi dalam persaingan juga memiliki kemungkinan antarnegara untuk bekerja sama (Keohane, 2019).

Agar kerja sama internasional dapat memberikan dampak nyata pada ranah domestik, hal ini harus dilakukan melalui proses transposisi. Dalam proses tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahap pertama kerja sama internasional secara umum, dilakukan melalui proses *agenda setting* atau menjadwalkan pertemuan untuk membahas sesuatu yang penting terkait kerja sama. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi isu yang terjadi dan memastikan agar dapat menghasilkan keputusan yang tepat untuk menangani isu atau masalah yang terjadi. Secara umum, *agenda setting* dilakukan di tingkat tinggi atau negara (Paulo, 2014).

Tahap selanjutnya merupakan negosiasi. Tahap ini dilakukan untuk membicarakan terkait kebijakan yang akan dibuat dalam kerja sama yang akan menghasilkan kebijakan yang tepat dengan melibatkan banyak pihak. Pada tahap ini, kerja sama internasional akan menghasilkan produk hukum dapat berbentuk "*soft law*" atau "*hard law*" (Paulo, 2014). Setelah tahap negosiasi dilakukan, selanjutnya dilakukan tahap implementasi yang dilakukan dengan menetapkan keputusan yang telah disepakati untuk dipraktikkan. Implementasi dapat diterapkan dengan berbagai cara, seperti dapat dengan mengembangkan keputusan ke level domestik atau langsung mengalokasikan sumber daya yang ada. Tujuan utama dari implementasi adalah memastikan bahwa produk negosiasi berjalan di ranah domestik maupun internasional secara tepat, dengan melibatkan perjanjian internasional transposisi menjadi hukum domestik melalui badan legislatif negara untuk menghasilkan produk hukum nasional (Paulo, 2014).

Buku ini tidak diperjualbelikan

Dalam perspektif kerja sama internasional, Tiongkok membentuk BRI dengan menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain. Dalam kerja sama Tiongkok dan Indonesia, kedua negara memiliki tujuan yang berbeda, akan tetapi terdapat kepentingan yang sama dalam aspek kemaritiman. Dalam proses kemitraan BRI ini, kedua negara telah melakukan beberapa tahapan untuk memastikan bahwa hasil dari kerja sama selaras dengan apa yang diharapkan. Kedua negara juga memastikan berkomitmen dalam menjalankan peran masing-masing, dengan kepentingannya masing-masing. Kepentingan Tiongkok dalam hal ini adalah untuk menguasai jalur maritim, selaras dengan tujuan Indonesia untuk menjadi PMD.

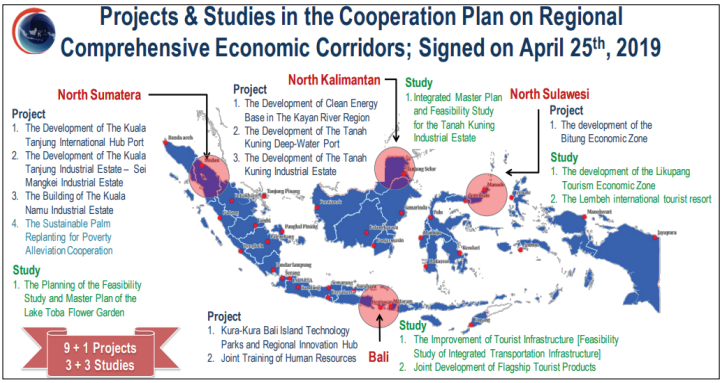
Dalam merealisasikan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok, kedua negara melakukan *agenda setting* untuk memperkenalkan BRI dan visi PMD. Tahap ini dapat dianalisis, terjadi di agenda pertama pada 2013, ketika Presiden Xi berkunjung ke Indonesia atas undangan Presiden SBY. Presiden Xi menyampaikan gagasan tentang skema jalur sutra maritim yang baru. Lalu agenda kedua pada 2014, ketika Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia akan menjadi PMD pada *East Asia Summit* (EAS) di Myanmar. Oleh karena itu, dengan adanya kesamaan kepentingan inilah, Indonesia memutuskan untuk mendatangi Presiden Xi dalam *Belt and Road Forum* pada 2017 untuk bernegosiasi terkait kerja sama infrastruktur (Prasetyo, 2017).

Sebagai langkah implementasi agenda kerja sama ini, Presiden Joko Widodo menuangkan visi PMD pada Nawa Cita di poin ketiga, serta mengeluarkan Perpres 2/2015 sebagai bukti komitmen Indonesia bermitra dengan BRI. Tiongkok juga melakukan langkah yang sama untuk membuat komitmen kerja sama dengan Indonesia dan membantu Indonesia dalam mewujudkan visi PMD. Hal ini dilakukan dengan menandatangani *MoU on Jointly Promoting Cooperation within the Framework of the Global Maritim Fulcrum Vision and the Belt and Road Initiative* untuk membantu mempromosikan visi PMD (KLNRI, 2018).

Buku ini tidak diperjualbelikan

Sebagai bentuk pengawasan kerja sama yang terjalin antardua negara, pemerintah Indonesia menunjuk Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman sebagai pengawas dalam kemitraan BRI. Indonesia melakukan transposisi kerja sama langsung melalui Presiden sebagai produk hukumnya adalah Peraturan Presiden 2/2015 dan Peraturan Presiden 16/2017. Agenda yang selanjutnya, diharapkan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan bersama (Perpres No 16, 2017).

Indonesia telah memutuskan masuk menjadi mitra BRI pada 2018. Bergabungnya Indonesia menjadi mitra BRI dapat menjadi tanda era baru dalam kerja sama bilateral kedua negara. Dalam upaya untuk memadukan gagasan BRI dan PMD, Kementerian Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman dan pemerintah Tiongkok berencana menghubungkan koridor BRI yang berada di Selat Malaka dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia dan Tiongkok merancang proyek pelabuhan di setiap pintu masuk ALKI, hal yang sama terjadi di keempat titik yang ditandai dibangun sekaligus proyek pendukung, seperti industri, *resort*, dan pusat pendidikan. Proyek dan Penelitian yang dirancang oleh Kemenko Marves dan Pemerintah China dapat dilihat pada Gambar 5.5 berikut.



Sumber: KKBKIRI (2019)

Gambar 5.5 Rencana Integrasi BRI dan PMD oleh Kemenko Marves

Buku ini tidak diperjualbelikan

Kombinasi dari kedua konsep tersebut akan membantu kedua negara mencapai tujuannya, yang akan berkontribusi membangun kawasan dan global. Konsep PMD yang menyediakan konektivitas dan pusat produksi baterai dapat membantu Tiongkok membangun jalur perdagangan dan pasokan nikel. Konsep BRI yang menyediakan pinjaman dan teknologi dalam membangun infrastruktur membantu Indonesia segera berkembang. Namun, dalam penerapannya, rencana tersebut baru terwujud ke dalam empat proyek infrastruktur sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Daftar Proyek di Indonesia dalam Skema BRI

No	Proyek	Lokasi	*Status*
1	PLTU 1 Jabar	Indramayu	Terealisasi Tahun 2011
2	Kawasan Industri Morowali	Morowali	Terealisasi Tahun 2015
3	Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)	Kaltara	Tidak Terealisasi
4	Kereta Cepat Jakarta-Bandung	Jakarta	Terealisasi Selesai 2023

Sumber: (BRIN, 2023; Saraswati, 2019)

Tulisan ini akan lebih spesifik membahas tentang Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) sebagai pusat industri hijau yang dibangun di Indonesia, tepatnya di pulau Kalimantan. Kawasan ini disiapkan untuk pembangunan industri EV baterai, petrokimia, dan industri aluminium. Segala aktivitas industri didukung oleh energi hijau dengan menggunakan *renewable energy* dan *hydropower* dari sungai (KPANRB, 2023). Indonesia berambisi untuk menjadi negara pengekspor baterai EV. Oleh karena itu, Indonesia bertujuan membangun industri baterai di Indonesia karena kebutuhan baterai EV untuk energi terbarukan sangat tinggi. Apalagi, di Indonesia bahan utama dalam pembuatan mobil listrik juga berlimpah ruah. Dengan Indonesia sebagai negara yang mampu menghasilkan produksi nikel terbesar di dunia, ia hanya butuh 30% bahan yang diimpor dari luar negeri, yang salah satunya adalah Tiongkok (Tritto, 2023).

Buku ini tidak diperjualbelikan

Program pembangunan industri dipercepat melalui program strategi nasional pada Peraturan Presiden Nomor 3/2016 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10/2018 yang salah satunya memuat tentang percepatan Proyek Strategis Nasional. KIPI menjadi salah satu proyek strategis nasional dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 24/2018 (PP No 24, 2018; PKB, 2022). KIPI dibangun dengan mengutamakan aspek *green economy*, kawasan industri hijau dengan konsep ekonomi untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, tetapi tetap ramah lingkungan dan aman untuk ekologi dengan menggunakan *hydropower* sebagai tenaga utama industri (KPANRB, 2023).

C. KIPI dalam Kerangka BRI dan PMD

Pembangunan KIPI memiliki empat fokus utama, yaitu (1) terminal khusus petrokimia; (2) smelter aluminium; (3) area infrastruktur, dan (4) pelabuhan internasional yang semuanya masih dalam tahap pembangunan. Kawasan dikembangkan dengan pendekatan *business-to-business* (B-to-B) sebagai bentuk percepatan dalam membangun KIPI. Hal itu diperlukan untuk mempermudah perizinan serta membuat pengembangan kawasan menjadi kondusif dan ramah untuk investor (DKISP, 2021).

Selain agenda pembangunan kawasan industri KIPI juga membangun pelabuhan internasional sebagai sarana prasarana untuk melakukan perdagangan komoditas melalui laut, skema pelabuhan ini juga mendukung sistem kerja KIPI yang menerima bahan mentah dari *Indonesia Morowali Industrial Park* (IMIP). Tujuan lain dibangunnya pelabuhan sebagai aktivitas industri yang terpusat pada satu pelabuhan menjadi akses utama. Selain itu, keberadaan pelabuhan internasional meningkatkan konektivitas perdagangan Indonesia, proyek ini diharapkan dapat berfungsi pada tahun 2030 (Halim, 2023).

Pembangunan KIPI pemerintah memproyeksikan dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak hingga saat ini 100.000 tenaga kerja sudah digunakan untuk membangun KIPI dan akan terus bertambah

Buku ini tidak diperjualbelikan

hingga 200.000 pekerja. Hal itu dapat memberikan dampak yang besar bagi sektor ekonomi Indonesia dalam pengembangannya pemerintah sudah menyiapkan sumber daya manusia dan pelaksanaan yang sudah berkembang pesat (Hanugrahayu, 2021). Dengan selesainya KIPI menjadi peluang bagi pemerintah khususnya di Kalimantan Utara untuk dapat mencetak tenaga kerja yang mumpuni.

Dalam buku putih BRI "The Belt and Road Initiative: A Key Pillar of the Global Community of Shared Future" menyebutkan pilar dalam BRI. Tiongkok ingin ikut serta membantu perkembangan negara mitra salah satunya mengembangkan infrastruktur pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan (BRF, 2023). Kerja sama Tiongkok-Indonesia dapat dilihat dalam *joint statement* antara Tiongkok dan Indonesia, kedua negara sepakat untuk seiring sejalan membangun BRI dan PMD dan mendukung pengembangan infrastruktur energi, pengembangan energi bersih, seperti tenaga surya dan listrik. Tiongkok berharap kerja sama dapat dilakukan melalui perusahaan Tiongkok yang bekerja sama dengan Indonesia dan mengembangkan bidang investasi, teknologi, dan energi dengan prinsip komersial (KLNRI, 2023).

Terdapat beberapa perusahaan Tiongkok yang digandeng dalam pembangunan KIPI. PowerChina atau Power Construction Corporation of China menjadi salah satu perusahaan Tiongkok yang ikut andil dalam pembangunan KIPI (PII, 2019). PowerChina berperan dalam pembangunan sumber energi KIPI atau PLTA di sungai Kayan yang berada didekat KIPI, PLTU ini dapat mengahasilkan 9.000 megawatt. PLTA Sungai Kayan didanai oleh PowerChina, sementara pengembangan dilakukan bersama dengan PT Indonesia Kayan Hydropower Energy Co. Ltd. PLTA Kayan dianggap sebagai proyek utama di sepanjang Koridor Ekonomi Komprehensif Indonesia dalam BRI (CD, 2018).

Tongkun dan *Xinfengming Group* juga menjadi perusahaan Tiongkok yang masuk ke dalam bagian pembangunan KIPI. *Tongkun* dan *Xinfengming* merupakan perusahaan petrokimia yang sudah memiliki beberapa pusat petrokimia di Indonesia. Perusahaan tersebut

Buku ini tidak diperjualbelikan

berperan sebagai pengembangan teknologi dan produksi petrokimia di KIPI (GBR, 2024). Dalam pertemuan G20 pada 2022 lalu, Tongkun dan Xinfengming Group juga berkomitmen untuk memperluas rantai industri dan membangun rantai industri luar negeri melalui operasi mereka di KIPI. Kedua perusahaan melihat KIPI memiliki potensi strategis bagi perusahaan (XFMG, 2022).

Tongkun dan *Xinfengming Group* merencanakan akan membangun kompleks petrokimia di KIPI dengan nilai investasi 150 triliun. Pembangunan ini diselaraskan dengan tujuan Tiongkok memberikan investasi besar di Asia Tenggara dalam kerangka BRI, masing-masing membangun fasilitas petrokimia seperti kilang minyak (*refinery*) untuk memproduksi bahan baku dalam membuat serat polyester (Kurniawan, 2023; Mokhtar, 2023).

Selain keterlibatan langsung perusahaan-perusahaan Tiongkok di KIPI, terdapat juga keterlibatan beberapa perusahaan kolaborasi antara Tiongkok-Indonesia, seperti PT Green Ammonia Indonesia dan PT Hydrogen Power Indonesia. Dua perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang akan menggunakan PLTA Sungai Kayan sebagai energi untuk mengoperasikan pabrik yang didirikan di KIPI. PT Green Ammonia dan PT Hydrogen Power Indonesia membutuhkan 300 MW untuk beroperasi. Kedua perusahaan tersebut mengusung konsep *green industry* sehingga hal itu menjadi selaras dengan PLTA Sungai Kayan yang menghasilkan energi listrik dari air (Rustan, 2023).

PT Green Ammonia berinvestasi di KIPI untuk membangun pabrik ammonia yang masih menjadi kebutuhan penting di beberapa negara, seperti Jepang dan Korea Selatan. PT Hydrogen Power Indonesia sama halnya dengan PT Ammonia juga berinvestasi di KIPI untuk membangun pabrik yang memproduksi hidrogen yang bisa dijadikan bahan bakar kendaraan. Keterlibatan kedua perusahaan ini di KIPI diharapkan akan dapat menguatkan peran KIPI di industri ramah lingkungan global (Rustan, 2023).

Perusahaan Indonesia juga turut andil dalam pembangunan KIPI, salah satunya pembangunan PLTA Mentarang yang merupakan induk miliki PT Kayan Hydropower Nusantara. PLTA Mentarang dibangun

Buku ini tidak diperjualbelikan

dengan kerja sama PT Adaro bersama Sarawak Energy Berhad sehingga tanggung jawab pembangunan PLTA tersebut diserahkan kepada PT Adaro. Peran PT Adaro tidak hanya sebatas membangun PLTA, tetapi memastikan juga tanggung jawab lingkungan dan sosial berjalan dengan baik, salah satunya dengan program Lestari Kehidupan dengan memberikan fasilitas perumahan dan lahan baru yang terdampak relokasi untuk meningkatkan kualitas hidup (KHN, 2023).

Laporan keuangan PT Adaro memuat catatan kerja operasional PT Adaro Tirta Mandiri, yang merupakan anak perusahaan dari PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. PT Adaro Tirta Mandiri memiliki bidang bisnis pengolahan air bersih, pengolahan lumpur, dan air tambang. Perusahaan ini juga menjadi pemasok air bersih untuk KIPI. Hingga saat ini, PT Adaro Tirta Mandiri sedang membangun *Water Treatment Plant* (WTP) dengan kapasitas 200lps (Adaro, 2024). PT Adaro juga menginvestasikan beberapa proyek salah satunya pembangunan smelter yang dibangun oleh PT Kalimantan Aluminium Industry yang merupakan anak perusahaan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Smelter ini digunakan untuk mendukung hilirisasi industri dengan mengolah bahan mentah yang dikirim dari morowali untuk diolah di KIPI (DSG, 2023).

KIPI menurut dokumen negara Tiongkok mengimplementasikan tujuan buku putih BRI pada poin tiga pembukaan tentang membangun konektivitas dan infrastruktur bermutu tinggi serta memandu praktik bisnis dalam proyek dengan prinsip pembangunan hijau. Secara dokumen tertulis tentang komitmen kerja sama antara Tiongkok dan Indonesia KIPI mewujudkan poin sepuluh tentang transisi energi dan pembangunan infrastruktur energi terbarukan dan poin enam tentang pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas kawasan (KLNRI, 2023).

Tiongkok mendorong perkembangan energi terbarukan dan dibuktikan pada saat ini Tiongkok telah menjadi negara dengan produksi energi terbarukan terbesar (Howe, 2023). Tiongkok telah mengembangkan tiga energi terbarukan, yaitu energi matahari, baterai,

Buku ini tidak diperjualbelikan

dan salah satunya kendaraan listrik berbasis EV. Produksi kendaraan listrik terus tumbuh hingga 34% per tahun 2023 di angka 9,6 juta (APMT, 2024), di sisi lain penjualan kendaraan listrik mencapai angka 9,5 juta pada tahun 2023 (APMT, 2024). Dengan angka penjualan tersebut dapat diasumsikan permintaan pasar kendaraan listrik cukup tinggi.

Tiongkok sebagai salah satu produsen mobil listrik di dunia, kebutuhan Tiongkok terhadap nikel sangatlah tinggi untuk membuat bahan bakar kendaraan listrik, yaitu baterai EV. Keinginan Tiongkok untuk menggunakan nikel sebagai bahan energi terbarukan dan ramah lingkungan terhambat karena Tiongkok tidak memiliki nikel dan harus mengimpor dari negara lain. KIPI dapat menjadi salah satu jalan keluar Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan nikel, program BRI menjadi salah satu jembatan kerja sama perdagangan antara Tiongkok-Indonesia untuk pemenuhan nikel (Hasiana, 2024).

Menurut Presiden Joko Widodo, KIPI menjadi kawasan industri pertama di Indonesia yang memproduksi baterai EV, kemampuan Indonesia saat ini bisa membantu Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan nikel. Tiongkok dapat mengolah nikel yang telah didapat dari Morowali untuk diolah menjadi baterai EV di KIPI. Hal ini yang bisa menjadikan KIPI sebagai jalan keluar Tiongkok untuk mendapatkan nikel di Indonesia.

Bukti bahwa KIPI mengimplementasikan tujuan BRI dapat ditemukan pada pernyataan bersama tentang pendalaman kerja sama strategis komprehensif antara Tiongkok dan Indonesia pada poin sembilan, yaitu komitmen mendukung pembangunan kawasan industri di Kalimantan Utara, yaitu KIPI. Pernyataan bersama tersebut dibuat pada *Belt and Road Forum* ke-3 yang dihadiri oleh Indonesia sebagai mitra BRI (KLNRI, 2023).

KIPI menurut dokumen negara Indonesia merupakan implementasi KKI dan rencana aksi PMD. KIPI mengimplementasikan poin enam dan sepuluh dalam dokumen komitmen kerja sama antara Tiongkok dan Indonesia, sekaligus mewujudkan pilar keempat dokumen kebijakan kelautan Indonesia dan pada poin 4.2 tentang

Buku ini tidak diperjualbelikan

meningkatkan rencana investasi salah satunya di bidang energi (KKBKIRI, 2017; Perpres No 2, 2015).

Keinginan Indonesia menjadi PMD didukung dengan kebijakan yang searah dengan keinginan Indonesia, KKI yang dibuat oleh Kemenko Marves dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan mimpi Indonesia (KKBKIRI, 2017). KKI terdiri dari beberapa pilar yang berisi strategi Indonesia untuk menuju PMD, salah satu pilar, yaitu pilar keempat memiliki tujuan yang sama dengan BRI, yaitu membangun infrastruktur dan konektivitas.

Pilar keempat mencerminkan keinginan Indonesia untuk meningkatkan ekonomi dan infrastruktur kelautan, sebelumnya dalam dokumen KKI pemerintah telah menyebutkan bahwa dalam berjalannya visi KKI dapat juga melakukan kerja sama dengan inisiatif yang ada di kawasan untuk mencapainya, tetapi dengan memperhatikan secara komprehensif konstelasi hubungan luar negeri di Asia. Dengan begitu pembangunan PMD memungkinkan untuk dicapai dengan bekerja sama dengan negara lain.

Untuk mencapai pilar keempat banyak strategi yang diterapkan dalam KKI salah satunya strategi yang berkaitan dengan kerja sama dengan negara lain adalah pada poin 5.4.1 huruf b dalam dokumen KKI, menciptakan iklim investasi usaha yang kondusif dan efisien (KKBKIRI, 2017). Pada dasarnya KIPI dibangun dengan menggunakan investasi dan sudah menjadi hal yang penting untuk Indonesia membuat KIPI menarik bagi investor (BPKRI, 2021).

Strategi untuk menciptakan iklim investasi usaha yang kondusif dan efisien dilakukan kajian dalam rencana aksi dan terpecah menjadi beberapa kegiatan untuk mencapainya kegiatan tersebut ialah melakukan penyelesaian masalah investasi di beberapa wilayah, penyusunan proyek investasi dan pemasaran investasi, dalam rencana aksi disebutkan sektor yang masuk ialah Kawasan Ekonomi Khusus, Pariwisata, Ekspor, Ketahanan Pangan, dan Energi. KIPI merupakan hasil dari rancangan kegiatan rencana aksi tersebut yang ditargetkan jumlah investasinya meningkat setiap tahun hingga 2025 (Perpres No 2, 2015).

Buku ini tidak diperjualbelikan

Bekerja sama dengan Tiongkok bisa menjadi pilihan terbaik Indonesia untuk membangun KIPI, selain karena Indonesia dan Tiongkok telah bekerja sama untuk membuat smelter nikel di Morowali, alasan lain karena Tiongkok salah satu negara industri terbaik di dunia (SG, 2024). Indonesia juga terlihat berusaha menyambut Tiongkok dengan baik dengan Kemenko Marves sedang berusaha meningkatkan mutu SDM dengan memberikan program beasiswa vokasi Mandarin dengan menggandeng Pemda Kalimantan Utara dan PT KIPI (KKBKIRI, 2023). KIPI menjadi bukti kerja sama yang kuat antara dua program negara BRI dan PMD terlihat pada rencana Kemenko Marves untuk mensinergikan antara BRI dan PMD yang salah satu proyeknya adalah KIPI (KKBKIRI, 2019).

D. Evaluasi Implementasi BRI dan PMD dalam Pembangunan KIPI

Menurut laporan pembangunan KIPI dari Kemenko Marves melalui Laporan Tahunan 2023, yang berstatus selesai baru pada perizinan dan persetujuan pembangunan. Pembangunan infrastruktur baru, meliputi pengelolaan air, jalan, listrik, sampah, dan limbah. Industri aluminium smelter masih dalam tahap *land clearing*, pembangunan *jetty* sudah diselesaikan, saat ini sedang dalam tahap fabrikasi kebutuhan pembangunan dan sebagian sudah dikirim ke tempat pembangunan. Industri petrokimia masih dalam tahap *land clearing* dan investasi masih dalam tahap persetujuan, pembangunan *jetty* sudah dilakukan sepanjang 950 meter pada proyek ini masih belum ada eksekusi pembangunan. Kawasan industri juga masih dalam tahap persetujuan dari kedua proyek tersebut masih belum ada perkembangan (KKBKIRI, 2023).

Berdasarkan Laporan Kinerja Kemenko Marves 2023, kendala pembangunan KIPI adalah mekanisme pengadaan lahan yang belum disepakati. Kendala lain disebutkan bahwa proses *corporate social responsibility* (CSR) terhambat untuk menyediakan SDM yang mahir dalam bahasa Mandarin. Untuk mengatasi kendala ini, Kemenko Marves mengagendakan upaya-upaya percepatan pembangunan KIPI,

Buku ini tidak diperjualbelikan

yakni koordinasi pembahasan mekanisme tukar-menukar aset PSN KI Tanah Kuning, koordinasi pembahasan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang Wilayah PSN KI Tanah Kuning, koordinasi pengembangan pendidikan vokasi bahasa Mandarin dan pelepasan 80 siswa peserta program beasiswa Vokasi Mandarin, dapat meningkatkan SDM yang berkontribusi dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten Bulungan (KKBKIRI, 2023).

Penelitian oleh Mamuja dan Setiawan (2023) menunjukkan kendala lain dalam pembangunan KIPI. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Departemen Perdagangan dan Industri Provinsi Kalimantan Utara, terdapat kendala berupa kompensasi pembebasan lahan yang tidak sesuai dengan harapan penduduk, yang mengakibatkan terkendalanya ekspansi KIPI. Selain itu, dana investasi yang awalnya ditargetkan mencapai 1.800 triliun rupiah ternyata hanya mencapai 300 miliar rupiah. Faktor lain yang menghambat pembangunan KIPI adalah kurangnya infrastruktur penunjang KIPI. Sebagai contoh, pemerintah telah membangun jalan sepanjang 23,25 km. Namun, ini masih tidak cukup karena kebutuhan pembangunan jalan mencapai 53,4 km.

Liputan the Jakarta Post pada 16 Juni 2024 menyatakan adanya kendala baru dalam pembangunan PLTA Sungai Kayan. PowerChina dan Sumitomo, yang merupakan dua rekanan utama pembangunan PLTA ini, ternyata menarik diri dari proyek tersebut (Koswaraputra, 2024). Meski kehilangan dua investor utamanya, PT Kayan Hydro Energy (KHE) sebagai pengembang setempat tetap yakin akan dapat menyelesaikan proyek ini. Kepada Bisnis.com, Komite Eksekutif PT KHE Steven Kho menyatakan bahwa PT KHE akan mencari investor lain untuk mendanai PLTA Sungai Kayan, baik dari dalam maupun luar negeri (Suwiknyo, 2024).

Implementasi BRI dan PMD sudah direncanakan dilakukan seiring sejalan, dokumen Kemenko Marves menjelaskan dalam *A Synergy between Two Great Nations: China's Belt & Road Initiative and Indonesia's Global Maritime Fulcrum*, BRI dan PMD dapat

Buku ini tidak diperjualbelikan

bersinergi salah satunya KIPI menjadi proyek yang Indonesia ingin bangun untuk mewujudkan PMD dan BRI berperan sebagai fasilitas pinjaman untuk membangun infrastruktur. Dari proyek yang direncanakan dapat diasumsikan Indonesia mengharapkan KIPI dapat meningkatkan investasi, ekonomi, dan lapangan pekerjaan dan Tiongkok mengharapkan kerja sama dengan perusahaan Tiongkok tetap terjaga dan terbangunnya konektivitas antara Indonesia dan Tiongkok (KKBKIRI, 2019).

Pembangunan KIPI memungkinkan dampak yang signifikan kepada Indonesia karena potensi KIPI di sektor ekonomi. Baterai kendaraan listrik dan aluminium merupakan produk yang sering diimpor Tiongkok dari Indonesia, dengan adanya KIPI produk tersebut dapat bertambah nilainya dengan mengolahnya menjadi baterai EV dan *nickel pig iron* (NPI) bahan baja tahan karat di Tiongkok. PMD berusaha membuat energi terbarukan dan hal ini dapat diwujudkan di KIPI karena aktivitasnya menggunakan energi terbarukan, yaitu *hydropower*. Adanya teknologi *hydropower* diharapkan dapat diterapkan di semua wilayah Indonesia.

KIPI dapat menjadi solusi pemenuhan kebutuhan impor Tiongkok dari Indonesia, dengan adanya kerja sama antara BRI dan PMD Tiongkok bisa memenuhi kebutuhan nikelnya dari Indonesia, seperti baterai EV dan NPI. Perdagangan juga dapat dilakukan dengan mudah karena letak geografis Indonesia yang masih berdekatan dengan Tiongkok dapat mempermudah distribusi produk nikel (Statista, 2024). Pembangunan KIPI juga memperhatikan konektivitas perdagangan maka dari itu KIPI dibangun fasilitas pelabuhan untuk mengangkut komoditas dari KIPI, konektivitas inilah yang diharapkan oleh Tiongkok untuk mempermudah melakukan perdagangan.

Pembangunan KIPI dengan kerja sama Tiongkok-Indonesia dalam skema BRI dan PMD diproyeksikan saling menguntungkan kedua negara, keinginan kedua negara dari skema masing-masing dapat tercapai dengan adanya KIPI. BRI dapat mencapai konektivitasnya kepada negara mitra mewujudkan energi terbarukan sekaligus stabilitas perdagangan dan investasi kepada negara mitra.

Buku ini tidak diperjualbelikan

PMD yang dapat mencapai pertumbuhan ekonomi, tercapainya PMD untuk mewujudkan energi terbarukan dan membuka lapangan kerja lokal, hingga saat ini KIPI masih dalam tahap pembangunan, tetapi perencanaan yang stategis ini dapat saling menguntungkan kedua negara.

Seperti yang telah diketahui KIPI akan dibangun tiga infrastruktur hasil kerja sama Tiongkok-Indonesia, yaitu kawasan industri, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang diberi nama *hydropower,* dan pelabuhan internasional. Idealnya ketiga proyek ini saling bersinergi. Kawasan industri bertugas mengolah bahan yang dikirim dari *Morowali Industrial Park* untuk diolah lagi menjadi barang jadi. Kemudian, *hydropower* berfungsi sebagai energi ramah lingkungan yang digunakan kawasan industri sebagai energi untuk memproduksi bahan jadi yang telah diterima. Selanjutnya, pelabuhan internasional berperan sebagai lokasi berlabuhnya kapal yang mengangkut komoditas maupun bongkar muatan (KKBKIRI, 2019).

Pada kenyataannya hingga saat ini proyek yang telah direncanakan masih dalam tahap pembangunan. Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa untuk penggunaan energi dari *hydropower* tidak dapat langsung diterapkan, tetapi akan berkala (Fawdi, 2023). Hal ini berarti penerapan energi ramah lingkungan masih sulit untuk direalisasikan. Kawasan industri masih tetap pada rencana awal, yaitu dibangun dengan kolaborasi dengan swasta dengan prinsip *B-to-B*, pemerintah hanya memastikan perizinan berjalan dengan baik.

Pada saat ini, pembangunan KIPI masih belum selesai maka dari itu belum dapat dikatakan proyek ini berhasil dan membawa dampak. Beberapa kendala disebutkan oleh Kemenko Marves bahwa karena data yang diperlukan dalam keadaan tersebar di pemerintah pusat dan daerah selain itu regulasi yang harus disinkronkan dengan keputusan, aset yang tertukar karena banyak aset pemda yang berada di kawasan industri dan legalitas kepemilikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan

E. Penutup

Meningkatnya perhatian akan geopolitik kemaritiman dan penguasaan sumber daya alam di wilayah laut membuat banyak negara menerbitkan kebijakan dan strategi terkait keamanan maritim dan pengelolaan wilayah laut. Tiongkok, sebagai salah satu aktor besar di kawasan, melihat ada hambatan dari AS dan sekutu-sekutunya yang ingin membendung pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Tiongkok pun berupaya mengatasi hambatan tersebut dengan menelurkan konsep BRI. Dengan enam koridor BRI, Tiongkok akan terhubung dengan berbagai mitra strategisnya sehingga dapat memperkuat ekonomi dan keamanan nasionalnya.

Indonesia sebagai negara maritim sejak kemerdekaannya tidak memberikan perhatian besar pada pengelolaan wilayah laut. Konsep Indonesia sebagai PMD yang diutarakan Presiden Joko Widodo seakan menjadi jawaban akan permasalahan keamanan maritim Indonesia dan kurangnya pengelolaan potensi maritim Indonesia. Konsep ini diikuti dengan penerbitan rangkaian peraturan pemerintah dan kebijakan yang berorientasi pada perwujudan Indonesia sebagai kekuatan maritim global.

Dalam pelaksanaannya, BRI dan PMD memiliki irisan kepentingan. Tiongkok memiliki kepentingan untuk mengembangkan *China-Indochina Peninsula Economic Corridor* (CICPEC) yang mengait ke jalur maritim di Selat Malaka. Indonesia memiliki kepentingan pengembangan infrastruktur pendukung konektivitas maritim di Indonesia. Dari irisan kepentingan ini, terjalin kerja sama antara pemerintah Tiongkok dan Indonesia. Untuk menyelaraskan kerja sama pengejawantahan konsep BRI dan PMD, Kemenko Marves telah menyusun sepuluh investasi dan kajian bersama Tiongkok. Namun, pada kenyataannya, hanya empat program yang terlaksana, yakni pembangunan PLTU 1 Jabar, pembangunan kawasan industri Morowali, pembangunan KIPI, dan pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Dari empat program tersebut, tulisan ini fokus pada pembangunan KIPI. Terlepas dari rencana yang telah disusun oleh pihak-pihak terkait, pada kenyataannya, proses pembangunan KIPI belum berjalan sesuai harapan. KIPI yang direncanakan terdiri dari tiga bagian, yakni kawasan industri, pembangkit listrik tenaga air *hydropower* dan pelabuhan internasional, sampai saat ini masih belum selesai dibangun. Dengan demikian, tujuan awal dari BRI dan PMD yang seharusnya dapat dipenuhi oleh KIPI masih belum terwujud.

Referensi

ACC. (2013, October 2). Speech by Chinese President Xi Jinping to Indonesian Parliament [Press release]. http://www.asean-china-center.org/english/2013-10/03/c_133062675.htm

Adaro. (2024). *Kinerja keuangan 1Q24*. https://www.adaro.com/files/news/berkas/2253/ADRO%201Q24%20FPR%20QAR%20Final%20-%20Indonesian.pdf

APMT. (2024). Operasi industri produksi dan penjualan industri otomotif pada tahun 2023 [Press release]. https://mp.weixin.qq.com/s/ZzOIuBJ6DggeVa53r6_X_Q

Atmini, S., & Retraubun, A. S. W. (2004). *Profil pulau-pulau kecil di Indonesia. Jilid 1*. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Indonesian Government).

Barrett, S. (1999). A theory of full international cooperation. *Journal of Theoretical Politics*, *11*(4), 519–541. doi:10.1177/0951692899011004004

BPKRI. (2021, December 20). *Investasi KIPI capai Rp 1.800 Triliun, Bappeda Litbang Kaltara sebut modal murni dari swasta*. https://kaltara.bpk.go.id/investasi-kipi-capai-rp-1-800-triliun-bappeda-litbang-kaltara-sebut-modal-murni-dari-swasta/

BRF. (2023, October). The belt and road initiative: A key pillar of the global community of shared future [Press release]. http://www.beltandroadforum.org/english/n101/2023/1010/c124-895.html

BRIN. (2023, October 27). Indonesia – Tiongkok tingkatkan hubungan dalam proyek pembangunan infrastruktur skala global [Press release]. https://www.brin.go.id/news/116170/indonesia-tiongkok-tingkatkan-hubungan-dalam-proyek-pembangunan-infrastruktur-skala-global

Buku ini tidak diperjualbelikan

CD. (2018, November 12). POWERCHINA pens EPC contract for Kayan hydropower project. *China Daily*. http://www.chinadaily.com.cn/m/powerchina/2018-11/12/content_37247247.htm

Chapsos, I., & Malcolm, J. A. (2017). Maritime security in Indonesia: Towards a comprehensive agenda? *Marine Policy*, *76*, 178–184. doi:https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.11.033

Chen, A. L. Q. (2023). The Belt and Road Initiative as a variegated agglomeration of multi-scalar state spatial strategies. *Territory, Politics, Governance*, *11*(3), 478–501. doi:10.1080/21622671.2020.1870544

Cohen, S. B. (2014). *Geopolitics: The geography of international relations*. Rowman & Littlefield Publishers.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publication.

Dheani, C. (2017). One belt one road and global maritime fulcrum: Between contradictions and harmony. *Jurnal Sentris*, *2*(2), 57–65. doi:https://doi.org/10.26593/sentris.v2i2.4139.57-65

DKISP. (2021, December 21). KIPI Tana Kuning-Mangkupadi disebut kawasan industri terbesar di dunia [Press release]. https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/kipi-tana-kuning-mangkupadi-disebut-kawasan-industri-terbesar-di-dunia/

DSG. (2023, March 6). PT Adaro Minerals Indonesia Investor besar pengelola kawasan industri hijau Kalimantan Utara. https://gewinnscale.id/adaro-klien-jembatan-timbang-gewinn-scale-investor-kawasan-industri-hijau/

Fawdi, M. I. (2023, February 28). Kunjungi KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, Presiden Jokowi sebut masa depan Indonesia Ada di Kaltara. *Tribun Kaltara*. https://kaltara.tribunnews.com/2023/02/28/kunjungi-kipi-tanah-kuning-mangkupadi-presiden-jokowi-sebut-masa-depan-indonesia-ada-di-kaltara

Fearon, J. D. (1998). Bargaining, enforcement, and international cooperation. *International Organization*, *52*(2), 269–305. doi:10.1162/002081898753162820

Ferdinand, P. (2016). Westward ho—the China dream and 'one belt, one road': Chinese foreign policy under Xi Jinping. *International Affairs*, *92*(4), 941–957. doi:10.1111/1468-2346.12660

Buku ini tidak diperjualbelikan

FES. (2024, February 14). *Map of the geopolitical competition in the Indo-Pacific*. https://asia.fes.de/news/geopolitical-competition-indo-pacific.html

GBR. (2024). *Southeast Asia Chemicals 2024*. https://www.gbreports.com/files/pdf/_2024/SEA-Chemicals-2024-web-1607.pdf

Halim, A. (2023, June 12). Pelabuhan internasional ditarget rampung 2030. *Radar Tarakan*. https://radartarakan.jawapos.com/bulungan/2414119933/pelabuhan-internasional-ditarget-rampung-2030#

Hannigan, J. (2016). *The geopolitics of deep oceans*. Polity Press.

Hanugrahayu, K. N. (2021, December 2). Menko Luhut ungkap 9 perusahaan asing berinvestasi di KIPI, yang aktif bangun proyek diterima. *Tribun Video*. https://video.tribunnews.com/view/292081/menko-luhut-ungkap-9-perusahaan-asing-berinvestasi-di-kipi-yang-aktif-bangun-proyek-diterima

Hasiana, D. (2024, May 6). AS-China adu investasi nikel di Asean, penambang yakin RI unggul. *Bloomberg Technoz*. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/37090/as-china-adu-investasi-nikel-di-asean-penambang-yakin-ri-unggul

Heydarian, R. J. (2021, March 13). Quad summit next step towards an Asian NATO. *Asia Times*. https://asiatimes.com/2021/03/quad-summit-next-step-towards-an-asian-nato/

Holsti, K. J. (1972). *International politics: A framework for analysis*. Prentice-Hall.

Howe, C. (2023, November 16). Explainer: The numbers behind China's renewable energy boom. *Reuters*. https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/numbers-behind-chinas-renewable-energy-boom-2023-11-15/

Kaplan, R. D. (2009). The revenge of geography. *Foreign Policy*, (172), 96–105.

Keohane, R. O. (2019). Sovereignty, interdependence, and international institutions. In S. Hoffmann (Ed.), *Ideas and Ideals. Essays on Politics in Honor of Stanley Hoffmann* (91–107). Routledge.

KHN. (2023, March 1). Presiden RI Joko Widodo groundbreaking PLTA Mentarang Induk milik PT Kayan Hydropower Nusantara [Press release]. https://www.adaro.com/files/news/berkas/2210/Press%20

Buku ini tidak diperjualbelikan

Release%20-%20Groundbreaking%20PLTA%20Mentarang%20Induk%20-%20Bahasa%20.pdf

Kjellén, R. (1916). *Die Großmächte der Gegenwart*. BG Teubner.

KKBKIRI. (2017). Kebijakan kelautan Indonesia [Press release]. https://maritim.go.id/konten/unggahan/2017/07/Kebijakan_Kelautan_Indonesia_-_Indo_vers.pdf

KKBKIRI. (2019, May 14). A synergy between two great nations: China's Belt & Road Initiative and Indonesia's Global Maritime Fulcrum [Press release]. https://maritim.go.id/konten/unggahan/2019/05/20190514-Kemenko-Maritim-GMF-BRI-1.pdf

KKBKIRI. (2023). *Laporan kinerja 2023*. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Indonesian Government).

KKBKIRI. (2023, August 23). Tingkatkan Mutu SDM, Kemenko Marves Dukung Program Beasiswa Vokasi Mandarin [Press release]. https://maritim.go.id/detail/tingkatkan-mutu-sdm-kemenko-marves-dukung-program-beasiswa-vokasi-mandarin

KLNRI. (2018, October 23). MoU on jointly promoting cooperation within the framework of the global maritim fulcrum vision and the belt and road initiative [Press release]. https://id.china-embassy.gov.cn/eng/sgdt/201909/t20190902_2049102.htm#:~:text=The%20two%20governments%20have%20signed%20a%20Memorandum,within%20the%20framework%20of%20BRI%20and%20GMF.

KLNRI. (2023, October 18). Joint statement on deepening comprehensive strategic cooperation between the people's Republic of China and the Republic of Indonesia, 18 October 2023, Beijing [Press release]. https://kemlu.go.id/portal/en/read/5393/siaran_pers/joint-statement-on-deepening-comprehensive-strategic-cooperation-between-the-peoples-republic-of-china-and-the-republic-of-indonesia-18-october-2-023-beijing

Kobara, J., & Moriyasu, K. (2021, March 27). Japan will turn to quad in 'new cold war': Defense ministry think tank. *Nikkei Asia*. https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Japan-will-turn-to-Quad-in-new-Cold-War-Defense-Ministry-think-tank

KOMINFO. (2019, February 25). Indonesia poros maritim dunia [Press release]. https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia

Buku ini tidak diperjualbelikan

KPANRB. (2023, March 1). Presiden yakin kawasan KIPI jadi masa depan industri energi hijau Indonesia [Press release]. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden-yakin-kawasan-kipi-jadi-masa-depan-industri-energi-hijau-indonesia

Kurniawan, H. (2023, April 12). Perusahaan tiongkok investasi Rp 150 Triliun, Kemungkinan di KI Boy Thohir. *Investor.id*. https://investor.id/business/326942/perusahaan-tiongkok-investasi-rp-150-triliun-kemungkinan-di-ki-boy-thohir

Lalisang, A. E. Y., & Candra, D. S. (2020). *Indonesia's global maritime fulcrum & China's belt road initiative. A match made at sea?* https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/16770.pdf

Luft, G. (2017). Silk Road 2.0. US Strategy toward China's Belt and Road Initiative. *Atlantic Council Strategy Paper*, (11), 1–59.

Mackinder, H. J. (2017). The geographical pivot of history. In R. E. Kasperson & J. Minghi (Eds.), *The Structure of Political Geography* (162–169). Routledge.

Mahan, A. T. (2004). *The influence of sea power upon history (1890)*. Digital Antiquaria.

Mamuja, D. D., & Setiawan, T. (2023). Analysis of the Government's Role for Promoting The Green Industrial Park Development in Indonesia. *International Journal of Current Science Research and Review*, *6*(7), 5120–5130. doi:https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V6-i7-128

MERICS. (2018, June 7). Mapping the belt and road initiative: This is where stand. https://merics.org/en/tracker/mapping-belt-and-road-initiative-where-we-stand

Mokhtar, F. (2023, November 23). A coal-powered industrial boom is testing Indonesia's Green Ambitions. *Financial Post*. https://financialpost.com/pmn/business-pmn/a-coal-powered-industrial-boom-is-testing-indonesias-green-ambitions

Morris, M. A. (1986). Maritime geopolitics in Latin America. *Political Geography Quarterly*, *5*(1), 43–55. doi:https://doi.org/10.1016/0260-9827(86)90010-8

O'Connor, T., & Jamali, N. (2020, October 22). US, China's geopolitical battle for Asia shapes new power dynamic for region. *Newsweek*. https://www.newsweek.com/us-china-geopolitical-battle-asia-shapes-power-dynamics-region-1541509

Buku ini tidak diperjualbelikan

Paulo, S. (2014). International cooperation and development: A conceptual overview. *German Development Institute Discussion Paper*, *13*, 1–31.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. (2018). https://peraturan.bpk.go.id/Details/82994/pp-no-24-tahun-2018

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019. (2015). https://peraturan.bpk.go.id/Details/41718/perpres-no-2-tahun-2015

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. (2017). https://peraturan.bpk.go.id/Details/62168

PII. (2019, August 27). Pembangkit hydro terbesar itu ada di sungai kayan [Press release]. https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/971/pembangkit-hydro-terbesar-itu-ada-di-sungai-kayan?lang=1

PKB. (2022, January 19). Tindak lanjut berakhirnya izin lokasi pada kawasan industri di Tanah Kuning dan Mangkupadi serta kawasan pembangkit listrik tenaga air di Peso. [Press release]. https://mpp.bulungan.go.id/berita/tindak-lanjut-berakhirnya-izin-lokasi-pada-kawasan-industri-di-tanah-kuning-dan-mangkupadi-serta-kawasan-pembangkit-listrik-tenaga-air-di-peso

Powell, R. C., & Dodds, K. (2014). *Polar geopolitics?: Knowledges, resources and legal Regimes*. Edward Elgar Publishing.

Prasetyo, B. (2017, May 14). Pembukaan belt and road forum, Jokowi disambut presiden Xi Jinping. *Kompas*. https://nasional.kompas.com/read/2017/05/14/13021411/pembukaan.belt.and.road.forum.jokowi.disambut.presiden.xi.jinping?page=all

Rustam, I. (2016). Tantangan ALKI dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. *Indonesian Perspective*, *1*(1), 1–21. doi:https://doi.org/10.14710/ip.v1i1.10426

Rustan, R. (2023, December 12). Harapkan pembangunan PLTA Sungai Kayan segera rampung. *Radio Republik Indonesia*. https://www.rri.co.id/tarakan/daerah/478749/harapkan-pembangunan-plta-sungai-kayan-segera-rampung

Saraswati, N. M. V. (2019). Menilik perjanjian Indonesia-Cina dalam kerangka belt and road initiative (BRI) dalam perspektif ketahanan nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, *7*(2), 55–72. doi:https://doi.org/10.55960/jlri.v7i2.72

Buku ini tidak diperjualbelikan

Schofield, C. (2012). Maritime energy resources in Asia: Energy and geopolitics. *National Bureau of Asian Research (NBR) Special Report*, (35).

SCIOPRC. (2020, August 4). What are six economic corridors under belt and road initiative? [Press release]. http://english.scio.gov.cn/beltandroad/2020-08/04/content_76345602.htm

SG. (2024, August 24). Top 10 manufacturing countries in the world in 2024. https://www.safeguardglobal.com/resources/top-10-manufacturing-countries-in-the-world/

SKRI. (2014, November 14). Pidato Presiden RI Joko Widodo Pada KTT Ke-9 Asia Timur, di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014 [Press release]. https://setkab.go.id/pidato-presiden-ri-joko-widodo-pada-ktt-ke-9-asia-timur-di-nay-pyi-taw-myanmar-13-november-2014/

Statista. (2024). Distribution of nickel mine production worldwide in 2021, by region. https://www.statista.com/statistics/545032/distribution-of-nickel-production-worldwide-by-region/#:~:text=In%202021%2C%20Asia%20produced%20more,14.5%20percent%20of%20global%20production.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Buku ini tidak diperjualbelikan

BAB 6

Diplomasi Siber Asia Tenggara di Tengah Rivalitas AS-China di Indo-Pasifik

Ali Abdullah Wibisono

A. Lanskap Geopolitik, Diplomasi Siber, dan Tantangan bagi ASEAN

Indo-Pasifik adalah teater utama dari langgam persaingan geopolitik antara AS, China, dan Rusia. Ruang siber dan teknologi digital dalam interaksi antarnegara di kawasan Indo-Pasifik telah menjadi "pedang bermata dua", di satu sisi ekonomi digital telah menjadi *booster* perekonomian yang tak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi di kawasan yang ditempati negara-negara dengan kontribusi terbesar pada GDP dunia, tapi di sisi lain ruang siber Indo-Pasifik juga diisi dengan negara-negara yang kompetitif dalam mendayagunakan teknologi digital di ruang siber. Indo-Pasifik terdiri dari 40 negara yang mewakili lebih dari 50% dari GDP dunia menjelang 2040, de-

A. A. Wibisono
Universitas Indonesia, *e-mail*: aliabdullahwibisono@hotmail.com

© 2026 Editor & Penulis

Wibisono, A. A. (2026). Diplomasi Siber Asia Tenggara di Tengah Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok di Indo-Pasifik. Dalam RR. E. Yustiningrum & E. S. Prihatini (Ed.), *Indonesia dalam Kancah Geopolitik di Indo-Pasifik* (189–231). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.2075.c1723
E-ISBN: 978-602-6303-98-1

Buku ini tidak diperjualbelikan

ngan GDP akumulatif dari China, Jepang, India, Korea Selatan, dan Australia mencapai lebih dari seluruh Uni Eropa secara keseluruhan (Hurel et al., 2024). Kawasan yang luas dan heterogen ini telah menjadi episentrum dari interaksi strategis dari negara-negara *Five Eyes* di beragam sektor. AS, Inggris, Australia, Kanada, dan negara-negara lain telah memublikasikan strategi mereka untuk Indo-Pasifik, dan membentuk kerja sama keamanan, seperti AUKUS yang berfokus pada aliansi teknologi unggul untuk meningkatkan *interoperability*. Sementara regionalisme yang menjadi episentrum Indo-Pasifik, yaitu ASEAN telah memublikasikan visi Indo-Pasifik mereka sejak 2017.

Dalam hal konstruksi norma keamanan siber—sebagaimana berlangsung pada forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertajuk *United Nations Group of Governmental Experts on Advancing Responsible State Behaviour in Cyberspace in the Context of International Security* (UNGGE) dan *United Nations Open-Ended Working Group on Development in the Field of Information and Telecommunication in the Context of International Security* (OEWG)—AS, China, dan Rusia mengedepankan prioritasnya masing-masing. China memprioritaskan kedaulatan nasional yang menghindari intervensi aktor eksternal negara maupun non-negara dalam pengaturan keamanan siber (dikenal pula sebagai pendekatan *multilateralism*) (Mallick, 2022, 67). Sementara, AS mengedepankan kemitraan negara dengan swasta dan masyarakat sipil dengan negara tunduk kepada aturan-aturan internasional yang disepakati bersama dan mengikat untuk menindak dan menanggulangi kejahatan siber dan kebahayaan lain terhadap informasi dan infrastruktur digital (dikenal pula sebagai *multistakeholderism*).

Sejauh mana persaingan geopolitik AS dan China di ruang siber sebagaimana diutarakan di atas berimplikasi pada keamanan siber Asia Tenggara? Artikel ini menjelaskan bagaimana persaingan geopolitik telah menjadi struktur yang membatasi aktivisme negara-negara Asia Tenggara dalam diplomasi siber mengarah kepada belum terwujudnya arsitektur norma keamanan siber di Asia Tenggara dalam bentuk persepsi ancaman yang sama.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Diplomasi siber adalah instrumen penting dalam keseluruhan kebijakan luar negeri suatu negara atau sekelompok negara untuk menjaga interaksi di ruang siber tidak mengarah kepada konflik dan saling percaya atau *confidence* dapat dibangun dan dijaga sebagai fondasi kerja sama penguatan bersama (Barrinha & Renard, 2017). Diplomasi siber di Asia Pasifik adalah pembahasan yang semakin mengundang penulis untuk melakukan observasi terhadap pembangunan norma dan perkembangan arsitektur keamanan regional (Barrinha & Renard, 2017), bagaimana diplomasi siber dapat berperan membangun saling-percaya dalam ruang siber yang semakin dipenuhi inovasi kecerdasan buatan, *machine learning*, *Internet of Things* (IoT), dan *blockchain* (Radanliev, 2024), peranan diplomasi siber dalam perang siber (Lancelot, 2020), dan bagaimana kebijakan penggentaran atau *deterrence* dapat diintegrasikan dengan diplomasi siber untuk memperkuat pencapaian tujuannya (Manantan, 2021). Namun, belum ada publikasi yang secara spesifik melihat implikasi dari rivalitas AS-China di ruang siber Asia Tenggara, khususnya dalam hal kesenjangan digital antarnegara anggota, dan menciptakan kebutuhan diplomasi siber yang spesifik untuk kawasan yang ditandai dengan kesenjangan digital di antara negara anggotanya.

Penelitian untuk artikel ini bertujuan melihat sejauh mana rivalitas geopolitik AS-China membatasi diplomasi siber negara-negara Asia Tenggara. Diplomasi siber adalah kebijakan yang ditujukan untuk memitigasi bahaya yang muncul dari relasi kompetitif di ruang siber sehingga data-data yang dibutuhkan adalah implikasi ketidakamanan siber di Asia Tenggara sebagai dampak dari rivalitas AS-China di ruang siber, data-data tentang kapabilitas keamanan siber negara-negara ASEAN dan komitmen mereka pada kerja sama internasional untuk keamanan siber, dan data-data tentang arsitektur regional keamanan siber ASEAN. Data-data yang digunakan dalam artikel ini bersumber dari laporan-laporan keamanan siber yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga konsultan keamanan siber internasional dan pengukuran indeks keamanan siber yang dikeluarkan oleh lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa bernama *International Telecommunications Union*

Buku ini tidak diperjualbelikan

(ITU), yaitu *Global Cybersecurity Index* (Indeks GCI) dan *Information and Communication Technology Development Index* (Indeks IDI). Laporan-laporan keamanan siber membantu penelitian ini melakukan observasi terhadap bentuk-bentuk ketidakamanan siber yang mutakhir dihadapi negara-negara di ASEAN dan tingkat intensitas serangan siber yang dihadapi oleh setiap negara. Sementara indeks keamanan dan pembangunan ruang siber berguna untuk mengetahui tingkat komitmen suatu negara kepada pembangunan infrastruktur digital dan keamanan siber. Sementara itu, komitmen negara-negara ASEAN, dan sejumlah negara Indo-Pasifik yang penting, seperti Australia dan Jepang untuk diplomasi siber diukur dengan indeks keamanan siber nasional (*National Cyber Security Index/NCSI*) yang dibuat oleh *Estonian e-Governance Academy* (eGA) yang salah satu komponen pengukurannya adalah kontribusi terhadap keamanan siber global (NCSI, 2023). Artikel jurnal internasional menjadi sumber data-data tentang arsitektur keamanan siber regional, yang menginformasikan penulis tentang arsitektur regional memitigasi ketidakamanan siber dari rivalitas AS-China.

Untuk mengeksplorasi bagaimana persaingan geopolitik di ranah siber memengaruhi keamanan siber Asia Tenggara, dan bagaimana respons ASEAN dalam membentuk tata kelola keamanan siber, artikel ini berlanjut dalam beberapa bagian. Bagian pertama yang mengikuti pendahuluan ini menjelaskan tentang konsep diplomasi siber dan ketidakamanan di ruang siber. Kedua, artikel ini menjelaskan bagaimana rivalitas AS-China bermanifestasi di ruang siber dan teknologi digital. Bagian keempat menjelaskan ketidakamanan siber Asia Tenggara yang ditandai dengan peningkatan kejahatan siber dengan *ransomware* dan *malware* lain dan serangan kelompok peretas non-negara dengan sponsor negara. Bagian kelima mengeksplorasi tata kelola keamanan siber yang telah dibangun ASEAN dan bagaimana hal ini belum menyepakati persepsi ancaman yang sama untuk ancaman yang berasal dari kejahatan siber. Artikel ini berkesimpulan bahwa arsitektur keamanan siber Asia Tenggara berupaya untuk mencegah kawasan ini terlalu condong ke salah satu kekuatan dalam rivalitas

Buku ini tidak diperjualbelikan

geopolitik, tapi kesenjangan digital di antara negara anggota adalah penghalang besar dari standar bersama keamanan siber regional.

B. Diplomasi Siber dan Ketidakamanan di Ruang Siber

Diplomasi siber adalah serangkaian penerapan negosiasi dalam relasi antarnegara yang bertujuan meregulasi dan menyelesaikan masalah-masalah seputar ruang siber. Masalah yang dihadapi dalam relasi antarnegara di ruang siber tidak jarang melibatkan penyalah-gunaan kemampuan maupun kealpaan yang dapat berujung pada konflik sehingga kajian diplomasi siber juga menginklusi perang siber (*cyber warfare*) dan kesepakatan tentang *rules of engagement* dalam melakukan tindakan tertentu. Diplomasi siber terjadi di masa damai maupun konflik. Di masa damai, diplomasi siber bertujuan memfasilitasi pertukaran informasi dan gagasan untuk isu-isu siber tertentu yang mengarah pada terbentuknya norma-norma siber. Sementara itu, ketika terjadi ketegangan atau konflik di ruang siber, diplomasi siber berperan sebagai strategi resolusi konflik yang mencegah konflik di ruang siber bereskalasi menjadi masalah geopolitik yang lebih serius.

Produk utama dari aktivitas diplomasi siber adalah norma siber. Norma siber adalah nilai dan pedoman yang ditetapkan bersama yang mengarahkan tindakan aktor di ruang siber, yang bertujuan untuk membentuk perilaku etis dan menghentikan aktivitas daring yang tidak bertanggungjawab. Diplomasi siber sangat penting dalam mempromosikan dan menegosiasikan standar perilaku yang membentuk norma siber ini di antara pemerintah maupun aktor swasta. Norma siber tidak selalu tertulis, tapi lebih berperan sebagai aturan tidak tertulis yang dipahami dan diindahkan oleh negara-negara sepemahaman (*likeminded states*). Norma siber yang sudah kokoh karena disepakati tanpa *reserve* dan berkesinambungan membentuk tata kelola atau rezim keamanan siber, yang berwujud regulasi yang diadopsi negara-negara anggota rezim tersebut.

Buku ini tidak diperjualbelikan

1. *Confidence Building*

Langkah pertama dari diplomasi siber adalah *confidence building* atau membangun kepercayaan, ini penting untuk mencapai kesepakatan antarnegara dan menumbuhkan rasa saling percaya, mengurangi skeptisisme, dan meningkatkan keterbukaan dalam berbagi informasi tentang aktivitas siber masing-masing aktor. *Confidence building* dapat terjadi lewat pertukaran informasi strategis, pelatihan bersama melibatkan tim dari dua atau lebih negara, dan *hotline* untuk menghindari kesalahpahaman dan kesalahan dalam penilaian perilaku.

Keamanan siber atau *cybersecurity* berhubungan erat dengan diplomasi siber tapi keduanya melayani dua fungsi berbeda. Keamanan siber mencegah, mengidentifikasi, dan merespons serangan siber berupa akses tak berizin, peretasan komputer dan pencurian informasi dari sistem, jaringan dan basis data komputer, dengan beragam strategi dan teknologi untuk melindungi data dan membatasi disrupsi di ruang siber.

Diplomasi siber berurusan dengan implikasi diplomatik dari manajemen ancaman-ancaman di ruang siber yang sering kali sulit untuk diidentifikasi dengan pasti dan akurat. Bisa dikatakan, salah satu isu utama dalam keamanan siber adalah identifikasi serangan siber. Diplomasi siber bertujuan untuk mengatasi masalah atribusi atau mencari bukti keterlibatan dalam serangan siber dengan membangun mekanisme untuk membuat orang bertanggung jawab atas operasi siber yang merugikan atau bahkan disruptif.

Untuk memerangi ancaman siber secara efektif, diplomasi siber mendorong kerja sama antara pemerintah dan perusahaan swasta karena sektor swasta memainkan peran utama dalam dunia maya. Oleh karena itu, kolaborasi publik-swasta dapat mempermudah pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam keamanan siber. Diplomasi siber mendorong pengembangan kapasitas di negara-negara berkembang untuk meningkatkan keterampilan dan kekuatan keamanan siber mereka. Bantuan ini dapat berasal dari aktivitas berbagi pengalaman keahlian, pelatihan bersama, dan transfer teknologi.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Bagi negara-negara demokratik, diplomasi siber tidak hanya memfasilitasi negosiasi norma dan resolusi konflik, tapi juga menjaga tindakan-tindakan keamanan siber dalam koridor kebebasan dan hak individual di ruang siber termasuk desentralisasi dan tata kelola internet, kebebasan berekspresi, etika, dan privasi. Keseimbangan antara hak individu di ruang siber dan keamanan siber nasional adalah pertimbangan penting di negara-negara demokratik karena hal tersebut membangun identitas demokrasi itu sendiri, sedangkan tindakan-tindakan keamanan siber oleh pemerintah, seperti pemantauan dan peniadaan akses digital terhadap seseorang atau suatu organisasi yang dianggap berbahaya mengakibatkan erosi dari hak-hak sipil masyarakat.

Diplomasi siber lebih dapat diterapkan dan memberikan manfaat yang maksimal di antara negara-negara yang sudah lebih terbuka dalam hal tata kelola siber nasionalnya kepada negara lain sehingga kebutuhan-kebutuhan keamanan siber yang lebih spesifik dapat dicapai. Di antara negara-negara Asia Tenggara yang beragam dalam hal kapabilitas dan tujuan keamanan sibernya, diplomasi siber lebih diharapkan untuk dapat memfasilitasi peningkatan kapasitas keamanan siber dan dialog yang berkelanjutan untuk mencapai norma-norma bersama.

Saat tulisan ini dibuat, diplomasi siber semakin diperlukan di tengah peningkatan ragam bentuk ancaman di ruang siber menurut karakter operasi siber yang membentuknya. Pertama adalah serangan spionase atau pencurian informasi, yaitu serangan terhadap suatu jaringan komputer atau unit yang bertujuan untuk mengumpulkan data berisi informasi untuk kepentingan kompetitif. Aktor-aktor yang terlibat dalam serangan seperti ini mengirim suatu *malware* atau menggunakan instrumen tertentu untuk mengumpulkan informasi penting yang bisa menguntungkan mereka dari jaringan digital atau unit yang mereka sadap tanpa terdeteksi. Spionase tidak mengakibatkan disrupsi pada jaringan melainkan hanya pencurian informasi. Harga yang ditimbulkan dari kerusakan akibat pencurian informasi bisa sangat tinggi. Bentuk kerusakan yang ditimbulkan spionase dapat

Buku ini tidak diperjualbelikan

berupa pencurian kekayaan intelektual, pencurian informasi strategis lewat *phising email* atau surel palsu yang memancing penerima surel mengaktifkan *malware* dalam surel palsu tersebut, pencurian identitas, intersepsi percakapan digital (yang belum terenkripsi). Pencurian data pribadi yang tersimpan dalam sistem digital suatu pengelola data seperti lembaga pemerintah juga mengakibatkan kerusakan berupa pembocoran data-data yang dicuri ke ruang publik dengan tujuan keuntungan finansial, yaitu dengan menjual data-data yang sudah dicuri.

2. Serangan Provokatif

Hal ini bertujuan untuk mengomunikasikan pesan atau mengungkap suatu informasi yang memalukan atau memprovokasi/mempolarisasi publik. Seperti halnya spionase, tidak terjadi disrupsi pada jaringan pada serangan provokatif, tetapi serangan provokatif dapat mengakibatkan dampak yang sangat serius bagi stabilitas sosial. Sebagai contoh, pada awal Agustus 2024 terjadi kerusuhan berkekerasan yang di lebih dari 20 lokasi di Inggris Raya sebagai akibat dari disinformasi atau berita bohong yang menyebar di media sosial bahwa seorang tersangka yang ditangkap polisi karena perbuatannya membunuh tiga korban adalah seorang muslim radikal; disinformasi ini kemudian menyebabkan demonstrasi besar-besaran di depan kantor Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, yang kemudian menyebar ke penjuru Inggris Raya, semuanya diwarnai dengan kekerasan yang menarget warga muslim, toko-toko milik orang Asia, dan polisi (Maclellan & Demony, 2024).

3. Serangan Disruptif

Hal ini mengacu kepada operasi siber yang menciptakan kelumpuhan sistem karena berlebihnya beban kerja *server* pada jaringan digital. Serangan disruptif berupaya mengambil alih akses terhadap data yang disimpan dalam jaringan atau unit. Operasi siber disruptif adalah upaya sengaja menghilangkan atau mengganggu kemampuan sistem untuk mencegah akses tidak sah (*unauthorized access*) yang dilakukan aktor peretas. Akses tidak sah atau *unauthorized access* terjadi ketika

Buku ini tidak diperjualbelikan

suatu aktor mengakses sistem digital tanpa izin dengan mencuri kata sandi, kartu akses, atau instrumen pembuka kunci *firewall* lainnya. Setelah berhasil memasuki sebuah sistem digital, peretas dapat menanam virus untuk mendisrupsi kerja sistem, mengunci akses terhadap data-data yang ada, atau menanam suatu *malware* yang dapat menunggu adanya akses untuk mengakses otoritas yang lebih tinggi dalam mengakses data yang lebih sensitif.

Kerusakan yang diakibatkan serangan disruptif dapat berupa kerusakan data, perusakan laman situs web, *Distributed Denial of Services* atau DDoS (ketidakmampuan sistem melayani perintah pengguna karena terbebani perintah-perintah palsu), atau terkuncinya akses terhadap data yang terjadi akibat pengaplikasian *ransomware*. Serangan disruptif dengan efek paling signifikan dihasilkan oleh *Advanced Persistent Threat*, yaitu serangan yang persisten yang disponsori negara dengan tujuan pencurian data atau disrupsi sistem digital. Ragam serangan disruptif dan pencurian data dapat terjadi karena masuknya *malware* atau program 'jahat' yang menginfiltrasi sistem digital, dan salah satu jalan masuk dari program ini adalah *phising email* atau surel palsu, yaitu surel yang tampak berasal dari lembaga tertentu tapi sebenarnya dibuat oleh peretas. Ketika pengguna mengklik tautan atau *attachment* dari surel tersebut maka *malware* akan menginfiltrasi jaringan. Serangan yang disruptif terhadap jaringan digital berpotensi mengakibatkan kematian atau cidera. Secara hipotetik serangan siber terhadap *air traffic controller* di suatu bandara dapat mengakibatkan dua pesawat bertabrakan di udara dan menewaskan seluruh penumpang.

4. Operasi Destruktif

Operasi serangan kinetik (menggunakan kekerasan fisik seperti senjata api dan bahan peledak) yang berupaya menghancurkan sistem digital dari infrastruktur vital. Serangan ini berusaha menghentikan atau merusak fungsi jaraingan dari sebuah infrastruktur vital, seperti pembangkit listrik, *water purifying system*, sistem perkereta-apian, sistem komunikasi pesawat terbang, dan infrastruktur layanan publik

Buku ini tidak diperjualbelikan

lainnya yang disrupsinya dapat mengorbankan nyawa pengguna layanan.

Deskripsi, bentuk, dan dampak dari keempat tipe serangan di ruang siber atau jaringan digital tersistematisasi pada Tabel 6.1. Seluruh serangan di ruang siber dapat dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara.

Tabel 6.1 Tipe-Tipe Serangan Siber, Lapisan Ruang Siber yang Diserang dan Dampaknya

Jenis Serangan Siber	Karakteristik	Bentuk Serangan	Dampak
Spionase; serangan pada lapisan data	Peretas berupaya mendapatkan akses ke data tanpa otoritas dari pemilik/pengelola sistem.	*Spyware*, *malware*, dan *plug-in* untuk mengumpulkan data, serangan *brute force*, penggunaan ulang kredensial, *phishing* yang memberi jalan bagi *malware* untuk mencuri data.	Dampak reputasi, hilangnya nilai strategis informasi, pencurian kekayaan intelektual, manipulasi dan kebocoran informasi rahasia/sensitif.
Provokasi; serangan pada lapisan sosial atau pengguna ruang siber	Pelaku memanipulasi pengetahuan sosial melalui disinformasi & misinformasi, *deepfake*, untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan.	Banjir informasi, penyesatan melalui informasi palsu atau bukti palsu atas tindakan orang/kelompok tertentu, dan eksploitasi isu yang sensitif bagi kelompok tertentu.	Ketidakstabilan sosial dan konflik, aksi terorisme, campur tangan dalam pilihan masyarakat di pemilu, dan perubahan politik yang radikal.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Jenis Serangan Siber	Karakteristik	Bentuk Serangan	Dampak
Disrupsi; serangan pada lapisan sistem operasi	Serangan yang bertujuan menghilangkan atau melemahkan fungsi jaringan digital dan layanannya untuk kepentingan politik atau keuntungan.	Serangan *ransomware* pada infrastruktur kritis, serangan DDoS, dan serangan APT (*Advanced Persistent Threat*).	Kelumpuhan sistem digital yang mengakibatkan gangguan layanan, kerugian ekonomi, kerusakan reputasi, kebocoran data ke publik, dan erosi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan keamanan digital. Jika disrupsi dilakukan pada infrastruktur vital, dapat menimbulkan efek kinetik.
Penghancuran; serangan pada lapisan perangkat keras	Serangan kerusakan fisik (kinetik) pada infrastruktur digital.	Serangan senjata api dan bahan peledak pada infrastruktur vital. Biasanya terjadi pada masa perang ketika suatu negara melumpuhkan infrastruktur digital vital dengan serangan kinetik.	Mirip dengan dampak disrupsi sistem. Pada level tertentu, dapat menyebabkan kematian jika serangan melumpuhkan infrastruktur vital yang terhubung dengan layanan publik yang luas, seperti sistem digital di Pengatur Lalu Lintas Udara (ATC).

Serangan siber global tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Semakin tinggi laju digitalisasi sektor-sektor ekonomi dan pemerintahan, semakin banyak pula pelaku penyerangan yang berupaya mendapat untung lewat pencurian dan penjualan data. Lebih fundamental dari tingginya laju digitalisasi, keberlanjutan serangan siber akan terjadi karena karakter-karakter dasar ruang siber yang akan terus bertahan. Pertama, ruang siber bersifat *low cost of entry*,

Buku ini tidak diperjualbelikan

artinya untuk suatu aktor memiliki efek atau pengaruh pada aktor lain di ruang siber membutuhkan sumber daya yang relatif lebih murah ketimbang di matra-matra lain (darat, laut, udara, dan antariksa) (Green, 2015, 35). Fitur ini membuat ruang siber inheren dengan ketidakamanan, karena aktor-aktor 'jahat' dapat memiliki peluang yang lebih besar dalam melakukan aksinya di ruang siber, meski ini bergantung pada kepemilikan teknologi dan pengetahuan (Brands, 2023; Terry, 2023, 1022).

Kedua, aktor-aktor memiliki anonimitas di ruang siber. Meskipun ragam aplikasi dan portal telah mewajibkan pengiputan data yang dapat diklarifikasi, tapi peluang seseorang atau suatu organisasi—termasuk negara—untuk menyembunyikan atau memalsukan identitas diri masih cukup besar karena penanda pengguna di ruang siber hanyalah *IP address*, yaitu alamat daring dari setiap gawai yang terkoneksi ke internet yang menunjuk pada lokasi geografis gawai yang digunakan untuk melakukan serangan (Warf & Fekete, 2016). Karakteristik dasar ini menciptakan problematika atribusi di ruang siber, yaitu kesulitan untuk membangun alibi yang meyakinkan atas keterlibatan seseorang dalam suatu serangan siber (Rid & Buchanan, 2015).

Terakhir, karakteristik dasar dari ruang siber yang membuatnya inheren dengan ketidakamanan adalah ketimpangan atau asimetrisme. Ruang siber dimanfaatkan oleh aktor dengan beragam kemampuan dan pengetahuan teknis tentang teknologi dan jaringan digital. Sebagian aktor memanfaatkan lemahnya struktur normatif dan legal formal untuk mengambil keuntungan di atas kerugian aktor lain, dan mereka bisa merupakan aktor negara, individu, kelompok, atau geng peretas. Semakin tinggi investasi untuk digitalisasi di suatu sektor semakin menarik pula sektor tersebut bagi para peretas, sebab semakin banyak informasi digital yang disirkulasikan di sektor tersebut dan setiap jaringan digital pasti memiliki kelemahan (*loophole*) yang bisa memberikan jalan masuk bagi penyerang.

Dalam perkembangannya, ketimpangan kekuatan di ruang siber tak kunjung teratasi dan justru dimanfaatkan oleh sebagian

Buku ini tidak diperjualbelikan

negara dalam mencapai keunggulan atau daya tawar (*leverage*) untuk memengaruhi perilaku negara lain, dan di pihak lain melakukan pemblokiran akses terhadap data dari aktor-aktor yang mereka tidak inginkan. Hal ini membuat dunia menyaksikan apa yang disebut dengan "*splinternet*", yaitu kondisi terfragmentasinya negara-negara di dunia dalam memperlakukan akses data dan aplikasi yang dapat beroperasi dalam jaringan internet yang berada dalam yurisdiksi mereka masing-masing (Hoffmann, Lazanski, & Taylor, 2020).

Diplomasi siber pun mengalami evolusi ke arah yang lebih agresif. Di tengah maraknya penggunaan kekuatan siber tak terkendali oleh negara-negara di dunia untuk pencurian data dan disrupsi jaringan digital, sebagian negara termasuk Australia dan Jepang mengadvokasikan penggunaan penggentaran atau *deterrence* untuk menghadapi pelaku serangan siber yang berhasil teridentifikasi (Manantan, 2021). Sementara atribusi negara tertentu sebagai pelaku atau sponsor serangan siber tidak absolut, Jepang dan Australia menempuh jalan penggentara lewat *naming-and-shaming*, yaitu memublikasikan tuduhan terhadap suatu negara yang mereka identifikasi melakukan serangan siber dengan tujuan mempermalukan dan mendesak negara yang bersangkutan untuk menghentikan serangan mereka jika tidak menginginkan konsekuensi yang lebih parah. Diplomasi siber juga dibuat lebih gencar lewat upaya *digital influencing*, yaitu mendorong negara-negara yang belum ikut serta secara lebih bermakna dalam negosiasi dan perundingan norma siber untuk merumuskan kebijakan mereka, merespons krisis-krisis siber yang penting dan ikut serta dalam perumusan dan penerapan perilaku yang bertanggung jawab di ruang siber.

Diplomasi siber adalah kebijakan yang krusial untuk mendampingi strategi keamanan siber negara. Negara-negara dengan kekuatan siber terbaik di dunia sekalipun mengalami serangan siber yang gencar, bahkan porsi serangan siber terbesar dialami oleh negara-negara dengan kekuatan siber paling mumpuni di dunia. Ketahanan siber mereka dikuatkan dengan aktivisme diplomasi siber yang meningkatkan penguasaan teknik dan teknologi keamanan siber.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Tabel 6.2 yang memperlihatkan perbandingan antara data sebaran serangan siber global dari lembaga konsultan keamanan siber Cyfirma (2023) dan pemeringkatan capaian skor indeks keamanan siber global (*Global Cybersecurity Index*/Indeks GCI) yang dikeluarkan International Telecommunications Union (ITU, 2023).

Tabel 6.2 Sebaran Serangan Siber Dunia Tahun 2023 dan Peringkat Indeks GCI

Negara	Pangsa Serangan Siber Global*	Peringkat Indeks GCI/ Skor GCI**
Jepang	12,5%	7/92
AS	10,8%	5/96,6
India	7,1%	t.d. (tidak tersedia)
Inggris	6,4%	2/92,8
Korea Selatan	5,2%	3/92,7
Singapura	5%	1/97,4
Australia	4,8%	6/94
Prancis	4,1%	10/89,4
Kanada	2,9%	11/87,2

*Pangsa persentase serangan siber global dihitung dari jumlah serangan siber yang terjadi, baik yang berhasil ditanggapi maupun tidak. Dari Situs Web Cyfirma https://www.cyfirma.com/research/singapore-and-southeast-asia-threat-landscape/

**Peringkat Indeks Keamanan Siber Global (GCI) diproses dengan mengubah skor menjadi peringkat. Indeks GCI dibuat oleh International Telecommunications Union (International Telecommunication Union (ITU) Development Sector, 2023)

Sumber: Diolah dari ITU (2023); Cyfirma (2023)

Dapat kita lihat bahwa negara-negara dengan indeks GCI tertinggi di dunia adalah juga target-target utama serangan siber global. Penjelasannya adalah negara dengan komitmen terhadap kapabilitas keamanan siber yang tinggi juga merupakan negara dengan tingkat *networked readiness* yang tinggi atau kemampuan pelayanan lalu lintas digital yang dapat diandalkan, serta melayani banyak pelaku bisnis dan lembaga pemerintah yang terdigitalisasi. Ini merupakan lingkungan yang sangat menarik bagi penyerang-penyerang di ruang siber yang mencari data-data sensitif rahasia perdagangan maupun

Buku ini tidak diperjualbelikan

rahasia negara. Di saat yang sama, diplomasi siber ikut menguatkan ketahanan siber lewat kerja sama penguatan ragam teknik ketahanan ruang siber tertentu, seperti membangun *back-up memory* yang aman dan memutakhirkan kemampuan *firewall* untuk mengenali *signature* dari *malware* dan *ransomware* yang berusaha menginfiltrasi sistem informasi digital, dan membina budaya kerja yang sesuai dengan prosedur standar untuk menjaga keamanan sistem informasi digital. Kerja sama internasional di bidang keamanan siber dapat membina dan memperkuat praktik-praktik yang dibutuhkan untuk keamanan siber ini.

C. Rivalitas Geopolitik AS-China di Ruang Siber

Rivalitas geostrategis China–AS telah bermanifestasi di ruang siber dan direfleksikan oleh cara keduanya memandang internet sebagai medan kompetisi untuk menyebarkan informasi dan wacana untuk meningkatkan pengaruh global mereka dan mendiskreditkan pihak lain. Baik AS maupun China telah memanfaatkan ruang siber untuk melakukan *digital influencing,* yaitu menyebarkan pandangan dunia mereka kepada khalayak global, sambil melawan dan membantah narasi informasi pihak lain.

Manifestasi dari persaingan antara AS dan China di ruang siber telah lama hadir sejak setidaknya awal abad ke-21, dan mengemuka terutama pada sektor ekonomi politik teknologi digital. Pada awal tahun 2000-an, China disinyalir meluncurkan gelombang serangan terhadap jaringan Departemen Pertahanan AS dalam apa yang disebut oleh AS sebagai Operasi Titan Rain (Doshi & Mcguiness, 2021). Pemerintah di seluruh dunia — AS, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Australia, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, India, dan lebih dari selusin lainnya — telah mengeluh tentang intrusi China ke dalam jaringan pemerintah mereka. Beberapa serangan siber terbesar dalam dekade terakhir dikonfirmasi oleh Jaksa Agung AS William Barr telah dilakukan oleh agen China, termasuk antara lain pencurian catatan dari Kantor Manajemen Personalia AS, Hotel Marriott, asuransi kesehatan Anthem, dan Equifax (Doshi & Mcguiness, 2021). Pada

Buku ini tidak diperjualbelikan

masa selanjutnya, perusahaan AS melakukan penuntutan hukum terhadap pemerintah dan perusahaan China atas tuduhan melakukan pencurian rahasia dagang dan hak atas kekayaan intelektual melalui serangan siber mereka.

Momentum penting dari upaya AS membendung kekuatan teknologi digital China adalah pelarangan kehadiran produk perusahaan teknologi digital China Huawei dalam infrastruktur digital AS. Pada Mei 2018, pemerintahan Presiden Trump mengeluarkan *Executive Order* yang melarang perusahaan-perusahaan AS untuk melakukan bisnis dengan Huawei, termasuk membeli, mengimpor, mentransfer, melakukan instalasi, melaksanakan kerja sama tanpa persetujuan khusus dari pemerintah (Beckley & Brands, 2022). Meskipun perintah ini hanya ditujukan kepada Huawei, tapi implikasinya luas bagi penguasaan teknologi digital AS atas China, khususnya untuk produk semikonduktor dan peralatan dan jasa pembuatan semi-konduktor. Sebagai contoh, sistem operasi Android dari Google tidak lagi bisa dilisensikan kepada Huawei sehingga ambisi perusahaan itu untuk menguasai pasar ponsel global terbatasi. Lebih dari itu, Huawei memiliki anak perusahaan bernama HiSilicon yang merupakan produsen semikonduktor terbesar di China, yang kemudian tidak lagi bisa mendapat pasokan alat, bahan, dan rancangan semikonduktor dari semua perusahaan AS, termasuk yang beroperasi di Taiwan (Miller, 2022). Langkah pelarangan kehadiran Huawei dalam infrastruktur digital juga diikuti oleh Australia.

Merespons kedigdayaan teknologi digital AS dan juga sebagai upaya membangun keunggulan kompetitif, informasi adalah prioritas teratas dalam pertimbangan keamanan nasional China menurut *Five-Year Plan for Informatisation* di tahun 2013 (Heinl, 2017) maupun di tahun 2021 (Creemers et al., 2022). Ruang siber adalah perpanjangan dari ambisi China untuk membangun kemandirian dan keunggulan, karena ketergantungan pada salah satu pemasok teknologi, sistem operasi atau piranti lunak dipersepsikan sebagai ancaman eksistensial bagi RRC. Hal ini diumpamakan oleh Presiden Xi Jinping seperti membangun 'rumah di atas fondasi milik orang lain':

Buku ini tidak diperjualbelikan

"*No matter how large an internet company is, no matter how high its market value is, if it is heavily dependent on foreign countries for its core components, and if the "major artery" of the supply chain is in the hands of others, it is like building a house on someone else's foundation. No matter how big and beautiful it is, it may not stand up to wind and rain, and it may be so vulnerable that it collapses at the first blow. The control of core technology by others is our biggest hidden danger.*"

- Xi Jinping, 2018, The Full Text of Xi Jinping's Speech at the Forum on Cybersecurity and Informatization Work (Mallick, 2022).

Publikasi lain mendetailkan upaya aktif China menghalau dominasi AS di ruang siber lewat cara-cara ilegal melakukan spionase siber terhadap AS dan juga negara-negara lain, sebagian besar di Eropa dan Asia Tenggara, untuk mengumpulkan informasi publik dan pribadi yang sensitif untuk mencapai tujuan-tujuan nasional mereka; China melakukan operasi pencurian informasi atau spionase dengan melakukan intrusi ke dalam jaringan komputer lawan dan mencuri informasi, memanipulasi data, dan menanam instrumen atau program untuk melakukan operasi lanjutkan di masa yang akan datang (Mallick, 2022).

Keberadaan ragam ancaman dan ketidakamanan ruang siber, ditambah dengan penggunaan instrumen siber dan teknologi digital untuk persaingan keunggulan di antara AS dan China, mengakibatkan ruang siber kawasan Indo-Pasifik yang rawan akan operasi peretasan komputer dan jaringan komputer yang menciptakan disrupsi terhadap ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan informasi digital.

D. Ketidakamanan Siber Asia Tenggara

Rivalitas AS-China di ruang siber ikut berpengaruh pada lanskap keamanan siber Asia Tenggara lewat serangan-serangan digital China dan AS dan sekutunya pada jaringan digital Asia Tenggara sebagai bagian dari upaya mencuri informasi strategis. Di masa lalu, AS, Australia, dan Inggris tercatat pernah melakukan spionase digital terhadap Indonesia, termasuk penyadapan pertemuan *UNFCC Bali*

Buku ini tidak diperjualbelikan

Climate Conference tahun 2007 yang dilakukan atas kerja sama dengan NSA-ASD (intelijen Australia), penyadapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh intelijen Australia dalam kurun waktu 2007–2009, penyadapan jaringan telekomunikasi salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia pada 2009 oleh GCSB (intelijen Selandia Baru), penyadapan pertemuan tingkat tinggi G-20 tahun 2009 di London, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diplomat Indonesia oleh GCHQ (intelijen Inggris) untuk kepentingan ekonomi, penyadapan kabel optik (internet) bawah laut yang bermuara di Singapura dan membawa data internet beberapa negara di kawasan, termasuk salah satunya Indonesia oleh intelijen Singapura bekerja sama dengan intelijen Inggris, AS, dan Australia. Penyadapan diduga berlangsung selama 15 tahun, dan baru diketahui publik luas pada tahun 2013 setelah pembocoran informasi oleh Edward Snowden (Haripin, 2022; Mengko, 2022, 68–71).

China pun tercatat sebagai sponsor serangan kelompok peretas, seperti Naikon dan SharpPanda. Naikon—dan kelompok-kelompok pelaku *Advanced Persistent Threats* (APT)—menargetkan beberapa pemerintah di Filipina, Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Brunei Darussalam untuk mengumpulkan intelijen geopolitik (Baezner, 2018). Demikian pula, SharpPanda juga menggunakan surel *spear phishing* yang canggih, sebuah taktik yang menarget individu dan organisasi tertentu untuk memperoleh informasi rahasia (CPR, 2021). Selain itu, aktor-aktor disruptif juga melakukan operasi infiltrasi jaringan untuk memasang pintu belakang (*backdoor*) pada sistem operasi untuk melakukan operasi pengawasan terhadap pemerintah Asia Tenggara. *Ensign Infosecurity's 2023 Cybersecurity Landscape Report* melaporkan bahwa kelompok-kelompok peretas dari China, Korea Utara, Iran, dan Rusia menarget Singapura, Indonesia, Malaysia, Hong Kong, dan Korea Selatan (Ensign, 2023). Mereka melakukannya dengan ragam motivasi, sebagian besar untuk pencurian dan spionase informasi, sementara lainnya termasuk sabotase dan perusakan jaringan, kejahatan, serta keuntungan finansial.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Namun, rivalitas AS-China berkontribusi pada tantangan keamanan siber Asia Tenggara yang lebih struktural. Pertama, secara umum Asia Tenggara adalah kawasan dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata dunia dan sedang gencar mengupayakan digitalisasi. Seluruh pelaku ancaman atau *threat actors* menarget jaringan TIK pemerintah dan perusahaan-perusahaan di sektor-sektor yang sedang mengalami pertumbuhan tinggi, diprioritaskan investasinya oleh pemerintah, dan mengalami laju digitalisasi yang tinggi. Dengan kata lain, risiko keamanan siber akan semakin tinggi seiring dengan investasi dan digitalisasi di suatu sektor meningkat, karena pelaku serangan berusaha meraih profit maksimal lewat penipuan dan pencurian data, maupun mengupayakan efek dramatis dari disrupsi di sektor yang melayani banyak konsumen. Selain itu, profil risiko keamanan siber negara-negara Asia Tenggara juga dipengaruhi oleh faktor risiko geopolitik yang tinggi. Tensi perebutan pengaruh antara AS, China, dan Rusia di kawasan ini tidak kunjung mereda, dan mereka tidak segan menggunakan instrumen siber sebagai alat memengaruhi. Seiring dengan Filipina memperbaiki relasi bilateralnya dengan AS, China menganggap negara itu sebagai potensi tantangan yang harus dikendalikan. Potensi konflik atas Taiwan merupakan titik api konflik yang mungkin terjadi di cakrawala keamanan regional dengan dampak siber yang berpotensi tidak dapat diprediksi. Filipina merupakan target logis bagi serangan siber China jika terjadi konflik atas Taiwan.

Tantangan struktural yang dihadapi Asia Tenggara adalah risiko dan kerawanan yang dibawa oleh transformasi digital yang begitu cepat. Seiring dengan semakin banyaknya organisasi publik dan swasta yang terhubung dengan jaringan 5G, mereka semakin banyak menggunakan teknologi yang mendukung kecerdasan buatan (AI) dan *internet of things* (IoT), sembari bermigrasi ke komputasi awan (*cloud*). Integrasi teknologi digital ini telah memperluas potensi target serangan (*attack surfaces*) yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Selain itu, tantangan struktural lain adalah keberagaman dalam hal kematangan siber, yaitu beragamnya intensitas komitmen dan kemauan politik negara-negara Asia Tenggara untuk terlibat dalam kebijakan siber dan isu-isu keamanan, serta beragamnya rezim politik di negara-negara di kawasan, telah menyebabkan kesenjangan pendekatan yang besar di ruang siber. Misalnya, negara dengan tingkat kematangan siber yang tinggi seperti Singapura cenderung mendorong peningkatan penerapan norma-norma internasional bersama, langkah-langkah peningkatan kapasitas, dan aspek kebijakan siber lainnya, sedangkan negara seperti Myanmar yang perlu meningkatkan kematangan siber secara keseluruhan lebih fokus pada upaya membangun kematangan siber dan fokus pada langkah-langkah perlindungan terhadap infrastruktur nasionalnya. Dengan kata lain, komitmen negara-negara Asia Tenggara terhadap isu-isu kebijakan siber juga bergantung pada kematangan siber mereka. Dalam pengukuran *Networked Readiness Index*, ditemukan bahwa kesiapan konektivitas jaringan digital di negara-negara ASEAN berada pada tingkat yang beragam. Skor negara-negara ASEAN dalam *National Cyber Security Index* (NCSI, 2023) dan *Global Cybersecurity Index* (ITU, 2021) pun tampak beragam.

Asia Tenggara telah terposisikan sebagai salah satu kawasan yang paling diminati aktor-aktor kriminal dan disruptif di ruang siber, baik yang disponsori negara maupun gang peretas yang beroperasi di seluruh dunia. Baik China, Rusia, AS, Jepang, dan Australia sebagai negara-negara kuat di ruang siber berusaha memengaruhi posisi politik dari negara-negara di kawasan sebagai bagian dari persaingan dalam memperebutkan pengaruh. Serangan-serangan siber atau operasi ofensif di ruang siber adalah salah satu instrumen untuk mencuri informasi sensitif, memanipulasi pengetahuan publik, memengaruhi preferensi kerja sama internasional sehingga tentu menjadi salah satu instrumen yang digunakan negara-negara besar lewat kelompok-kelompok peretas.

Di sisi lain Asia, Tenggara juga merupakan kawasan dengan pertumbuhan ekonomi dan digitalisasi yang paling dinamis di dunia,

Buku ini tidak diperjualbelikan

dan seiring dengan laju digitalisasi dan investasi pada pertumbuhan ekonomi yang kian meningkat maka semakin gencar pula serangan siber dapat diharapkan terjadi. Pengamatan oleh perusahaan konsultan keamanan siber Cyfirma memperlihatkan bahwa dalam Januari–Juni 2023 saja, Asia Tenggara adalah tuan rumah regional dari 2,47% atau sejumlah 66 organisasi yang menjadi korban serangan *ransomware*. Dalam hal jumlah korban *ransomware*, Thailand menempati posisi pertama (17/66), diikuti Indonesia (13/66), Malaysia (12/66), Filipina (11/66), Singapura (8/66), dan Vietnam (5/66). Tabel 6.3 merinci pangsa serangan siber global yang diterima oleh sembilan negara, menempatkan Jepang (12,5%), AS (10,8%), dan India (7,1%) sebagai tiga target serangan teratas dalam daftar tersebut.

Tabel 6.3 Karakteristik Ketidakamanan Siber Negara-Negara ASEAN, Jepang, dan Australia

Negara	Karakteristik Ancaman Siber yang Mengemuka
Singapura	*Phising email* menarget organisasi dan bisnis; serangan APT/ serangan siber oleh peretas berbasis di luar negeri; *ransomware.*
Malaysia	Kebocoran data; serangan siber oleh peretas berbasis di luar negeri; serangan *ransomware*; serangan *phising email* pada bisnis piranti lunak, penerbangan, logistik, TIK, dan pemerintah; serangan oleh *hacktivist* dalam bentuk DdoS, *web defacement*, dan pembocoran data.
Indonesia	Serangan *ransomware* diikuti dengan pembocoran data menarget perbankan dan pemerintah; serangan *phising email* terutama menyerang media sosial, sektor logistik, layanan keuangan, layanan penyedia internet dan surel; serangan DDoS terhadap perusahaan TIK, penyedia internet, layanan informasi, *gaming* dan *retail,* berdurasi sebagian besar lebih dari 3 jam.
Filipina	Serangan *ransomware* diikuti dengan pembocoran data oleh beragam kelompok peretas internasional menarget sektor keuangan, pemerintahan, pendidikan, dan *retail*; serangan DdoS terhadap sektor TIK, penyedia informasi, *gaming*, dan penyedia internet; serangan APT bertujuan pencurian informasi perusahaan di bidang perdagangan dan pemerintahan.
Vietnam	Serangan APT oleh kelompok-kelompok peretas internasional; serangan DdoS dengan durasi lebih dari 3 jam pada perusahaan -perusahaan TIK; serangan *ransomware*; serangan *phising*.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Negara	Karakteristik Ancaman Siber yang Mengemuka
Jepang	Serangan APT; pembocoran data-data perusahaan termasuk basis data pegawai dan informasi kartu kredit.
Australia	Serangan APT menarget sektor perbankan dan keuangan, konglomerasi bisnis; pembocoran data menarget perusahaan pertambangan, dan panel surya; serangan DdoS menarget perusahaan-perusahaan TIK.

Sumber: Diolah dari Cyfirma (2023)

Keberagaman komitmen kepada kebijakan tata kelola keamanan siber dan laju digitalisasi menyebabkan Asia Tenggara yang sebelumnya telah menjadi medan intervensi digital, baik oleh AS maupun China (Mubah et al., 2016). Wilayah Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara, juga memiliki tingkat serangan *malware* dan *ransomware* yang lebih tinggi dari rata-rata dunia. Microsoft menemukan bahwa kawasan ini memiliki tingkat 1,6 atau 1,7 kali lebih tinggi dari rata-rata global (Microsoft, 2022). Kejahatan siber mendominasi profil ancaman keamanan siber di Asia Tenggara. Laporan *ASEAN Cyberthreat Assessment 2021* yang dilakukan Interpol mengidentifikasi hal-hal berikut sebagai ancaman kejahatan siber teratas di Asia Tenggara, yaitu (1) peretasan surel bisnis (*business email compromise*); (2) *phishing*; (3) *ransomware*; (4) peretasan data ekonomi digital; (5) pelaku jasa *crimeware* (*crimeware-as-a-service*); dan (6) penipuan siber. Interpol menempatkan *ransomware* sebagai ancaman paling signifikan di Asia Tenggara, yang berproliferasi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena *low cost of entry*, dan terjangkau untuk dijalankan para pelaku peretasan. Selain itu, *ransomware-as-a-service* (RaaS), *crimeware-as-a-service* (CaaS), dan *phishing-as-a-service* (PhaaS) juga menjadi populer untuk menghasilkan keuntungan cepat. Ini adalah model bisnis antara operator *ransomware* dan klien mereka. Dalam pengaturan ini, klien yang tidak memiliki keahlian untuk mengembangkan *ransomware*, membayar operator untuk meluncurkan serangan *ransomware*. Sederhananya, RaaS, CaaS, dan PhaaS beroperasi dengan cara yang sama dengan model bisnis perangkat lunak sebagai layanan (*software as a service*/SaaS)

Buku ini tidak diperjualbelikan

(Baker & Shortland, 2023). Interpol juga melaporkan peningkatan kecenderungan para pelaku kejahatan siber untuk mengeksploitasi semakin meluasnya penggunaan perangkat IoT, dengan menggunakan berbagai taktik untuk memperoleh keuntungan ilegal yang maksimal. Laporan tersebut juga mencatat bahwa informasi sumber terbuka (*open source*)—terdiri dari unggahan informasi dari para pengguna media sosial—sangat penting untuk menyusun taktik penipuan rekayasa sosial yang efektif terhadap individu dan organisasi (Interpol, 2021).

E. Tata Kelola Keamanan Siber yang Telah Dibangun ASEAN

Sejauh mana tata kelola keamanan siber Asia Tenggara merespons rivalitas AS-China? Tata kelola keamanan siber Asia Tenggara dibangun oleh dua pilar utama, yaitu strategi keamanan siber setiap negara di kawasan dan arsitektur keamanan regional yang sejauh ini telah dibangun oleh ASEAN.

Berkenaan dengan strategi keamanan siber dari masing-masing negara di kawasan, Asia Tenggara masih diisi oleh negara-negara yang sangat beragam dalam hal komitmen mereka terhadap keamanan siber. Ruang siber Asia Tenggara diisi oleh oleh tiga kelompok negara berdasarkan komitmen mereka dalam keamanan siber. Kelompok pertama adalah negara-negara yang telah menempatkan keamanan informasi digital sebagai prioritas nasional, dan mengalokasikan investasi yang tinggi sebagai porsi dari Produk Domestik Bruto (di atas rata-rata global untuk porsi PDB pada keamanan siber sebesar 0,13%) untuk keamanan siber dan pengembangan TIK, serta memiliki dependensi terhadap ekonomi digital yang tinggi. Singapura, Malaysia, dan Thailand ada pada kategori pertama ini (Tran Dai & Gomez, 2018). Pada Tabel 6.4, ketiga negara ini meraih tiga peringkat teratas di Asia Tenggara untuk capaian skor indeks *National Cyber Security Index* (NCSI). Meskipun Indonesia lebih baik dari Thailand dalam capaian indeks GCI, tapi capaian Indonesia untuk skor indeks IDI yang mengukur pembangunan TIK nasional masih rendah dan hanya

Buku ini tidak diperjualbelikan

mencapai peringkat 111 dari 193 negara, menunjukkan kesenjangan digital yang tinggi antarkelompok masyarakat dalam hal akses digital. Hal ini berkontribusi pada literasi digital yang tidak merata dan keamanan siber nasional berpotensi disrupsi.

Pada kategori kedua terdapat negara-negara dengan dependensi yang tinggi pada ekonomi digital tetapi memiliki porsi GDP yang rendah (di bawah rata-rata global, antara 0,03%–0,13% dari GDP). Mereka mengakui kehadiran ancaman tapi memprioritaskan isu-isu lain sehingga mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk keamanan siber dan hanya secara parsial mengupayakan keamanan siber. Negara-negara ini bahwa mengakui kerawanan negara akan serangan siber dan implikasinya, tapi belum mempunyai prioritas yang jelas antara perlindungan infrastruktur dan pengendalian konten informasi digital oleh warganya. Indonesia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina ada pada kelompok kedua ini. Brunei Darussalam menunjukkan komitmen pada kapabilitas keamanan siber yang masih di bawah Indonesia meskipun kesenjangan digital di negara itu jauh lebih kecil. Kelompok ketiga adalah negara-negara yang belum mengakui ancaman keamanan siber sebagai prioritas nasional karena tidak adanya aset yang terancam disebabkan oleh penetrasi internet yang masih rendah. Kamboja, Laos, dan Myanmar ada pada kelompok ini.

Rivalitas AS-China di sektor ekonomi-politik dari teknologi digital tercermin dalam tata kelola ruang siber negara-negara Asia Tenggara. Pada kubu pertama adalah negara-negara pendukung tata kelola model *multistakeholderism* yang mengusung kemitraan pemerintah-swasta dan kebebasan berinternet yang diadvokasikan oleh AS, dan kubu kedua adalah tata kelola model *multilateralism* yang mendukung peran kuat negara berdaulat dalam kemitraan lintas aktor yang diadvokasikan China (Stadnik, 2017). Keberadaan dua macam kecenderungan dalam tata kelola ini di Asia Tenggara dicerminkan oleh laporan Freedom House tahun 2017 tentang kebebasan berinternet di Asia Tenggara, yang menggambarkan bobot kebijakan sensor dan institusionalisasi kendali informasi yang

Buku ini tidak diperjualbelikan

tinggi di Thailand, Myanmar, dan Vietnam sehingga mendapat label "not free"; sementara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Kamboja mendapat label "partially free"; dan Filipina mendapat label "free" atau menjalankan kebebasan berinternet.

Selain keragaman dalam hal model tata kelola ruang siber, negara-negara Asia Tenggara juga ditandai dengan keberagaman tingkat pengembangan kapabilitas keamanan siber, pengembangan kapasitas TIK, dan kontribusi pada keamanan siber global, sebagaimana tercermin pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4 Pengukuran Kapasitas Keamanan Siber dan Pembangunan TIK Negara-Negara ASEAN

Negara	Peringkat GCI*	Peringkat IDI**	Peringkat NCSI***	Global Cyber Security Contribution****
Singapura	4	18	31	83%
Malaysia	5	63	22	83%
Indonesia	24	111	49	17%
Vietnam	25	108	93	33%
Thailand	44	78	45	17%
Filipina	61	101	48	33%
Brunei Darussalam	85	53	88	17%
Myanmar	99	135	152	17%
Laos	131	139	135	17%
Kamboja	132	128	120	17%

*Global Cybersecurity Index (GCI) disusun oleh International Telecommunication Union (ITU) untuk mengukur komitmen 193 negara anggota ITU terhadap keamanan siber dan membantu mereka mengidentifikasi sektor-sektor yang perlu diperbaiki. Pemeringkatan pada tabel ini adalah hasil konversi skor pada indeks GCI menjadi peringkat global.

***Information and Communication Technology* (ICT) *Development Index* (IDI) mengukur tingkat pembangunan sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dibuat oleh lembaga *International Telecommunications Union* (ITU). Indeks IDI mengukur hingga sejauh mana konektivitas digital bersifat universal dan bermanfaat (*meaningful*). Pemeringkatan pada tabel ini adalah hasil konversi skor pada indeks IDI menjadi peringkat global.

Buku ini tidak diperjualbelikan

***National Cyber Security Index (NCSI) mengukur pengembangan kapasitas (*capacity building*) cybersecurity yang dibuat oleh Estonian e-Governance Academy (eGA).

**** Global Cyber Security Contribution adalah ukuran yang ada di dalam NCSI untuk mengukur keberadaan perjanjian internasional untuk kejahatan siber, representasi di forum kerjasama internasional, peran sebagai tuan rumah untuk organisasi keamanan siber internasional, kerja sama pembangunan kapasitas keamanan siber dengan negara-negara lain.

Perbedaan komitmen kepada keamanan siber pun mengakibatkan aktivisme diplomasi siber yang berbeda. Tabel 6.4 juga menunjukkan komitmen diplomasi siber dengan angka persentase pemenuhan potensi peran internasional atau *Contribution to Global Cyber Security*. Kontribusi kepada keamanan siber global pada dasarnya merupakan dari regulasi keamanan siber di masing-masing negara, semakin kuat regulasi tersebut semakin baik pula pemenuhan potensi kontribusi kepada keamanan siber global. Tabel 6.5 memerinci capaian pada setiap indikator dari skor kontribusi pada keamanan siber global yang tertera pada Indeks NCSI.

Tabel 6.5 Indikator-Indikator Kontribusi Pada Keamanan Siber Global Negara-Negara ASEAN

Negara Anggota ASEAN	Konvensi Internasional untuk Kejahatan Siber	Perwakilan di Forum Internasional	Tuan Rumah Organisasi Keamanan Siber Internasional	Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Negara lain	Skor total (dalam skala 6)
Singapura	0	1	3	1	5
Malaysia	0	1	3	1	5
Indonesia	0	1	0	0	1
Vietnam	0	1	0	1	2
Filipina	1	1	0	0	2
Brunei Darussalam	0	1	0	0	1
Kamboja	0	1	0	0	1
Laos	0	1	0	0	1

Buku ini tidak diperjualbelikan

Negara Anggota ASEAN	Konvensi Internasional untuk Kejahatan Siber	Perwakilan di Forum Internasional	Tuan Rumah Organisasi Keamanan Siber Internasional	Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Negara lain	Skor total (dalam skala 6)
Myanmar	0	1	0	0	1
Thailand	0	1	0	0	1

Sumber: Diolah dari Indeks NCSI (NCSI, 2023)

Tabel 6.5 memperlihatkan bahwa mayoritas negara ASEAN belum memiliki komitmen yang besar untuk ikut serta dalam pengembangan norma keamanan siber global. Hanya Singapura dan Malaysia yang memiliki keikutsertaan dalam pembentukan norma keamanan siber global dengan menjadi tuan rumah untuk organisasi keamanan siber internasional dan melaksanakan *capacity-building* untuk keamanan siber negara lain. Negara-negara ASEAN lainnya sebagian besar hanya menjaga keikutsertaan dalam forum kerja sama keamanan siber internasional.

Selain itu, Tabel 6.5 juga menunjukkan ketiadaan konvensi kerja sama penanganan kejahatan siber yang disepakati oleh seluruh negara ASEAN. Hanya Filipina yang tercatat menandatangani konvensi anti-kejahatan siber, yaitu *Budapest Convention* yang disepakati oleh Uni Eropa sejak 2001 untuk mengatur respons negara-negara pengadopsinya terhadap kejahatan siber. Hingga tulisan ini dibuat, satu-satunya perjanjian internasional di bidang kejahatan siber yang bersifat mengikat bagi para pengadopsinya hanya *Budapest Convention* yang berjudul lengkap *2001 European Convention on Cyber-Crime*. Selain negara-negara Uni Eropa, Kanada, Jepang, Afrika Selatan, Australia, dan AS juga ikut memformulasikan konvensi ini. Konvensi ini mengatur tentang harmonisasi legislasi dan jangkauan transnasional dari aparat penegak hukum dalam menindak kejahatan siber lintas batas negara anggota konvensi (Thomas, 2009). Melihat konten dari konvensi yang sangat mengatur substansi legal-formal dan tata kelola yurisdiksi siber negara-negara pengadopsinya, *Budapest Convention* tidak diratifikasi oleh sebagian besar negara ASEAN

Buku ini tidak diperjualbelikan

yang mengedepankan norma non-interferensi. Negara Asia lain yang menandatanganinya hanya Jepang dan Sri Lanka.

Saat tulisan ini dibuat, lembaga *Ad Hoc Committee on Cybercrime* yang dibuat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyepakati draf perjanjian penanggulangan kejahatan siber yang diinisiasi oleh Rusia sejak tiga tahun lalu (Smalley, 2024). Draf perjanjian tersebut dikritik oleh para pemerhati HAM karena komitmennya yang rendah pada penyalahgunaan wewenang investigasi dan pengumpulan alat bukti digital yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat pada teknologi digital dan menciptakan risiko kesalahan prosedur pidana kejahatan transnasional.

Pilar nasional yang membangun diplomasi siber di Asia Tenggara adalah instrumen kebijakan keamanan siber yang dikeluarkan oleh masing-masing negara anggota. Diplomasi siber hanya dapat mencapai manfaat optimal jika semua negara telah merumuskan strategi keamanan siber nasional yang merumuskan tujuan-tujuan kebijakan keamanan siber, baik dalam hal pengamanan data, infrastruktur komunikasi digital, integritas dan ketersediaan jaringan atau sistem layanan digital, maupun perlindungan hak-hak fundamental pengguna internet. Dokumen strategi keamanan siber nasional juga menjelaskan posisi pemerintah dalam mengupayakan keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi individu dan perlindungan data pribadi dan organisasi dan keamanan nasional. Dengan seluruh negara merumuskan strategi keamanan siber nasional, konvergensi kepentingan dan norma keamanan siber regional. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6.6, di Asia Tenggara, sejumlah negara belum memiliki dokumen strategi keamanan siber nasional, termasuk Indonesia, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Brunei Darussalam.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Tabel 6.6 Instrumen Kebijakan Keamanan Siber dan Data Negara-Negara ASEAN

ASEAN State	Cyber Security Policy Instrument
Malaysia	Computer Crimes Act 1997
	Communication and Multimedia Act 1998
	Sedition and Defamation Act 1948
	Personal Data Protection Act 2010
	National Cyber Security Policy 2016
	Cyber Security Act 2024
Filipina	Electronic Commerce Policy 2000 (Republic Act 8792)
	Law on Cybercrime Prevention (Republic Act 10175)
	Data Privacy Act 2012 (Republic Act 10173/2012)
	National Cyber Security Plan 2022
Thailand	Hukum konvensional mengatur *lèse-majesté* atau penghinaan terhadap kerajaan.
	Computer Crimes Act 2007 & Computer-Related Crime Act 2016
	Cyber Security Act 2019 (B.E. 2562)
	Personal Data Protection Act (PDPA) 2019
	Electronic Transaction Law 2019
	National Cyber Security Strategy 2017-2021
Vietnam	Cyber Security Law 2018
	Cyber Information Law 2015; Information Technology Law 2006; E-Transactions Law 2005; Protection of Consumers' Rights Law 2010
	Hukum konvensional untuk pemidanaan pengguna internet
	Cyber Security Strategy 2025-2030
Indonesia	UU Informasi dan Transaksi Elektronik
	UU Perlindungan Data Pribadi
	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan peraturan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017
	Perpres No. 47/2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional
Singapura	Info-Communications Media Development Authority Act 2016; Broadcasting Act, Electronic Transactions Act; Films Act; Newspaper Act, Postal Services Act
	Spam Control Act
	Internet Domain Act

Buku ini tidak diperjualbelikan

ASEAN State	Cyber Security Policy Instrument
	Personal Data Protection Act 2012
	Cybersecurity Act 2018
	National Cybersecurity Strategy 2016
Kamboja	Defamation & Sedition Law; Cybercrime Law 2022;
Brunei Darussalam	Sedition Act 1948;
Laos	Prevention and Combating Cybercrime Law; electronic data protection law 2017;
Myanmar	Telecommunications Law; Law Protecting Privacy and Security of Citizens;

Sumber: Diolah dan dikembangkan dari Fitriani et al., 2019

Di Asia Tenggara, Brunei Darussalam adalah satu-satunya negara di kawasan yang tidak memiliki regulasi untuk keamanan siber, kejahatan siber, data pribadi, maupun strategi keamanan siber nasional. Meskipun akselerasi dalam hal transformasi digital telah mendorong negara-negara kawasan untuk merumuskan ragam kebijakan keamanan siber nasional, kesenjangan masih ada dalam respons kebijakan mereka. Selain itu, regulasi dan undang-undang yang diproduksi dan mengatur keamanan siber nasional masih lebih banyak berkutat pada restriksi akses informasi untuk pengguna ruang siber dan teknologi digital. Sejumlah regulasi masih belum sesuai dengan prinsip kebebasan berekspresi dan perlindungan hak atas privasi tapi di negara lain—terutama Filipina—hal ini diprioritaskan. Selain itu, mayoritas substansi dari produk kebijakan keamanan siber nasional berkisar pada pengendalian konten digital dan pemidanaan pembuat/penyebar konten yang dianggap negatif, baik karena menghina negara/kerajaan, mencemarkan nama baik orang lain atau mengandung konten negatif lainnya, ketimbang regulasi untuk perlindungan data pribadi dan infrastruktur komunikasi digital.

Pilar kawasan dari tata kelola keamanan siber Asia Tenggara dibangun oleh ASEAN lewat *ASEAN Cybersecurity Cooperation Strategy* (2017–2020), yang ditindaklanjuti dengan *Cybersecurity Cooperation Strategy 2021–2025* yang menguraikan tentang pendirian *ASEAN*

Buku ini tidak diperjualbelikan

Cybersecurity Coordinating Committee. Di dalam komite tersebut melekat ragam kolaborasi lintas-sektor untuk isu-isu siber. ASEAN juga mendirikan *ASEAN Ministerial Conference on Cybersecurity* untuk menanggapi ancaman ransomware yang meningkat dalam sesi substantif pertama dari *United Nations Open-Ended Working Group on Development in the Field of Information and Telecommunication in the Context of International Security* (OEWG).

Substansi dari norma-norma keamanan siber Asia Tenggara mengikuti substansi dari norma-norma perilaku siber yang bertanggungjawab yang ditetapkan dalam proses *United Nations Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security* (*UNGGE*) tahun 2015 (CSAS, 2017). ASEAN dalam hal ini adalah pelaksana subsidiaritas norma dari apa yang sudah ditetapkan dalam UNGGE (Cloramidine & Wibisono, 2024). Termasuk dalam 11 norma perilaku siber yang bertanggungjawab ini adalah larangan negara untuk membiarkan wilayahnya digunakan untuk tindakan yang salah dengan menggunakan TIK dan mendukung atau melakukan serangan siber yang merusak infrastruktur penting (UNGA, 2021).

Kerangka institusional dan kebijakan ASEAN terkait tata kelola siber secara garis besar masih merupakan turunan dari prinsip fundamental kawasan yang terhimpun dalam *ASEAN Way*, termasuk non-intervensi dalam urusan domestik negara anggota, musyawarah dan mufakat sebagai metode pengambilan keputusan, dan mekanisme institusional yang informal dan tidak mengikat sebagaimana terlihat pada produk kesepakatan berupa memorandum (Ali, 2021). Oleh karena itu, kerja sama siber kawasan di bidang siber juga taat kepada pendekatan formalistik antarpemerintah (*intergovernmental*), ditandai dengan deklarasi, pernyataan dan inisiatif kerja sama yang tidak mengikat, struktur kelembagaan berupa *ASEAN Digital Ministers' Meeting* (ADGMIN), sebelumnya dikenal dengan *ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers* (TELMIN), yang merupakan platform kelembagaan utama di ASEAN untuk kerja sama di sektor TIK. ADGMIN mengemban tugas menentukan arah

Buku ini tidak diperjualbelikan

garis besar dari kebijakan dan kerja sama ASEAN di ranah digital. Dalam mengemban fungsinya, ADGMIN juga didukung oleh *ASEAN Digital Senior Officials' Meeting*, *ASEAN Telecommunication Regulators' Council* dan *ASEAN ICT Centre* yang masing-masing berupaya memperdalam kerja sama antarnegara ASEAN. Ketaatan pada koridor *ASEAN Way* terlihat pada inisiatif kebijakan yang tak mengikat dan berbasis prinsip non-intervensi urusan-urusan internal.

Ketaatan pada *ASEAN Way* juga terlihat pada *ASEAN Framework on Personal Data Protection* yang mengupayakan penguatan perlindungan data pribadi di kawasan untuk mendukung aliran informasi di kawasan. Alih-alih merumuskan aturan-aturan mengikat yang mengharmoniskan hukum-hukum domestik tentang proteksi data pribadi, *framework* ini mendorong negara-negara anggota untuk merancang dan mengimplementasikan hukum atau kebijakan yang mengatur perlindungan data pribadi di yurisdiksinya masing-masing. Selain itu, negara-negara anggota yang mengimplementasikan *framework* ini dapat mengadopsi pengecualian-pengecualian sesuai dengan kondisi domestik masing-masing. Sangat kontras dengan aturan *General Data Protection Regulation* dari Uni Eropa, *ASEAN Framework on Personal Data Protection* tidak mewujud sebagai aturan mengikat yang harus diterapkan negara-negara anggota ASEAN di yurisdiksinya masing-masing (GSMA, 2018).

Selain selaras dengan *ASEAN Way*, fitur utama kedua dari pendekatan tata kelola siber ASEAN adalah penekanannya pada prinsip sentralitas ASEAN, yaitu gagasan bahwa ASEAN harus tetap berada di pusat arsitektur kelembagaan, yang mendorong inisiatif kerja sama regional yang lebih luas di kawasan Asia-Pasifik. Sentralitas ASEAN merupakan prinsip penting yang menginformasikan pengelolaan hubungan eksternal ASEAN dengan negara-negara kuat, termasuk China, AS, Jepang, Korea Selatan, UE, dan India. Prinsip ini secara bertahap menghasilkan terciptanya sistem mitra dialog yang dilembagakan yang dipimpin ASEAN, yang dapat dilihat sebagai bentuk kerja sama transregional yang berbeda di *Global South* (Mueller, 2020). Sehubungan dengan tata kelola siber, ASEAN menunjukkan

Buku ini tidak diperjualbelikan

keinginan yang kuat untuk menerapkan dan memperkuat prinsip sentralitas ASEAN melalui mekanisme kelembagaan yang dipimpin ASEAN, seperti *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan *ASEAN Plus Three*.

Melalui ARF, ASEAN secara khusus mempromosikan langkah-langkah membangun kepercayaan di ruang siber yang selaras dengan budaya diplomatiknya, yang mendorong deeskalasi dan pencegahan konflik secara bertahap melalui *dialog confidence building* (ARF, 2012). ARF dengan demikian memfasilitasi terciptanya pendekatan kerja sama regional terhadap tata kelola siber yang terutama difokuskan pada ketahanan kemampuan nasional dan rasa saling percaya (Tran Dai & Gomez, 2018), dengan ASEAN berada di pusat kelembagaan dan diplomatik kawasan Asia-Pasifik yang lebih luas.

Alih-alih memilih antara pendekatan tata kelola siber multilateral yang secara eksklusif berpusat pada negara (multilateralism) dan pendekatan multi-pemangku kepentingan berbasis pasar (multistakeholderism), ASEAN berupaya menjadi "perantara" antara pendekatan China dan AS terhadap tata kelola siber (Van Raemdonck, 2021). Sementara ASEAN dan China memang memiliki posisi normatif yang sama pada prinsip-prinsip umum tentang penghormatan terhadap kedaulatan negara dan non-intervensi dalam urusan internal, perbedaan halus antara pendekatan ASEAN dan China terhadap tata kelola siber dapat diamati. Misalnya, China telah lama skeptis tentang pendekatan *multistakeholderism* yang bertentangan dengan penekanan China pada tata kelola siber multilateral yang dipimpin oleh pemerintah yang berdaulat (Rosenbach & Chong, 2019). Sebaliknya, ASEAN telah mulai merangkul gagasan multistakeholderism dalam tata kelola ruang siber. Sebagaimana ditunjukkan dalam *ASEAN Cybersecurity Cooperation Strategy 2021–2025*, ASEAN berupaya untuk mengupayakan pendekatan "multi-disiplin", modular, dan terukur bagi pengembangan kapasitas keamanan siber (ASEAN, 2022). Dengan menyoroti pentingnya pendekatan "multilateral" dan "multi-stakeholder", dokumen ini semakin menunjukkan niat ASEAN untuk menciptakan jalan tengah yang melampaui model tata kelola dunia maya AS dan China.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Jalan tengah antara *multilateralism* dan *multistakeholderism* ini termanifestasikan dalam aktivisme ASEAN membangun kerja sama ekstra-regional di bidang keamanan siber. ASEAN telah membangun kerja sama keamanan siber secara berkelanjutan dengan sejumlah mitra dialog dan organisasi internasional dengan tujuan meningkatkan pertukaran informasi tentang ancaman dan respons terhadap insiden-insiden keamanan siber. Dalam hal ini *ASEAN Regional Forum* (ARF) telah membentuk *Points of Contact Directory*, yaitu sejumlah narahubung yang dapat segera merespons insiden keamanan siber yang membutuhkan koordinasi segera—sebagai bagian dari upaya diplomasi preventif untuk membangun saling percaya (*confidence building measure*). *Points of Contact Directory* tersebut dapat dikategorikan sebagai diplomasi preventif karena bertujuan mencegah terjadi kesalahpahaman dan mispersepsi tentang suatu insiden keamanan yang melibatkan TIK digital yang dapat mengarah kepada eskalasi ketegangan hubungan jika tidak diatasi.

Di sektor kejahatan siber (*cybercrime*) *UN Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan Interpol memainkan peranan yang melampaui upaya membangun kesadaran ke arah kolaborasi lintas batas, khususnya di antara penegak hukum, penuntut umum, dan penyidik kejahatan siber. Melalui *Financial Action Task Force* (FATF), UNODC juga bekerja sama dengan sektor keuangan dan bisnis dari negara-negara anggota untuk mengidentifikasi titik-titik rawan (*chokepoint*) mata uang kripto dan layanan pencucian uang terkait yang digunakan oleh penjahat dan sindikat kejahatan siber di Asia Tenggara.

Bekerja sama dengan perusahaan keamanan siber, Interpol juga telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengadili dan menyelidiki pelaku kejahatan siber yang beroperasi sebagai bagian dari jaringan kejahatan global di Asia Pasifik. Pada bulan Maret 2020, ASEAN membentuk *ASEAN Cybercrime Operations Desk* untuk meningkatkan intelijen kejahatan siber dan mengoordinasikan beberapa operasi multiyurisdiksi untuk menargetkan kejahatan siber.

Namun, ketaatan pada koridor *ASEAN Way* dan membangun kerja sama ekstra-regional sepertinya masih meninggalkan banyak

Buku ini tidak diperjualbelikan

pekerjaan rumah bagi keamanan siber ASEAN, khususnya dalam menghadapi ancaman kejahatan siber (*cybercrime*). Meskipun terdapat capaian yang semakin banyak di Asia Tenggara berkenaan dengan penanggulangan kejahatan siber, masih terdapat tantangan bagi respons regional yang kolektif dan holistik menghadapi kejahatan siber. Pertama, sejumlah pemerintahan di negara-negara Asia Tenggara belum melihat kejahatan siber sebagai ancaman keamanan (Walsh, 2017).

Kesenjangan dalam perspektif ancaman kejahatan siber berkaitan dengan kesenjangan yang mencolok dalam hal kematangan digital di antara negara-negara anggota ditambah perbedaan prioritas keamanan siber sebagai isu keamanan nasional, secara keseluruhan menurunkan kedalaman implementasi kebijakan-kebijakan keamanan siber regional yang telah diambil (Heinl, 2017). Sebagai contoh, persengketaan di Laut China Selatan telah lama memiliki dimensi siber yang bermanifestasi sebagai spionase atau pencurian informasi di ruang siber, tapi insiden ini tidak pernah dipertimbangkan sebagai insiden keamanan siber dan diperlakukan secara terisolasi dari keseluruhan lanskap keamanan siber (Manantan, 2021). Hal ini memunculkan keraguan di sebagian kalangan terhadap kemampuan ASEAN untuk memenuhi komitmen keamanan siber-nya, terutama karena kemampuan ASEAN menjaga konsolidasi politik di tengah persaingan geopolitik semakin tampak terbatasi.

Dua prioritas ancaman terhadap data di ruang siber adalah konten informasi digital yang mengakibatkan instabilitas politik-keamanan karena ketidaksesuaian dengan diskursus ideologis dominan dan kejahatan siber yang dilakukan aktor-aktor disruptif yang mengancam integritas, aksesibilitas, dan kerahasiaan data. ASEAN menganggap keduanya sama penting. Namun kenyataannya, fokus yang timpang ke salah satu ancaman akan membuat investasi yang kurang pada ancaman yang lain. Indonesia adalah contoh negara dengan prioritas keamanan siber yang masih berkisar pada pengendalian konten informasi digital atau ujaran, keberlangsungan ekonomi digital, dan digitalisasi sektor-sektor masyarakat; sehingga ruang perhatian untuk keamanan jaringan dan data menjadi sempit. Di tahun 2021,

Buku ini tidak diperjualbelikan

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaporkan bahwa dari 1.261 notifikasi celah keamanan yang mereka kirimkan kepada institusi pemerintah dan lembaga-lembaga pengelola data lain, hanya 72 notifikasi atau 6% yang mendapat tindak lanjut (Yahya & Arbi, 2022). Kemampuan yang rendah dalam merespons kerawanan ini menunjukkan ketiadaan dorongan struktural dari lembaga-lembaga pengelola data untuk menjaga keamanan jaringan dengan serius. Ini kontras berbeda dengan China misalnya, yang menerapkan denda hingga 500.000 yuan bagi lembaga yang mengalami serangan siber yang mengakibatkan kerusakan, kebocoran, atau hilangnya akses terhadap data (Heinl, 2017).

Keberagaman dalam prioritas keamanan siber nasional merupakan fungsi dari tingkat sumber daya finansial dan manusia yang tersedia dari masing-masing negara dan tingkat kemauan politik yang menentukan ambisi dan prioritas di ruang siber. Ada negara yang mau fokus mengupayakan perlindungan infrastruktur informasi vital dan kerangka regulasi, tapi ada pula negara yang lebih memprioritaskan industri digital dalam negerinya dan membangun matra siber untuk angkatan bersenjata. Kunci kesepakatan adalah mencari prioritas bersama, misalnya menanggulangi kejahatan siber yang juga telah menjadi agenda *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC).

Prinsip *ASEAN Way* lain yang juga dapat menjadi tantangan adalah musyawarah dan mufakat, karena prinsip ini dapat mendorong negara anggota untuk menyepakati norma dan aturan demi tercapainya konsensus tanpa pemahaman utuh dari norma tersebut. Lebih mengkhawatirkan dari itu, di tengah karakteristik ruang siber yang ditandai dengan anonimitas pelaku serangan siber, konsensus dapat dihasilkan oleh ketidakjujuran intensi. Hal ini berpotensi terjadi, mengingat negara seperti Vietnam masih sering menjadi sponsor serangan siber di Asia Tenggara. Vietnam sebagai salah satu anggota ASEAN melalui APT32 telah melakukan berbagai macam serangan siber ke negara lain, seperti Australia, Bangladesh, Tiongkok, Denmark, Jerman, India, Iran, Jepang, Nepal, Belanda, Korea Selatan,

Buku ini tidak diperjualbelikan

Inggris, AS, termasuk di antaranya negara-negara anggota ASEAN, yakni Kamboja, Brunei Darussalam, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, dan Thailand (ETDA, 2022). Integritas dari norma dan aturan apa pun di level regional akan bergantung pada implementasi dan penerjemahannya menjadi aturan di tingkat nasional.

F. Penutup

Rivalitas AS-China di ruang siber menjangkau hingga ruang siber Asia Tenggara dalam dua manifestasi penting. Pertama adalah karakteristik kompetitif dari ruang siber Indo-Pasifik yang terbentuk oleh rivalitas ini. Upaya AS untuk membendung penguasaan ekonomi-politik China atas teknologi digital, sebagai respons terhadap upaya China mencuri informasi rahasia dari perusahaan-perusahaan teknologi AS diikuti dengan tindakan-tindakan spionase yang serupa di Asia Tenggara. Ragam bentuk spionase atau pencurian informasi lewat *phising email* maupun penyadapan digital dilakukan oleh kelompok-kelompok peretas maupun negara yang mengindikasikan keterlibatan China maupun AS dan aliansinya. Namun, Asia Tenggara secara umum telah menyaksikan peningkatan risiko serangan siber dengan pelaku serangan negara lain maupun dari dalam negeri, suatu risiko yang meningkat sebagai hasil dari kombinasi dari laju transformasi digital yang cepat yang tidak diimbangi dengan komitmen untuk membangun kemampuan pencegahan, deteksi, dan pemulihan dari serangan siber serta perlindungan data dan sistem komunikasi digital.

Implikasi kedua dari rivalitas ini adalah fragmentasi antarnegara Asia Tenggara dalam hal tata kelola keamanan siber, yang terderivasikan dari perbedaan preferensi China dan Rusia yang mengedepankan peranan kuat pemerintah negara berdaulat dalam pengendalian informasi digital dan penanganan kejahatan siber dan preferensi tata kelola AS yang mengedepankan pentingnya kemitraan pemerintah dan swasta dalam mengelola data pribadi, kebebasan lalu lintas data lintas yurisdiksi siber, serta penguatan ketahanan infrastruktur dan jaringan digital. Di Asia Tenggara, sebagian besar negara kawasan

Buku ini tidak diperjualbelikan

mengadopsi peran kuat negara dalam pengendalian konten dan informasi digital dengan pengecualian Filipina. Sebagian negara telah membuat strategi keamanan siber nasional mereka *accessible* bagi dunia internasional, memungkinkan kemitraan keamanan siber yang lebih optimal, tetapi Indonesia, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, dan Myanmar belum mengikuti langkah ini. Perbedaan-perbedaan dalam respons kebijakan ini hadir di atas perbedaan dan kesenjangan kapabilitas keamanan siber sebagaimana direkam oleh indeks GCI, IDI, dan NCSI yang artikel ini sudah tampilkan. Namun secara umum, rivalitas geopolitik—berkombinasi dengan kesenjangan kekuatan digital yang ada—berimplikasi pada absennya standar umum regional yang dapat menjadi referensi keamanan siber, dan keleluasaan negara-negara kawasan untuk melakukan restriksi kebebasan ruang siber dan 'impunitas' lembaga-lembaga yang mengelola dan (semestinya) bertanggungjawab atas keamanan data pribadi.

Menghadapi rivalitas dan fragmentasi model tata kelola ini, ASEAN berusaha membangun "poros"-nya sendiri. ASEAN telah menyepakati sentralitas teknologi digital dan ruang siber bagi inovasi, efisiensi, dan produktivitas bisnis serta kelancaran keseharian hidup warga yang semakin terdigitalisasi (ASEAN, 2021). Membangun arsitektur diplomasi siber global lewat *Cybersecurity Cooperation Strategy 2021–2025* yang menguraikan tentang pendirian *ASEAN Cybersecurity Coordinating Committee* dan operasionalisasi *ASEAN Digital Ministers' Meeting* (ADGMIN). Arsitektur keamanan yang sudah ada di ASEAN, terutama ARF yang memasukkan di dalamnya Jepang, Selandia Baru, Australia, Rusia, India, Korea Selatan, dan bahkan Uni Eropa, juga memfasilitasi ASEAN membangun sentralitas dalam upaya membangun tata kelola keamanan siber Asia Tenggara.

Namun, dalam praktiknya regulasi siber di Asia Tenggara lebih cenderung mengikuti prinsip *multilateralism* karena kedekatan prinsip tersebut dengan nilai-nilai *ASEAN Way*. Keadaan ini mengakibatkan Asia Tenggara belum memiliki kesepakatan yang menyatukan persepsi ancaman terhadap keamanan siber, khususnya dan terutama pada bentuk-bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) yang berpotensi menciptakan disrupsi yang berbahaya bagi keselamatan publik

Buku ini tidak diperjualbelikan

maupun ekonomi nasional, suatu potensi ancaman yang besar di tengah ketimpangan tata kelola siber di antara negara-negara anggota.

Untuk dapat menciptakan *hedging* yang efektif terhadap dampak dari rivalitas AS-China di ruang siber, arsitektur keamanan siber ASEAN perlu mengurangi kesenjangan digital antarnegara-negara di kawasan, mendorong negara-negara anggota untuk merumuskan strategi keamanan siber nasional secara terbuka dan berkala serta menggiatkan pengembangan kapasitas lewat berbagi pengalaman terbaik dalam mendeteksi dini serangan siber dan membangun ketahanan di ruang siber. Hal ini sudah muncul dengan kepemimpinan Singapura sebagai pemimpin dalam kapabilitas keamanan siber di kawasan. Di masa yang akan datang, kolaborasi yang melampaui mitra tradisional dan mengeksplorasi tipe-tipe kerja sama di antara negara-negara dengan pengalaman dan semangat yang sama untuk memajukan solusi-solusi ancaman siber yang diakses sebagai mitra setara.

Diplomasi siber harus dengan dilakukan investasi dan intensitas yang lebih, terutama oleh negara-negara pemimpin di ruang siber termasuk Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Aktivisme diplomasi siber di kawasan menjadi penting untuk membangun saling percaya, prediktabilitas, dan stabilitas yang esensial untuk mengurangi kesenjangan digital, mendorong insentif bagi sistem internasional untuk membangun keamanan siber, dan mendorong negara-negara di dunia terlibat dalam diskusi keamanan siber.

Referensi

Ali, H. M. (2021). "Norm Subsidiarity" or "Norm Diffusion"? A Cross-Regional Examination of Norms in ASEAN-GCC Cybersecurity Governance. *The Journal of Intelligence, Conflict, and Warfare*, *4*(1), 128–153. doi:https://doi.org/10.21810/jicw.v4i1.2805

ARF. (2012, July 12). 2012 ASEAN Regional Forum Statement by the Ministers of Foreign Affairs on Cooperation on Ensuring Cyber Security [Press release]. https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2020/09/2012-ARF-MFA-Stm-on-Cooperation-in-Cyber-Security.pdf

Buku ini tidak diperjualbelikan

ASEAN. (2021). *ASEAN Digital Masterplan 2025*. https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ASEAN-Digital-Masterplan-EDITED.pdf

ASEAN. (2022). ASEAN Cyber Security Cooperation Strategy (2021-2025) [Press release]. Retrieved from https://asean.org/wp-content/uploads/2022/02/01-ASEAN-Cybersecurity-Cooperation-Paper-2021-2025_final-23-0122.pdf

Baezner, M. (2018). *Use of cybertools in regional tensions in southeast asia*. CSS Cyberdefense Hotspot Analyses. https://www.research-collection.ethz.ch/bitstream/handle/20.500.11850/314588/Cyber-Reports-2018-05.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Baker, T., & Shortland, A. (2023). Insurance and enterprise: cyber insurance for ransomware. *The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice*, *48*(2), 275–299. doi:10.1057/s41288-022-00281-7

Barrinha, A., & Renard, T. (2017). Cyber-diplomacy: the making of an international society in the digital age. *Global Affairs*, *3*(4–5), 353–364. doi:10.1080/23340460.2017.1414924

Beckley, M., & Brands, H. (2022). *Danger zone: The coming conflict with China*. W. W. Norton and Company.

Brands, H. (2023). *The new makers of modern strategy: From the ancient world to the digital Age*. Princeton University Press.

Cloramidine, F., & Wibisono, A. A. (2024). Global cyber norms subsidiarity (UN GGE and UN OEWG) within ASEAN's Body. *Hasanuddin Journal of Strategic and International Studies (HJSIS)*, *2*(2), 21–37. doi:https://doi.org/10.20956/hjsis.v2i2.35313

CPR. (2021, June 3). Sharppanda: Chinese apt group targets southeast asian government with previoulsy unknown backdoor. https://research.checkpoint.com/2021/chinese-apt-group-targets-southeast-asian-government-with-previously-unknown-backdoor/

Creemers, R., Dorwart, H., Neville, K., & Schaefer, K. (2022). *Translation. 14th five-year plan for national informatization*. https://digichina.stanford.edu/wp-content/uploads/2022/01/DigiChina-14th-Five-Year-Plan-for-National-Informatization.pdf

CSAS. (2017). *Norms for cybersecurity in Southeast Asia. Policy options for collaborative security in the southeast asian region*. https://ccapac.asia/wp-content/uploads/2022/03/Norms-for-Cybersecurity-in-Southeast-Asia.pdf

Buku ini tidak diperjualbelikan

Cyfirma. (2023). The changing cyber threat landscape Southeast Asia. https://www.cyfirma.com/research/the-changing-cyber-threat-landscape-southeast-asia/

Cyfirma. (2023, September 8). Singapore and Southeast Asia threat landscape. https://www.cyfirma.com/research/singapore-and-southeast-asia-threat-landscape/

Doshi, R., & Mcguiness, K. (2021). *Huawei meets history: Great powers and telecommunications risk*, *1840–2021*. https://policycommons.net/artifacts/4135986/huawei-meets-history/4944162/

Ensign. (2023). *Cyber threat landscape report july 2023*. https://www.ensigninfosecurity.com/resources/98

ETDA. (2022). Threat group cards: A threat actor encyclopedia. https://apt.etda.or.th/cgi-bin/listgroups.cgi

Fitriani, F., Pareira, C., & Arifin, N. A. (2019). *Towards a resilient regional cyber security: perspectives and challenges in Southeast Asia*. Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Green, J. A. (2015). *Cyber warfare: A multidisciplinary analysis*. Routledge.

GSMA. (2018). *Regional privacy frameworks and cross-border data flows. How ASEAN and APEC can Protect Data and Drive Innovation. September 2018*. https://www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-good/public-policy/wp-content/uploads/2018/09/GSMA-Regional-Privacy-Frameworks-and-Cross-Border-Data-Flows_Full-Report_Sept-2018.pdf

Haripin, M. (2022). *Intelijen dan keamanan nasional di Indonesia pasca-orde baru*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Heinl, C. H. (2017). New trends in Chinese foreign policy: The evolving role of cyber. *Asian Security*, *13*(2), 132–147. doi:10.1080/14799855.2017.1286160

Hoffmann, S., Lazanski, D., & Taylor, E. (2020). Standardising the splinternet: how China's technical standards could fragment the internet. *Journal of Cyber Policy*, *5*(2), 239–264. doi:10.1080/23738871.2020.1805482

Hurel, L. M., Priyandita, G., Basu, A., Tran, B., Vosse, W., & Bareja, M. (2024). Cyber capabilities in the Indo-Pacific: Shared ambitions, different means? *Royal United Services Institute (RUSI) Commentary*.

Interpol. (2021). *Annual report 2021*. Interpol.

Buku ini tidak diperjualbelikan

ITU. (2021). *Global cybersecurity index 2020*. https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2021-PDF-E.pdf

ITU. (2023). *Measuring digital development. The ICT development index 2023*. https://www.itu.int/hub/publication/d-ind-ict_mdd-2023-2/

Lancelot, J. F. (2020). Cyber-diplomacy: Cyberwarfare and the rules of engagement. *Journal of Cyber Security Technology*, *4*(4), 240–254. Do i:10.1080/23742917.2020.1798155

Maclellan, K., & Demony, C. (2024, August 6). UK's Starmer vows speedy punishment to quell violent disorder. *Reuters*. https://www.reuters.com/world/uk/uks-starmer-hold-emergency-meeting-riots-intensify-2024-08-05/

Mallick, P. K. (2022). *China in the cyber domain*. Prints Publications Pvt Ltd.

Manantan, M. B. F. (2021). Advancing cyber diplomacy in the Asia Pacific: Japan and Australia. *Australian Journal of International Affairs*, *75*(4), 432–459. doi:10.1080/10357718.2021.1926423

Mengko, D. M. (2022). Intelijen dan Perkembangan Teknologi. In M. Haripin (Ed.), *Intelijen dan Keamanan Nasional di Indonesia Pasca-Orde Baru* (65–90). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Microsoft. (2022, August 23). Microsoft releases its second edition of Cyber Signals tracking ransomware's new business model. https://news.microsoft.com/apac/2022/08/23/microsoft-releases-its-second-edition-of-cyber-signals-tracking-ransomwares-new-business-model/

Miller, C. (2022). *Chip war: The fight for the world's most critical technology*. Simon and Schuster.

Mubah, A. S., Wardahni, A., Ponsela, D. F., & Tsauro, M. A. (2016). Problem dasar kesenjangan digital di Asia Tenggara. *Global Strategis*, *10*(2), 204–220.

Mueller, L. M. (2020). Challenges to ASEAN centrality and hedging in connectivity governance — Regional and National Pressure Points. *Pacific Review*, 1–31. doi:10.1080/09512748.2020.1757741

NCSI. (2023). *National cyber security index 3.0*. https://ega.ee/wp-content/uploads/2023/08/NCSI-3.0_Methodology.pdf

Rid, T., & Buchanan, B. (2015). Attributing Cyber Attacks. *Journal of Strategic Studies*, *38*(1–2), 4–37. Doi:10.1080/01402390.2014.977382

Buku ini tidak diperjualbelikan

Rosenbach, E., & Chong, S. M. (2019, August). *Governing cyberspace: State control vs. the multistakeholder model*. https://www.belfercenter.org/publication/governing-cyberspace-state-control-vs-multistakeholder-model

Smalley, S. (2024, August 9). UN cybercrime treaty passes in unanimous vote. *The Record*. Retrieved from https://therecord.media/un-cybercrime-treaty-passes-unanimous

Stadnik, I. (2017). What is an international cybersecurity regime and how we can achieve it? *Masaryk University Journal of Law and Technology*, *11*(1), 129–154. doi:https://doi.org/10.5817/MUJLT2017-1-7

Terry, S. M. (2023). The strength of weakness: The Kim dynasty and North Korea's strategy for survival. In H. Brands (Ed.), *The New Makers of Modern Strategy: From the Ancient World to the Digital Age.* (1022–1045). Princeton University Press.

Thomas, N. (2009). Cyber security in East Asia: Governing anarchy. *Asian Security*, *5*(1), 3–23. Doi:10.1080/14799850802611446

Tran Dai, C., & Gomez, M. A. (2018). Challenges and opportunities for cyber norms in ASEAN. *Journal of Cyber Policy*, *3*(2), 217–235. Doi: 10.1080/23738871.2018.1487987

UNGA. (2021, July 14). *Group of governmental experts on advancing responsible state behaviour in cyberspace in the context of international security*. https://digitallibrary.un.org/record/3934214?ln=en&v=pdf#files

Van Raemdonck, N. (2021, May). *Digital dialogue. Cyber Diplomacy in Southeast Asia*. https://eucd.s3.eu-central-1.amazonaws.com/eucd/assets/2ZycxfN1/dd-southeast-asia-nb-fb-nvr-09-05.pdf

Walsh, P. F. (2017). Securing state secrets. In R. Dover, H. Dylan, & M. S. Goodman (Eds.), *The Palgrave Handbook of Security, Risk and Intelligence* (177–193). Palgrave Macmillan UK.

Warf, B., & Fekete, E. (2016). Relational geographies of cyberterrorism and cyberwar. *Space and Polity*, *20*(2), 143–157. doi:10.1080/13562576.2015.1112113

Yahya, A. N., & Arbi, I. A. (2022, September 18). 1.261 notifikasi dikeluarkan sepanjang 2022, BSSN: Bentuk Pencegahan Serangan Siber. *Kompas.com*. https://nasional.kompas.com/read/2022/09/18/08493131/1261-notifikasi-dikeluarkan-sepanjang-2022-bssn-bentuk-pencegahan-serangan

Buku ini tidak diperjualbelikan

Buku ini tidak diperjualbelikan

BAB 7

Menavigasi Kebijakan *Look East* melalui Diplomasi Biru

Baiq Wardhani, Sarah Anabarja, & Renatha A. Rossdiana

A. Kebijakan *Look East* Indonesia dalam Kerangka KSST

Tulisan ini menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mewujudkan kebijakan luar negeri *Look East* dengan memfungsikan diplomasi biru di wilayah regional Pasifik Selatan melalui skema Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular (KSST)[1]. Bentuk kerja sama ini merupakan inisiatif Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dan pembangunan bersama antara tiga pihak, yakni negara-negara berkembang, negara maju, dan institusi multilateral, mencakup berbagai bentuk bantuan, seperti pinjaman pembangunan, kerja

[1] Bantuan Indonesia ke Pasifik Selatan tidak selalu dalam bentuk KSST, ada juga bentuk bantuan bilateral langsung non-KSST.

B. Wardhani, S. Anabarja, & R. A. Rossdiana
Universitas Airlangga, *e-mail*: baiq.wardhani@fisip.unair.ac.id

© 2026 Editor & Penulis

Wardhani, B., Anabarja, S., & Rossdiana, R. A. (2026). Menavigasi Kebijakan Look East Dalam Diplomasi Biru. Dalam RR. E. Yustiningrum & E. S. Prihatini (Ed.), *Indonesia dalam Kancah Geopolitik di Indo-Pasifik* (233–271). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.2075.c1724
E-ISBN: 978-602-6303-98-1

Buku ini tidak diperjualbelikan

sama sektoral, dan bantuan teknis. Bantuan Indonesia ke Pasifik Selatan mencerminkan pendekatan yang holistik dan beragam, yang tidak hanya terbatas pada bantuan finansial, tetapi juga mencakup aspek-aspek, seperti pembangunan kapasitas, dukungan teknis, dan kerja sama sektoral (Wardhani & Dugis, 2020).

Kebijakan *Look East* adalah orientasi strategis Indonesia negara dalam memperkuat hubungan dan kerja sama dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Salah satu fokus utama kebijakan ini adalah isu kemerdekaan Papua. Sejak isu tersebut disuarakan lebih gencar oleh negara-negara Pasifik, Indonesia menggunakan bantuan sebagai alat diplomasi utama untuk menangkalnya. Secara umum, kebijakan ini mencerminkan upaya Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar dan membangun citra positif di antara negara-negara Pasifik (Wardhani & Dugis, 2020). Dalam mewujudkan Kebijakan *Look East*, Jakarta memanfaatkan diplomasi biru sebagai sarana mencapai kepentingan nasionalnya di Pasifik Selatan. Penulis menggunakan istilah diplomasi biru dalam esai ini untuk menyebut bentuk diplomasi yang berkaitan dengan kelautan, terutama isu kelautan yang bertujuan untuk memanfaatkan dan melestarikan sumber daya kelautan, termasuk dalam penciptaan berbagai inisiatif ekonomi berbasis laut. Sebagai negara maritim, sayangnya konsep ini belum terlalu dikenal di Indonesia, tetapi penggunaannya semakin popular di tingkat global akhir-akhir ini[2]. Popularitas ini tidak terlepas dari

[2] Diplomasi biru merupakan hasil dari serangkaian negosiasi perjanjian perdagangan dan investasi bilateral dan multilateral baru yang melibatkan negara-negara dari lima benua. Perjanjian internasional ini menghubungkan kembali negara-negara ekonomi kuat di dunia, baik yang tradisional maupun yang baru berkembang sehingga memberikan nilai tambah pada aspek diplomasi dengan memperluas skalanya hingga pada tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya (Gutu, 2016; Yadav, 2023). Bentuk diplomasi ini bertujuan untuk mengatasi tantangan seperti polusi, penangkapan ikan berlebihan, dan keamanan maritim untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan. Pentingnya diplomasi biru juga ditandai dengan berkumpulnya para pemimpin dunia di pertemuan tingkat tinggi *One Ocean* di Prancis, yang mereka telah berkomitmen mewujudkan kesehatan dan tata kelola kelautan. Pertemuan itu juga dihadiri oleh ilmuwan terkemuka, organisasi non-pemerintah (LSM),

Buku ini tidak diperjualbelikan

semakin tingginya kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem laut dari kerusakan. Bersama dengan ekonomi biru, diplomasi biru adalah sarana untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (*Sustainable Development Goals,* SDGs), khususnya Tujuan 14. Dengan demikian, ekonomi biru dan diplomasi biru menggunakan pendekatan holistik yang berorientasi menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kesehatan ekosistem laut dalam jangka panjang (Haque, 2021; Harrath, 2019; Islam, 2022).

Untuk menunjukkan perhatiannya yang meningkat di Pasifik Selatan, Indonesia membentuk Forum Pasifik Selatan Indonesia (*Indonesia South Pacific Forum*, ISPF) pada tahun 2019. Dengan menekankan prinsip manfaat dan saling menghormati, peran regional Indonesia dalam ISPF mencerminkan sikap Indonesia sebagai aktor regional penting dalam diplomasi di Pasifik Selatan. Diplomasi biru Indonesia di Pasifik Selatan merupakan strategi yang memiliki berbagai dimensi, termasuk dimensi politik, ekonomi, dan budaya. Indonesia melihat kawasan ini semakin penting karena semakin kompleksnya kepentingan kekuatan global yang dapat memengaruhi kepentingan Indonesia. Dengan menyadari kedekatan geografis dan budaya dengan Pasifik, Indonesia berupaya memperkuat hubungan melalui *Pacific Elevation* (Darmawan, 2022), visi yang diperkenalkan oleh Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, pariwisata, dan pertukaran budaya. Pendekatan diplomasi biru akan mampu mengafirmasi strategi *Pacific Elevation*. Baik ISPF maupun *Pacific Elevation* bertujuan untuk menciptakan momentum dan meningkatkan keterlibatan Indonesia dengan negara-negara Pasifik guna mengatasi tantangan bersama[3].

---

pembuat kebijakan, dan badan internasional, serta korporasi yang bergerak di bidang kelautan, seperti Maersk, CMA CGM, dan Hapag-Lloyd, yang kegiatan mereka mencakup hampir 55% angkutan laut dunia (TG, 2022).

[3] Konsep *Pacific Elevation* merupakan konsep yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia di tahun 2019 yang menekankan pada upaya Indonesia untuk semakin meningkatkan posisinya dalam kemitraan dengan negara-negara pasifik (Pugu, 2024; Wati, Apresian, & Dewi, 2021). Terdapat dua isu utama dalam Pacific Elevation ini yaitu isu kemerdakaan Papua Barat dan isu perdagangan. In-

Buku ini tidak diperjualbelikan

Sementara itu, negara-negara kepulauan Pasifik, yang secara global dikenal dengan sebutan "*small island developing states*" (SIDS)[4] telah mengubah penyebutan mereka menjadi "*large ocean island states*" (LOIS). Sebutan baru ini perlu untuk mengubah persepsi internasional dengan menegaskan identitas mereka sebagai negara yang memiliki zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang luasnya melebihi jumlah daratan. Pengubahan ini merupakan bagian dari strategi diplomatik untuk menegaskan kepentingan mereka dan memengaruhi kebijakan internasional, khususnya yang berkaitan dengan agenda terkait kelautan (Bernard et al., 2021; Chan, 2018; Wyeth, 2028). Sejak 2017, *Pacific Island Forum* (PIF) memperkenalkan konsep 'Pasifik Biru' (*Blue Pacific*) yang menjadi identitas kolektif mereka, yaitu memosisikan kembali mereka sebagai negara samudra luas. Konsep ini merupakan cara mereka menghadapi situasi yang ditandai oleh kerentanan bersama, terutama terkait perubahan iklim dan kelestarian lingkungan. *Blue Pacific* didasarkan pada gagasan bahwa negara-negara di Samudra Pasifik bukan hanya sekumpulan negara individual, tetapi mereka membentuk satu kesatuan yang saling terhubung secara geografis, budaya, dan menghadapi tantangan yang sama. Dengan

donesia ingin meningkatkan kehadirannya dengan meningkatkan perdagangan di Kawasan pasifik untuk meredam isu Papua merdeka. *Pacific Elevation* juga dapat dipahami melalui posisi Indonesia yang ingin lebih strategis di regional Asia Tenggara sebagai ekonomi yang semakin kuat bertumbuh (Kabutaulaka, 2020) sehingga penerapan *Pacific Elevation* ini, meliputi hampir semua bidang terutama pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi (Nugrahantya, 2021).

[4] *Small Island Developing States* (SIDS) di Pasifik terdiri dari dua belas negara bagian independen yang terletak di Pasifik barat dan tengah Lautan: Negara Federasi Mikronesia (FSM), Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Nauru, Palau, Papua Nugini (PNG), Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu. Selain itu, Kepulauan Cook dan Niue, berasosiasi bebas *(free association)* dengan Selandia Baru. Wilayah lainnya, Tokelau, bergantung pada Selandia Baru. Selanjutnya, ada sejumlah wilayah yang bergantung pada atau dalam asosiasi bebas dengan negara metropolitan di luar regional Pasifik, yaitu Perancis (Polinesia Perancis, Kaledonia Baru, Wallis, dan Futuna), Inggris (Kepulauan Pitcairn), dan Amerika Serikat (Samoa Amerika, Guam, dan Utara, dan Kepulauan Mariana) (Bernard et al., 2021).

Buku ini tidak diperjualbelikan

dasar persamaan ini, *Blue Pacific* didirikan untuk memfasilitasi kerja sama dan kolaborasi antara negara-negara kepulauan Pasifik yang menghadapi tantangan keamanan multidimensi, termasuk keamanan lingkungan dan strategis (Storey, 2024).

Melalui kolaborasi dalam *Blue Pacific*, mereka dapat mengatasi masalah mereka secara bersama-sama. Para pemimpin Pasifik menyadari pentingnya pendekatan terpadu dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatan keamanan regional (Storey, 2024). Selain itu, identitas kolektif *Blue Pacific* juga berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pengakuan global dan memastikan suara mereka didengar oleh para pemimpin dunia[5]. Keterlibatan Indonesia dalam *Blue Pacific* menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap prioritas kawasan dan komitmen untuk menyelaraskan upaya diplomasi dengan kepentingan negara-negara Pasifik. Dengan memanfaatkan posisinya sebagai negara Pasifik, Indonesia berkomitmen untuk mengintegrasikan kepentingan nasional dengan aspirasi negara-negara Pasifik Selatan karena Jakarta menghadapi persoalan yang kompleks dengan negara-negara Pasifik Selatan. Kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan yang berat ini akan sangat penting dalam membentuk peranannya sebagai aktor regional dan memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran Pasifik Selatan (Hutagalung, 2024).

Tulisan ini menjelaskan bagaimana diplomasi biru dapat memperkuat kehadiran Indonesia di Pasifik Selatan melalui KSST. Kami meyakini bahwa untuk memperkuat identitasnya di Pasifik, keterlibatan Indonesia dalam berbagai aspek di Pasifik Selatan sangatlah penting. Tanpa itu, identitas Pasifik Indonesia akan dianggap sebagai retorika politik belaka oleh negara-negara Pasifik. Diplomasi biru dapat menjadi titik awal utama untuk memperkuat

[5] Dalam konteks yang lebih luas, meningkatnya kehadiran negara-negara besar dan tingginya tingkat kejahatan transnasional di wilayah ini menjadikan *Blue Pacific* juga memiliki dimensi strategis, yaitu menjaga keamanan dan stabilitas regional (UNDP, 2022).

Buku ini tidak diperjualbelikan

keberadaan Indonesia di kawasan Pasifik. Diplomasi biru Indonesia terkait erat dengan *Look East Policy* yang memberikan prioritas pada hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan. Sebagai negara maritim, Pasifik Selatan menjadi subjek utama dalam isu-isu kelautan. Namun, Jakarta belum melihat hal ini sebagai kesempatan strategis untuk memperkuat posisinya di kawasan itu. Indonesia dapat menggunakan ISPF sebagai platform untuk kerja sama regional. Keberhasilan dalam memanfaatkan ISPF sebagai platform diplomasi biru akan memberikan dampak positif dalam memenuhi kebutuhan khusus negara-negara Pasifik Selatan serta meningkatkan kolaborasi dan kemitraan antara kedua belah pihak. Namun, tantangan yang dihadapi oleh diplomasi biru Indonesia tidaklah mudah. Selain menjadi kawasan yang menjadi titik api bagi kepentingan geopolitik aktor global dan regional, efektivitas diplomasi biru juga menghadapi tantangan yang berasal dari faktor internal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan mengenai kebijakan *Look East* melalui diplomasi biru dan juga dalam hubungannya dengan kerja sama Selatan-Selatan dengan level analisis negara. Pengumpulan datanya dilakukan melalui pengumpulan data sekunder berupa studi literatur dari berbagai sumber daring dan luring, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah populer, surat kabar, maupun sumber akademis lainnya. Sistematika tulisan ini meliputi pendahuluan lalu pembahasan mengenai diplomasi biru sebagai Instrumen Politik Luar Negeri *Look East.* Selanjutnya, dibahas mengenai keterlibatan Indonesia di Pasifik melalui Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular (KSST) lalu subbab yang menjelaskan mengenai bagaimana menyinergikan Kebijakan *Look East* melalui Diplomasi Biru dan KSST, dan diakhiri dengan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari bahan-bahan sekunder. Bahan-bahan ini didapat dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, *website* resmi pemerintah, dan organisasi internasional dengan tujuan untuk menemukan sumber yang paling relevan dan kredibel. Dengan bantuan internet, penulis berupaya menemukan materi tentang

Buku ini tidak diperjualbelikan

Kebijakan *Look East* yang relevan dengan pendekatan diplomasi biru dalam skema KSST.

B. Diplomasi Biru sebagai Instrumen Politik Luar Negeri *Look East*

Untuk memperoleh gambaran lebih jelas tentang Kebijakan Luar Negeri *Look East* Indonesia, diplomasi biru, dan Kerja Sama Selatan-Selatan, bagian ini menguraikan tiga konsep tersebut melalui telaah kepustakaan. Dinamika hubungan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik semakin berkembang dengan adanya politik luar negeri Indonesia yang berorientasi ke kawasan Pasifik, yang disebut Kebijakan *Look East*. Kebijakan ini dalam berbagai publikasi banyak dikaitkan dengan asal mula sejarah munculnya dan implementasinya di India yang dimaksudkan untuk menjalin hubungan dengan negara di Asia Tenggara (yang kemudian diperluas ke seluruh Asia Pasifik) serta membendung pengaruh berbagai negara besar seperti China (Fathullah, 2018; Sinaga et al., 2019). Namun, Prasetyo (2022) melihat bahwa Indonesia yang juga membuat kebijakan *Look East* merupakan bagian dari upayanya dalam menjaga hubungan dengan negara Pasifik Selatan dan dalam mempertahankan teritorinya, terutama terkait isu Papua. Kebijakan *Look East* ini dilakukan Indonesia melalui dua aspek, yaitu eksternal dengan menggunakan jalur diplomasi pertahanan, budaya, dan ekonomi termasuk pemberian bantuan luar negeri kepada negara-negara di Pasifik Selatan. Selain itu, kebijakan tersebut juga memprioritaskan kerja sama di level multilateral, trilateral, maupun bilateral dalam pembangunan di kawasan tersebut.

Terdapat empat pilar pembangunan kawasan Pasifik Selatan berdasarkan Kebijakan *Look East* Indonesia, yaitu keamanan, tata pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, dan pertumbuhan ekonomi. Empat hal tersebut berusaha dijaga oleh Indonesia karena sangat memengaruhi stabilitas politik ekonomi dan keamanan di Indonesia (Firmansyah, 2019). Kebijakan *Look East* merupakan bagian dari *repositioning* kebijakan luar negeri sekaligus

Buku ini tidak diperjualbelikan

untuk memperbaiki dan meningkatkan citra Indonesia di negara di Kawasan Pasifik. Kebijakan tersebut difokuskan untuk membangun kerja sama pembangunan dengan negara-negara Pasifik Selatan, seperti Kiribati, Fiji, Tuvalu, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Isu Kemerdekaan Papua juga menjadi diskursus utama di antara negara-negara Pasifik Selatan utamanya terkait eksploitasi etnis ras Melanesia (Prasetyo & Zahidi, 2022). Melalui kebijakan luar negeri ini, Indonesia berusaha untuk melakukan penguatan hubungan dengan negara-negara di Pasifik Selatan.

Keterlibatan Indonesia di berbagai forum termasuk *Indonesia South Pacific Forum* (ISPF) sangat penting dalam mempertahankan stabilitas kawasan dan pengaruh di kawasan (Buiney & Wambrauw, 2024). ISPF merupakan wadah bagi negara Pasifik Selatan dengan Indonesia yang juga bergabung di dalamnya untuk melakukan dialog dalam mendiskusikan masalah yang terjadi dan pemetaan solusi dan potensi kerja sama di masa depan (Marsudi, 2019). ISPF diluncurkan di tahun 2019 dengan tema *Our Future*, *Shared Ocean*, *Shared Prosperity* yang diikuti oleh 15 negara, yaitu Tuvalu, Tonga, Selandia Baru, Marshall Island, Nauru, Kiribati, Solomon Islands, Palau, New Caledonia, Fiji, Australia, Federated States of Micronesia, Cook Islands, dan Papua Nugini. Ruang lingkup pembahasan ISPF meliputi peningkatan peran dan kehadiran Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan, pembahasan isu perubahan iklim, kelautan, dan pembangunan area pesisir termasuk penguatan perdagangan (Wardhani, 2023). Dalam kesempatan tersebut, Indonesia membuka kerja sama bilateral yang cukup intensif dengan negara-negara Asia Pasifik yang ikut serta (Buiney & Wambrauw, 2024).

Politik Luar Negeri *Look East* lahir di tengah pergolakan geostrategi di kawasan Indo-Pasifik. Kawasan ini telah muncul sebagai titik fokus dinamika geopolitik global, dengan Samudra Hindia dan Pasifik berfungsi sebagai arena strategis bagi negara-negara besar untuk menegaskan pengaruh dan mengamankan kepentingan nasional mereka. Kawasan Indo-Pasifik telah mengalami pergeseran dinamika geopolitik, di mana pertimbangan maritim memainkan

Buku ini tidak diperjualbelikan

peran penting dalam membentuk kepentingan strategis suatu negara (Yadav, 2023). Diplomasi Biru mengacu pada penggunaan strategis kemampuan maritim, kebijakan, dan inisiatif ekonomi untuk mencapai tujuan nasional dan mempertahankan pengaruh dalam domain maritim. Konsep tersebut juga dapat dilihat sebagai kerangka untuk memahami dan menafsirkan kebijakan maritim, kepentingan ekonomi, dan aspirasi geopolitik di Indo-Pasifik (Yadav, 2023). Lebih lanjut, Salman (2015) menjelaskan bahwa diplomasi biru pada dasarnya menghormati prinsip-prinsip ekonomi biru dengan mengembangkan ekonomi dan perdagangan dalam mengeksploitasi sumber daya air alami mereka dan mengambil risiko konflik di laut dan samudra lintas batas. Diplomasi ini melibatkan negara-negara tetangga dalam menemukan dan mengeksploitasi secara adil modalitas kelautan dengan menekankan pada upaya perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan nasionalnya (Salman, 2015).

Diplomasi Biru[6] bisa dilihat sebagai konsep baru dalam mempromosikan keberlanjutan perairan di seluruh dunia dengan menerapkan berbagai alat kerja sama diplomasi ekonomi, keterampilan negosiasi multilateral, perdagangan internasional atas lautan, budi daya perikanan, pariwisata dan *branding* negara, serta peluang energi lepas Pantai. Sekali pun secara konseptual menjanjikan, diplomasi biru belum memiliki instrumen dukungan implementasi politik dan ekonomi yang seragam. Namun seiring dengan ekonomi hijau, praktik diplomasi biru mewakili masa depan hubungan perdagangan lintas samudra (Gutu, 2016).

Dalam penerapannya, diplomasi biru mencakup beberapa tujuan, seperti; dukungan dan penerapan hukum air internasional,

[6] Dalam implementasinya, Pohl (2014) mengungkapkan ada beberapa kerangka kerja sama global dalam diplomasi biru dengan beberapa wadah untuk kerja sama biru, seperti *United Nations Environment Program* (UNEP), *United Nations Development Program* (UNDP), United Nations (UN)-Water, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations* (UNESCO), *United Nations Economic Commission for Europe* (UNECE) Water Convention, *Water Cooperation Facility* dan *World Water Council*. Adapun bidang yang menjadi fokus, meliputi legal institusi, penguatan kapasitas, finansial, dan koordinasi politik.

Buku ini tidak diperjualbelikan

penggalangan dana dalam isu terkait sektor kelautan dan perairan, hingga penguatan *platform* institusional untuk kerja sama yang lebih koheren. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa diplomasi biru adalah versi baru dari diplomasi hijau, yang dikembangkan di perairan; atau diplomasi laut yang mengacu pada tindakan perdagangan terkait aktivitas kelautan di seluruh dunia, dan berfokus pada tindakan diplomasi di balik lingkungan ekonomi yang diciptakan, dengan memperkuat peran para aktor terkait dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Ide umumnya serupa dengan apa yang diusung oleh konsep ekonomi hijau, yaitu pengurangan risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi, hanya saja wilayah geografis yang dimaksud tidak permukaan tanah, melainkan permukaan air (Gutu, 2016).

Dalam terminologi yang berbeda, Prasetya dan Estriani (2018) memakai terminologi diplomasi maritim yang diinterpretasikan sebagai salah satu bentuk praktik politik luar negeri dengan tujuan memaksimalkan potensi kemaritiman suatu negara, untuk memengaruhi hubungan dengan negara lain dalam satu kawasan dalam memenuhi kepentingan nasional suatu negara berdasar hukum nasional mereka. Hal seperti ini telah diinisiasi oleh salah satu negara berpengaruh seperti Tiongkok. Melalui *Pingtan Declaration* misalnya, Tiongkok telah melibatkan SIDS dalam forum institusional yang membahas tentang *Blue Economy and Ecological Islands* pada tahun 2017 lalu (MFAPRC, 2022). Selain itu, sejak 2019 Tiongkok juga terlibat dalam KSS dengan menyelenggarakan pelatihan yang berkenaan dengan mitigasi perubahan iklim dan pembangunan rendah-karbon, serta membangun beragam infrastruktur pembangkit listrik bertenaga air di wilayah Pasifik Selatan (MFAPRC, 2022).

Potensi kelautan yang dimiliki Indonesia termasuk posisi geostrategis dan posisi geopolitiknya merupakan peluang besar dalam pengembangan ekonomi dan keamanan laut dengan diplomasi biru sebagai salah satu pilar penting dalam kebijakan kelautan di Indonesia (Yudilla & Amri, 2020). Indonesia melaksanakan setidaknya tiga bentuk diplomasi maritim, yaitu diplomasi maritim persuasif,

Buku ini tidak diperjualbelikan

diplomasi maritim kooperatif, dan diplomasi maritim koersif (Rijal, 2019). Indonesia lebih menerapkan diplomasi maritim kooperatif dan persuasif dalam melaksanakan diplomasi maritimnya dengan memfokuskan pada aspek persuasi, kerja sama, dan negosiasi. Dengan demikian maka diplomasi biru adalah diplomasi spesifik terkait kelautan dan dimensi diplomasi yang menjelaskan alat, teknik, dan strategi penguatan diplomasi ekonomi terkait ekonomi biru antarsesama negara pesisir. Namun, diplomasi biru bukanlah diplomasi ekonomi, budaya, atau geopolitik tradisional. Sebaliknya, diplomasi ini bersifat kontemplatif dengan melibatkan perairan, ekonomi, politik, pemahaman, dan perjanjian internasional, serta mengutamakan kepentingan bersama dalam hubungan multilateral dan hidup berdampingan dalam satu wilayah (Haque, 2021).

Konektivitas diplomasi biru merupakan agenda utama dan sangat diperlukan dalam upaya menumbuhkan aspek pertumbuhan ekonomi biru. Diplomasi biru tidak seperti diplomasi yang orientasinya konvensional maka diplomasi biru memerlukan perhatian dan keseriusan khusus. Agar diplomasi biru memiliki fungsi ekonomi yang maksimal, diperlukan pengembangan ekonomi biru yang sukses dan berkelanjutan secara riil. Oleh karenanya, setiap negara pesisir harus memperluas cakrawala konektivitas diplomasi biru sebagai instrumen yang sangat diperlukan secara internasional untuk pengembangan warna biru ekonomi untuk negara pantai atau pesisir mana pun. Negara-negara yang berstatus negara SIDS dan negara-negara berkembang pesisir harus memperkuat cakrawala diplomasi biru dan konektivitas mereka dengan memanfaatkan dan meningkatkan ekonomi biru yang mereka inginkan sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dari laut dan samudra mereka. Diplomasi biru merujuk pada banyak isu secara keseluruhan (Haque, 2021).

Sebagai sebuah platform baru, terdapat beberapa tantangan dalam melaksanakan diplomasi biru, seperti yang dikemukakan oleh Pohl et al. (2014), yaitu kurangnya *setting* institusional yang menghubungkan aktor penting dalam membuat suatu kerangka kerja sama di kawasan. Selain itu, juga tidak adanya peringatan dini

Buku ini tidak diperjualbelikan

yang sistemik dan terkoordinasi dalam mencegah konflik perairan. Masalah kapasitas terkait sumber daya manusia dan keuangan juga menjadi tantangan besar dalam kerja sama lintas batas perairan. Lebih lanjut, Pohl (2014) menyatakan, dalam diplomasi biru terkadang para pembuat kebijakan, meskipun mereka memiliki tujuan ekonomi dan keberlanjutan yang serupa, namun secara internasional sering kali mereka terfragmentasi dan tidak mempunyai kekuatan politik. Dalam skala global, diplomasi biru tidak memiliki dampak yang sama terhadap negara-negara bahkan di kawasan yang sama dalam kerangka kerja sama regional. Hal ini dikarenakan masalahnya jauh lebih kompleks dengan melibatkan kemitraan dan perjanjian internasional bilateral atau multilateral antarnegara (Gutu, 2016).

Dalam implementasi diplomasi biru, negara-negara dapat bekerja sama melalui skema KSST. Konferensi Bandung pada tahun 1955 menandai kerja sama antara negara-negara di selatan, yang merupakan langkah penting bagi negara-negara berkembang untuk bekerja sama dalam mencapai kemandirian kolektif. Kerja sama ini secara konkret ditujukan untuk berbagi pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya guna mengatasi tantangan pembangunan dan mendorong pertumbuhan bersama. Kerja sama ini telah berkembang dengan pesat sehingga menghasilkan berbagai bidang fokus yang disesuaikan untuk mengatasi tantangan unik yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Bidang-bidang ini meliputi pembangunan pertanian, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, hak asasi manusia, urbanisasi, kesehatan, dan peningkatan kapasitas dengan penekanan pada saling menguntungkan dan semangat solidaritas (UNDP, 2022). Sifat kooperatif dari kerja sama Selatan-Selatan sangat penting dalam memajukan Agenda SDGs 2030 dan mengatasi tantangan sosial-ekonomi yang kompleks yang melampaui batas negara (BPPK, 2016; Rinaldi, 2023). Kebutuhan untuk saling mendukung dalam berbagai sektor menyebabkan Kerja Sama Selatan-Selatan mengalami pergeseran paradigma dari yang awalnya berfokus pada kerja sama di level teknis, seperti pertukaran tenaga ahli, transfer teknologi, hingga pembangunan kapasitas menjadi kemitraan yang sifatnya mencakup sektor strategis dan komprehensif.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Kawasan Indo Pasifik merupakan salah satu kawasan penting percaturan global. Keterlibatan Indonesia secara konstruktif dan memberi solusi diplomatik atas berbagai masalah yang dihadapi terutama di Pasifik Selatan sangat penting untuk menjamin stabilitas dan kemakmuran di kawasan. Situasi geopolitik bersifat dinamis, dan pilihan yang diambil oleh berbagai negara yang terlibat akan membentuk lanskap Indo-Pasifik di masa depan. Skenario strategis yang berkembang di Indo-Pasifik tampaknya rumit dan berlapis-lapis. Kerangka normatif yang muncul dari inisiatif strategis dan ekonomi negara-negara besar dan organisasi regional secara idealis didorong oleh keinginan akan kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, berbasis aturan, inklusif, dan bebas dari segala cara koersif (Yadav, 2023). Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan kerangka diplomasi maritim kooperatif dalam berbagai forum. Indonesia melakukan berbagai diskusi dan negosiasi dengan negara-negara terutama di lingkup ASEAN untuk mengarah pada *outlook* kerja sama maritim di kawasan Indo-Pasifik (Khoirunissa & Aryani, 2021).

Kerangka kerja sama Selatan-Selatan memberi peluang bagi Indonesia untuk berpartisipasi dan meningkatkan perhatiannya ke Pasifik Selatan. Perhatian yang lebih besar ke wilayah ini menandai pergeseran dalam politik luar negeri Indonesia, menjadikan Pasifik Selatan sebagai salah satu prioritas setelah selama lebih dari tiga dekade sebagai kawasan marginalnya. Bagi Indonesia, kerja sama Selatan-Selatan dan diplomasi biru merupakan bagian integral dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dua inisiatif ini mendorong kolaborasi internasional untuk mengatasi permasalahan global berdasarkan pemahaman dan kepentingan bersama. Menggabungkan kerja sama Selatan-Selatan untuk mewujudkan dan memfasilitasi diplomasi biru dapat menghasilkan respons yang lebih terkoordinasi dan efektif terhadap tantangan-tantangan pembangunan dan pengelolaan lingkungan yang saling terkait.

Di lingkup Indo-Pasifik, Indonesia melakukan berbagai kemitraan yang sifatnya tidak hanya bilateral tetapi juga multilateral, seperti

Buku ini tidak diperjualbelikan

Indonesia *Maritime Partnership Initiative* bersama Singapura, China, Korea Selatan, Jepang, dan India, serta *Heads of Asian Coast Guard Agency Meeting* (HACGAM) (Indrawati & Nugroho, 2019). Pada bulan Mei 2018, Indonesia menyampaikan konsep mengenai Pasifik Selatan dengan tiga elemen kuncinya, yaitu membangun lingkungan yang mendukung hukum internasional dan penyelesaian sengketa secara damai, mengatasi tantangan transnasional seperti terorisme dan pembajakan, serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Samudra Hindia dan Pasifik Selatan dalam upaya penciptaan sistem perekonomian yang terbuka dan adil (Choong, 2019). Pada tahun 2022, dilaksanakan *Indonesia-Pacific Forum for Development* (IPFD) yang pertama bertempat di Bali. IPFD ini bisa saja diindikasikan bahwa Indonesia mempunyai komitmen dalam semakin meningkatkan kerja sama di kawasan Pasifik. Indonesia semakin meningkatkan kerja sama dengan Pasifik dengan visi *Pacific Elevation*. Sebelumnya, di tahun 2019, Indonesia menyelenggarakan *Indonesia South Pacific Forum* dan *Pacific Exposition* pada 2021. Dalam hal kerja sama ekonomi kelautan berkelanjutan, dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti hubungan antarmasyarakat, membuat platform pembangunan yang komprehensif dan inklusif, serta membuka peluang kerja sama pembangunan tanpa terkecuali. Indonesia juga berkeinginan untuk melakukan penjajakan terhadap berbagai modalitas kerja sama termasuk kerja sama triangular (KLNRI, 2022).

Pasifik Selatan merupakan salah satu fokus Indonesia dalam menjalin hubungan kerja sama Selatan-Selatan. Walaupun banyak dinamika yang terjadi, Indonesia tetap mempertahankan hubungan yang strategis melalui kerja sama di berbagai bidang termasuk kelautan. Forum Indonesia Pasifik Selatan selain membahas kerja sama untuk mewujudkan kawasan yang sejahtera dan damai, juga menyelenggarakan *Pacific Exposition* (PE) kedua. Pameran PE kedua dilaksanakan secara virtual pada 27 hingga 30 Oktober 2021 dengan nilai transaksi yang meningkat 30% dibandingkan PE pertama, yakni 1,48 triliun dolar atau 104,1 juta dolar AS. PE ini mencakup pameran pariwisata, perdagangan, dan investasi (Buiney &

Buku ini tidak diperjualbelikan

Wambrauw, 2024). Pasifik Selatan sekarang menjadi arena persaingan strategis. Banyak hal telah berubah dalam beberapa dekade sejak Perang Dunia Kedua. Saat ini, Samudra Pasifik adalah rumah bagi empat belas negara berdaulat kebijakan luar negeri yang independen dan memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing (Morgan, 2020). Negara-negara Pasifik Selatan menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya alamnya, menangani kejahatan transnasional, melindungi kedaulatannya, dan mengelola ancaman lingkungan laut, serta bahaya alam (Bergin et al., 2019).

Indonesia, sebagai salah satu aktor regional di Indo-Pasifik, berdasarkan jumlah penduduknya dan faktor geopolitik, mempunyai kebutuhan akan penegakan hukum internasional, penyelesaian sengketa secara damai, serta perlunya konektivitas dan keamanan maritim di wilayah Indo Pasifik terutama Pasifik Selatan. Dari berbagai literatur, diskursus mengenai konsep diplomasi biru, utamanya dalam kerja sama Selatan-Selatan masih kurang mempunyai ruang diskusi sehingga tulisan ini, bisa menjadi salah satu alternatif dalam memandang kebijakan *Look East* Indonesia di wilayah Pasifik Selatan melalui kerja sama Selatan-Selatan utamanya dalam aspek diplomasi biru.

C. Keterlibatan Indonesia di Pasifik melalui Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular (KSST)

Indonesia dan posisinya sebagai salah satu negara '*global south*' telah berkontribusi dalam beragam kerangka kerja sama utamanya kerja sama Selatan-Selatan. Bertitik tolak semangat Konferensi Asia-Afrika di Bandung 69 tahun yang lampau, Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan profilnya dalam beragam isu global. Sebagai bagian dari kerangka kerja sama Selatan-Selatan, Indonesia juga aktif menjalin kerja sama dalam Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular (KSST). KSST sendiri telah menjadi prioritas utama dari kebijakan luar negeri Indonesia sebagaimana teragendakan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) (BAPPENAS, 2024). Dalam kerangka ini, Indonesia juga telah menunjukkan upaya untuk meningkatkan

Buku ini tidak diperjualbelikan

profilnya sebagai '*the rising middle power*'. Dengan profil tersebut, Indonesia berupaya untuk menguatkan identitasnya dalam diplomasi global, khususnya pada negara-negara 'selatan'.

Meski awalnya posisi Indonesia dalam KSST ini adalah resipien/penerima bantuan, tetapi sejak 2003 Indonesia telah meningkatkan statusnya sebagai negara berpendapatan menengah (Trinidad, 2014). Peningkatan status ini menjadi aspirasi bagi Indonesia untuk mengakselerasi profil internasionalnya dalam beragam agenda pembangunan global. Kusumaningprang (2017) berpendapat bahwa meski Indonesia memiliki kapabilitas material yang cenderung terbatas, tetapi dalam beberapa hal Indonesia juga menunjukkan kemampuannya dalam menghasilkan ide dan mengupayakan aktivisme diplomatik yang mumpuni. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kepercayaan dan partisipasi Indonesia sebagai *co-host* dalam Konferensi Pemimpin Pembangunan (*Development Leaders Conference,* DLC) VI di Oslo pada Oktober 2023 lalu (KSPRI, 2023). Sejalan dengan peran terkininya dalam DLC tersebut, Indonesia tengah menunjukkan eksistensinya dalam beragam kerja sama pembangunan internasional sebagai '*new emerging donor*' dan '*southern provider*'. Dalam posisinya sebagai '*new emerging donor*' inilah, Indonesia perlu untuk menginisiasi kerja samanya dengan target untuk membangun citra yang lebih positif secara bertahap dan berkelanjutan (BAPPENAS, 2011).

Kerangka KSST dianggap amat menguntungkan bagi Indonesia yang termasuk dalam jajaran negara donor non-tradisional. Negara donor non-tradisional ini terdiri atas negara-negara dengan pendapatan menengah (*Middle Income Countries*, MICs) yang masuk dalam daftar penerima bantuan pembangunan asing (*Overseas Development Assistance*, ODA). Robledo (2015) menyatakan bahwa negara-negara MICs tersebut juga sekaligus sedang menapakkan perannya sebagai negara donor. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemudian KSST menjadi salah satu format kerja sama andalan bagi Indonesia dengan negara-negara selatan, utamanya dalam bidang politik, ekonomi, sosiokultural, dan teknikal.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Sumber daya KSST umumnya berasal dari partner triangular Indonesia, yang terdiri dari negara-negara maju dan organisasi internasional[7] (BAPPENAS, 2011). Adapun pengelolaan dan koordinasi KSST Indonesia dimotori oleh Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional (KSPI) pada Kementerian Luar Negeri yang berperan sebagai Tim koordinasi Nasional KSS (Tim Kornas KSS) sejak tahun 2017 (KSPRI, 2023)[8]. Sementara itu, Kementerian lainnya juga terlibat dalam Tim Kornas, antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, juga Kementerian Pelaksana Pembangunan Nasional/Bappenas (KSPRI, 2023).

Adapun prioritas relasi diplomatik yang ditekankan oleh Indonesia tentu bukan hanya pada wilayah regional Asia Tenggara. Sebagai salah satu negara kepulauan yang sebagian teritorialnya termasuk dalam wilayah Pasifik, Indonesia juga memprioritaskan lingkaran konsentriknya di kawasan ini (KLNRI, 2013). Dalam cetak biru, KSS juga termaktub bahwa komunitas regional dan sub-regional di kawasan Pasifik, seperti *South West Pacific Dialogue* (SwPD) dan *Pacific Islands Forum* (PIF) adalah prioritas bagi kerja samanya (BAPPENAS, 2011).

Wilayah ini menjadi semakin penting bagi Indonesia, sebab hubungan antara Indonesia dan negara-negara di kawasan ini tidak selalu dalam kondisi yang stabil. Salah satu isu yang sering kali mewarnai relasinya dengan negara Pasifik Selatan adalah mengenai isu Papua. Hingga, Indonesia merasa perlu untuk memelihara hubungannya dengan negara-negara tersebut. Santarita (2002) mencatat bahwa Indonesia perlu untuk memitigasi dan mengomunikasikan beragam

---

[7] Beberapa partner kerja sama triangular tersebut antara lain; Jepang (*Japan International Cooperation* Agency, JICA), *Islamic Development Bank* (IDB), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jerman (*Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit*, GIZ), *United States Agency for International Development* (US-AID), *United Nations Development Program* (UNDP), Bank Dunia, dan lainnya (BAPPENAS, 2011).

[8] Kementrian lainnya juga terlibat dalam Tim Kornas antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementrian Keuangan, juga Kementerian Pelaksana Pembangunan Nasional/Bappenas (KSPRI, 2023).

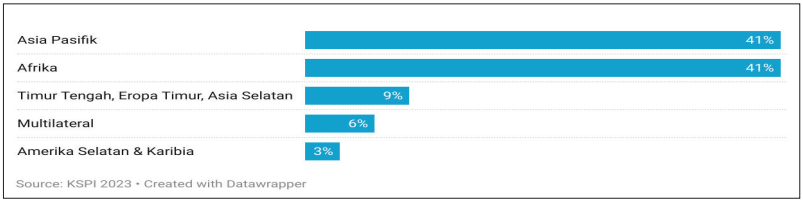
Buku ini tidak diperjualbelikan

hal, khususnya setelah Timor Leste memisahkan diri pada tahun 1999. Selain itu, Indonesia juga memiliki kepentingan untuk menjembatani kawasan Pasifik dengan rekan-rekannya di ASEAN. Hal ini serupa dengan apa yang dikemukakan oleh (Webb-Gannon & Elmslie, 2014) bahwa untuk meyakinkan negara-negara Pasifik agar bekerja sama lebih erat dengan Jakarta adalah dengan memberikan janji untuk membuka pintu gerbang kemakmuran ekonomi Asia melalui Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Pamasiwi dan Arsyani (2019) mengemukakan bahwa memberikan prioritas kepada negara-negara di Pasifik memiliki kepentingan strategis untuk menciptakan citra positif di antara mereka. Mengingat letak geografis Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik, tindakan geostrategis Jakarta sangat bergantung pada dinamika regional. Hal ini sejalan dengan pendekatan '*dynamic equilibrium*' yang pernah diungkapkan oleh Menteri Natalegawa. Melalui rencana geostrategis ini Indonesia berkontribusi pada pembentukan tatanan regional di tengah meningkatnya persaingan antara AS dan China di Indo-Pasifik (Mubah, 2019).

Kerja sama dengan negara Pasifik tercatat semakin intensif sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melalui terbentuknya Forum Dialog Pasifik Barat Daya (*Southwest Pacific Dialogue*, SwPD). Dalam forum ini, Indonesia memulai intensifikasi diplomasinya dengan 5 negara Pasifik lainnya, yakni Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Filipina, juga Timor Leste (BPPK, 2016)[9]. Kajian yang sama juga mencatat bahwa program kerja sama Indonesia pada wilayah tersebut berfokus pada bantuan teknik yang berupa program peningkatan kapabilitas, seperti program magang dan pelatihan, serta bantuan tenaga ahli. Di samping itu terdapat pula bantuan beasiswa dan hibah peralatan pendidikan.

[9] Menyusul kemudian beragam kegiatan lain dalam kerangka KSST yang melibatkan lebih banyak negara-negara Pasifik seperti Fiji, Vanuatu, serta Solomon Islands.

Buku ini tidak diperjualbelikan



Sumber: KSPRI (2023)

Gambar 7.1 Porsi Hibah RI pada Pemerintah/Lembaga Asing

Sebagai bagian dari perwujudan upaya penguatan citranya sebagai '*new emerging donor*', Indonesia mengimplementasikan berbagai kerja sama hibah dalam kerangka KSST. Dalam laporan capaian KSST 2023 mencatat bahwa selain Afrika, negara-negara di kawasan Asia-Pasifik menjadi rekan terbesar dalam perjanjian hibah KSST Indonesia (Gambar 7.1). Dari 13 total realisasi perjanjian hibah kawasan Asia-Pasifik, 11 di antaranya melibatkan negara-negara di kawasan Pasifik, dan organisasi multilateralnya, yakni *Melanesian Spearhead Group* (MSG) (Tabel 7.1). Jika dilihat dari data capaian kerja sama KSST Indonesia dengan mitra Pasifiknya, tampak bahwa mayoritas realisasi kerja samanya berupa program pelatihan teknik yang berfokus pada keterampilan administratif, kesehatan, dan pertanian (KSPRI, 2023). Hal ini memang sesuai dengan kesepakatan Agenda Pembangunan Doha (*Doha Development Agenda*, DDA) yang memfokuskan pada aspek jasa, pertanian, dan akses pasar non-agrikultur.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Tabel 7.1 Realisasi Program Kerja Sama Hibah KSST Indonesia di Pasifik Selatan Tahun 2023

No	Program	Nominal Hibah (dalam rupiah)	Mitra	Jumlah Kerja Sama
1	Program magang aparatur sipil lintas K/L	4.484.129.100	Timor Leste	5
2	Program magang aparatur sipil di Kemendag	1.230.672.300		
3	Pelatihan teknis klasifikasi barang, nilai pabean, dan *rules of origin* TLCA	1.632.089.400		
4	Pelatihan Eksekutif : *Customs Modernization* untuk pegawai TLCA	450.343.120		
5	Pelatihan standar akuntansi pemerintah dan swasta	2.079.880.616		
6	Program desain teknik Rumah Sakit Umum Port Moresby	5.759.135.114	Papua Nugini	2
7	Program pembangunan *Integrative West Sepik*	5.001.631.813		
8	Studi awal pembangunan Pusat Pelatihan pertanian regional raki-raki	4.333.721.535	Fiji	1
9	Program pelatihan budaya ayam broiler	4.516.760.600	Kepulauan Solomon	1
10	Hibah kendaraan operasional MSG	2.140.710.000	MSG	2
11	Pelatihan tahap lanjutan di bidang perikanan	1.568.611.946		
Total Kerja Sama Hibah		33.197.685.544		11

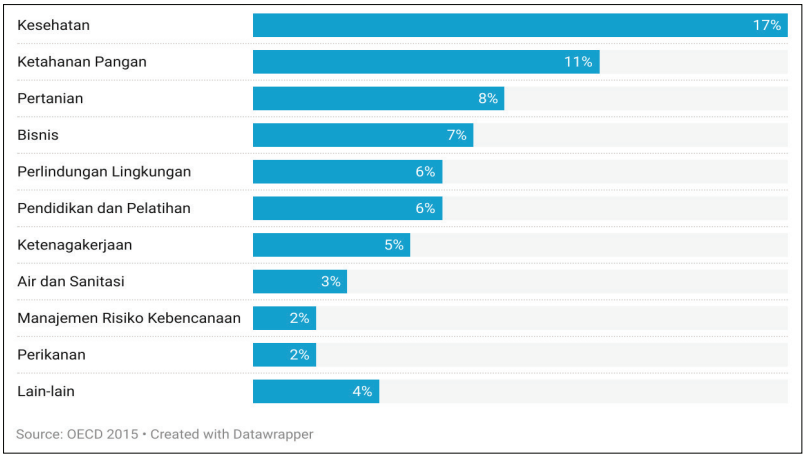
Sumber: IndonesianAid (2023); KSPRI (2023)

Buku ini tidak diperjualbelikan

Seperti telah diketahui bahwa keterlibatan Indonesia dalam KSST menyasar tujuan besar berupa kemandirian bersama bagi negara-negara mitra, utamanya negara-negara selatan. Meski sejak awal inisiasinya, KSST Indonesia ini telah menekankan prinsip *demand-driven* bagi negara mitra, akan tetapi dalam beberapa program bantuan ternyata masih nampak penekanannya pada bantuan-bantuan teknikal yang bersifat pengayaan kapasitas pertanian (Tabel 7.1). Padahal, jika merujuk pada cetak birunya, tahun 2024 ini Indonesia seharusnya perlu menyasar beberapa target yang makin menunjukkan komprehensivitas dari KSST guna mewujudkan tujuan kemandirian bersama negara-negara selatan (BAPPENAS, 2011). Hal yang tentunya tidak lepas dari prioritas nilai KSST yang juga menekankan aspek kepemilikan (*ownership*) dari program (BAPPENAS, 2011). Hingga seharusnya kecenderungan untuk menambah keragaman jenis kerja sama KSST perlu dilakukan oleh Indonesia agar koheren dengan perkembangan isu-isu baru yang mengikuti dinamika global, seperti salah satunya isu perubahan iklim dan penyertanya.

Laporan survei dari OECD (2016) menemukan bahwa mayoritas kerja sama dan program KSST di negara-negara SIDS justru tidak terkait berkenaan dengan mitigasi atau adaptasi perubahan iklim. Alih-alih berkaitan langsung dengan kerentanan SIDS terhadap perubahan iklim, program KSST yang ditargetkan pada SIDS paling banyak terkait dengan pemerintahan dan sektor publik (29%). Disusul kemudian dengan program kesehatan (17%), ketahanan pangan (11%), pertanian (8%), dan bisnis (7%) (Gambar 7.2).

Buku ini tidak diperjualbelikan



Sumber: OECD (2016)

Gambar 7.2 Bidang Kerja Sama KSST di SIDS

Jika ditilik secara makro, sebenarnya jumlah kerja sama dalam KSST dengan di kawasan Pasifik ini belum sedominan negara-negara di kawasan Karibia. Tercatat bahwa program KSST pada negara-negara kawasan Pasifik hanya terdiri atas 26% saja (OECD, 2016). Ini jauh dari jumlah program KSST di Karibia yang mencapai 66% (OECD, 2016). Guna menyikapi hal tersebut, sebenarnya Indonesia harus mulai memaksimalkan perannya sebagai negara kepulauan terbesar di Pasifik (KLNRI, 2021). Meski intensitas kerja sama dalam upaya diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik telah rutin dilakukan setidaknya dua tahun sekali melalui program *Pacific Exposition*, tetapi perlu juga mengiringinya dengan pendekatan lain. Hal ini amat perlu dilakukan sebagai bentuk keseriusan Indonesia untuk keluar dari anggapan bahwa segala macam program dan kerja sama yang ditawarkan Indonesia pada negara-negara Pasifik tidak lebih dari sekadar retorika belaka (Wangge, 2023).

Dalam artikel ini, penulis berargumen bahwa diperlukan pendekatan yang lebih menekankan perspektif maritim dalam berhubungan dengan negara-negara di Pasifik ini. Pendekatan

Buku ini tidak diperjualbelikan

kemaritiman penting digunakan untuk memosisikan Indonesia sebagai mitra terdekat bagi negara-negara Pasifik yang hampir seluruhnya merupakan negara dengan mayoritas wilayah berupa perairan. Ini sekaligus dapat memperteguh komitmen KSST Indonesia pada negara-negara Pasifik yang menekankan nilai kepemilikan (*ownership*). Apalagi hasil survei OECD (2016) pada SIDS menyimpulkan bahwa salah satu hal yang memotivasi negara-negara tersebut untuk turut serta dalam KSST adalah kemiripan budaya dan keselarasan pandangan. Dalam hal ini, upaya penerapan diplomasi biru dalam program KSST di negara-negara Pasifik, seharusnya menjadi amat relevan bagi Indonesia yang juga merupakan negara dengan wilayah maritim yang luas.

Bercermin dari data KSST, Indonesia pada negara-negara Pasifik yang selama ini mayoritas masih berfokus pada program pelatihan aparatur sipil dan pertanian agraris (Gambar 7.2). Pada tahun 2023 misalnya, hanya terdapat 1 program yang berkaitan dengan perikanan yang menargetkan pada negara-negara anggota MSG, dengan total hibah sekitar 1,5 miliar rupiah (IndonesianAid, 2023). Jumlah ini jauh dari jumlah total realisasi hibah KSST Indonesia ke wilayah Pasifik yang mencapai 33,2 miliar rupiah (IndonesianAid, 2023). Dari data tersebut, terdapat kesan bahwa Indonesia belum terlalu menampakkan perspektifnya sebagai negara maritim. Padahal, sebagai bagian dari negara yang mengidentifikasikan diri sebagai negara Pasifik, Indonesia memiliki isu dan tantangan yang serupa dengan negara-negara di Pasifik. Isu-isu sensitif yang terkait dengan dampak perubahan iklim, polusi air, manajemen kebencanaan, perikanan, dan manajemen infrastruktur pesisir, adalah beberapa permasalahan yang kerap kali menjadi tantangan bagi negara kepulauan. Inilah yang menjadikan beberapa kalangan masih beranggapan bahwa identitas Indonesia sebagai negara maritim masih sekadar terbatas pada retorika saja.

Dengan demikian, sudah saatnya Indonesia bergeser dari perspektif agraris menuju perspektif maritim melalui diplomasi biru. Hal ini sekaligus dapat menjadi langkah strategis Indonesia untuk menavigasi relasinya dengan negara-negara Pasifik di tengah rivalitas

Buku ini tidak diperjualbelikan

Amerika Serikat dan China di kawasan ini. Sebagai negara *middle power* yang relatif memiliki keterbatasan dalam kapabilitas materi, pergeseran pendekatan ini adalah langkah efektif bagi Indonesia. Dengan menerapkan diplomasi biru dalam KSST, Indonesia tengah menunjukkan kapabilitasnya dalam aktivisme diplomatik dengan menjaring kekuatan-kekuatan kecil dan menengah lainnya di kawasan Pasifik melalui ide dan identitas kemaritimannya. Di samping itu, dengan menggunakan pendekatan maritim, program-program KSST Indonesia lebih berpotensi efektif bagi semua pihak—donor dan resipien. Dalam hal ini, setidaknya Indonesia dapat mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Australia melalui kebijakan *Pacific Engagement* yang di antaranya berfokus pada kerja sama kelautan yang berkelanjutan dan pendampingan sektor perikanan (DFAT, n.d.).

D. Mensinergikan Kebijakan *Look East* melalui Diplomasi Biru dan KSST

Salah satu tujuan awal KSST adalah "mengalahkan hegemoni negara maju" terhadap negara berkembang (Engel, 2019; Gray & Gills, 2016) sehingga menciptakan keseimbangan kekuatan yang lebih adil di tingkat internasional. Berdasarkan hal tersebut maka proyek-proyek dalam KSST yang diarahkan ke Pasifik Selatan mencakup berbagai inisiatif yang dirancang untuk memperkuat ketahanan dan pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut. Diplomasi biru yang menjadi fokus perwujudan Kebijakan *Look East* menekankan pentingnya penguatan kerja sama di bidang kelautan mengingat tantangan yang ada, seperti perubahan iklim, bencana alam, dan keamanan sumber daya laut. Bagian ini mengupas tentang apakah pentingnya meletakkan diplomasi biru dengan menyinergikan KSST dalam Kebijakan *Look East*.

Pertama, KSST secara signifikan mendukung diplomasi biru Indonesia dengan membina kemitraan dan berbagi pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya di antara negara-negara berkembang, khususnya di sektor maritim. Kolaborasi ini sejalan dengan RPJMN Indonesia 2020–2024, yang menekankan pentingnya Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dalam mencapai prioritas nasional dan tujuan

Buku ini tidak diperjualbelikan

pembangunan berkelanjutan (BAPPENAS, 2020). Kolaborasi ini dapat terwujud karena membaiknya perekonomian Indonesia sehingga mendorong pemerintah untuk berperan aktif mempromosikan kerja sama horizontal di antara negara-negara berkembang sebagai penyedia donor dalam kelompok non-DAC (*Development Assistance Committee*). Sekalipun Indonesia masih menerima bantuan luar negeri, sejak kurang lebih dua dekade ini Indonesia bekerja sama dengan negara maju dan lembaga internasional untuk menyalurkan dana ke negara-negara Pasifik (Sari, 2022). Penyaluran dana ini merupakan bentuk partisipasi Indonesia pada kebutuhan pembangunan di Pasifik, sekaligus menjadi instrumen bagi membangun dan memperbaiki citra internasional Jakarta di wilayah itu. Seperti diketahui bahwa Kepulauan Pasifik adalah wilayah yang paling bergantung pada bantuan luar negeri, yang kondisi ini mendorong persaingan geopolitik untuk mendapatkan pengaruh di antara negara-negara donor sehingga memicu tingginya bantuan pembangunan[10]. Sekalipun dari segi kuantitas tidak sebanding dengan jumlah yang diberikan oleh donor utama, alokasi dana bantuan Indonesia ke luar negeri yang diarahkan kepada negara-negara Pasifik Selatan mencapai 26%, dan ini pun tidak berkaitan langsung dengan kerja sama kelautan. Dana tersebut disalurkan melalui *Indonesian Agency for International Development* (IndonesianAid) yang didirikan pada tahun 2019 (Wahyudi, 2021). Namun, patut menjadi perhatian bahwa sebagian besar aliran bantuan ditujukan ke Afrika.

Kedua, melalui KSST, Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan dapat bekerja sama dalam proyek-proyek mitigasi dan adaptasi

[10] Peneliti Lowy Institute mencatat terdapat 14 negara penerima utama di kawasan Kepulauan Pasifik, yaitu Kepulauan Cook, Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Negara Federasi Mikronesia (Mikronesia), Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini (PNG), Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu. Secara keseluruhan, wilayah ini menerima lebih dari $40 miliar ODF antara tahun 2008 dan 2021. Australia merupakan pendonor utama, diikuti oleh Bank Pembangunan Asia, China, Selandia Baru, dan Jepang. Australia adalah donor terbesar di Pasifik, sekitar 40% dari total *Official Development Finance* (ODF) (Dayant et al. 2023).

Buku ini tidak diperjualbelikan

perubahan iklim, yang merupakan bagian penting dari kerangka kerja UNFCCC. Sesuai dengan rencana strategis Indonesia dalam adaptasi dan mitigasi iklim (KLHKRI, 2018), KSST dipandang sebagai elemen kunci untuk rencana aksi iklim negara-negara Pasifik Selatan dan Indonesia yang dikenal sebagai *Nationally Determined Contributions (NDCs)* (UNCCS, n.d.). Dalam konteks Pasifik yang menghadapi ancaman tenggelamnya negara mereka, KSST menekankan pentingnya aksi kolektif dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait aksi iklim (SDG 13), kehidupan di bawah air (SDG 14), dan kehidupan di darat (SDG 15). Dalam kaitan ini, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) mengakui peran KSST dalam mempercepat aksi iklim.

Kebijakan *Look East* yang berfokus ke kawasan Pasifik Selatan, bersinggungan dengan permasalahan perubahan iklim dalam beberapa hal. Selain bertujuan untuk membina hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi, Kebijakan *Look East* juga mempunyai implikasi lingkungan. Sebagai penghasil emisi gas rumah kaca dan perubahan penggunaan lahan, Indonesia menyadari pentingnya mengatasi perubahan iklim untuk menjaga stabilitas dan pembangunan regional (WB, 2023). Selain itu, pendekatan Indonesia terhadap perubahan iklim, khususnya dalam transisi menuju perekonomian rendah karbon dan berketahanan iklim, sangat penting bagi negara-negara Pasifik Selatan, yang sebagian besar merupakan negara kepulauan kecil yang rentan terhadap dampak iklim[11].

Ketiga, diplomasi biru Indonesia dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan potensi kerja sama ekonomi yang terganggu karena perubahan iklim. Indonesia dan negara-negara

[11] Bagi negara-negara Pasifik Selatan, transisi Indonesia menuju perekonomian rendah karbon, sangat penting. Isu perubahan iklim mendominasi mendominasi agenda KTT PIF ke 50 di Funafuti, Tuvalu, 13–16 Agustus 2019, yang dihadiri Indonesia sebagai mitra dialog PIF. Pada pertemuan itu, PIF mengesahkan *Kainaki II Declaration for Urgent Climate Change Action* dan sepakat untuk menyusun 2050 *Strategy for the Blue Pacific Continent* (KLNRI, 2019). Agenda PIF ini selaras dengan Kebijakan *Look East* yang memberi bantuan kepada negara-negara Pasifik berperan penting dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Pasifik Selatan memiliki kesamaan status sebagai negara kepulauan yang rentan perubahan iklim sehingga dapat berdampak pada sektor perekonomian. Berangkat dari persoalan ini, terdapat kaitan erat antara diplomasi biru dengan ekonomi biru karena keduanya menekankan pentingnya tata kelola laut yang berkelanjutan dan kerja sama ekonomi. Dengan berfokus pada ekonomi biru (yang mencakup industri berbasis kelautan, perikanan berkelanjutan, dan pariwisata maritim) (Faizasyah, 2019), Indonesia dapat menunjukkan komitmennya terhadap sektor kelautan yang menguntungkan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini juga dapat menunjukkan keselarasan dengan narasi *Blue Pacific*, yang memprioritaskan isu-isu lingkungan dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan persaingan geopolitik (Goh, 2023). Ketidakberpihakan Indonesia dalam persaingan geopolitik di Indo-Pasifik dapat menjadi poin penting bagi negara-negara Pasifik Selatan untuk menaruh kepercayaan yang lebih tinggi pada Indonesia. Atas dasar ini maka diplomasi biru Indonesia berpotensi membangun kembali kepercayaan dan membangun hubungan yang lebih kuat dan tangguh dengan negara-negara tetangga di Pasifik Selatan. Inisiatif Indonesia dalam ISPF dan *Pacific Exposition* serta kontribusinya pada lembaga multilateral, seperti *Our Ocean*, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai bagian dari negara Pasifik yang asertif [12].

Keempat, sesuai dengan misi diplomasi biru, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan langsung dalam memastikan bahwa isu-isu seperti kenaikan permukaan air laut dan pengelolaan sumber daya laut ditangani dengan pendekatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Pada bulan Oktober 2023, Indonesia menjadi tuan rumah KTT *Archipelagic and Island States* (AIS) Forum 2023 sehingga memungkinkan Indonesia untuk memimpin diskusi dan inisiatif regional yang dapat mendukung kebijakan luar negeri dan

[12] Pada konferensi *Our Ocean* pada tahun 2022, Indonesia memberi tiga komitmen pada konferensi tersebut, yakni membangun enam *Aquaculture Village*; Menetapkan dua juta hectares *Marine Protected Area* (MPA) baru; dan menyediakan dana sebesar US$ 73,3 juta untuk kegiatan pengawasan kelautan dan perikanan dan menerapkan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat untuk memerangi penangkapan ikan yang merusak lingkungan (Rony, 2022).

Buku ini tidak diperjualbelikan

keamanan maritimnya. KTT ini juga dihadiri sejumlah negara Pasifik Selatan serta perwakilan organisasi regional di kawasan itu, yaitu *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dan *Pacific Island Forum* (PIF) (KPEKRI, 2023). Pertemuan ini merupakan salah satu mekanisme yang menyinergikan kebijakan luar negeri *Look East* dengan *Blue Pacific*. Forum diplomasi multilateral ini menjadi ajang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dengan negara-negara Pasifik Selatan dengan cara mempertajam strategi dalam menghadapi isu-isu kelautan global, khususnya perubahan iklim, yang merupakan tantangan signifikan bagi negara-negara kepulauan. Pembahasan AIS Forum 2023 berfokus pada empat isu, yakni mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah laut, dan tata kelola maritim yang baik (Pramudyani, 2023)[13].

Untuk mendukung diplomasi biru dalam kerangka KSST, Indonesia telah mendedikasikan dana sejumlah JPY 20,7 miliar (sekitar US$ 150 juta) untuk program-program konservasi laut dan ekonomi biru. Inisiatif ini dikenal dengan *Indonesian Sovereign Blue Bond* (Obligasi Biru Negara Indonesia) yang diluncurkan pada Mei 2023 (UNDP, 2023; UNSDG, 2023). Inisiatif ini secara langsung berkontribusi terhadap tujuan Forum AIS[14]. Fokus kegiatan ini adalah pada konservasi dan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir yang berkelanjutan sejalan dengan kebutuhan Pasifik Selatan, di mana

[13] Salah satu kegiatan pendamping KTT AIS 2023 yang mendukung keberlangsungan diplomasi kelautan adalah diselenggarakannya "*AIS Startup Blue Business Summit*". Pertemuan ini adalah platform bagi para *bluepreneur* untuk tumbuh dan terhubung dengan pemangku kepentingan terkait kelautan, inovator teknologi kelautan, dunia usaha, perwakilan bisnis, dan calon investor (KPEKRI, 2023).

[14] Dampak obligasi ini tidak hanya memberikan manfaat langsung terhadap lingkungan, tetapi juga meningkatkan peluang ekonomi dan penghidupan berkelanjutan bagi ketahanan jangka panjang masyarakat Pasifik Selatan secara inklusif. Hasil penerbitan obligasi ini pembiayaannya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif berbasis kelautan, seperti perlindungan pesisir, pengelolaan perikanan dan budi daya perairan yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati laut, dan rehabilitasi mangrove (UNDP, 2023).

Buku ini tidak diperjualbelikan

laut merupakan sumber makanan, pendapatan, dan identitas budaya yang penting. Berdasarkan narasi ini dapat dilihat keterkaitan antara KTT AIS Forum 2023 dan Obligasi Biru Negara Indonesia dalam mendukung diplomasi biru dan Kebijakan *Look East*. Indonesia dapat menciptakan kemitraan strategis dan memperkuat posisinya sebagai pemain kunci dalam isu-isu kelautan antarnegara kepulauan. Langkah ini tidak hanya membuat diplomasi biru tidak hanya memiliki fungsi lingkungan, tetapi juga memiliki fungsi ekonomi, yaitu pengentasan kemiskinan.

Upaya menyinergikan politik luar negeri *Look East* melalui instrumen diplomasi biru dengan memanfaatkan skema KSST bukan tanpa tantangan. Indonesia telah mengambil banyak langkah penting untuk upaya tersebut tetapi belum maksimal karena Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal. Sementara faktor eksternal seperti kompleksitas geopolitik dan kepentingan ekonomi global yang dapat memengaruhi kebijakan dan prioritas nasional, merupakan hal yang sulit untuk dikontrol. Sementara itu, faktor internal menyangkut sumber daya dan kapasitas institusional yang terbatas dapat menghambat upaya diplomasi. Lebih jauh, perlu adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung inisiatif diplomasi biru.

E. Penutup

Keterlibatan Indonesia di Pasifik Selatan merupakan wujud peningkatan peran Indonesia di kancah internasional dan keinginannya untuk dipandang sebagai kekuatan regional yang asertif dan bertanggung jawab. Menavigasi politik luar negeri *Look East* dengan menggunakan instrumen diplomasi biru melalui kerangka KSST bertujuan memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan kepentingan kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan global, yang sejalan dengan tujuan SDGs. Indonesia telah melakukan upaya-upaya yang bertujuan mengimplementasikan apa yang menjadi target politik luar negerinya, yang hal ini mencerminkan pengakuan Indonesia atas sifat saling terkait

Buku ini tidak diperjualbelikan

antara faktor iklim, kerja sama, stabilitas, dan pertumbuhan bersama. Sebagai negara maritim, Indonesia dapat memaksimalkan perannya dalam kerja sama biru dengan negara-negara Pasifik Selatan. Melalui inisiatif seperti KSST dan pembentukan *Indonesian Aid*, Indonesia memberikan hibah, bantuan teknis, dan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara Pasifik Selatan agar kawasan ini kondusif sebagai kawasan yang stabil dan bersahabat. Secara ekonomi, kawasan ini juga dapat dikondisikan sebagai investasi bagi stabilitas ekonomi masa depan dan pasar potensial. Keberhasilan memaksimalkan peran itu tergantung pada sejumlah faktor, yaitu internal dan eksternal.

Efektivitas dan penerimaan bantuan Indonesia berkaitan dengan dinamika regional di Pasifik Selatan. Beberapa negara Pasifik telah menyatakan keprihatinannya atas hambatan yang melekat pada bantuan tersebut. Keterlibatan Indonesia di Pasifik mendapat apresiasi sekaligus menuai kritik karena sifat bantuan yang mampu memengaruhi opini politik atas isu kemerdekaan Papua. Keberhasilan diplomasi ini bergantung pada kemampuan Indonesia untuk menampilkan diri sebagai mitra yang memberi nilai tambah bagi komunitas Pasifik. Diplomasi Indonesia dituntut mampu menavigasi kompleksitas persoalan berbagai pandangan yang bertolak belakang ini. Selain itu, dalam implementasi diplomasi biru di Pasifik Selatan, Indonesia juga berhadapan dengan negara-negara berpengaruh lainnya di kawasan ini, yang semuanya memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang signifikan di Pasifik Selatan, seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan China.

Kerja sama Indonesia dengan Pasifik Selatan selama ini lebih banyak dilakukan di sektor non-kelautan yang tidak secara langsung mendukung keberhasilan diplomasi biru, yang hal ini dapat menjadi evaluasi bagi para pengambil keputusan. Orientasi *land-based*, bukan *ocean-based*, masih mendominasi bantuan Indonesia ke Pasifik Selatan. Hal ini mencerminkan kurangnya perhatian Indonesia kepada persoalan kelautan sehingga dukungan terhadap upaya total dan kesinambungan diplomasi biru perlu ditinjau lebih serius. Bantuan yang diberikan kepada Pasifik sama besarnya dengan bantuan kepada

Buku ini tidak diperjualbelikan

negara-negara Afrika. Tanpa mengurangi arti penting Afrika, tidak nampak bahwa bantuan ke Pasifik berorientasi kelautan.

Di bawah skema KSST yang melibatkan FAO, bantuan Indonesia ke Pasifik Selatan masih berfokus pada bantuan pertanian mengingat tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Pasifik adalah ketahanan pangan. Basis sumber alamnya yang terbatas, terutama negara-negara kepulauan kecil menyebabkan keamanan pangan yang rendah. Sebagian negara kepulauan memperoleh sumber makanan dari impor berupa makanan kaleng dari negara terdekat, seperti Australia dan Selandia Baru. Konsumsi makanan kaleng ini menyebabkan persoalan kesehatan yang pelik, seperti obesitas, gangguan jantung, diabetes, dan penyakit degenaratif lainnya. Oleh karena itu, bantuan pertanian masih menjadi prioritas Indonesia pada saat ini. Bantuan pertanian dapat menjadi langkah awal dari bantuan yang dapat memperkuat komitmen pada pengembangan ekonomi biru. Fakta ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan Indonesia ke negara-negara Pasifik lebih didasarkan pada kepentingan untuk mewujudkan agenda nasional Indonesia, yaitu menarik simpati negara-negara Pasifik untuk mendukung integritas teritorial dan memperbaiki citra global Indonesia (*donor-driven*). Agar tidak terjebak pada retorika politik tersebut, bantuan luar negeri harus didasarkan pada pemberdayaan, kepemilikan, dan keterlibatan aktor lokal.

Luasnya perairan Indonesia menjadi signifikan bagi kuatnya peran yang dijalankan. Untuk mengafirmasi posisinya sebagai negara kelautan, Indonesia dapat menyinergikan Kebijakan *Look East* dengan Pasifik Selatan melalui Diplomasi Biru dengan memanfaatkan skema Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular. Beberapa inisiatif yang dapat dilakukan Indonesia, di antaranya sebagai berikut.

1) Mengembangkan kerja sama triangular sebagai mitra yang saat ini sedang gencar mempromosikan ekonomi biru dan diplomasi biru, seperti India yang telah menunjukkan pergeseran dari *Look East Policy* menjadi *Act East Policy*.
2) Memanfaatkan identitasnya sebagai bagian dari Pasifik, Indonesia dapat menjalin kerja sama kelautan melalui pendekatan sosial

Buku ini tidak diperjualbelikan

budaya sambil memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara Pasifik Selatan, misalnya dalam bentuk kemitraan dalam bidang pendidikan melalui pemberian beasiswa kepada para pemuda Pasifik tentang kemaritiman.

3) Sebagai negara yang berpengaruh dalam multilateralisme di tingkat regional, Indonesia dapat menginisiasi pertemuan regional dan multilateral, seperti ASEAN dan G20, untuk memfasilitasi dialog dan kerja sama yang lebih luas dengan negara-negara Pasifik Selatan.

Lebih jauh, Indonesia dapat memanfaatkan kepemimpinan dan sentralitasnya dalam ASEAN untuk lebih menyinkronisasi kepentingan Indonesia dengan Pasifik Selatan. Ketidakterlibatan Indonesia dalam persaingan AS dengan China di Indo-Pasifik dapat menjadi peluang untuk berperan strategis, mengingat negara-negara Pasifik Selatan juga tidak ingin terbawa dalam arus persaingan geopolitik global. Inisiatif Indonesia, seperti *Pacific Elevation*, *Indonesia-South Pacific Forum*, dan *Indonesia–Pacific Forum for Development* merefleksikan komitmen Indonesia untuk berperan lebih asertif.

Referensi

BAPPENAS. (2011). *Republik Indonesia laporan studi kerja sama selatan-selatan (draf grand design dan cetak biru)*. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).

BAPPENAS. (2020, March 12). Bappenas dorong pembangunan inklusif melalui kerja sama selatan-selatan dan triangular [Press release]. Retrieved from https://bappenas.go.id/id/berita/bappenas-dorong-pembangunan-inklusif-melalui-kerja sama-selatan-selatan-dan-triangular

BAPPENAS. (2024, January 16). Minister suharso emphasizes the role of south-south and triangular partnerships to address global uncertainty [Press release]. Retrieved from https://www.bappenas.go.id/en/berita/menteri-suharso-ungkap-peran-kerja-sama-selatan-dan-triangular-untuk-atasi-ketidakpastian-global-QSGJf

Buku ini tidak diperjualbelikan

Bergin, A., Brewster, D., & Bachhawat, A. (2019). *Ocean horizons. strengthening maritime security in Indo-Pacific Island States*. Australian Strategic Policy Institute (ASPI).

Bernard, L., Petterson, M., Schofield, C., & Kaye, S. (2021). Securing the limits of large ocean states in the pacific: Defining baselines limits and boundaries amidst changing coastlines and sea level rise. *Geosciences*, *11*(394), 1–20. Doi:https://doi.org/10.3390/geosciences11090394

BPPK. (2016). *Kerja sama selatan-selatan sebagai instrumen kebijakan luar negeri Indonesia*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional, BPPK, Kementerian Luar Negeri.

Buiney, M. E., & Wambrauw, M. S. F. (2024). Indonesia's interests in the pacific region. *Jurnal Multidisiplin Madani*, *4*(3), 376–390. Doi:https://doi.org/10.55927/mudima.v4i3.8028

Chan, N. (2018). "Large Ocean States": Sovereignty, small islands, and marine protected areas in global oceans governance. *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations*, *24*(4), 537–555. Doi:https://doi.org/10.1163/19426720-02404005

Choong, W. (2019). The return of the Indo-Pacific strategy: An assessment. *Australian Journal of International Affairs*, *73*(5), 415–430. Doi:10.1080/10357718.2019.1639134

Darmawan, A. R. (2022, September 13). Why Indonesia's engagement with Pacific countries matters. *The Interpreter*. Retrieved from https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/why-indonesia-s-engagement-pacific-countries-matters

Dayant, A., Duke, R., De Gorostiza, G., & Rajah, R. (2023). *Lowy Institute Pacific Aid Map. 2023 Key Finding Report*. Sydney, Australia: Lowy Institute.

DFAT. (n.d.). *Australia and the Pacific. Supporting Sustainable Oceans and Livelihood*. https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/supporting-sustainable-oceans-and-livelihoods.pdf

Engel, S. (2019). South–south cooperation in Southeast Asia: From Bandung and Solidarity to Norms and Rivalry. *Journal of current Southeast Asian affairs*, *38*(2), 218–242. Doi:10.1177/1868103419840456

Faizasyah, T. (2019, March 30). Indonesian diplomacy: Finding the right balance. *The Jakarta Post*. Retrieved from https://www.thejakartapost.com/academia/2019/03/30/indonesia-foreign-policy-indo-south-pacific.html

Buku ini tidak diperjualbelikan

Fathullah, M. (2018). *Dari Look East ke Act east : Arti penting perubahan kebijakan luar negeri india terhadap negara-negara Asia Tenggara.* (Bachelor Thesis). Airlangga University.

Firmansyah, R. H. (2019). *Kepentingan Indonesia dalam meningkatkan status keanggotaannya di melanesian spearhead group (msg) menjadi associated member tahun 2015.* (Bachelor Thesis). Brawijaya University.

Goh, D. L. (2023). Climate change and geopolitics in the blue pacific. *RSIS Commentary*, (177), 1–4.

Gray, K., & Gills, B. K. (2016). South–South cooperation and the rise of the Global South. *Third World Quarterly*, *37*(4), 557–574. Doi:10.1080/01436597.2015.1128817

Gutu, I. (2016). The transatlantic blue diplomacy. *CES Working Papers*, *8*(4), 666–680.

Haque, M. R. (2021, July 1–4). *Blue diplomacy of Bangladesh: Connectivity, capabilities, and challenges.* Paper presented at the 3rd International Conference on Research in Business, Management, and Finance.

Harrath, N. (2019, April 3). Diplomats dive into the world of blue diplomacy. Retrieved from https://www.clingendael.org

Hutagalung, S. (2024, April 25). Navigating Indonesia's relations in South Pacific for 2024 – OpEd. *Eurasia Review*. Retrieved from https://www.eurasiareview.com/25042024-navigating-indonesias-relations-in-south-pacific-for-2024-oped/#google_vignette

IndonesianAid. (2023). *Laporan kinerja tahun 2023. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional*. https://ldkpi.kemenkeu.go.id/api/Medias/99a96a3e-4a57-4dfd-8099-12ecb3b9a4de

Indrawati, I., & Nugroho, A. Y. (2019). Penerapan prinsip politik luar negeri Indonesia melalui diplomasi maritim [The Implementation of Indonesian Foreign Policy through Maritime Diplomacy]. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)*, *10*(20), 14–26. Doi:http://dx.doi.org/10.19166/verity.v10i20.1462

Islam, M. S. (2022). The blue economy diplomacy of Bangladesh: Concepts, contexts and practices1. *Journal of Bangladesh and Global Affairs*, *01*(02), 35–64. doi:https://doi.org/10.55875/jbga.bd.oct22.002

Kabutaulaka, T. (2020, January 13). Indonesia's "Pacific elevation": Elevating what and who? *Griffith Asia Insights*. Retrieved from https://blogs.griffith.edu.au/asiainsights/indonesias-pacific-elevation-elevating-what-and-who/

Buku ini tidak diperjualbelikan

Khoirunissa, L., & Aryani, M. I. (2021). Diplomasi Maritim Indonesia dalam perumusan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, *3*(2), 44–70. doi:https://doi.org/10.25077/fetrian.3.2.44-70.2021

KLHKRI. (2018, March 13–15). *NDC Indonesia and Its Implementation Strategy*. https://sustainabledevelopment.un.org/content/unosd/documents/390902_PL5_Presentation%20Mataerial_Yulia%20Suryanti.pdf

KLNRI. (2013, February 28). Laut China Selatan [Press release]. https://kemlu.go.id/portal/id/read/101/halaman_list_lainnya/laut-china-selatan

KLNRI. (2019, August 16). Indonesia perkuat kerja sama perubahan iklim dengan pasifik pada KTT PIF ke-50 di Tuvalu [Press release]. https://kemlu.go.id/portal/id/read/533/berita/indonesia-perkuat-kerja-sama-perubahan-iklim-dengan-pasifik-pada-ktt-pif-ke-50-di-tuvalu

KLNRI. (2021, October 27). Speech by the minister of foreign affairs of the republic of Indonesia during the opening ceremony of pacific exposition on 27 October 2021 titled it's time for the pacific, pacific exposition 2021. Pemulihan Ekonomi [Press release]. https://kemlu.go.id/wellington/id/news/17036/opening-pacific-exposition-2021-its-time-for-the-pacific-pacific-exposition-2021-upaya-pemulihan-ekonomi

KLNRI. (2022, December 7). Press briefing Menlu RI Indonesia Pacific forum for development (IPFD) Bali, 7 Desember 2022 [Press release]. https://kemlu.go.id/portal/id/read/4231/siaran_pers/press-briefing-menlu-ri-indonesia-pacific-forum-for-development-ipfd-bali-7-desember-2022

KPEKRI. (2023, October 8). Press release AIS forum summit 2023: AIS forum realizes innovative solution for sustainable future of Ocean [Press release]. https://kemenparekraf.go.id/en/articles/press-release-ais-forum-summit-2023-ais-forum-realizes-innovative-solution-for-sustainable-future-of-ocean

KPEKRI. (2023, October 10). Siaran pers KTT AIS forum 2023: Daftar kepala negara dan delegasi yang menghadiri KTT AIS forum 2023 [Press release]. https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-ktt-ais-forum-2023-daftar-kepala-negara-dan-delegasi-yang-menghadiri-ktt-ais-forum-2023

Buku ini tidak diperjualbelikan

KSPRI. (2023). *Laporan kinerja (LK) sekretariat kantor staf presiden tahun anggaran 2023*. https://ksp.go.id/wp-content/uploads/2024/07/Laporan-Kinerja-2023_s.pdf

Kusumaningprang, R. M. (2017). The roots and evolution of Indonesia's middle power activism. *The Indonesian Quarterly*, *45*(2), 152–179.

Marsudi, R. L. P. (2019, March 21). New era of Indonesia-South Pacific engagement. *The Jakarta Post*. https://www.thejakartapost.com/academia/2019/03/21/new-era-of-indonesia-south-pacific-engagement.html

MFAPRC. (2022, May 24). Fact sheet: Cooperation between China and Pacific Island countries [Press release]. Retrieved from https://www.mfa.gov.cn/eng/zy/gb/202405/t20240531_11367460.html

Morgan, W. (2020). Oceans apart? considering the Indo-Pacific and the Blue Pacific. *Security Challenges*, *16*(1), 44–64.

Mubah, A. S. (2019). Indonesia's double hedging strategy toward the United States-China competition: Shaping regional order in the Indo-Pacific? *Issues and studies - Institute of International Relations*, *55*(4), 1940007. Doi:10.1142/S1013251119400071

Nugrahantya, A. S. (2021). *Pacific elevation 'engagement': Strategi Indonesia terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dalam menghentikan gerakan separatis di Papua Barat*. (Bachelor Thesis). Diponegoro University.

OECD. (2016). *Annual report of Indonesia's South-South and triangular coorperation (SSTC) 2016*. https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12315719.pdf

Pamasiwi, R. M., & Arsyani, N. R. (2019). *Beyond Indonesia's sustainable movement in South Pacific area: Study case on pilot projects for Timor Leste and Fiji*. Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Indonesia (UI).

Pohl, B., Carius, A., Conca, K., Dabelko, G., Kramer, A., Michel, D., Schmeier, S., Swain, A., & Wolf, A. (2014). *The rise of hydro-diplomacy. Strengthening foreign policy for transboundary waters*. German Federal Foreign Office in cooperation with Adelphi

Pramudyani, Y. D. (2023, October 11). Indonesia ajak negara AIS Forum bersama hadapi tantangan global. *Antara News*. Retrieved from https://www.antaranews.com/berita/3767418/indonesia-ajak-negara-ais-forum-bersama-hadapi-tantangan-global

Buku ini tidak diperjualbelikan

Prasetya, D. M., & Estriani, H. N. (2018). Diplomasi maritim Indonesia dalam Indian Ocean rim association (IORA): Peluang dan tantangan. *Insignia: Journal of International Relations*, *5*(2), 96–108. doi:https://doi.org/10.20884/1.ins.2018.5.2.1390

Prasetyo, H., & Zahidi, M. S. (2022). Diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik Selatan dalam rangka menjaga kedaulatan Papua. *Journal of Diplomacy and International Studies*, *5*(02), 15–22.

Pugu, M. R. (2024). Era baru kemitraan Indonesia-Pasifik. Mungkinkah Papua menjadi hub dalam kerangka diplomasi Indonesia di Pasifik. *Journal of Syntax Literate*, *9*(5). Doi:10.36418/syntax-literate.v9i5.15342

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika. (2019). Connecting the Connectivity in the Indo-Pacific: Indian Ocean and Rim Chapter. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri.

Rijal, N. K. (2019). Smart maritime diplomacy: Diplomasi maritim Indonesia menuju poros maritim dunia. *Jurnal Global & Strategis*, *13*(1), 63–78. Doi:https://doi.org/10.20473/jgs.13.1.2019.63-78

Rinaldi, P. N. (2023, August 12). The vital role of south-south cooperation and its importance for the summit of the future. *Global Governance Forum*. Retrieved from https://globalgovernanceforum.org/vital-role-south-south-cooperation-importance-summit-of-the-future/

Robledo, C. (2015). New donors, same old practices? south-south cooperation of Latin American emerging donors. *Journal of the Global South*, *2*(1), 3. doi:10.1186/s40728-014-0008-0

Rony, T. K. (2022, April 16). Our Ocean Conference 2022: Indonesia komitmen lindungi laut dari kerusakan. *Liputan 6*. Retrieved from https://www.liputan6.com/global/read/4939884/our-ocean-conference-2022-indonesia-komitmen-lindungi-laut-dari-kerusakan

Salman, A. (2015). *Blue diplomacy: Transboundary water governance from a foreign policy lens. Policy Brief*. Heinrich Böll Stiftung.

Santarita, J. (2002). Southwest Pacific dialogue: Indonesia's newest leverage in the Asia Pacific. *Asian Studies*, *38*(2), 121–135.

Sari, L. N. (2022, June 1). Diplomasi Indonesia kepada negara-negara berkembang melalui official development assistance (ODA). *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Retrieved from https://setkab.go.id/diplomasi-indonesia-kepada-negara-negara-berkembang-melalui-official-development-assistance-oda/

Buku ini tidak diperjualbelikan

Storey, V. (2024). What is the "Blue Pacific" and why is it important? Retrieved from https://www.pln.com.au/single-post/what-is-the-blue-pacific-and-why-is-it-important

TG. (2022, February 8). World leaders descend on France for ocean summit as Macron puts spotlight on seas. *The Guardian*. Retrieved from https://www.theguardian.com/environment/2022/feb/08/blue-diplomacy-france-summit-puts-worlds-spotlight-on-oceans

Trinidad, D. D. (2014). South-South Cooperation in Southeast Asia and the Role of Japan. *VRF Series*, (489), 1–89.

UNCCS. (n.d.). *Catalysing the implementation of nationally determined contributions in the context of the 2030 agenda through south-south cooperation*. https://unfccc.int/files/resource_materials/application/pdf/ssc_ndc_report.pdf

UNDP. (2022). *Pacific SIDS. Blue Economy Initiative. Building Sustainable and Resilient Ocean Futures for Pacific SIDS*. United Nations Development Program (UNDP).

UNDP. (2023, June 26). Indonesia luncurkan sovereign blue bond pertama di dunia yang ditawarkan kepada publik – dengan dukungan UNDP [Press release]. Retrieved from https://www.undp.org/indonesia/blog/indonesia-luncurkan-sovereign-blue-bond-pertama-di-dunia-yang-ditawarkan-kepada-publik-dengan-dukungan-undp

UNSDG. (2023, July 13). Indonesia launches the world's first publicly offered sovereign blue bond [Press release]. Retrieved from https://unsdg.un.org/latest/stories/indonesia-launches-world's-first-publicly-offered-sovereign-blue-bond

Wahyudi, N. A. (2021, October 22). Kucurkan bantuan bagi kawasan pasifik US$18 Juta, RI ingin perkuat perdagangan. *Bisnis.com*. Retrieved from https://ekonomi.bisnis.com/read/20211022/12/1457254/kucurkan-bantuan-bagi-kawasan-pasifik-us18-juta-ri-ingin-perkuat-perdagangan

Wangge, H. (2023, August 31). Indonesia's commitment to the pacific needs to go beyond rhetoric. *The Diplomat*. Retrieved from https://thediplomat.com/2023/08/indonesias-commitment-to-the-pacific-needs-to-go-beyond-rhetoric/

Wardhani, B. (2023). From Jakarta to Oceania: Indonesia's cultural diplomacy with the South Pacific. *Journal of Asian Security and International Affairs*, *10*(1), 47–64. Doi:10.1177/23477970231152011

Buku ini tidak diperjualbelikan

Wardhani, B., & Dugis, V. (2020). Interpreting Indonesia's "Look East" Policy: The Security Dimension of Foreign Aid. *Issues & Studies*, *56*(03), 2040010. Doi:10.1142/s101325112040010x

Wati, V. O., Apresian, S. R., & Dewi, E. A. (2021). Indonesia's foreign policy in pacific island countries during Joko Widodo era 2014–2019: An adaptive action? *Global & Strategis*, *15*(1), 1–24. doi:https://doi.org/10.20473/jgs.15.1.2021.1-24

WB. (2023). *Indonesia. Laporan iklim dan pembangunan negara*. World Bank.

Webb-Gannon, C., & Elmslie, J. (2014). MSG headache, West Papuan headache? Indonesia's Melanesian foray. *Asia Pacific Journal: Japan Focus*, *12*(47), 3-1-3-23.

Wyeth, G. (2028, October 30). Paying attention to the blue pacific. *The Diplomat*. https://thediplomat.com/2018/10/paying-attention-to-the-blue-pacific/#:~:text=The%20concept%20of%20the%20"Blue%20Pacific"%20is%20an,"large%20ocean%20states%2C"%20rather%20than%20"small%20island%20states."

Yadav, A. (2023). Navigating the Blue Diplomacy: Indo-Pacific Oceans and the Geopolitical Chessboard of India and China. *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, *5*(6), 1–8. Doi:10.36948/ijfmr.2023.v05i06.11472

Yudilla, A., & Amri, P. (2020). Analisa SWOT kebijakan poros maritim global di wilayah Kepulauan Riau. *Nation State: Journal of International Studies*, *3*(2), 230–240. Doi:https://doi.org/10.24076/NSJIS.2020v3i2.360

Buku ini tidak diperjualbelikan

Buku ini tidak diperjualbelikan

BAB 8

Menavigasi Arus Zaman: Posisi Indonesia di Tengah Persaingan dan Perubahan

RR Emilia Yustiningrum & Ella Syafputri Prihatini

Bab ini menyintesis bab-bab sebelumnya untuk menyajikan analisis holistik mengenai posisi strategis Indonesia pada sebuah persimpangan krusial. Argumen utamanya adalah bahwa meskipun Indonesia telah dengan mahir menavigasi arus geopolitik eksternal melalui strategi *hedging*, kedaulatan strategis jangka panjangnya makin ditantang oleh konsekuensi domestik yang mendalam dari pilihan-pilihan ekonominya dan defisit tata kelola yang persisten. Bab ini diakhiri dengan menawarkan rekomendasi untuk jalan ke depan yang lebih berkelanjutan dan tangguh.

RR. E. Yustiningrum & E. S. Prihatini
Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: emilia.yustiningrum@gmail.com

© 2026 Editor & Penulis

Yustiningrum, RR., E. & Prihatini, E. S. (2026). Menavigasi Arus Zaman: Posisi Indonesia di Tengah Persaingan dan Perubahan. Dalam RR. E. Yustiningrum & E. S. Prihatini (Ed.), *Indonesia dalam Kancah Geopolitik di Indo-Pasifik* (273–292). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.2075.c1725
E-ISBN: 978-602-6303-98-1

Buku ini tidak diperjualbelikan

A. Menakar Peran Aktor

Di kawasan Indo-Pasifik, setidaknya terdapat 32 negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Berbagai negara tersebut merupakan pelaku yang aktif dalam dinamika politik, ekonomi, dan keamanan di kawasan. Interaksi antarnegara tersebut terjadi pada berbagai level mulai dari bilateral, regional, dan multilateral. Bahkan muncul kecenderungan saat ini yang berupa minilateral yang merupakan kumpulan beberapa negara di kawasan Indo-Pasifik yang secara intensif bertemu, berdiskusi, merancang kerja sama, bahkan merespons salah satu isu penting di kawasan. Dalam konteks minilateral di Indo-Pasifik, berbagai negara yang tergabung di dalamnya tidak lagi berjuang secara bilateral, atau menggunakan organisasi regional seperti ASEAN, maupun organisasi multilateral, seperti PBB, tetapi berkelompok dalam skala kecil untuk membahas dinamika di kawasan. Setidaknya terdapat tiga kelompok minilateral di kawasan Indo-Pasifik, yaitu Quad, AUKUS, dan BRI.

Kelompok pertama adalah negara-negara yang tergabung ke dalam dialog keamanan yang dikenal dengan nama *Quadrilateral Security Dialogue* (*Quad*) yang terdiri atas Amerika Serikat (AS), Australia, Jepang, dan India. Quad adalah dialog keamanan dan belum merupakan organisasi multilateral yang mapan dalam arti memiliki dasar perjanjian, markas besar, dan anggaran. Pada awalnya Quad dibentuk sebagai respons berbagai negara ini terhadap tsunami yang terjadi di Samudra Hindia pada tahun 2004. Anggota-anggota Quad ini saling membantu untuk membangun wilayah yang porak-poranda akibat tsunami tahun 2004. Strategi AS ke kawasan Indo-Pasifik sebenarnya sudah dimulai masa Presiden Barack Obama pada tahun 2011 melalui kebijakan *pivot to Asia*, yang dilanjutkan dengan *Rebalance to Asia*, membangun kemitraan ekonomi melalui *Trans-Pacific Partnership* (TPP) ketika Hillary Clinton sebagai Menteri Luar Negeri AS (WH, 2015). AS mengeluarkan *National Security Strategy* (NSS) masa Donald Trump (Ramadhan & Yustiningrum, 2024, 17). Joseph Biden tahun 2022 memperkenalkan *Indo-Pacific Strategy* (IPS) untuk promosi gagasan *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP),

Buku ini tidak diperjualbelikan

implementasi *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF), dan merespon isu keamanan non-tradisional seperti COVID-19 (Li, 2023, p. 4).

Australia merupakan salah satu pelopor Quad pada tahun 2004. Setelah melewati masa pasif selama kurang lebih satu dekade, Australia mulai menunjukkan perhatian terhadap kawasan Indo-Pasifik. Hal ini terjadi ketika pemerintahnya mengeluarkan *Australian Defence White Paper* tahun 2016 yang menyatakan wilayahnya sebagai *Indo-Pacific strategic arc* (DD, 2013). Bagi Australia, kawasan Indo-Pasifik yang ideal memegang prinsip penyelesaian konflik secara damai, penghormatan hak semua bangsa, dan pendukung pasar bebas (DFAT, 2017, 4). Namun demikian, Australia tidak tergesa-gesa dalam mendukung AS untuk melawan Tiongkok di kawasan, tetapi tetap memegang prinsip pragmatisme karena Tiongkok masih merupakan mitra dagang yang penting bagi Australia (Taylor, 2020).

Sementara itu, Jepang melalui Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe mulai menyuarakan perspektifnya mengenai Indo-Pasifik. Dalam pidato yang berjudul *Confluence of the Two Seas* pada tahun 2007, Shinzo Abe menekan perluasan Asia di mana Jepang memiliki tanggung jawab untuk mendukung serta memastikan keamanan dan kesejahteraan di kawasan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia (Abe, 2007). Selanjutnya, Shinzo Abe memperkenalkan strategi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) yang berupa menjaga kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, memfasilitasi konektivitas antara benua Asia dan Afrika, serta mempromosikan kebebasan dan ekonomi pasar (Abe, 2016).

India mendekat ke timur melalui *Look East Policy, Act East Policy, dan Security and Growth for All in the Region* (SAGAR) (Kelly, 2014, 81; Kesavan et al., 2020, 13; Khatik & Bhandari, 2021, 544; Ramadhan & Yustiningrum, 2024, 18). Dalam perkembangannya, India mendekat ke 10 negara ASEAN, menjadi anggota *Quadrilateral Security Dialogue*, merespon rivalitas AS-Tiongkok secara damai, bahkan berencana membangun rumah sakit militer di pulau Sabang, Indonesia sebagai

Buku ini tidak diperjualbelikan

peningkatan eksistensi militer di khususnya di kawasan Andaman dan Kepulauan Nicobar, Samudera Hindia.

Kelompok minilateral kedua adalah pakta pertahanan yang beranggotakan Australia, Inggris, dan AS (AUKUS) yang dibentuk pada bulan September 2021. Pakta pertahanan ini bertujuan utama untuk mendukung Australia mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir melalui transfer teknologi AS dan Inggris ke Australia. Rancangan kapal selam mampu berada di bawah laut selama maksimal enam bulan dan daya jangkauan mencapai ke kawasan Indo-Pasifik.

Sebagai kelompok minilateral ketiga, Tiongkok memperkenalkan *Belt and Road Initiative* (BRI), *Maritime Silk Road* (MSR), dan pembentukan *Asian Infrastructure and Investment Bank* (AIIB) (Ramadhan & Yustiningrum, 2024, 18–19). Tiongkok terus berupaya menjalin hubungan dekat dengan berbagai negara berkembang di empat benua—Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin—untuk membangun proyek konektifitas, transisi energi, dan pariwisata. Tiongkok selalu menggunakan pertemuan multilateral yaitu *Belt and Road Forum for Internasional Cooperation* atau *Silk Road Summit* tahun 2017, 2019, dan 2023 untuk mengembangkan berbagai proyek dengan negara berkembang, memperkenalkan pendanaan pembangunan alternatif melalui AIIB di samping World Bank dan IMF, serta tidak pernah mengundang AS dalam ketiga forum tersebut.

B. Upaya Menekan Risiko

Selama lebih dari dua abad, Amerika Serikat (AS) selalu menempatkan Eropa sebagai mitra utama. Perubahan terjadi pada masa Presiden Barack Obama tahun 2011 yang mengubah orientasi strategi AS, baik pada aspek militer, diplomasi, maupun ekonomi ke kawasan Indo-Pasifik yang dikenal dengan nama *pivot to Asia* (Blackwill, 2024). Tujuan utamanya adalah merespons dinamika di kawasan Indo-Pasifik, kebangkitan Tiongkok, konflik di Timur Tengah yang tidak kunjung selesai, dan mengurangi belanja militer ke kawasan Eropa. Sayangnya, strategi Presiden Barack Obama ini tidak menuai hasil positif karena dalam prosesnya, AS justru melakukan perubahan

Buku ini tidak diperjualbelikan

internal yang semula membuka pasar bebas, memfasilitasi perdagangan dan investasi, serta mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya di kawasan Indo-Pasifik, namun justru meningkatkan upaya defensif yang secara terang-terangan berusaha mengurangi risiko keamanan dan kepentingan nasional karena meningkatnya aktivitas Tiongkok di kawasan tersebut (Blackwill, 2024). Bahkan, AS mulai menjalankan kebijakan untuk mengontrol ekspor, penyaringan ketat atas investasi asing ke AS, pemberlakuan tarif tinggi untuk negara asing, mencampuri kebijakan industri domestik negara lain, dan memberlakukan sanksi ke negara lain (Blackwill, 2024).

Pada awalnya, AS membangun perjanjian perdagangan melalui *Trans Pacific Partnership* (TPP) tahun 2005 yang diawali kerja sama dengan Brunei Darussalam, Chile, Selandia Baru, dan Singapura. Pada tahun 2011, Kementerian Luar Negeri AS menyatakan bahwa TPP adalah kebijakan AS yang berhasil di kawasan Indo-Pasifik. Upaya AS tidak berlangsung lama, karena berbagai perubahan kebijakan internalnya, di tengah upaya memfasilitasi rantai pasokan global, AS justru melakukan *de-risking* atau pengurangan risiko dengan membangun lebih banyak institusi perdagangan di dalam negeri (Blackwill, 2024). Bahkan, pemerintahan Presiden Donald Trump menyalahkan Tiongkok karena meningkatnya defisit perdagangan AS dan kehilangan banyak lapangan pekerjaan di dalam negeri. Presiden Joseph Biden pada bulan Oktober 2022 justru semakin memberlakukan kontrol expor asing ke AS untuk produk-produk yang didominasi oleh Tiongkok.

Sementara itu, Tiongkok yang meluncurkan *Belt and Road Initiative* (BRI) tahun 2013, membentuk *Asian Infrastructure and Investment Bank* (AIIB) tahun 2016, memperkenalkan *Maritime Silk Road* (MSR) untuk membangun infrastruktur dan konektivitas laut di kawasan Indo-Pasifik, menggunakan berbagai upaya tersebut untuk merespons AS. Dalam situasi inilah rivalitas AS-Tiongkok dalam aspek perdagangan global ini sangat terlihat dan terbukti nyata.

Namun demikian, AS tidak serta merta melakukan pemutusan hubungan dagang dengan Tiongkok, yang dikenal dengan nama

Buku ini tidak diperjualbelikan

de-coupling dengan pertimbangan bahwa AS masih membutuhkan Tiongkok dalam berbagai aspek penting selain perdagangan global. Selanjutnya, AS mengembangkan konsep *de-risking,* yaitu mengurangi risiko terhadap ketergantungan rantai pasokan global dari Tiongkok tanpa harus memutuskan rantai tersebut secara total. Hal tersebut didukung oleh negara-negara anggota G-7 termasuk Uni Eropa dan juga India (Cave, 2023).

Pemerintah Tiongkok menanggapi kebijakan *de-risking* AS sebagai upaya yang tidak menunjukkan perubahan atau peningkatan dari berbagai periode sebelumnya. Hal ini terjadi karena Tiongkok memaknai kebijakan *de-risking* AS sebagai upaya *de-coupling* yang terselubung, sebagai menjaga komitmen jangka panjang untuk tetap mendominasi perdagangan dan ekonomi global (Cave, 2023).

Dalam situasi persaingan antara AS melawan Tiongkok yang menunjukkan peningkatan pemberlakuan *de-risking* oleh AS, sebenarnya pemerintah Indonesia memiliki peluang untuk melakukan *hedging* dalam arti meningkatkan otonomi, mengurangi risiko, dan tidak hanya mendekatkan pemerintahnya pada kekuatan global yang dominan, baik AS saja maupun Tiongkok saja (Anwar, 2023; Priamarizki, 2024). Negara-negara Asia Tenggara khususnya Indonesia umumnya melakukan strategi *hedging* dengan mendorong kerja sama ekonomi yang lebih kuat dengan Tiongkok, tetapi tetap mempertahankan pengaruh keamanan AS di kawasan Indo-Pasifik (Goh, 2007; Kuik, 2023). Prabowo Subianto yang terpilih menjadi presiden Indonesia mulai tahun 2024 juga memberlakukan kebijakan *hedging* melalui pemikirannya yang berjudul "The Road Ahead for Indonesia" dengan menyatakan bahwa "Sejalan dengan visi untuk posisi geopolitik negara kami [Indonesia], kami akan meneruskan kerja sama yang kuat dengan Tiongkok sebagai mitra ekonomi yang penting. Namun pada saat yang sama, kami akan memperluas dan memperdalam kerja sama kami dengan AS." (Subianto, 2024).

Buku ini tidak diperjualbelikan

C. Persaingan AS-Tiongkok

Dalam dunia internasional, terdapat dua peristiwa besar yang memengaruhi rantai pasokan mineral kritis yang dampaknya masih bisa dirasakan hingga kini. Peristiwa pertama adalah pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2020 yang membuat hampir semua aktivitas yang berkaitan dengan mineral kritis terhenti sementara. Peristiwa kedua adalah perang Rusia-Ukraina sejak bulan Februari 2022 yang membuat Rusia menghentikan pasokan energi khususnya gas alam ke berbagai negara, seperti kawasan Eropa Barat yang membuat negara-negara ini mencari alternatif solusi sumber energi baru, baik yang terbarukan maupun yang tidak bisa diperbarui.

Masih dalam suasana pandemi COVID-19 dan menanggapi terganggunya rantai pasokan mineral kritis pada level internasional tersebut, Presiden Donald Trump pada periode pertama mengeluarkan dua surat perintah pengamanan rantai pasokan dan mineral kritis sehubungan tingginya kebutuhan Amerika Serikat (AS) mengenai hal tersebut yang pada saat itu mengalami ancaman yang luar biasa. Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri AS mengeluarkan daftar 35 mineral kritis yang kemudian disempurnakan oleh Kementerian Perdagangan AS dalam bentuk strategi komprehensif mengenai mineral kritis (Burke, 2022, 40).

Selanjutnya, Presiden Joseph Biden pada tahun 2021 memperbarui surat perintah, tidak hanya mengenai kebijakan AS mengenai mineral kritis tetapi juga merumuskan laporan, pengkajian, investasi mengenai rentannya pemerintahnya terhadap rantai pasokan mineral kritis (Burke, 2022, 40). Untuk pertama kali, Presiden Joseph Biden juga menanggapi rivalitas geopolitik mengenai mineral kritis khususnya pemenuhan kebutuhan baterai kendaraan listrik (Giuli, 2023, 53).

Sementara itu, pemerintah Tiongkok menanggapi kelangkaan rantai pasokan mineral kritis dengan menyatakan bahwa pihaknya adalah pemimpin terdepan level global tidak hanya dalam pertambangan, tetapi juga pemrosesan, pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi, hingga penyampaian ke pengguna atas berbagai

Buku ini tidak diperjualbelikan

mineral kritis tersebut (Wu & Huy, 2022, 3). Pemerintah Tiongkok menyebutkan terdapat enam kategori mineral kritis, yaitu kobalt, tembaga, lithium, nikel, unsur tanah jarang *(rare earth elements)* dan silicon (Wu & Huy, 2022, 2). Bahkan pada peringatan 10 Tahun Sabuk dan Jalan Inisiatif *(Belt and Road Initiative)* tahun 2023, pemerintah Tiongkok kembali menyatakan komitmennya mengenai pembangunan energi hijau, peningkatan investasi energi rendah karbon, dan meninggalkan berbagai proyek batu bara global (Juani et al., 2024).

Pada bulan Januari 2014, pemerintah Indonesia pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberlakukan larangan ekspor nikel mentah dan belum diproses yang mengharuskan pemrosesan dilakukan di dalam negeri yang dikenal dengan nama hilirisasi pertambangan. Melalui peraturan pemerintah tersebut, hanya berbagai perusahaan yang memiliki kemampuan untuk pemrosesan nikel atau yang melakukan hilirisasi yang akan mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Larangan ekspor tersebut tidak membatasi berbagai perusahaan domestik dan asing, sepanjang mampu melakukan hilirisasi nikel maka akan mendapatkan izin pembangunan *smelter* di Indonesia (IRENA, 2023, 113; Terauds, 2017). Lapangan ekspor nikel mentah berkontribusi pada peningkatan drastis atas harga nikel pada pasar internasional pada semester pertama tahun 2014, meskipun harga kembali normal karena kelangkaan bahan baku. Ketika pemerintah Indonesia mengalami defisit anggaran pada tahun 2016 khususnya pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, larangan ekspor nikel mentah sementara ditangguhkan, yang diberlakukan lagi pada bulan Januari 2020 (IRENA, 2023, 113).

Dalam jangka pendek, larangan ekspor nikel mentah mengakibatkan pemerintah Indonesia kehilangan pendapatan ekspor, lapangan pekerjaan bidang pertambangan, dan kontribusi terhadap pendapatan nasional. Namun dalam jangka panjang, larangan ekspor nikel mentah ini menarik berbagai investasi pemrosesan nikel dan membangun industri hilirisasi. Sebelum diberlakukan larangan ekspor nikel mentah tahun 2014, pemerintah Indonesia hanya memiliki

Buku ini tidak diperjualbelikan

dua *smelter*, namun pada tahun 2020 jumlahnya meningkat menjadi 30 *smelter* (Huber, 2021) dan bahkan pada tahun 2024 meningkat hingga 50 *smelter.* Dalam kurun waktu tersebut pemerintah Indonesia berhasil menarik investasi asing mengenai pemrosesan nikel mencapai 15 miliar dolar AS (IRENA, 2023, 113).

Pada tahun 2023, Indonesia merupakan penerima dana pinjaman pembangunan terbesar melalui skema *Belt and Road Initiative* (BRI) dari pemerintah Tiongkok yang jumlahnya mencapai 7,03 miliar dolar AS dan menguasai hampir 90% pemrosesan nikel di Indonesia (Baskaran, 2024). Berbagai perusahaan asing Tiongkok yang beroperasi pada pemrosesan nikel adalah Tsingshan Holding Group, Zhejiang Huayou Cobalt, Ningbo Lygend—part of CATL Group, Wuling Motors, and China Molybdenum Company (Baskaran, 2024).

Masuknya investasi Tiongkok mengenai hilirisasi nikel khususnya di Morowali, Sulawesi Tengah, melalui proyek *Indonesia Morowali Industrial Park* (IMIP) membuat pemerintah Indonesia melakukan berbagai penyesuaian dalam aturan nasional mengenai hilirisasi. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara telah disempurnakan ke dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan. Perubahan signifikan dalam peraturan tersebut, antara lain (a) peningkatan manajemen dan aturan pada sektor pertambangan untuk meningkatkan pendapatan pada sektor ini, (b) pemerintah pusat memiliki kewenangan eksklusif atas pemberian izin usaha dan manajemen tambang yang bertujuan untuk mempersingkat atau menyederhanakan alur perizinan, meminimalisir rantai birokrasi, mengurangi praktik-praktik korupsi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta mengintegrasikan izin usaha tambang dari Kementerian ESDM untuk mempermudah restrukturisasi perusahaan dan transaksi investasi (Baskaran, 2024).

Sayangnya, berbagai perusahaan *smelter* Tiongkok yang mendapatkan izin di kawasan Morowali tidak memiliki kewajiban terhadap pemangku kepentingan atau persyaratan untuk memenuhi standar ESG yang tinggi. Hal ini dibarengi dengan standar analisa dampak lingkungan yang rendah, pembayaran upah buruh yang

Buku ini tidak diperjualbelikan

hanya mengikuti standar UMR di provinsi Sulawesi Tengah, yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di kabupaten Morowali. Akhirnya, para pekerja tambang harus mengambil kerja lembur untuk meningkatkan penghasilan bulanan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup di Morowali. Hal ini ditambah dengan tingginya angka kecelakaan kerja di Morowali, di mana pada bulan Desember 2023, terjadi ledakan di tungku yang menelan korban jiwa sebanyak 20 pekerja tambang (Baskaran, 2024).

Persoalan yang dihadapi *smelter* nikel di Morowali juga berkaitan dengan penggusuran mata pencaharian lokal (Mtero, 2017), memaksa penduduk setempat untuk bekerja tanpa keterampilan (Rubbers, 2020), kerusakan lingkungan yang menyebabkan pencemaran air (Castillo, Blumenthal, & Purdy, 2022), dan perampasan tanah (Toumbourou et al., 2022).

D. Investasi: Ekspektasi vs. Realisasi

Seiring dengan perkembangan rivalitas geopolitik AS dan Tiongkok di Indo-Pasifik, investasi Tiongkok di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada periode 2019 hingga 2024, investasi Tiongkok menyumbang 18% dari seluruh investasi asing langsung ke Indonesia (KabarBursa, 2025). Investasi Tiongkok terutama difokuskan pada sektor hilirisasi sumber daya alam—khususnya pengolahan nikel—serta bidang transportasi, logistik/pergudangan, dan telekomunikasi (Kurniawan, 2024). Proyek-proyek besar di Morowali (Sulawesi Tengah) dan Weda Bay (Maluku Utara) menjadi representasi kuat kehadiran Tiongkok dalam industri pengolahan nikel dan pengembangan kawasan industri terpadu di luar Pulau Jawa. Di sini lain, Jepang telah menanamkan investasi sebesar Rp75 triliun dengan fokus di sektor otomotif dan infrastruktur, dan Korea Selatan berinvestasi Rp20,8 triliun di sektor baterai kendaraan dan energi terbarukan.

Dalam pembahasan Bab 5 yang mengulas perkembangan investasi Tiongkok di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) atau Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) yang mengokupasi pesisir di Kecamatan Mangkupalas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan

Buku ini tidak diperjualbelikan

Utara, didapati bahwa realisasi investasi masih menghadapi banyak kendala. Persoalan utama terletak di segi perizinan yang belum sinkron antara pemerintah pusat dan daerah.

Meskipun KIPI Kalimantan Utara tercatat sebagai skema proyek strategis nasional (PSN) berlabel hijau lewat Peraturan Pemerintah No. 109/2020, koordinasi pembahasan mekanisme tukar-menukar aset dan tata ruang masih menghambat upaya perluasan alokasi lahan. Proses ganti rugi juga belum tuntas, dengan kompensasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Realisasi dana investasi yang tidak sesuai dengan komitmen awal (CNNI, 2024) membuat pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan menjadi terhambat progresnya.

Dari berbagai catatan ketidaksesuaian rencana dan realisasi di proyek KIPI, dampak terhadap masyarakat lokal juga harus menjadi aspek yang perlu selalu dicermati. Laporan Mongabay pada awal tahun 2025 menyebutkan bahwa geliat pembangunan kawasan KIPI telah meresahkan masyarakat lokal di dua desa dengan 6.500 jiwa, termasuk para nelayan (Naem, 2025). Pembangunan pabrik-pabrik dan pembangkit listrik batu bara di pesisir pantai telah berdampak terhadap hasil tangkapan ikan yang terus menyusut. Akibat turunnya hasil tangkapan ikan, nelayan terbebani biaya operasional yang tinggi. Sebagian dari mereka telah beralih pekerjaan menjadi petani, pedagang, atau peladang kelapa sawit. Namun, berkebun pun sulit karena lahan-lahan telah masuk ke kawasan industri.

Visi menjadikan Indonesia sebagai PMD dan upaya merealisasikannya dengan menggandeng agenda politik Tiongkok lewat BRI tentu harus selalu mengedepankan kepentingan bangsa Indonesia. Prioritas tertinggi harus selalu menempatkan Indonesia sebagai penerima manfaat terbesar dari semua program yang dilaksanakan.

KIPI perlu terus dikawal untuk memastikan penciptaan kawasan yang konsisten berorientasi energi terbarukan dan menopang ambisi mendorong transisi ekonomi hijau. Penelitian lebih lanjut harus dilakukan guna mendalami evaluasi kesuksesan berbagai program yang menyandingkan visi nasional dengan agenda internasional, dalam

Buku ini tidak diperjualbelikan

hal ini PMD dan BRI. Penelusuran secara lebih kritis dan objektif diperlukan untuk mencermati semua keuntungan dan kerugian yang muncul, sehingga pembangunan di Indo-Pasifik benar-benar dapat dinikmati oleh semua pihak.

E. Siber: Ujian Multilateralisme?

Dinamika rivalitas geopolitik di Indo-Pasifik juga harus selalu dipantau ketat sembari memperhatikan keamanan Indonesia di sektor siber. Sebagaimana dibahas di Bab 6, di satu sisi, prioritas keamanan siber Indonesia masih berkisar pada pengendalian konten informasi/ujaran dan pengembangan digitalisasi aktivitas ekonomi. Namun di sisi lain, ruang perhatian untuk keamanan jaringan dan data masih tergolong sempit.

Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara cenderung mengandalkan pendekatan multilateralisme karena kedekatan prinsip tersebut dengan nilai-nilai ASEAN Way. Keadaan ini membuat Asia Tenggara belum memiliki kesepakatan yang menyatukan persepsi ancaman terhadap keamanan siber, khususnya dan terutama pada bentuk-bentuk kejahatan siber (*cybercrime*). Selain itu, ketimpangan digital di antara negara-negara Asia Tenggara juga membuat upaya mengatasi kejahatan siber semakin sulit diatasi bersama-sama.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa Indonesia Anti-Scam Center (IASC) menerima lebih dari 153.000 laporan penipuan keuangan yang kerugiannya mencapai triliunan rupiah (Azzahra, 2025). Jika dirata-rata, jumlah laporan yang masuk ke IASC adalah 718 laporan per hari, atau 2–3 kali lebih banyak daripada negara-negara lain.

Pada 20 Juni 2024, server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengalami gangguan dan mengakibatkan layanan pembuatan paspor dan keimigrasian di semua bandar udara internasional di Indonesia terganggu (Sulistyo, 2024). Sebelumnya, di tahun 2020 sebuah e-commerce terbesar di Indonesia, Tokopedia, juga mendapatkan serangan siber sehingga

Buku ini tidak diperjualbelikan

lebih dari 91 juta data pengguna bocor. Kebocoran juga menimpa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di mana data nomor induk kependudukan (NIK) serta riwayat kesehatan lebih dari 279 juta warga Indonesia—termasuk mereka yang sudah meninggal dunia—telah diretas dan dijual di forum daring (Amindoni, 2021).

Kerentanan Indonesia di sektor siber menunjukkan kegagalan pemerintah melindungi warga negara pada era digital. Upaya untuk meminimalisir kerugian pun telah dilakukan lewat pengesahan Undang-Undang No. 27 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) pada Oktober 2022. Namun hingga buku ini ditulis, pemerintah belum menerbitkan peraturan turunan dan membentuk lembaga pengawas independen. Tanpa peraturan turunan, sulit bagi penegak hukum untuk menerapkan sanksi administratif dan pidana. Ketiadaan lembaga pengawas independen juga berarti tidak ada badan eksekutif yang mengawasi kepatuhan.

Kebocoran data pribadi menjadi pintu masuk bagi maraknya judi *online* di Indonesia. Pengamat siber menilai banyak situs judi *online* ilegal mengandalkan kebocoran data pribadi untuk menargetkan korban lewat SMS, e-mail, dan WhatsApp (Respati & Setiawan, 2023). Situs judi kemudian menggunakan akses ini untuk menyebarkan *malware*, *phishing*, atau mengelabui pengguna agar mengunduh aplikasi ilegal. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah melihat judi *online* dan kebocoran data pribadi sebagai dua kejahatan siber yang membutuhkan penanganan khusus. Pemerintah menetapkan tujuh Desk Program Prioritas Presiden Prabowo di bidang politik dan keamanan. Dari tujuh desk tersebut, dua di antaranya menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yakni Desk Pemberantasan Judi Online serta Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi (KOMDIGI, 2025).

Kerja sama bilateral dan multilateral sangat diperlukan dalam upaya pemerintah melindungi Indonesia dari kejahatan siber yang tidak saja sangat merugikan secara ekonomi, tetapi juga sendi-sendi sosial dan moral. Diplomasi siber menjadi salah satu strategi penting yang harus diutamakan oleh Indonesia agar dapat menjaga keamanan

Buku ini tidak diperjualbelikan

siber di Tanah Air dan di kawasan Indo-Pasifik. Contoh paling dekat dengan isu ini adalah kerja sama yang harus Indonesia perkuat dengan empat negara tempat tinggal para pengendali mayoritas bandar judi *online*; Tiongkok, Myanmar, Laos, dan Kamboja (Dwi & Puspita, 2024).

Sindikat kriminal di negara-negara Mekong ini diperkirakan menghasilkan lebih dari 43 miliar dolar AS per tahun atau setara dengan 40% PDB gabungan Laos, Myanmar, dan Kamboja. Tidak hanya judi *online*, mereka juga memfasilitasi perdagangan manusia dan pencucian uang. Untuk Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menaksir potensi kerugian akibat praktik judi *online* dapat menembus Rp1.000 triliun pada akhir 2025 jika tidak ada intervensi serius (Rakhmayanti, 2025). Di sinilah pentingnya pemerintahan Presiden Prabowo untuk segera menjalani amanat UU PDP dan berbagai regulasi serta strategi nasional di bidang keamanan siber (antara lain Peraturan BSSN No. 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber 2024–2028). Kebijakan di dalam negeri harus merefleksikan keseriusan dan urgensi yang diperlukan untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan di dunia siber.

F. Indonesia di Pasifik

Sebagai ulasan terakhir, Bab 7 menyebutkan bahwa upaya bersikap netral Indonesia dalam persaingan antara AS dan Tiongkok di Indo-Pasifik membuat Indonesia berpeluang memainkan peran yang lebih strategis dengan negara-negara Pasifik Selatan. Semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo, inisiatif Indonesia seperti *Pacific Elevation*, *Indonesia-South Pacific Forum*, dan *Indonesia–Pacific Forum for Development* merefleksikan komitmen Indonesia untuk berperan lebih asertif. Namun, bagaimana kelanjutan kebijakan *Look East* melalui diplomasi kelautan dengan negara-negara di Pasifik di era Presiden Prabowo?

Pada April 2024, Presiden Prabowo mengunjungi Tiongkok dan Jepang sebagai upaya menunjukkan prioritas kebijakan *Look*

Buku ini tidak diperjualbelikan

East Indonesia (TJP, 2024) sembari mengirimkan pesan bahwa pemerintahannya akan melanjutkan kerja sama dengan Tiongkok dan sekutu terkuat AS di Asia, Jepang. Prabowo secara konsisten menekankan kebijakan bertetangga baik atau *good neighbor*, yang sangat ia yakini sebagai pendekatan kebijakan luar negeri yang tepat untuk negara yang beragam seperti Indonesia—negara yang dikagumi karena kekayaan budayanya (Nasution, 2025). Keyakinan ini berasal dari nilai sosial Indonesia yang mengakar kuat, tetangga saling membantu di saat dibutuhkan dan memperlakukan satu sama lain seperti keluarga.

Berbeda dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo yang cenderung mengutamakan diplomasi ekonomi dan infrastruktur, Presiden Prabowo lebih mengutamakan aspek geoekonomi, pertahanan, dan kemitraan strategis (Yadav, 2025). Namun, pandangan kritis menilai kebijakan luar negeri Indonesia di bawah komando Presiden Prabowo cenderung kehilangan identitas di kalangan Global South. Selain resmi bergabung menjadi anggota BRICS pada Januari 2025, kebijakan luar negeri Indonesia dinilai relatif minim inovasi meskipun Presiden Prabowo mengunjungi lebih banyak negara dibandingkan Presiden Joko Widodo (Utama, 2025).

Pada awal tahun 2025, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyatakan bahwa kawasan Pasifik belum menjadi prioritas, berbanding terbalik dengan retorika diplomasi yang ditunjukkan dalam satu dekade terakhir (Wangge, 2025). Selama 10 tahun terakhir, hibah Indonesia untuk kawasan Pasifik dan Oseania nyaris separuh dari total hibah Indonesia di berbagai kawasan, yaitu sebesar Rp 1,14 triliun, namun kata Pasifik hanya disebutkan dua kali dalam pidato Menlu Sugiono. Kunjungan resmi Presiden Prabowo juga tidak pernah menghampiri kawasan Pasifik.

Keterlibatan Indonesia di Pasifik salah satunya bertujuan untuk memengaruhi opini politik atas isu kemerdekaan Papua. Kerja sama Indonesia dengan Pasifik Selatan selama ini lebih banyak dilakukan di sektor non-kelautan yang tidak secara langsung mendukung keberhasilan diplomasi biru, yang hal ini dapat menjadi evaluasi bagi

Buku ini tidak diperjualbelikan

para pengambil keputusan. Orientasi *land-based,* bukan *ocean-based*, masih mendominasi bantuan Indonesia ke Pasifik Selatan. Fokus ini mencerminkan kurangnya perhatian Indonesia kepada persoalan kelautan dan perubahan iklim yang dialami kawasan Pasifik. Bila kebijakan di Pasifik tidak berubah dan benar-benar berorientasi *ocean-based* maka sangat sulit memengaruhi advokasi akar rumput yang dimotori kelompok masyarakat sipil Pasifik terkait persoalan politik dan hak asasi manusia di Papua Barat.

Di sini, pemerintahan Presiden Prabowo perlu menyusun ulang fokus kebijakan luar negeri terhadap kawasan Pasifik mengingat upaya yang sudah dibangun oleh rezim pendahulunya. Sumber daya yang telah dikeluarkan dan investasi diplomasi tingkat negara serta di level masyarakat juga patut menjadi pertimbangan utama. Kehadiran Indonesia di Pasifik tidak hanya penting untuk menegakkan filosofi *good neighbor*, tetapi juga aspek kritis dalam upaya menjaga kedaulatan wilayah terutama di isu-isu terkait Papua Barat. Penelitian dan advokasi lebih lanjut masih sangat diperlukan guna meningkatkan literasi Pasifik dan memperkuat strategi mengukuhkan pengaruh Indonesia di salah satu kawasan yang sangat terdampak oleh perubahan iklim global ini.

Referensi

Abe, S. (2007, August 22). "Confluence of the Two Seas" Speech by H.E. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan at Parliament of the Republic of India [Press release]. Retrieved from https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html

Abe, S. (2016, August 27). Address by Prime Minister Shinzo Abe at the Opening Session of the Sixth Tokyo International Conference on African Development (TICAD) [Press release]. Retrieved from https://www.mofa.go.jp/afr/af2/page4e_000496.html

Amindoni, A. (2021, May 21). BPJS Kesehatan: Data ratusan juta peserta diduga bocor - 'Otomatis yang dirugikan masyarakat', kata pakar. *BBC News*. Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57196905

Buku ini tidak diperjualbelikan

Anwar, D. F. (2023). Indonesia's hedging plus policy in the face of China's rise and the US-China rivalry in the Indo-Pacific region. *The Pacific Review, 36*(2), 351-377. doi:10.1080/09512748.2022.2160794

Azzahra, N. (2025, June 25). OJK Terima 153 Ribu Laporan Penipuan Keuangan. *Tempo.co*. Retrieved from https://www.tempo.co/hukum/ojk-terima-153-ribu-laporan-penipuan-keuangan-1805163#goog_rewarded

Baskaran, G. (2024, July 11). Diversifying Investment in Indonesia's Mining Sector. Retrieved from https://www.csis.org/analysis/diversifying-investment-indonesias-mining-sector

Blackwill, R. D. (2024, August 1). The Rise and Fall of the Economic Pivot to Asia. *Foreign Policy*. Retrieved from https://foreignpolicy.com/2024/08/01/lost-decade-us-economic-pivot-to-asia-defense/

Burke, S. E. (2022). Shiny Objects: Repositiong the United States for Critical Mineral Success. In S. E. Burke, L. Hughes, P. Q. Huy, K. Vekasi, & Y.-H. Wu (Eds.), *Critical Minerals: Global Supply Chains and Indo-Pacific Geopolitics. The National Bureau of Asian Research (NBR) Special Report 102* (pp. 35-43). Washington DC, USA: National Bureau of Asian Research (NBR).

Castillo, R., Blumenthal, L., & Purdy, C. (2022, September 21). Indonesia's Electric Vehicle Batteries Dream Has a Dirty Nickel Problem. *Brookings Commentary*.

Cave, D. (2023, May 22). How 'Decoupling' From China Became 'De-risking. *The New York Times*. Retrieved from https://www.nytimes.com/2023/05/20/world/decoupling-china-de-risking.html

CNNI. (2024, April 21). Luhut Tagih Janji Investasi China Terkait Proyek di Kaltara. *CNN Indonesia*. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240421115711-92-1088634/luhut-tagih-janji-investasi-china-terkait-proyek-di-kaltara

DFAT. (2017). *2017 Foreign Policy White Paper*. Canberra, ACT: Department of Foreign Affairs and Trade (Australian Government).

Dwi, A., & Puspita, M. D. (2024, June 28). 4 Negara Ini Kendalikan Mayoritas Bandar Judi Online di Indonesia. *Tempo.co*. Retrieved from https://www.tempo.co/ekonomi/4-negara-ini-kendalikan-mayoritas-bandar-judi-online-di-indonesia--45024#goog_rewarded

Giuli, M. (2023). Geopolitics of the Energy Transition. In M. Asif (Ed.), *Handbook of Energy Transitions* (pp. 41-54). Boca Raton, FL: CRC Press.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Goh, E. (2007). Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies. *International Security, 32*(3), 113-157. doi:10.1162/isec.2008.32.3.113

Huber, I. (2021, December 8). Indonesia's Nickel Industrial Strategy. Retrieved from https://www.csis.org/analysis/indonesias-nickel-industrial-strategy

IRENA. (2023). *Geopolitics of the Energy Transition: Critical Materials*. Abu Dhabi, United Arad Emirates (UAE): International Renewable Energy Agency (IRENA).

Juani, A., Doris, A., Sulejmanagic, M., & Alam, M. (2024). Pulling Sideways: How Indo-Pacific Middle Powers are Responding to Great-Power Competition Across Security, Economic, and Energy Sectors. Retrieved from https://fpanalytics.foreignpolicy.com/2024/06/24/indo-pacific-great-power-competition/

KabarBursa. (2025, May 06). [INFOGRAFIS] Sebaran Investasi Cina vs Jepang vs Korea di RI. Retrieved from https://www.kabarbursa.com/infografis/infografis-sebaran-investasi-cina-vs-jepang-vs-korea-di-ri

Kelly, A. (2014). Looking Back on Look East: India's Post-Cold War Shift toward Asia. *Seton Hall Journal of Diplomacy and International Relations, 15*, 81-93.

Kesavan, K. V., Singh, A., Powell, L., Joshi, M., Mukhopadhyay, A., & Sahoo, N. (2020). India and South Korea: Exploring New Avenues, Outlining Goals. *ORF Special Report*, 1-80.

Khatik, M. H., & Bhandari, U. (2021). India's Foreign Policy: A Transformation from 'Look East'to 'Act East'Policy. *Towards Excellence, 13*(2), 542-551.

KOMDIGI. (2025, March 03). Tangani Judi Online, Meutya Hafid: Komdigi Terapkan Teknologi dan Kerja Lintas Sektor [Press release]. Retrieved from https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9116

Kuik, C.-C. (2023). Shades of grey: riskification and hedging in the Indo-Pacific. *The Pacific Review, 36*(6), 1181-1214. doi:10.1080/09512748.2022.2110608

Kurniawan, A. (2024, November 12). Memblejeti Investasi China Rp534,5 Triliun di Indonesia, Ini Rincian dan Sebarannya. *Sindo News, Sindo News*. Retrieved from https://ekbis.sindonews.com/read/1487231/34/memblejeti-investasi-china-rp5345-triliun-di-indonesia-ini-rincian-dan-sebarannya-1731406317

Buku ini tidak diperjualbelikan

Li, Z. (2023). Aspiration and Leadership Research of the Diffusion of Indo-Pacific. *SHS Web Conference, 157*(03028), 1-7. doi:https://doi.org/10.1051/shsconf/202315703028

Mtero, F. (2017). Rural livelihoods, large-scale mining and agrarian change in Mapela, Limpopo, South Africa. *Resources Policy, 53*, 190-200. doi:https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2017.06.015

Naem, A. (2025, February 25). Nestapa Nelayan Terdampak Kawasan Industri 'Hijau' Kaltara. *Mongabay*. Retrieved from https://mongabay.co.id/2025/02/27/nestapa-nelayan-terdampak-kawasan-industri-hijau-kaltara/

Nasution, R. (2025, May 21). Closer look at Prabowo's good neighbor foreign policy. *Antara News*. Retrieved from https://en.antaranews.com/news/356009/closer-look-at-prabowos-good-neighbor-foreign-policy

Priamarizki, A. (2024). Understanding the Domestic Determinants of Indonesia's Hedging Policy towards the United States and China. *Contemporary Southeast Asia, 46*(1), 19-42.

Rakhmayanti, I. (2025, May 15). Uang Rp 1.000 Triliun Terancam Hilang di 2025 Gara-gara Judi Online. *CNBC Indonesia*. Retrieved from https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250515125927-37-633524/uang-rp-1000-triliun-terancam-hilang-di-2025-gara-gara-judi-online

Ramadhan, M. S., & Yustiningrum, R. R. E. (2024). Diskursus Indo-Pasifik dalam Politik Domestik dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Geopolitik, Geostrategi, dan Geoekonomi. In R. R. E. Yustiningrum, M. S. Ramadhan, D. F. Anwar, S. Siswanto, G. Wuryandari, A. N. Alami, R. A. R. F. Prabaningtyas, & A. Elisabeth (Eds.), *Indo-Pasifik dalam Politik Luar Negeri Indonesia: Dimensi Geopolitik, Geostrategi, dan Geoekonomi* (pp. 1-47). Yogyakarta, Indonesia: Penerbit Andi.

Respati, A. R., & Setiawan, S. R. D. (2023, October 26). Pengamat: Banyaknya Penawaran Judi "Online" akibat Kebocoran Data Pribadi. *Kompas.com*. Retrieved from https://money.kompas.com/read/2023/10/26/090000426/pengamat--banyaknya-penawaran-judi-online-akibat-kebocoran-data-pribadi

Rubbers, B. (2020). Mining Boom, Labour Market Segmentation and Social Inequality in the Congolese Copperbelt. *Development and Change, 51*(6), 1555-1578. doi:https://doi.org/10.1111/dech.12531

Buku ini tidak diperjualbelikan

Subianto, P. (2024, June 12). The Road Ahead for Indonesia—One of the Fastest Growing Economies in Asia | Opinion. *Newsweek*. Retrieved from https://www.newsweek.com/road-ahead-indonesiaone-fastest-growing-economies-asia-opinion-1911354

Sulistyo, P. D. (2024, June 30). PDN Diretas "Ransomware", Keamanan Siber Jangan Dipandang Sebelah Mata. *Kompas.id*. Retrieved from https://www.kompas.id/artikel/pdn-diretas-ransomware-keamanan-siber-jangan-dipandang-sebelah-mata

Taylor, B. (2020). Is Australia's Indo-Pacific Strategy An Illusion? *International Affairs 96*(1), 95-109. doi:10.1093/ia/iiz228

Terauds, K. (2017). *Using trade policy to drive value addition: Lessons from Indonesia's ban on nickel exports. Background document to the Commodities and Development Report 2017*. Retrieved from Geneva, Switzerland: https://unctad.org/system/files/non-official-document/suc2017d8_en.pdf

TJP. (2024, April 3). Looking east. *The Jakarta Post*. Retrieved from https://www.thejakartapost.com/opinion/2024/04/03/looking-east.html

Toumbourou, T. D., Dressler, W. H., & Werner, T. T. (2022). Plantations enabling mines: Incremental industrial extraction, social differentiation and livelihood change in East Kalimantan, Indonesia. *Land Use Policy, 119*, 106157. doi:https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106157

Utama, V. R. (2025, June 02). Indonesia's foreign policy is all style, no substance. *East Asia Forum*. Retrieved from https://eastasiaforum.org/2025/06/02/indonesias-foreign-policy-is-all-style-no-substance/

Wangge, H. (2025, February 12). Pekerjaan Rumah Kebijakan Luar Negeri RI di Pasifik. *Kompas.id*. Retrieved from https://www.kompas.id/artikel/pekerjaan-rumah-kebijakan-luar-negeri-ri-di-pasifik

Wu, Y.-H., & Huy, P. Q. (2022). Geopolitics of Critical Minerals. In S. E. Burke, L. Hughes, P. Q. Huy, K. Vekasi, & Y.-H. Wu (Eds.), *Critical Minerals: Global Supply Chains and Indo-Pacific Geopolitics. The National Bureau of Asian Research (NBR) Special Report 102* (pp. 1-11). Washington DC, USA: National Bureau of Asian Research (NBR). .

Yadav, A. S. (2025, March 10). Arah Baru Kebijakan Luar Negeri Indonesia. *Kompas.id*. Retrieved from https://www.kompas.id/artikel/arah-baru-kebijakan-luar-negeri-indonesia

Buku ini tidak diperjualbelikan

Daftar Singkatan

ACC	:	*ASEAN-China Center*
ADF	:	*Australian Dence Force*
ADGMIN	:	*ASEAN Digital Ministers' Meeting*
AEC	:	*ASEAN Economic Community*
AEP	:	*Act East Policy*
AFTA	:	*ASEAN Free Trade Area*
AI	:	*Artificial Intelligence*
AIIB	:	*Asian Infrastructure and Investment Bank*
AIS	:	*Archipelagic and Island States*
ALKI	:	Alur Laut Kepulauan Indonesia
AMCHAM	:	*American Chamber of Commerce*
AMDAL	:	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
AMF	:	*ASEAN Maritime Forum*
AMMTC	:	*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*
AMTI	:	*Asia Maritime Transparency Initiative*
ANTAM	:	Aneka Tambang
ANU	:	*Australian National University*
AOIP	:	*ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*

Buku ini tidak diperjualbelikan

APEC	:	*Asia-Pacific Economic Cooperation*
APMT	:	Agen Pemegang Merk Terdaftar
APT	:	*Advanced Persistent Threats*
ARF	:	*ASEAN Regional Forum*
AS	:	Amerika Serikat
ASD	:	*Australian Signal Directorate*
ASEAN	:	*Association of Southeast Asian Nations*
ASPI	:	*Australian Strategic Policy Institute*
AUKUS	:	*Australia, United Kingdom, United States*
B-to-B	:	*Business-to-Business*
B3W	:	*Build Back Better World*
BAPPENAS	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BASF	:	*Badische Anilin-und Soda-Fabrik*
BBC	:	*British Broadcasting Corporation*
BCIMEC	:	*Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor*
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BNN	:	*Business News Network*
BP	:	*British Petroleum*
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPKRI	:	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPPK	:	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
BRF	:	*Belt and Road Forum*
BRI	:	*Belt and Road Initiative*
BRICS	:	*Brazil, Russia, India, China, South Africa*
BRIN	:	Badan Riset dan Inovasi Nasional
BSSN	:	Badan Siber dan Sandi Negara
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
CaaS	:	*crimeware-as-a-service*
CAGR	:	*Compound Annual Growth Rate*
CAPEX	:	*Capital Expenditure*
CATL	:	*Contemporary Amperex Technology Co Limited*
CBL	:	*Contemporary Brunp Lygend*
CBM	:	*Confidence Building Measure*
CBS	:	*Columbia Broadcasting System*
CCWAEC	:	*China-Central Asia-West Asia Economic Corridor*
CD	:	*China Daily*
CELIOS	:	*Center of Economics and Law Studies*
CES	:	*Center for European Studies*

Buku ini tidak diperjualbelikan

CFR	:	*Council on Foreign Relations*
CGM	:	*Compagnie Generale Maritime*
CHIPS	:	*Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors*
CICPEC	:	*China-Indochina Peninsula Economic Corridor*
CIPE	:	*Center for International Private Enterprise*
CIS	:	*Commonwealth of Independent States*
CMA	:	*Compagnie Maritime d'Affretement*
CMEC	:	*China-Myanmar Economic Corridor*
CMREC	:	*China-Mongolia-Russia Economic Corridor*
CNBC	:	*Consumer News and Business Channel*
CNGR	:	*Compendated Neuron Gamma-Ray*
CNNI	:	*Cable News Network Indonesia*
CPEC	:	*China-Pakistan Economic Corridor*
CPI	:	*Corruption Perceptions Index*
CPR	:	*Check Point Research*
CPTPP	:	*Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership*
CREA	:	*Center for Research on Energy and Clean Air*
CSAS	:	*Cyber Security Agency of Singapore*
CSIS	:	*Centre for Strategic and International Studies*
CSP	:	*Comprehensive Strategic Partnership*
CSR	:	*Corporate Social Responsibility*
DAC	:	*Development Assistance Committee*
DC	:	*District Columbia*
DD	:	*Department of Defence*
DDA	:	*Doha Development Agenda*
DDoS	:	*Distributed Denial of Services*
DFAT	:	*Department of Foreign Affairs and Trade*
DIS	:	*Department of Industry and Science*
DKISP	:	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
DLC	:	*Development Leaders Conference*
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DS	:	*Department of State*
DSG	:	*Digital Scale in Gewinn*
EAS	:	*East Asia Summit*
eGA	:	*e-Governance Academy*
ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral

Buku ini tidak diperjualbelikan

ESS	:	*Energy Saving System*
ETDA	:	*Electrinic Transaction Development Agency*
EV	:	*electric vehicle*
EYI	:	*Ernest & Young Indonesia*
FA	:	*Framework Agreement*
FAO	:	*Food and Agriculture Organization*
FATF	:	*Financial Action Task Force*
FDI	:	*Foreign Direct Investment*
FEB	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
FeNi	:	Feronickel
FES	:	*Friedrich Ebert Stiftung*
FETRIAN	:	*Frequency of International Relations*
FHT	:	Feni Halmahera Timur
FIRB	:	*Foreign Investment Review Board*
FOIP	:	*Free and Open Indo-Pacific*
FSM	:	*Federated States of Micronesia*
FTA	:	*Free Trade Agreement*
G7	:	*Group of Seven*
G20	:	*Group of Twenty*
GBR	:	*Global Business Reports*
GCI	:	*Global China Initiative*
GCI	:	*Global Cybersecurity Index*
GCAC	:	*General Customs Administration of China*
GCHQ	:	*Government Communications Headquarter*
GCSB	:	*Government Communications Security Bureau*
GIZ	:	*Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit*
GMF	:	*Global Maritime Fulcrum*
GoI	:	*Government of Indonesia*
GSMA	:	*Global System for Mobile Communications Association*
GTA	:	*Global Trade Alert*
GVC	:	*Global Value Chain*
HACGAM	:	*Heads of Asian Coast Guard Agency Meeting*
HAKI	:	Hak Atas Kekayaan Intelektual
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HI	:	Hubungan Internasional
HIPMI	:	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
HoA	:	*Head of Agreement*
HP	:	*Hewlett-Packard*

Buku ini tidak diperjualbelikan

HPAL	:	*High-Pressure Acid Leach*
IA-CEPA	:	*Indonesia Australia – Comprehensive Economic Partnership Agreement*
IASC	:	*Indonesia Anti-Scam Center*
IBI	:	Industri Baterai Indonesia
IBIMA	:	*International Business Information Management Association*
IBM	:	*International Business Machine*
ICT	:	*Information and Communication Technology*
IDB	:	*Islamic Development Bank*
IDI	:	*Information Development Index*
IEA	:	*International Energy Agency*
IFRI	:	*Institut Francais des Relations Internationales*
IJFMR	:	*International Journal for Multidisciplinary Research*
IMF	:	*International Monetary Fund*
IMIP	:	*Indonesia Morowali Industrial Park*
INCO	:	*International Nickel Indonesia*
INDEF	:	*Institute for Development of Economics and Finance*
IoT	:	*Internet of Things*
IP	:	*Internet Provider*
IPEF	:	*Indo-Pacific Economic Framework*
IPFD	:	*Indonesia-Pacific Forum for Development*
IRA	:	*Inflation Reduction Act*
IRENA	:	*International Renewable Energy Agency*
ISEAS	:	*Institute of Southeast Asian Studies*
ISDP	:	*Institute for Security and Development Policy*
ISPF	:	*Indonesia-South Pacific Forum*
ITU	:	*International Telecommunication Union*
IUP-OP	:	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
IWIP	:	*Indonesia Weda Bay Industrial Park*
JAB	:	Jurnal Administrasi Bisnis
JETP	:	*Just Energy Transition Partnership*
JICA	:	*Japan International Cooperation* Agency
JSTOR	:	*Journal Storage*
LEP	:	*Look East Policy*
LK	:	Laporan Kinerja
LPEM	:	Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat
LSM	:	*Lembaga Swadaya Masyarakat*

Buku ini tidak diperjualbelikan

LTD	:	*Limited Trade Deal*
KADIN	:	*Kamar Dagang dan Industri*
KESDMRI	:	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
KHE	:	Kayan Hydro Energy
KHN	:	Kayan Hydropower Nusantara
KIEP	:	*Korea Institute for International Economic Policy*
KIHI	:	Kawasan Industri Hijau Indonesia
KIPI	:	*Kalimantan Industrial Park Indonesia*
KKI	:	Kebijakan Kelautan Indonesia
KKBKIRI	:	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik
KLHKRI	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
KLNRI	:	Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
KOMDIGI	:	Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
KOMINFO	:	Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia
KPANRB	:	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KPEKRI	:	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPRI	:	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
KSPI	:	Kerja Sama Pembangunan Internasional
KSPRI	:	Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
KSS	:	Kerja sama Selatan-Selatan
KSST	:	Kerja sama Selatan-Selatan Triangular
KTT	:	Konferensi Tingkat Tinggi
LASSIJ	:	*Liberal Arts and Social Sciences International Journal*
LCS	:	Laut China Selatan
LOIS	:	*Large Ocean Island States*
LTJ	:	Logam Tanah Jarang
MDI	:	*Ministry of Defence of India*
MEAI	:	*Ministry of External Affairs of India*
MENLU	:	*Menteri Luar Negeri*
MERICS	:	*Mercator Institute for China Studies*

Buku ini tidak diperjualbelikan

METI	:	*Ministry of Economy, Trade, and Industry*
MFAPRC	:	Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China
MICs	:	*Middle Income Countries*
MIND ID	:	Mineral Industri Indonesia
MNI	:	Media Nikel Indonesia
MoU	:	*Memorandum of Understanding*
MTS	:	*Multilateral Trading System*
MPA	:	*Marine Protected Area*
MSG	:	*Melanesian Spearhead Group*
MSR	:	*Maritime Silk Road*
MW	:	*Mega Watt*
NATO	:	*North Atlantic Treaty Organization*
NBR	:	*National Bureau of Asian Research*
NCSI	:	*Global Cybersecurity Index*
NDCs	:	*Nationally Determined Contributions*
NELB	:	*New Eurasian Land Bridge*
NI	:	*Nickel Industries*
NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
NPI	:	*Nickel Pig Iron*
NSA	:	*National Security Agency*
NSS	:	*National Security Strategy*
OBOR	:	*One Belt One Road*
OECD	:	*Organization for Economic Cooperation and Development*
OEWG	:	*Open-Ended Working Group*
ODA	:	*Overseas Development Assistance*
ODF	:	*Official Development Finance*
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
OSS	:	*Online Single Submission*
OUSTR	:	*Office of the United States Trade Representative*
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PCA	:	*Permanent Court of Arbitration*
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PDN	:	Pusat Data Nasional
PDP	:	Perlindungan Data Pribadi
PE	:	*Pacific Exposition*
PEP	:	*Papua New Guinea Electrification Partnership*

Buku ini tidak diperjualbelikan

PEV	:	*Powered Electric Vehicles*
PhaaS	:	*phishing-as-a-service*
PIF	:	*Pacific Island Forum*
PII	:	Portal Informasi Indonesia
PKB	:	Pemerintah Kabupaten Bulungan
PLA	:	*People's Liberation Army*
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
PLTA	:	Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTS	:	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PLTU	:	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PM	:	Perdana Menteri
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMD	:	Poros Maritim Dunia
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PNG	:	Papua New Guinea
PPATK	:	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPP	:	*Purchasing Power Parity*
PSN KI	:	Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri
PT	:	*Perseroan Terbatas*
PTA	:	*Preferential Trade Agreement*
QUAD	:	*Quadrilateral Security Dialogue*
R&D	:	*Research and Development*
RaaS	:	*ransomware-as-a-service*
RCEP	:	*Regional Comprehensive Economic Partnership*
RKEF	:	*Rotary Kiln-Electric Furnace*
RPJMN	:	Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RRE	:	*Rare Earth Elements*
RSIS	:	*Rajaratnam School of International Studies*
SaaS	:	*software as a service*
SAGAR	:	*Security and Growth for All in the Region*
SBY	:	Susilo Bambang Yudhoyono
SCIOPRC	:	*State Council Information Office of the People's Republic of China*
SCO	:	*Shanghai Cooperation Organization*
SDGs	:	*Sustainable Development Goals*
SDM	:	*Sumber Daya Manusia*
SEADI	:	*Support for Economic Analysis Development in Indonesia*

Buku ini tidak diperjualbelikan

SG	:	*Safeguard Global*
SHS	:	*Social Humanity Sciences*
SIDS	:	*Small Island Developing States*
SKRI	:	Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
SM	:	Sebelum Masehi
SMS	:	*Short Message Service*
SLOC	:	*Sea Line of Communication*
SWIFT	:	*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications*
SWOT	:	*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*
SWPD	:	*South West Pacific Dialogue*
TE	:	*Trading Economics*
TELMIN	:	*Telecommunications and Information Technology Ministers*
TG	:	*The Guardian*
THAAD	:	*Terminal High Altitude Area Defense*
TI	:	*Transparency International*
TICAD	:	*Tokyo International Conference on African Development*
TIK	:	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TJP	:	*The Jakarta Post*
TPP	:	*Trans-Pacific Partnership*
TS	:	*Talisman Sabre*
TWH	:	*The White House*
UAE	:	*United Arab Emirates*
UK	:	*United Kingdom*
UMR	:	Upah Minimum Regional
UN	:	*United Nations*
UNCCS	:	*United Nations Climate Change Secretariat*
UNCLOS	:	*United Nations Convention on the Law of the Sea*
UNDP	:	*United Nations Development Program*
UNEP	:	*United Nations Environment Program*
UNESCAP	:	*United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*
UNFCCC	:	*United Nations Framework Convention on Climate Change*
UNECE	:	*United Nations Economic Commission for Europe*
UNESCO	:	*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations*

Buku ini tidak diperjualbelikan

UNGA	:	*United Nations General Assembly*
UNGGE	:	*United Nations Group of Governmental Experts*
UNODC	:	*United Nations Office on Drugs and Crime*
UNOEWG	:	*United Nations Open-Ended Working Group*
UNSDG	:	*United Nations Sustainable Development Goal*
US	:	*United States*
USA	:	*United States of America*
USAID	:	*United States Agency for International Development*
USCB	:	*United Stated Census Bureau*
USD	:	*United States Dollar*
USDS	:	*United States Department of State*
USEIA	:	*United States Energy Information Administration*
USGAO	:	*United States Government Accountability Office*
USMCA	:	*United States-Mexico-Canada Agreement*
USOPM	:	*United States Office of Personnel Management*
UU	:	Undang-Undang
VDNI	:	*Virtue Dragon Nickel Industry*
VOI	:	*Voice of Indonesia*
WB	:	*World Bank*
WEB	:	*World Economy Brief*
WH	:	*White House*
WHO	:	*World Health Organization*
WIUPK	:	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
WM	:	Wood Mackenzie
WMT	:	*Wet Metric Ton*
WTP	:	*Water Treatment Plant*
XFMG	:	*Xin Feng Ming Group*
ZEE	:	Zona Ekonomi Eksklusif
ZTE	:	*Zhongxing Telecommunication Equipment*

Buku ini tidak diperjualbelikan

Glosarium

Act East Policy	:	Kebijakan luar negeri India yang bertujuan memperkuat hubungan ekonomi, strategis, dan budaya India dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur.
Advanced Persistent Threat/Ancaman persisten tingkat lanjut	:	serangan siber canggih dan berkelanjutan yang dilakukan oleh peretas yang membangun kehadiran tanpa terdeteksi di jaringan digital untuk mencuri data sensitif dalam jangka waktu yang lama.
America First	:	kebijakan yang menekankan prioritas kepentingan Amerika Serikat dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, perdagangan, keamanan, dan diplomasi.
Arbitrase internasional	:	proses penyelesaian sengketa yang terjadi di antara pihak-pihak yang berasal dari negara yang berbeda melalui jalur arbitrase
Archipelagic and Island States Forum	:	Platform yang diinisiasi tahun 2017 yang meliputi 47 negara kepulauan terlepas dari Kawasan mereka berada dan level pembangunannya.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Battery-powered Electric Vehicles	:	Kendaraan yang menggunakan energi listrik untuk menggerakkan dan menyimpan energi tersebut dalam baterai.
Belanja modal	:	Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Belt and Road Initiative (BRI)	:	Inisiatif pembangunan infrastruktur skala global yang dicanangkan oleh Pemerintah Tiongkok pada tahun 2013. Dalam proyek ini, Pemerintah Tiongkok berinvestasi dan terlibat dalam pembangunan infrastruktur di lebih dari 150 negara di dunia, yang meliputi jalan, jembatan, industri, perkeretaapian, pelabuhan, dan energi.
Compound Annual Grouth Rate (Tingkat Pertumbuhan Tahunan Gabungan)	:	Tingkat pengembalian yang harus dimiliki suatu investasi setiap tahun agar tumbuh dari saldo awal hingga saldo akhir, selama interval waktu tertentu.
Confidence building measures/Langkah-langkah membangun kepercayaan	:	Tindakan yang diambil untuk mengurangi rasa takut akan serangan oleh kedua belah pihak dalam situasi konflik, meliputi: dialog, pembatasan penggunaan instrumen koersif, transparansi, verifikasi, tindakan atau prosedur unilateral, bilateral, atau multilateral yang mengurangi ketegangan militer antarnegara.
Corruption Perception Index (Indeks Persepsi Korupsi)	:	Indeks yang menilai dan mengurutkan tingkat persepsi korupsi yang terjadi di sektor publik dan politik suatu negara. Indeks ini dikeluarkan oleh Transparency International setiap tahun, meliputi lebih dari 180 negara.
De-risking	:	Upaya pengurangan risiko dari ketergantungan ekonomi berlebih pada negara yang dianggap berbahaya secara geopolitik
Diplomasi Biru	:	Bentuk diplomasi yang berkaitan dengan kelautan, terutama isu kelautan yang bertujuan untuk memanfaatkan dan melestarikan sumber daya kelautan, termasuk dalam penciptaan berbagai inisiatif ekonomi berbasis laut.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Diplomasi siber/*cyber diplomacy*	:	Penggunaan perangkat dan inisiatif diplomatik untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara di ruang siber, untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tidak merugikan demokrasi, sistem politik, infrastruktur vital, dan, keselamatan warga negara.
Distributed Denial of Services (DDoS)	:	Upaya berintensi jahat untuk mengganggu lalu lintas normal dari server, layanan, atau jaringan yang menjadi target dengan membanjiri target atau infrastruktur di sekitarnya dengan lalu lintas Internet.
Doha Development Agenda	:	Salah satu agenda dalam World Trade Organization (WTO) yang diluncurkan pada November 2001 untuk meminimalisir hambatan perdagangan dan meningkatkan perdagangan global.
Downstream	:	Mengolah bahan mentah baik minyak atau gas bumi menjadi bahan jadi.
Dua Negara, Taman Kembar" ("Two Countries, Twin Parks" Initiative)	:	Proyek kawasan percontohan pembangunan ekonomi dan perdagangan inovatif, yang merupakan kerja sama antara Tiongkok dan Indonesia.
Dwelling time	:	Waktu tunggu bongkar-muat logistik di pelabuhan
Dynamic equilibrium	:	Keadaan dalam sistem di mana kondisi tetap stabil meskipun terjadi perubahan terus-menerus
Economic Statecraft	:	Berbagai alat ekonomi yang digunakan negara—seperti pinjaman, bantuan luar negeri, sanksi, dan perjanjian perdagangan—untuk memajukan prioritas kebijakan luar negeri mereka.
Electric Vehicles (Kendaraan listrik)	:	Kendaraan yang dapat digerakkan oleh motor listrik yang menarik listrik dari baterai dan dapat diisi ulang dari sumber eksternal.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Firewall	:	Sistem atau perangkat keamanan jaringan yang menyaring lalu lintas masuk dan keluar jaringan berdasarkan aturan keamanan. Firewall berfungsi sebagai penghalang atau lapisan keamanan siber antara jaringan tepercaya dan jaringan tidak tepercaya sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh administrator jaringan.
Foreign Direct Investment (FDI)	:	Investasi atau penanaman modal yang berasal dari pihak luar negeri.
Free and Open Indo-Pacifik (FOIP)	:	Strategi geopolitik yang dipromosikan oleh Amerika Serikat dan sekutunya untuk memastikan kebebasan navigasi, perdagangan bebas, penghormatan terhadap hukum internasional, dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik, menghadapi pengaruh dan ekspansi Tiongkok
General Data Protection Regulation (GDPR)	:	Undang-undang yang disetujui oleh Uni Eropa pada bulan April 2016 dan mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat untuk mengatur cara perusahaan memproses dan menggunakan data pribadi yang mereka kumpulkan dari konsumen secara daring.
Geoekonomi	:	Mengacu pada penggunaan instrumen ekonomi untuk kepentingan geostrategis suatu negara
Geopolitik	:	Metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam hubungannya dengan ruang geografis.
Geostrategi	:	Strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional
Global Cybersecurity Index (Indeks GCI)	:	Referensi yang dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU) yang mengukur komitmen negara-negara terhadap keamanan siber di tingkat global – untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya dan berbagai dimensi masalah ini.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Global South	:	Istilah yang dipakai untuk merujuk Kawasan-kawasan di Amerika Latin, Asia, Afrika, dan Oseania walau dalam penggunaannya tidak hanya merujuk dalam hal geografis tetapi juga gerakan politik, ideologi, visi pembangunan, dan solidaritas antarnegara.
Green Economy	:	Kegiatan perekonomian yang ramah lingkungan.
Hard power	:	Pendekatan dalam hubungan internasional yang menggunakan kekuatan militer dan ekonomi untuk memengaruhi atau memaksa negara lain agar mematuhi kebijakan atau kepentingan tertentu
High-Pressure Acid Leach (HPAL)	:	Proses yang digunakan untuk mengekstrak nikel dan kobalt dari bijih laterit.
Hydropower	:	Penggunaan kekuatan aliran air untuk menghasilkan energi listrik.
Indeks keamanan siber nasional (National Cyber Security Index/ NCSI)	:	Referensi pengukuran tingkat keamanan siber negara-negara di dunia yang dikembangkan oleh e-Governance Academy dari Estonia yang mengidentifikasi bidang-bidang prioritas utama yang perlu ditangani guna meningkatkan status keamanan siber, memberikan gambaran umum tentang kesiapan negara-negara untuk mencegah dan memerangi serangan dan kejahatan siber.
Indonesia South Pacific Forum	:	Forum yang diadakan tahun 2019 untuk peningkatan hubungan kerja sama Indonesia dengan negara mitra di Pasifik Selatan, utamanya sebagai platform dialog untuk menggali potensi dan memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Pasifik Selatan.
Indonesian Agency for International Development	:	Dibentuk pada 18 Oktober 2019 sebagai satu bentuk perwujudan "diplomasi tangan di atas" Indonesia.
Indonesia-Pacific Forum for Development	:	Forum yang diinisiasi oleh Indonesia pada 2022 yang merupakan platform Indonesia untuk mengembangkan kerja sama pembangunan secara terlembaga di Kawasan Pasifik.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Inflation Reduction Act (IRA)	:	Undang-undang AS terkait energi bersih dan perubahan iklim.
Information and Communication Technology Development Index (Indeks IDI)	:	Ukuran standar yang dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU) untuk menilai tingkat pengembangan TIK di suatu wilayah. Indeks ini memungkinkan perbandingan antarwilayah dan antarwaktu.
Infrastruktur digital	:	Infrastruktur digital mengacu pada teknologi berbasis perangkat keras dan perangkat lunak fisik yang memungkinkan layanan digital. Ini mencakup sistem dan jaringan teknologi informasi yang memungkinkan organisasi untuk beroperasi dan berkomunikasi. Infrastruktur digital menghubungkan teknologi seperti komputasi, penyimpanan, jaringan, aplikasi, dan platform untuk membangun fondasi bagi operasi digital perusahaan.
Internet of Things (IoT)	:	Perangkat fisik berupa kendaraan, peralatan, dan instrumen lain yang memiliki sensor, perangkat lunak, dan konektivitas jaringan, yang memungkinkan mereka untuk melayani konektivitas jaringan dan mengumpulkan dan berbagi data.
Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK):	:	Izin pertambangan yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai perpanjangan setelah berakhirnya pelaksanaan kontrak kerja atau perjanjian kerja untuk waralaba pertambangan Indonesia.
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi	:	Izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
Jetty	:	Sebuah bangunan yang tegak lurus menjorok ke laut.
Joint Statement	:	Dokumen resmi antara dua negara atau lebih tentang kesepahaman untuk menyepakati sebuah program.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Keamanan siber	:	Praktik melindungi sistem, jaringan, dan data dari serangan digital. Serangan ini dapat bertujuan untuk mengakses, mengubah, atau menghancurkan informasi sensitif, memeras uang dari pengguna, atau mengganggu operasi bisnis normal
Kecerdasan buatan (AI)	:	Bidang sains yang melibatkan pembuatan komputer dan mesin yang dapat bernalar, belajar, dan bertindak dengan cara yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia.
Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional/ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)	:	Perjanjian dagang bebas mega-kawasan yang dirampungkan melalui fasilitasi ASEAN pada November 2020. RCEP beranggotakan lima negara di Asia-Pasifik, yaitu sepuluh negara anggota ASEAN, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. RCEP menjadi perjanjian dagang terbesar di dunia dan melingkupi negara -negara dengan total kurang lebih sepertiga dari PDB dunia.
Kemitraan Trans-Pasifik/Trans Pacific Partnership (TPP)	:	Perjanjian dagang bebas yang diusung oleh Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama dengan Tujuan mengimbangi pengaruh ekonomi Tiongkok di Asia-Pasifik. TPP berakhir pada 2017 setelah pemerintahan Donald Trump memutuskan untuk keluar dari TPP akibat sentimen terhadap perdagangan bebas yang membahayakan lapangan kerja domestik.
Kerangka Kerja Sama Ekonomi Indo-Pasifik/ Indo-Pacific Economic Framework (IPEF)	:	Inisiatif kerja sama ekonomi yang diusung oleh Presiden AS Joe Biden pada 2022 yang berfokus pada empat pilar, yaitu perdagangan, rantai pasok, energi bersih, dan antikorupsi.
Kerja sama Selatan-Selatan Triangular	:	Kerja sama dalam bidang pembangunan yang melibatkan negara-negara Selatan dengan tujuan mencapai kondisi yang independen, dengan melibatkan tiga pihak, yaitu dua negara Selatan dan pihak ketiga, yaitu negara maju atau organisasi multilateral sebagai penyedia sumber daya

Buku ini tidak diperjualbelikan

Ketahanan siber	:	Kemampuan organisasi untuk mencegah, bertahan, dan pulih dari insiden keamanan siber. Ketahanan siber adalah konsep yang menyatukan keberlangsungan bisnis, keamanan sistem informasi, dan ketahanan organisasi.
Konektivitas global	:	Keadaan di mana negara-negara, masyarakat, dan ekonomi di seluruh dunia terhubung melalui jaringan transportasi, komunikasi, perdagangan, dan teknologi
Land Clearing	:	Langkah awal dalam pembangunan/mendirikan bangunan di suatu area yang sebelumnya terdapat banyak benda atau pohon.
Logam Tanah Jarang (LTJ) atau rare earth elements (RRE)	:	Logam tanah jarang merupakan mineral yang bersifat magnetik dan konduktif, banyak digunakan di perangkat elektronik, seperti ponsel, tablet, speaker, dan lain-lain.
Logam/mineral kritis	:	Unsur logam yang meliputi logam jarang tanah (rare earth metal) dan logam lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai komponen industri manufaktur dan strategis nasional, semisal mikrocip, baterai kendaraan listrik, dan sebagainya.
Look East Policy	:	Kebijakan yang yang memberikan prioritas pada hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan. Kebijakan luar negeri India untuk memperkuat hubungan ekonomi dan strategis dengan negara-negara Asia Timur dan Tenggara
Made in China 2025	:	Rencana strategis nasional Tiongkok yang beralih dari "pabrik" dunia ke produksi produk dan jasa bernilai tinggi.
Malware Multilateralism	:	Pendekatan yang ditandai dengan banyak negara berkolaborasi melalui perjanjian formal dan organisasi internasional untuk mengelola dan mengatur ruang siber, dan menekankan pada peran pemerintah dan badan internasional dalam menciptakan kebijakan dan kerangka kerja untuk keamanan ruang siber, privasi data, dan tata kelola internet.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Map of South China Sea Islands	:	Peta yang menggambarkan kepulauan di Laut China Selatan, termasuk Kepulauan Spratly dan Paracel.
Middle Income Countries	:	Negara-negara yang dalam perhitungan World Bank mempunyai GNI per capita $ 1,135 atau lebih rendah pada tahun 2022.
Multilateral trading system (Sistem Perdagangan Multilateral)	:	Sistem perdagangan yang dibentuk dan diatur oleh organisasi multilateral (semisal WTO) untuk memanajemen perdagangan multilateral pada komoditas tertentu. Sistem ini mengatur, di antaranya: standar ekspor impor, aturan tarif perdagangan, dan lainnya.
Nationally Determined Contributions	:	Komitmen yang dibuat negara-negara di dunia (yang meratifikasi Paris Agreement) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim.
Nine dash line	:	Garis yang digunakan China untuk mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, termasuk area yang juga diklaim oleh negara lain seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia
Online single submission	:	Sistem pengurusan administrasi daring yang bersifat satu pintu. Dalam konteks permohonan izin pertambangan, pemohon hanya perlu mendaftarkan diri dan mengurus keperluan administrasi melalui satu sistem tersebut.
Overseas Development Assistance	:	Bantuan yang diberikan pemerintah negara donor yang menargetkan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan negara berkembang.
Pacific Elevation	:	Konsep yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia di tahun 2019 yang menekankan pada upaya Indonesia untuk semakin meningkatkan posisinya dalam kemitraan dengan negara-negara Pasifik.
Pacific Exposition	:	Ajang pameran dagang, investasi dan ekonomi di Kawasan Pasifik.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Pacific Island Forum (PIF)	:	Organisasi intergovernmental yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama diantara negara-negara dan teritori di Oseania yang dahulunya bernama South Pacific Forum (1971) dan berubah menjadi PIF pada 1999 untuk lebih bersifat inklusif.
Pacific pledge	:	Inisiatif pemerintah Australia yang berfokus pada peningkatan bantuan dan dukungan bagi negara-negara di Pasifik
Pasifik Biru	:	Gagasan bahwa negara-negara di Samudra Pasifik bukan hanya sekumpulan negara individual, tetapi mereka membentuk satu kesatuan yang saling terhubung secara geografis, budaya, dan menghadapi tantangan yang sama.
Pasifik Selatan	:	Kawasan di Selatan Samudra Pasifik yang terdiri dari negara-negara kepulauan dengan wilayah teritori yang kecil dan rentan terhadap intervensi asing akibat kondisi geografis mereka yang sangat strategis untuk melakukan kegiatan dagang dan untuk menaruh pangkalan militer di masa Perang Dunia.
People-to-People Ties	:	Hubungan langsung dan interaksi antara individu dari negara yang berbeda, seperti pertukaran budaya, pendidikan, dan kunjungan.
Perang siber	:	Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh suatu negara atau organisasi untuk menyerang sistem jaringan komputer negara atau lembaga dengan tujuan mengganggu, merusak, atau menghancurkan infrastruktur melalui virus komputer atau serangan penolakan layanan.
Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik/Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)	:	Perjanjian dagang bebas di Asia-Pasifik yang muncul sebagai rekonfigurasi TPP setelah hengkangnya AS dari perjanjian tersebut. CPTPP berlaku pada 2018 dan beranggotakan 11 negara, termasuk Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Permanent Court of Arbritration (PCA)	:	Lembaga internasional yang menyediakan layanan arbitrase dan penyelesaian sengketa untuk negara, organisasi antar pemerintah, dan entitas swasta
Promote a networked region	:	Mendorong pengembangan dan integrasi kawasan melalui peningkatan konektivitas dan kerja sama antara negara-negara dan wilayah
Public Private Partnership/ kemitraan publik-swasta	:	Kemitraan antara sektor publik/pemerintah dan swasta yang mendorong berbagi informasi yang sangat penting untuk melindungi infrastruktur penting dan memajukan keamanan siber.
Quadrilateral Security Dialogue (QUAD)	:	Kemitraan strategis antara Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia
Ransomware	:	Jenis malware yang menyandera data sensitif atau perangkat korban, mengancam akan mengunci data kecuali tebusan dibayarkan, memblokir akses ke data pribadi secara permanen.
Renewable Energy	:	Energi yang berasal dari sumber-sumber alamiah seperti sinar matahari, angin, hujan, geothermal, dan bio energy.
Sekuritisas	:	Upaya yang dilakukan oleh pengambil kebijakan untuk mengindikasikan suatu permasalahan/peristiwa tertentu sebagai isu keamanan. Dapat dilakukan dengan pernyataan, pidato, perumusan aturan, dan sebagainya.
Small Island Developing States	:	Terdiri 39 negara dan 18 anggota asosiasi komisi regional Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menghadapi kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang unik di kepulauan Karibia, Pasifik, dan Atlantik, Samudra Hindia, dan Laut China Selatan.
Soft power	:	Pendekatan dalam hubungan internasional yang memengaruhi negara lain melalui daya tarik budaya, nilai-nilai, dan ide-ide positif, bukan melalui kekuatan militer atau ekonomi.
Southwest Pacific Dialogue	:	Forum untuk Australia, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, Selandia Baru, dan Timor Leste untuk bertukar pandangan dan informasi mengenai isu penting di kawasan.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Strategis Sea Line of Communication (SLOC)	:	Jalur laut penting yang menghubungkan pusat-pusat perdagangan dan sumber daya utama di seluruh dunia.
Sustainable Development Goals	:	Agenda Persatuan Bangsa-Bangsa sebagai cetak biru untuk mencapai keberlangsungan masa depan dalam menghadapi tantangan global dalam pengentasan kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, penurunan lingkungan hidup, dan keamanan dan perdamaian.
Tasliman Sabre	:	Latihan militer bilateral terbesar antara Australia dan Amerika Serikat, dengan partisipasi multinasional, memajukan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.
Traditional fishing	:	Metode penangkapan ikan yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat pesisir China.
Wet Metric Ton (WMT)	:	Jumlah 1.000-kilogram Bijih Besi dalam keadaan basah alami.
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK)	:	Kawasan yang diberikan kepada pihak-pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Tentang Editor



RR Emilia Yustiningrum adalah peneliti senior pada Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Indonesia. Ia menyelesaikan S1 Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cumlaude (2002), S2 Hubungan Internasional di University of Groningen, Belanda (2009), dan S3 Hubungan Internasional dari Griffith University, Australia (2021). Fokus kajiannya adalah politik luar negeri Indonesia, politik internasional, kawasan Indo-Pasifik, dan penanggulangan bencana. Berbagai karyanya antara lain buku berjudul *Explaining Indonesia's Foreign Policy: The Role of the Military in Post Natural Disaster Management* (Palgrave Macmillan, 2024), dan bagian dari buku berjudul *Indonesia's Engagement in the Climate Change Negotiations: Building National Resilience* (Elsevier, 2023), *Indonesia's Foreign Policy on the Status of*

Buku ini tidak diperjualbelikan

Forces Agreement (SOFA) in Post Natural Hazard-Induced Disasters Contexts (Springer Nature, 2025), dan *Natural Resource Governance in Indonesia from a Political Perspective: The Marine, Fisheries, and Forestry Cases* (Springer Nature, 2025). Ia dapat dihubungi melalui email: rrem001@brin.go.id atau emilia.yustiningrum@gmail.com



Ella Syafputri Prihatini, seorang Asisten Profesor Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan peneliti di Centre for Muslim States and Societies (CMSS) University of Western Australia (UWA). Fokus penelitiannya meliputi representasi politik, studi gender, media digital, dan politik komparatif di Asia. Karya-karyanya telah dipublikasikan di jurnal-jurnal terkemuka, seperti Politics and Gender, Contemporary Politics, Parliamentary Affairs, dan Women's Studies International Forum, serta beberapa bab buku, termasuk tentang representasi substantif di parlemen Asia (Routledge), perkembangan representasi politik perempuan di Indonesia (ISEAS – Yusof Ishak Institute), dan Palgrave Handbook of Fashion and Politics. Ella meraih gelar sarjana hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada (2004), gelar magister praktik pembangunan dari University of Queensland (2010) yang didanai oleh Australian Development Scholarships (ADS), dan gelar doktor ilmu politik dan hubungan internasional dari UWA (2019) sebagai penerima beasiswa Endeavour. Pada September 2019, ia diakui sebagai salah satu dari 40 Peneliti Top Australia dalam laporan khusus 'Bintang Penelitian' yang diterbitkan oleh koran The Australian. Email: ella.syafputri@umj.ac.id.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Tentang Penulis



Maulana Ibrahim seorang staf pengajar di Universitas Negeri Medan. Menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara jurusan Hukum Perdata dan S2 di Universitas Sumatera Utara jurusan Ilmu Hukum. Maulana memiliki ketertarikan dalam kajian hukum, politik, dan kebijakan publik.

E-mail: maulanaibrahim@unimed.ac.id

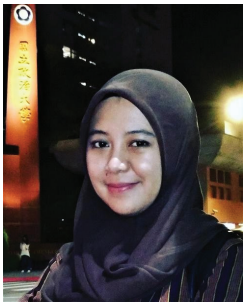


Poppy Wulandari seorang staf pengajar Politeknik Negeri Medan. Poppy memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (Ekonomi) dari Universitas Negeri Medan tahun 2017 dan gelar Master of Business Administration in International Business dari National Dong Hwa University Taiwan tahun 2020. Poppy memiliki kecenderungan dan minat dalam kajian di bidang ekonomi dengan sudut pandang berbagai lintas ilmu. Ia dapat dihubungi melalui e-mail: poppywulandari@polmed.ac.id

Buku ini tidak diperjualbelikan



Baiq Wardhani adalah staf pengajar di Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya. Ia lulus dengan gelar Sarjana dari Universitas Airlangga; Magister, dan Doktor dari Universitas Monash, Australia. Ia mengajar beberapa mata kuliah, diantaranya Pengantar dan Teori Hubungan Internasional; Kosmopolitanisme, Nasionalisme, dan Fundamentalisme; Masyarakat, Budaya, dan Politik Pasifik Selatan; Organisasi Internasional dan Bisnis; Teori Sosial Kontemporer. Baiq Wardhani adalah Pemimpin Redaksi Jurnal Global Strategis, yang diakreditasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Indonesia sejak 2011. Pengalaman internasionalnya di antaranya adalah menjadi dosen tamu di beberapa universitas di luar negeri, aktif menulis di jurnal ilmiah, dan penerima beberapa international awards. Ia dapat dihubungi melalui email: baiq.wardhani@fisip.unair.ac.id; baiq.wardhani@gmail.com



Sarah Anabarja adalah pengajar di Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya. Sarah menamatkan gelar Sarjana dan Master di bidang Hubungan Internasional di Universitas Airlangga. Ia melanjutkan studi doktoralnya di National Chengchi University, Taiwan hingga lulus pada tahun 2023. Fokus kajiannya adalah aktivisme global, khususnya oleh aktor non-negara; juga pada isu-isu di kawasan Asia Pasifik. Beberapa mata kuliah yang Ia ampu antara lain; Masyarakat Budaya dan Politik Tiongkok, HI di Asia Timur, Studi Pembangunan Internasional, INGO dan Tata Kelola Global, dan Tata Kelola Regional Indo-Pasifik. Selain mengajar, Sarah juga turut menjadi editor Jurnal Hubungan Internasional (JHI) yang terafiliasi dengan Cakra Studi Global Strategis (CSGS), sebuah pusat studi yang

Buku ini tidak diperjualbelikan

berada dalam pengelolaan Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga. Ia dapat dihubungi melalui email: sarah.anabarja@fisip.unair.ac.id.



Renatha Ayu Rossdiana menamatkan S1 Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan S2 Hubungan Internasional di Universitas Airlangga. Sebelumnya, penulis pernah bekerja di bagian kerja sama Luar negeri di LIPI dan BRIN. Saat ini, penulis bekerja di International Office, UPN "Veteran" Jawa Timur. Beberapa publikasi yang pernah diterbitkan sebelumnya diantaranya The Urgency of China's Crypto Mining Ban in relation to the Carbon Neutral Policy 2060 (2023), dan "The Effectiveness of the Global Coalition to End Wildlife Trafficking Online to Diminish Illegal Wildlife Trafficking (IWT)" (2023). Penulis dapat dihubungi melalui email renatha.rossdiana.rr@gmail.com.



Wabilia Husnah merupakan peneliti muda di Direktorat Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan, dan Kebudayaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (PMKK-BRIN). Ia menyelesaikan jenjang pendidikan S1 Sastra Cina di Universitas Indonesia, dan jenjang pendidikan S2 Kajian Gender di Universitas Indonesia. Bidang penelitian yang ditekuninya adalah Kajian Tiongkok dan Kajian Budaya, dengan fokus pada isu gender, dan budaya populer. Ia dapat dihubungi melalui email wabiliahusnah89@gmail.com; wabilia.husnah@brin.go.id.

Buku ini tidak diperjualbelikan



Paulus Rudolf Yuniarto adalah peneliti di Pusat Riset Kewilayahan– Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRW – BRIN). Mendapatkan gelar Doktor Antropologi dari Tokyo Metropolitan University, Jepang. Saat ini menekuni bidang kajian kewilayahan (area studies) dalam isu migrasi internasional orang Indonesia di Taiwan dan Jepang, kajian China mengenai isu hubungan antar masyarakat dan kebudayaan, serta beberapa isu pembangunan berkelanjutan dan etnisitas di Indonesia. Dapat dihubungi melalui email: rudolfyuniarto@gmail.com. Karya tulisnya dapat dilihat dalam link: https://scholar.google.com/citations?user=oIFL_9oAAAAJ&hl=en.



Ali Abdullah Wibisono adalah Lektor Kepala di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Hubungan Internasional dan Sekolah Pascasarjana Studi Strategis dan Internasional, Program Studi Terorisme, Universitas Indonesia. Ia menyelenggarakan beberapa mata kuliah keamanan internasional di Universitas Indonesia, termasuk Teori Keamanan Internasional, Keamanan Non-Tradisional, Pengkajian Strategi, dan Kebijakan Keamanan Indonesia. Ia juga menyelenggarakan mata kuliah di program studi Kajian Terorisme, Sekolah Studi Strategis dan Global, Universitas Indonesia, termasuk Kerangka Analisis untuk Terorisme dan Penanggulangan Terorisme, Media, Globalisasi dan Terorisme, dan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan. Publikasi penelitiannya berkisar pada area terorisme dan kontra-terorisme, terorisme siber dan keamanan siber, keamanan maritim, dan rivalitas geopolitik. Ia memperoleh gelar Ph.D (2015) dan MA (2008) dari University of Nottingham, serta gelar sarjana (2005) dari Universitas Indonesia. Publikasi-publikasinya dapat diakses melalui URL Google Scholar berikut:

Buku ini tidak diperjualbelikan

https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=9QW4KF0AAAAJ&view_op=list_works&authuser=2&sortby=pubdate



Arrizal Anugerah Jaknanihan adalah peneliti di ASEAN Studies Program, The Habibie Center. Fokus kajian Arrizal meliputi keamanan ekonomi, arsitektur keamanan kawasan, dan politik perdagangan internasional di ASEAN. Ia memperoleh gelar Master of International Relations dari The Australian National University dan Sarjana Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada. Publikasi terkini Arrizal "Why is economic interdependence not weaponised?" mengenai geoekonomi di Asia Tenggara diterbitkan di Australian Journal of International Affairs. Ia saat ini juga terafiliasi sebagai Associate Fellow di Helsinki Geoeconomics Society. Arrizal dapat dihubungi melalui email: arrizal.jaknanihan@gmail.com



Alfin Febrian Basundoro merupakan staf pengajar di Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga. Alfin memiliki fokus kajian pada bidang politik luar negeri dan pertahanan Indonesia dan geopolitik Asia Tenggara. Alfin telah mempublikasikan sejumlah karya di berbagai media nasional dan internasional, seperti Detik, Jawa Pos, Antara, Lowy Institute, dan East Asia Forum. Alfin dapat dihubungi melalui pos-el alfinfebrian@fisip.unair.ac.id

Buku ini tidak diperjualbelikan



Ganjar Widhiyoga adalah dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Slamet Riyadi (UNISRI), Surakarta. Ganjar menyelesaikan pendidikan Sarjana dan Magister dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional UGM. Selanjutnya, Ganjar menyelesaikan pendidikan Doktoral dari *School of Government and International Affairs*, Durham University, United Kingdom. Ganjar memiliki fokus riset pada pengaruh globalisasi di tingkat lokal. Ganjar dapat dihubungi melalui ganjar.widhiyoga@gmail.com atau ganjar.widhiyoga@unisri.ac.id



Hasna Wijayati saat ini bekerja sebagai dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Slamet Riyadi (UNISRI), Surakarta. Hasna memiliki minat riset pada ekonomi politik, spesifiknya pada penguatan potensi daerah untuk menghadapi tantangan di pasar global. Hasna merupakan lulusan Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional UNISRI dan Program Magister Ilmu Hubungan Internasional UGM. Hasna dapat dihubungi melalui hasna.wijayati@unisri.ac.id



Megah Rahmat Ramadhan telah menamatkan pendidikan dari Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional UNISRI. Saat ini, Megah menjadi asisten peneliti pada Laboratorium Diplomasi dan Kerja Sama Internasional UNISRI. Megah memiliki minat penelitian pada strategi dan geopolitik. Megah dapat dihubungi melalui megahrahmat8@gmail.com

Buku ini tidak diperjualbelikan

Indeks

Act East Policy, 48, 49, 60, 263, 293, 303
Advanced Persistent Threat, 197, 199, 303
Advanced Persistent Threat/Ancaman persisten tingkat lanjut, 303
AIS, 259, 260, 261, 267, 268, 293
ALKI, 168, 186, 293
America First, 39, 303
Arbitrase internasional, 34, 303
ASEAN, ix, x, xii, xiv, 35, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 65, 67, 68, 72, 74, 76, 77, 78, 84, 86, 91, 92, 94, 96, 102, 103, 104, 105, 106, 114, 137, 144, 153, 164, 189, 190, 191, 192, 208, 209, 210, 211, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 245, 250, 264, 267, 274, 284, 293, 294, 309

Baterai, 127, 178, 297
BCIMEC, 159, 294
Belt and Road Initiative (BRI), vi, xii, xiv, 4, 17, 30, 141, 152, 153, 155, 277, 281, 304
Blue Pacific, 21, 236, 237, 258, 259, 260, 268, 270

CCWAEC, 159, 294
CICPEC, vii, 159, 160, 161, 162, 180, 295
CMREC, 159, 295

Buku ini tidak diperjualbelikan

Confidence building measures, 304
Corruption Perception Index (Indeks Persepsi Korupsi), 304
CPEC, 159, 160, 295

demand-driven, 253
De-risking, 10, 12, 77, 78, 82, 87, 94, 304
Diplomasi Biru, vi, 233, 238, 239, 241, 256, 263, 304
Diplomasi siber, 191, 193, 194, 195, 201, 216, 227, 285, 305
Distributed Denial of Services atau DDoS, 197
DLC, 248, 295
donor-driven, 263
Dwelling time, 305
Dynamic equilibrium, 305

Firewall, 306
Free and Open Indo-Pacifik (FOIP), 306

G20, 59, 91, 92, 112, 172, 264, 296
General Data Protection Regulation, 220, 306
Geoekonomi, v, 10, 11, 48, 71, 75, 81, 306
Geopolitik, iv, v, vii, xii, xiv, 1, 29, 71, 115, 129, 151, 155, 158, 189, 203, 233, 273, 306
Global Cybersecurity Index (Indeks GCI), 192, 306

Hard power, 307
Hilirisasi, 145
Hydropower, 171, 172, 183, 298, 307

Indeks keamanan siber nasional (National Cyber Security Index/NCSI), 307
Indonesian Sovereign Blue Bond, 260
Indo-Pasifik, iv, v, vi, vii, ix, xi, xii, xiii, xiv, 1, 3, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 91, 101, 102, 103, 115, 151, 153, 158, 180, 189, 190, 192, 205, 225, 233, 240, 241, 245, 247, 250, 259, 264, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 282, 284, 286, 306, 309, 314, 315, 318
Information and Communication Technology Development Index (Indeks IDI), 192, 308
Infrastruktur, vii, 97, 129, 164, 308
Infrastruktur digital, 308
Internet of Things (IoT), 19, 191, 308
Investasi AS, vii, 132
Investasi Tiongkok, vii, ix, 99, 124, 128, 140, 282
IPFD, 246, 267, 297
ISPF, 20, 21, 235, 238, 240, 259, 297
Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 308

Kalimantan Industrial Park Indonesia, vi, 18, 151, 154, 169, 282, 298

Buku ini tidak diperjualbelikan

Keamanan siber, 194, 309
Kecerdasan buatan (AI), 309
Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional/Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), 309
Kemitraan Trans-Pasifik/Trans Pacific Partnership (TPP), 309
Kendaraan listrik, 305
Kerangka Kerja Sama Ekonomi Indo-Pasifik/Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), 309
Ketahanan siber, 201, 310
Konektivitas global, 310
KSST, viii, x, xiii, 20, 21, 233, 237, 238, 239, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 298

Land Power, 155
LOIS, 21, 236, 298
Look East Policy, 47, 49, 238, 263, 297, 310

Malware, 310
Map of South China Sea Islands, 32, 311
Maritim, vi, viii, 17, 30, 50, 84, 89, 151, 152, 155, 164, 165, 167, 184, 267, 300
middle power, 3, 66, 248, 256, 268
Morowali, 90, 99, 119, 120, 125, 131, 134, 136, 138, 141, 143, 169, 170, 174, 176, 179, 180, 281, 282, 297
MSG, 251, 252, 255, 260, 271, 299
Multilateralism, 265, 310
Multilateral trading system (Sistem Perdagangan Multilateral), 311

NELB, 159, 299
Networked Readiness Index, 208
new emerging donor, 248, 251
Nikel, v, vii, 16, 115, 118, 123, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 143, 146, 299
Nine dash line, 311
Norma siber, 193

ODA, 248, 269, 299
Online single submission, 311
Operasi siber disruptif, 196

Pacific Elevation, 20, 235, 236, 246, 264, 286, 311
Pacific Exposition, 246, 254, 259, 299, 311
Pacific pledge, 312
Pasifik Selatan, x, xii, xiii, xiv, 14, 20, 21, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 242, 245, 246, 247, 249, 252, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 268, 269, 286, 287, 288, 307, 310, 312, 318
People-to-People Ties, 312
Perang siber, 312
Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik/Comprehensive and Progressive

Buku ini tidak diperjualbelikan

Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), 312
Permanent Court of Arbritration (PCA), 313
Persetujuan Perdagangan Preferensial (PTA, 75
Phising email, 209
PIF, 236, 249, 258, 260, 267, 300, 312
Pingtan Declaration, 242
Poros Maritim Dunia, vi, viii, 17, 30, 151, 152, 155, 165, 300
Promote a networked region, 313
Public Private Partnership/ kemitraan publik-swasta, 313

Quadrilateral Security Dialogue (QUAD), 313
Ransomware, 313
Rivalitas, 1, 3, 7, 12, 29, 36, 38, 58, 60, 61, 115, 118, 134, 189, 203, 205, 212, 225
Ruang siber, 18, 189, 200, 204, 211

SDGs, 20, 235, 244, 258, 261, 300
Sekuritisasi, 78
SIDS, 236, 242, 243, 253, 254, 255, 270, 301
Soft power, 31, 313
southern provider, 248
Spionase, 195, 198
Strategis Sea Line of Communication (SLOC), 314
SwPD, 249, 250

Tasliman Sabre, 314
Tata kelola keamanan siber, 211
Tesla, 131, 132, 133, 134, 139, 145, 148
Traditional fishing, 314
Tsingshan, 99, 119, 120, 125, 126, 136, 144, 147, 281

Vale, 119, 120, 126, 127, 131, 134, 139
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), 314

ZEE, 33, 236, 302

Buku ini tidak diperjualbelikan

Konseptualisasi Indonesia dalam memaknai rivalitas Amerika Serikat (AS) melawan Tiongkok dalam geopolitik di Indo-Pasifik diawali dengan pemahaman tentang rivalitas kedua negara besar dalam enam aspek utama, yaitu ekonomi dan persaingan dagang, militer, kemajuan teknologi dan inovasi, politik dan ideologi, diplomasi dan aliansi, serta konflik kawasan.

Pembahasan mengenai dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik selalu melibatkan berbagai negara sebagai pelaku utamanya. AS pada awalnya mengembangkan pivot to Asia, disambut dengan Jepang yang membangun *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP), Australia menggunakan *Australia's Asian Century* untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia, India yang merespons dengan *Security and Growth for All in the Region* (SAGAR) khususnya di kawasan Samudera Hindia, dan Tiongkok yang membangun koridor dunia melalui *Belt and Road Initiative* (BRI). Sepuluh negara anggota ASEAN merespons dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik dengan pemahaman dan kebijakan yang berbeda satu sama lain.

Buku *Indonesia dalam Kancah Geopolitik di Indo-Pasifik* menjadi rujukan bagi kajian mengenai politik internasional, politik luar negeri Indonesia, studi keamanan dan pertahanan, serta dinamika perkembangan politik di kawasan ASEAN, Asia Pasifik, dan Pasifik Selatan. Dalam periode peningkatan rivalitas AS-Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik yang terjadi di berbagai bidang, buku ini memberikan analisis mendalam dan terkini mengenai investasi AS dan Tiongkok di kawasan, respons pemerintah Indonesia, dan dinamika politik domestik dalam menanganinya.

Buku ini tidak diperjualbelikan

BRIN Publishing
The Legacy of Knowledge

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, anggota Ikapi
Gedung B.J. Habibie Lt. 8,
Jln. M.H. Thamrin No. 8,
Kota Jakarta Pusat 10340
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

DOI: 10.55981/brin.2075

ISBN 978-602-6303-98-1